



**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024**



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Kediri telah membentuk Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan;

b. bahwa untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional dan penyesuaian target kinerja akibat pandemi Covid-19, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78);
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 Maret 2022
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 27-3/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2024

I. UMUM

Perubahan regulasi perencanaan pembangunan daerah diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan regulasi tersebut mendorong perlu dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Disisi yang lain mempertimbangkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat menyebabkan capaian kinerja pembangunan menurun. Target kinerja pembangunan yang ditetapkan diawal tidak relevan lagi dengan kondisi terkini.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD serta pertimbangan teknis lainnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 84

DAFTAR ISI

	Hal.
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024	1
DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1-5
1.4. Maksud dan Tujuan	1-11
1.5. Sistematika Penulisan	1-11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-13
2.3. Aspek Pelayanan Umum	2-26
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	2-98
2.5. Aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2-113
BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-11
3.3. Kerangka Pendanaan	3-18
BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	4-1
4.2. Isu Strategis	4-13
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1. Visi	5-1
5.2. Misi	5-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	5-4
BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..	6-1
6.1. Strategi	6-1
6.2. Arah Kebijakan	6-10
6.3. Program Pembangunan Daerah	6-15
BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7-1
BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8-1
BAB 9 PENUTUP	9-1
9.1. Pedoman Transisi	9-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan	9-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-35-6010 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Kediri Provinsi Jawa Timur dan Nomor 132-35-6010 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 18 September 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Kediri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 29 April 2019 melantik Abdullah Abu Bakar sebagai Walikota Kediri dan Lilik Muhibah sebagai Wakil Walikota Kediri masa jabatan tahun 2019-2024.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Kediri menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020–2024 merupakan implementasi dari pelaksanaan periode keempat dari RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD menggunakan 5 (lima) pendekatan perencanaan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menjabarkan janji politik yang tertuang dalam visi dan misi kepala

daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya, pendekatan atas bawah dan bawah atas dilaksanakan melalui musyawarah yang diselaraskan dengan prioritas nasional maupun provinsi.

Tahapan penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020–2024 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: a) Persiapan Penyusunan; b) Penyusunan Rancangan Awal; c) Penyusunan Rancangan; d) Pelaksanaan Musrenbang; e) Perumusan Rancangan Akhir; f) Penetapan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2020–2024 telah berjalan selama satu tahun. Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD terjadi pandemi Covid-19 serta adanya keharusan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat serta mempengaruhi capaian target kinerja pembangunan. Sementara itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdampak pada perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berdampak pada perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perubahan dokumen perencanaan apabila terjadi bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional. Memperhatikan ketentuan tersebut serta kondisi saat ini, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020–2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020–2024, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78);
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 66).

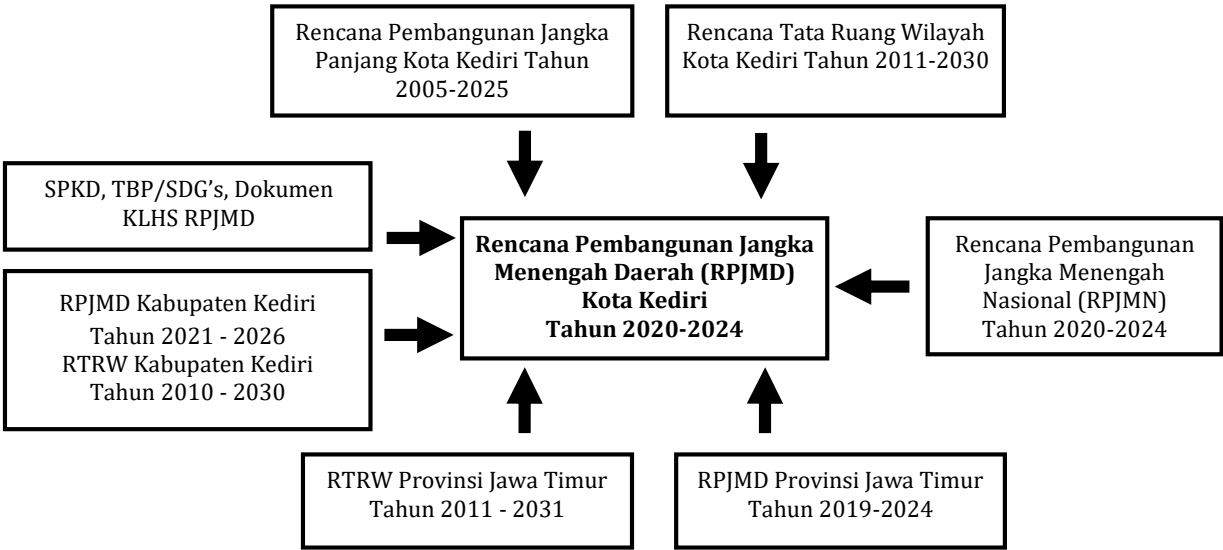
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025, khususnya pada tahap keempat dalam rencana pelaksanaan jangka panjang daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 beserta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 beserta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030.

Keterkaitan antara RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 - Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
dalam RPJMD



Secara detail, hubungan antar dokumen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. **RPJMD Kota Kediri dengan RPJPD**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Kediri Tahun 2005–2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kediri, juga berpedoman pada pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan yang termuat di dalam RPJPD Kota Kediri.

Visi Kota Kediri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, “Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing”, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yang arah kebijakannya secara umum dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kota Kediri yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya Sesuai Nilai Luhur Pancasila;
2. Mewujudkan Kota Kediri Sebagai Pusat Industri, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Kota Kediri Menjadi Pusat Pendidikan yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kota Kediri yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum;
5. Mewujudkan Kota Kediri yang Aman, Tertib, Tentram, Damai dan Bersatu dicapai dengan meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, terbinanya dan terbangunnya semangat atau jiwa patriotisme dan nasionalisme;
6. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Umum, Ruang Publik yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan;
7. Mewujudkan Kota Kediri Yang Sehat, Indah, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

b. RPJMD Kota Kediri dengan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota.

Selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain yang berbatasan, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

c. RPJMD Kota Kediri dengan RPJMN

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Dalam rangka mendukung pencapaian misi nasional, maka misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020–2024 diselaraskan dengan misi RPJMN 2020–2024 yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 – Keselarasan Dengan Misi RPJMN

Misi Kota Kediri	Misi RPJMN
Misi I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi	Misi VI: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Misi VIII: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Misi II: Mewujudkan Sumber daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya	Misi I: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Misi V: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
Misi III: Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan	Misi II: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Misi III: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Misi IV: Mewujudkan Kota Kediri Aman, Nyaman dan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan	Misi IV: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi VII: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Misi IX: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

d. RPJMD Kota Kediri dengan RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Timur

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri juga memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur sehingga pembangunan di Kota Kediri selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019–2024 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”*. Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Misi RPJMD Kota Kediri selaras dengan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 – Keselarasan Dengan Misi RPJMD Provinsi Jatim

Misi Kota Kediri	Misi RPJMD Provinsi Jatim
Misi I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi	Misi III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.
Misi II: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya	Misi II: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
Misi III: Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan	Misi I: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
Misi IV: Mewujudkan Kota Kediri Aman, Nyaman dan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan	Misi IV: Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong-Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

e. RPJMD Kota Kediri dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten Kediri

Penyusunan RPJMD Kota Kediri juga memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten Kediri sebagai satu-satunya daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Kediri. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kediri yang secara substansi makna yang terkandung di dalamnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi yang hendak dicapai Kota Kediri. Salah satu misi Kabupaten Kediri yaitu meningkatkan pembangunan kepariwisataannya dan Kota Kediri berperan sebagai *Service City* untuk mendukung penyediaan fasilitas jasa dan pelayanan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Selanjutnya dalam penataan ruang, wilayah Kota Kediri secara geografis yang lokasinya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Kediri, keduanya saling memiliki ketergantungan. Adanya rencana pembangunan Bandara dan pintu keluar tol di Kabupaten Kediri secara langsung berpengaruh pada Kota Kediri. Perlunya penyediaan akses jalan dan jembatan dalam mendukung mega proyek tersebut dan diharapkan dapat menggerakkan serta mengembangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Disamping itu, perlu kerjasama yang saling sinergi antara Kota Kediri

dengan Kabupaten Kediri dalam rangka mewujudkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional. Keselarasan visi, misi dan penetapan ruang antara Kota Kediri dan Kabupaten Kediri akan mempercepat pencapaian target pembangunan di kedua wilayah, serta mendukung penerapan *smart city* di Kota Kediri.

f. Penelaahan KLHS

Pemerintah Kota Kediri berperan aktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terdapat 16 Tujuan dari 17 Tujuan yang sesuai kewenangan Kota Kediri, sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.
- Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

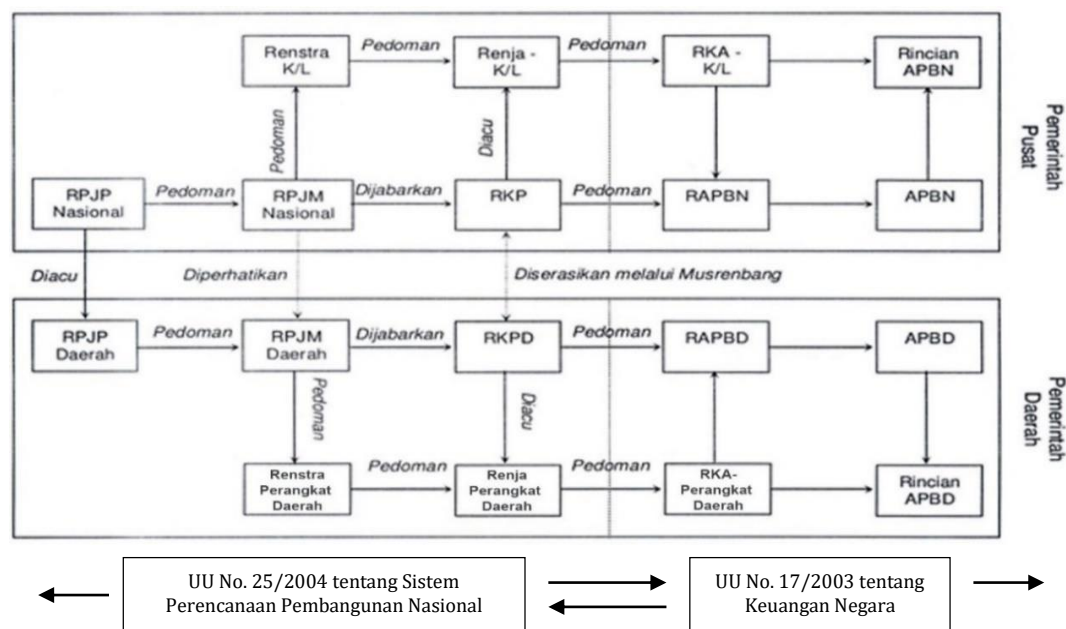
- Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Tujuan 17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan, tujuan 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan bukan menjadi kewenangan Kota Kediri.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut:

Gambar 1.2 - Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang di susun oleh seluruh Perangkat Daerah di Kota Kediri di bawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan.

Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Kediri yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah serta penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020–2024 disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan yang berlaku, dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2019-2024 yang berpedoman pada RPJPD Kota Kediri kedalam program pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten Kediri sebagai daerah terdekat dengan Kota Kediri;
3. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat;
6. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Pemerintah Daerah selama periode 2020–2024;
2. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
4. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
5. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020–2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode 2020–2024.

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan untuk menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi-strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penetapan indikator kinerja daerah setiap tahunnya sampai akhir periode masa jabatan, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX. PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Kediri adalah 6.719,95 ha, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 2.693,35 ha terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 1.595,01 ha, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 2.431,59 ha terdiri dari 15 Kelurahan.

Secara rinci luas wilayah Kota Kediri berdasarkan 46 Kelurahan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

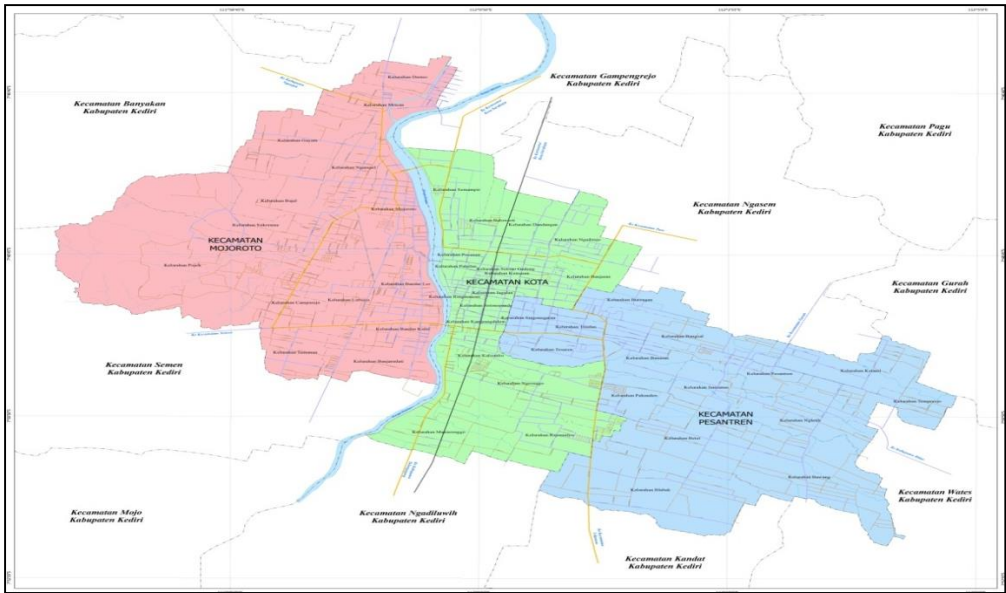
Tabel 2.1 - Luas Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan/ Kelurahan	Luas (ha)	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (ha)	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (ha)
Kec. Kota	1.595,01	Kec. Pesantren	2.431,59	Kec.Mojoroto	2.693,35
Manisrenggo	169,61	Blabak	355,49	Pojok	689,24
Rejomulyo	167,46	Bawang	378,45	Campurejo	128,14
Ngronggo	254,90	Betet	199,49	Tamanan	105,35
Kaliombo	103,28	Tosaren	130,72	Banjarmlati	104,25
Kampungdalem	37,37	Banaran	104,81	Bandar Kidul	135,73
Setonopande	40,95	Ngletih	145,59	Lirboyo	118,66
Ringinanom	7,74	Tempurejo	178,64	Bandar Lor	159,04
Pakelan	36,35	Ketami	181,50	Mojoroto	199,68
Setonogedong	7,86	Pesantren	119,91	Sukorame	363,45
Kemasan	15,71	Bangsals	138,20	Bujel	159,67
Jagalan	12,79	Burengan	86,37	Ngampel	164,57
Banjaran	138,72	Tinalan	77,7	Gayam	143,48
Ngadirejo	139,29	Pakunden	104,57	Mrican	150,23
Dandangan	136,65	Singonegaran	119,97	Dermo	71,85
Balowerti	96,03	Jamsaren	110,12		
Pocanan	23,83				
Semampir	206,48				

Sumber : RDTRK Kota Kediri Tahun 2021-2041

Gambaran batas wilayah Kota Kediri dengan daerah lain di sekitarnya terlihat pada peta 2.1 berikut :

Gambar 2.1 - Peta Kota Kediri



Sumber : RTRW Kota Kediri 2011-2030

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 wilayah Kota Kediri berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri, yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Kandang dan Kec. Ngadiluwih, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Wates dan Kec. Gurah, sebelah barat berbatasan dengan Kec. Banyuwangi dan Kec. Semen, serta sebelah utara berbatasan dengan Kec. Gempengrejo dan Kec. Ngasem.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kediri dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri dan terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa, berada diantara 111,05°-112,03° Bujur Timur dan 7,45°-7,55° Lintang Selatan.

Kota Kediri dilalui oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km dan membagi wilayah Kota Kediri menjadi wilayah barat dan timur. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren.

c. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kota Kediri relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 40 dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kemiringan antara 0-2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri (80,17%) berada pada 63m sampai 100m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Ketinggian antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumbang dengan ketinggian 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl di bagian barat Kecamatan Mojoroto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kemiringan 0-2%. Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 15% dengan ketinggian lebih kurang 67 mdpl.

d. Geologi

Secara geologi wilayah Kota Kediri terdiri atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Berdasarkan Geologi Lembar Kediri yang disusun oleh Departemen

Pertambangan dan Energi, dinyatakan bahwa tatanan stratigrafi terdapat batuan sedimen, batuan gunung api dan alluvium yang diperkirakan berumur plitosen awal hingga resen.

Sebagian wilayah Kecamatan Mojoroto yaitu Kelurahan Dermo, Mrican, Gayam, Bujel, Sukorame, Pojok, Ngampel, Mojoroto, Bandar Lor, Bandar Kidul, Banjarmati dan Tamanan memiliki endapan alluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur.

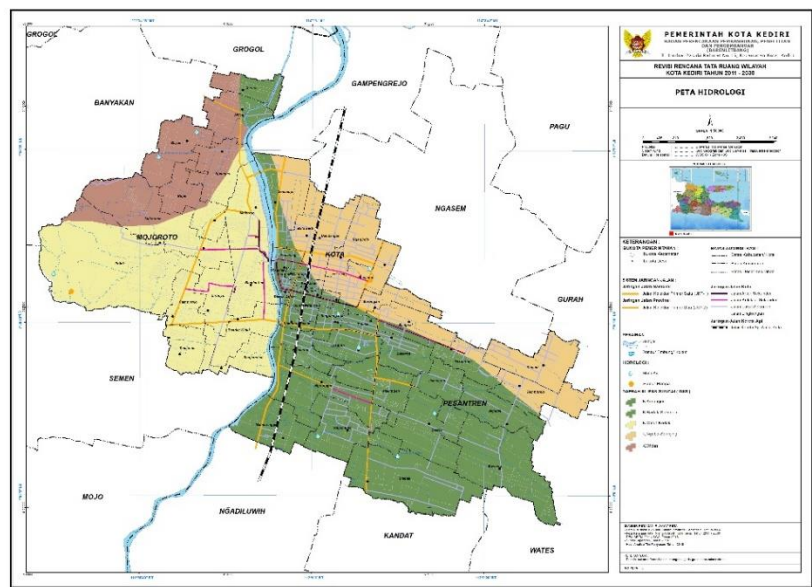
Pada wilayah Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah *tuf vulkan intermedier* dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batuan termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Endapan lahar ini melampar pada kaki gunung, lereng gunung dan lembah sungai dan diduga berupa lahar panas, lahar dingin dan lahar longsor. Jenis batuan ini memiliki ketebalan puluhan sampai ratusan meter. Memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 25 cm dan bertekstur halus.

Jenis tanah di wilayah Kota Kediri adalah alluvial coklat kelabu dan mediteran. Sesuai dengan karakteristik jenis tanah tersebut, yaitu tanah alluvial, memiliki sifat fisik diantaranya memiliki daya adsorbs tinggi, permeabilitas rendah dan kepekaan erosinya besar. Disamping itu, tanah alluvial banyak dijumpai di kawasan datar (kemiringan rendah), jadi erodibilitasnya yang tinggi tidak berpengaruh pada kemungkinan terjadinya erosi. Namun karena memiliki permeabilitas rendah, maka pembangunan di atas tanah alluvial memerlukan perencanaan sistem drainase yang cermat agar tidak terjadi genangan yang dapat merugikan. Sedangkan untuk jenis tanah mediteran juga dijumpai di wilayah ini, dengan daya adsorpsi yang sedang, permeabilitas tinggi dan kepekaan erosinya besar. Tanah mediteran sesuai untuk kawasan terbangun, namun harus mencermati erodibilitasnya yang besar. Jika berada di wilayah yang memiliki sumber air cukup, tanah mediteran sesuai untuk pertanian padi, palawija, tebu, tembakau dan kapas.

e. Hidrologi

Keberadaan Sungai Brantas di tengah-tengah Kota Kediri yang mengalir dari arah selatan ke arah utara, seolah-olah membelah Kota Kediri menjadi wilayah barat (Kecamatan Mojoroto) dan wilayah timur (Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren). Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas sebagai saluran primer. Sungai tersebut antara lain : Sungai Kresek sepanjang 5,87 km di Kecamatan Pesantren; Sungai Parang sepanjang 3 km, Sungai Kedak sepanjang 5,84 km, Sungai Ngampel sepanjang 1,38 km, dan Sungai Bruno sepanjang 1,93 km di Kecamatan Mojoroto; serta Sungai Tawang sepanjang 7,46 km di Kecamatan Kota. Peta hidrologi Kota Kediri sebagai berikut:

Gambar 2.2 – Peta Hidrologi Kota Kediri



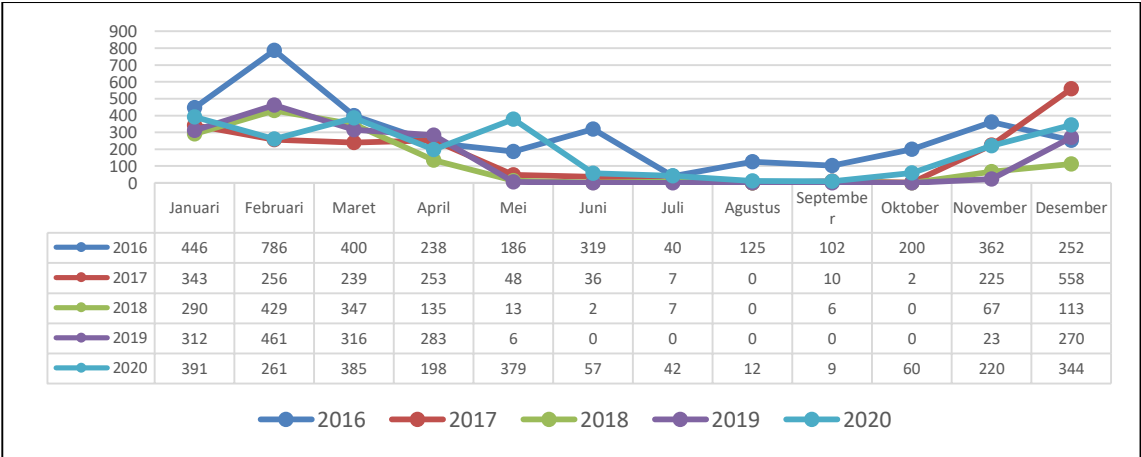
Sumber : RTRW Kota Kediri 2011-2030

Selain sungai, mata air adalah sumber air bersih yang potensial di Kota Kediri. Kecamatan Mojoroto memiliki banyak sumber mata air yaitu 7 sumber dan yang memiliki debit paling besar adalah sendang (0-60 liter/detik). Potensi ini bisa mendukung kebutuhan air bersih penduduk sehari-hari seperti masak, cuci dan mandi. Kecamatan Pesantren memiliki 14 sumber mata air dan yang memiliki debit paling besar adalah mata air Banteng (10-112liter/detik). Potensi ini sangat mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk sehari-hari seperti memasak, mencuci dan mandi. Kedalaman air sumur di Kecamatan Pesantren berkisar antara 6-9 meter, yang paling dangkal (6 meter) berada pada Kelurahan Bawang, Tempurejo dan Ketami.

f. Klimatologi

Rata-rata curah hujan di Kota Kediri pada periode 2016-2020 adalah 2.128 mm³ dimana yang terendah pada tahun 2018 sebesar 1.409. Secara umum curah hujan pada tahun 2020 dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Agustus dan September. Berbeda halnya pada tahun 2016 hujan terjadi hampir di sepanjang tahun.

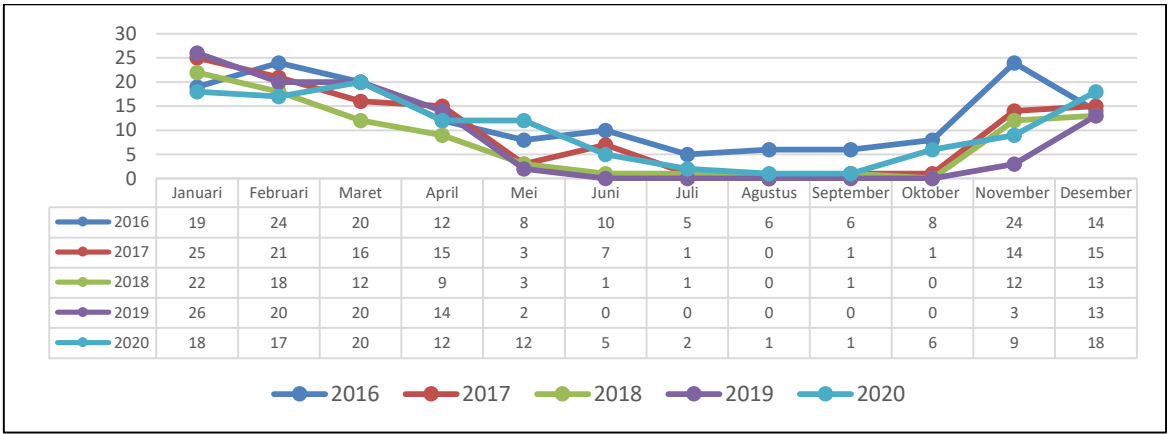
Grafik 2.1 - Rata-rata Curah Hujan (mm³) Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Kediri, 2020

Dari gambar terlihat bahwa rata-rata curah hujan tertinggi adalah pada tahun 2016 pada bulan Februari. Pada tahun 2016 dan 2020 hujan terjadi sepanjang tahun yang artinya pada tahun 2016 dan 2020 tidak terjadi kemarau sama sekali. Namun tahun 2016 memiliki total curah hujan setahun yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu 3.456 mm³.

Grafik 2.2 – Hari Hujan Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Kediri, 2020

Pada bulan Januari sampai dengan April pada 5 tahun terakhir hari hujan cukup sering, kemudian bulan Mei sampai dengan Oktober cenderung jarang hujan, lalu bulan November dan Desember mulai sering hujan kembali. Jumlah total hari hujan dalam setahun yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 156 hari dalam setahun.

g. Daya Dukung dan Daya Tampung

Untuk mendukung pembangunan daerah Kota Kediri, perlu memperhatikan hasil kajian daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem, sebagai berikut.

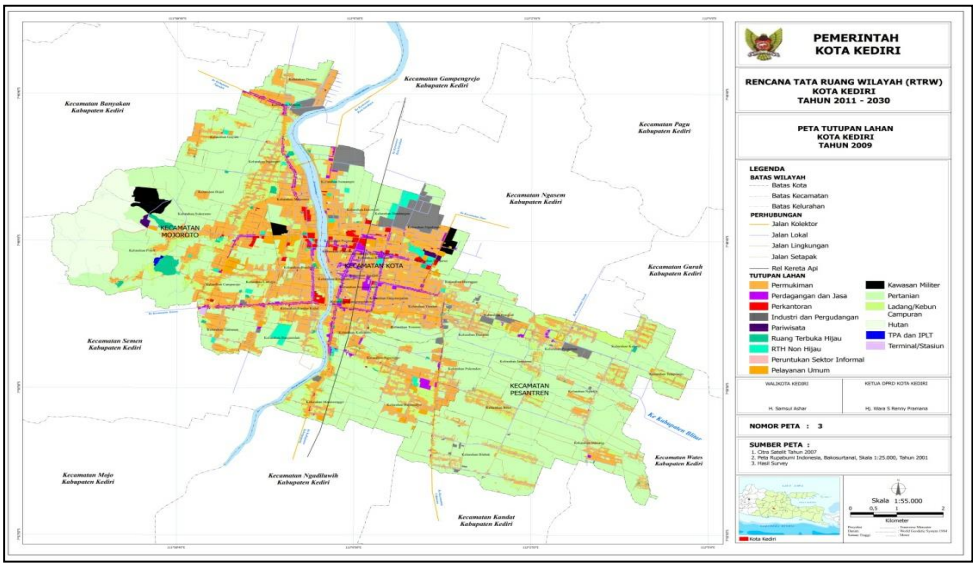
1. Jasa Ekosistem dipengaruhi oleh dua komponen penting yakni ekoregion dan tutupan lahan. Ekoregion yang mendominasi di Kota Kediri adalah Dataran Fluvio Gunungapi sebesar 6,028,39 Ha. Penutup/ penggunaan lahan di Kabupaten Kediri yang mendominasi adalah pertanian yang luasnya mencapai 2.441,16 ha dari total luas wilayah Kota Kediri.
2. Jasa ekosistem penting dapat digunakan untuk mengetahui potensi daya dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Kecamatan yang memiliki wilayah kategori I atau Prioritas pertama paling besar adalah Kecamatan Mojojoto yang memiliki luasan wilayah prioritas I sebesar 596,26 hektar. Dengan demikian untuk wilayah yang mendapatkan prioritas dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan adalah Kecamatan Mojojoto.
3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem penyedia (penyedia pangan, penyedia air bersih, penyedia serat fiber, penyedia bahan bakar, dan penyedia sumber daya genetik) memiliki nilai jasa ekosistem yang bervariasi. Jasa ekosistem penyedia pangan dominan pada kelas sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia air bersih dominan pada kelas sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia serat fiber dominan pada kelas sedang, dan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik dominan pada kelas sedang.

4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem pengaturan memiliki dominan nilai sebagai berikut: pengaturan iklim memiliki nilai jasa ekosistem pada dominan kelas tinggi, pengaturan tata aliran air dan banjir pada kelas sedang, pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana pada kelas tinggi, pengaturan pemurnian air pada kelas tinggi, pengaturan pengolahan dan pengurai limbah pada kelas sangat tinggi, pengaturan pemeliharaan kualitas udara pada kelas sedang, pengaturan penyerbukan alami pada kelas sangat tinggi, dan pengaturan pengendalian hama penyakit pada kelas sangat tinggi.
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem budaya memiliki dominan nilai sebagai berikut : jasa ekosistem budaya untuk permukiman dominan pada kelas sedang, untuk ekowisata pada kelas sangat rendah, untuk estetika alam pada kelas sedang, pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan pada kelas sedang, pendukung siklus hara pada kelas sangat tinggi, produksi primer pada kelas tinggi, dan pendukung keanekaragaman hayati pada kelas tinggi.

h. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kota Kediri didominasi oleh lahan terbangun. Namun demikian perkembangan lahan terbangun belum tersebar secara merata.

Gambar 2.3 – Penggunaan Lahan di Kota Kediri



Sumber : RTRW Kota Kediri 2011-2030

Dominasi penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota, dengan 63% penggunaan lahan di Kecamatan Kota dimanfaatkan untuk perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman dan wisata kota, sedangkan sisanya untuk persawahan, fasilitas umum dan sosial serta lahan kosong. Sedangkan penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojo sebesar 67,48% dimanfaatkan untuk persawahan, tanah kosong dan hutan, dan 32,52% digunakan untuk pendidikan, industri rumah tangga, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman kepadatan sedang dan rendah. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya sama dengan Kecamatan Mojo sebesar 58,81%, selebihnya dimanfaatkan untuk perkantoran, industri, industri rumah tangga, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian.

2.1.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Berada di jalur transportasi regional yang menghubungkan antara Kota Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Malang, Kota Kediri telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder. Pusat pelayanan kota mempunyai skala pelayanan regional dalam wilayah Kota Kediri, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Kediri dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat pelayanan kota yakni berdasarkan dominasi kegiatan. Adapun fungsi pusat pelayanan kota ini adalah sebagai berikut :

a. Pusat Pemerintahan Kota

Pusat pemerintahan Kota Kediri ditandai dengan adanya kantor walikota dan kantor-kantor pemerintahan lainnya yang terdapat di kawasan pusat pelayanan kota ini.

b. Pusat Perdagangan Jasa Skala Regional

Fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala regional yakni dengan adanya beberapa pusat perbelanjaan (Mall Kediri, Kediri Town Square), kawasan pertokoan (Jl. Erlangga – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Dhoho – Jl. Patimura – Jl. HOS Cokroaminoto dan Jl. P. Sudirman – Jl. Yos Sudarso), pasar rakyat (Pasar Setonobetek), dan pasar grosir yang terdapat di kawasan pusat kota dan mempunyai skala pelayanan regional karena menjadi orientasi pemenuhan kebutuhan penduduk di wilayah luar Kota Kediri seperti dari Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek.

c. Pusat Kegiatan Industri

Terdapat industri besar berupa industri pengolahan tembakau di Kelurahan Semampir, Dandangan dan Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota, serta sentra industri kecil makanan berupa home industri tahu, getuk pisang, kain tenun, kain batik dan lain sebagainya.

d. Pusat Pendidikan

Pusat pelayanan pendidikan yang berada di kawasan Kota Kediri merupakan sarana pendidikan formal tingkat pendidikan dasar dan menengah atas dan merupakan sekolah favorit/unggulan. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan skala regional berupa perguruan tinggi dan akademi diarahkan ke wilayah Kota Kediri bagian Barat (Kecamatan Mojoroto) dan sebagian kecil di wilayah timur (Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Pesantren). Untuk sarana pelayanan pendidikan berbasis agama yang berupa pesantren juga tersebar di wilayah barat (Pondok Pesantren Lirboyo di Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto) dan di wilayah lainnya (Pondok Pesantren Wali Barokah di Kelurahan Banjaran, dan lainnya).

e. Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Regional

Sarana pendukung fungsi pusat pelayanan kesehatan skala regional di Kota Kediri ini berupa RSUD Gambiran di Kelurahan Pakunden, RS Kusta di Kelurahan Mojoroto, RS Bhayangkara di Kelurahan Dandangan, RS DKT di Kelurahan Semampir, RS Baptis di Kelurahan Bangsal, dan RS Muhammadiyah di Kelurahan Mrican.

f. Pusat Pelayanan Pariwisata

Kegiatan pariwisata antara lain yaitu pengembangan pariwisata Selomangleng, wisata belanja di pusat-pusat perbelanjaan yang ada, wisata kuliner dan pengembangan akomodasi pariwisata berupa hotel/penginapan.

Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata secara regional sehingga Kota Kediri memiliki kawasan-kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensinya masing-masing, sebagai berikut :

a. Kawasan Khusus Militer, yaitu terdapat :

1. Brigade Infanteri Mekanis 16/Wira Yudha yang berada di Jalan Maskumambang Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto, di bawah kaki Gunung Klotok.
2. Kompleks Yonif Mekanis 521/ Dadaha Yodha di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota.

Kawasan pertahanan dan keamanan tersebut memiliki pengaruh strategis terhadap stabilitas keamanan dan politik yang juga berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pengembangan wilayah Kota Kediri secara keseluruhan.

b. Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis di Kota Kediri yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan *Central Business District* (CBD)

Kawasan CBD yang merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yakni kawasan perdagangan dan jasa berskala regional dan kawasan perkantoran berskala lokal dan regional di pusat kota yang berada di Kecamatan Kota. Pada kawasan perdagangan dan jasa ini meliputi:

- a) Keberadaan Pasar Setonobetek, Pasar Grosir Buah, Sayur Ngronggo, dan Pasar Pahing dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kebutuhan pokok, sayuran, ikan dan sejenisnya.
- b) Pertokoan di sepanjang Jl. Pattimura dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kelontong, tekstil, dan alat perlengkapan sehari-hari.
- c) Pertokoan di sepanjang Jl. Dhoho - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Urip Sumoharjo dan sekitarnya dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang campuran seperti garment, elektronika, jasa bank, showroom motor-mobil, dan lainnya.
- d) Pertokoan dan pusat perbelanjaan yang terdapat di sepanjang Jl. Brawijaya dan Jl. Diponegoro.
- e) Perkantoran terdapat di Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Basuki Rachmat.

Selain pengembangan kawasan CBD juga terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi pengembangan pasar rakyat yang tersebar di tiap kecamatan/bagian wilayah kota dan pada pusat-pusat permukiman, pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*, pertokoan, *show room*, bank dan grosir pada kawasan pusat kota dan koridor sepanjang Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga dan Jl. P. Kusuma Bangsa; serta pengembangan toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kediri. Selain itu kawasan perdagangan dan jasa juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata seperti pembangunan pasar wisata di Kelurahan Campurejo, pembangunan pasar penjualan *souvenir* Selomangleng di Kelurahan Pojok, pembangunan sentra pemasaran produk Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Banjarmlati; dan pengembangan sentra oleh-oleh dan produk IKM di Kelurahan Pocanan.

Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa baru yang akan dikembangkan adalah pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor, pasar grosir elektronik di Kelurahan Ketami dan pasar *showroom* di Kelurahan Blabak.

2. Kawasan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Kediri meliputi kawasan peruntukan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM). Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar yaitu industri rokok PT Gudang Garam di Kelurahan Semampir, Dandangan dan Ngadirejo serta industri pengolahan tebu (pabrik gula) di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Industri menengah berupa industri pergudangan di Kelurahan Bangsal, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren dan Kota, industri pengolahan makanan di Kecamatan Pesantren dan Kota. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren. Industri kecil tersebar di beberapa wilayah kota Kediri.

Adapun pengembangan SIKM meliputi sentra kerajinan batik di Kelurahan Dermo, Mrican, Dandangan dan Rejomulyo; sentra kerajinan tenun di Kelurahan Bandar Kidul; sentra tahu di Kelurahan Pakelan, Pocanan, Tinalan, Banaran dan Bawang; sentra stik tahu di Kelurahan Tinalan dan Kampung Dalem; sentra madumongso dan getuk pisang di Kelurahan Kampung Dalem, Tinalan dan Dandangan; dan sentra makanan ringan di Kelurahan Blabak dan Bangsal.

Arah pengembangan baru untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan di Kota Kediri meliputi Kecamatan Kota (Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan, kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir) dan Kecamatan Pesantren (Kelurahan Bangsal, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak).

Mengingat sektor industri pengolahan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri, keberadaan industri ini tetap dipertahankan. Arah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak, Betet dan Bawang.

Rencana penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, untuk kawasan industri meliputi :

- a) Industri besar, terdapat Industri Rokok di Kelurahan Semampir, Balowerti dan Dandangan di Kecamatan Kota, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Mrican, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Pesantren.
- b) Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak – Betet – Bawang.
- c) Pengembangan dan penataan sentra industri rumah tangga (*home industry*) yakni *home industry* tenun di Kelurahan Bandar Kidul; *home industry* batik di Kelurahan Dermo, Rejomulyo dan Dandangan; *home industry* pengolahan makanan (tahu) di Jalan Pattimura.

3. Kawasan Terpadu Mrican

Pengembangan kawasan akibat dampak pintu tol dan rencana bandara di Kabupaten Kediri akan menyebabkan perubahan dan perkembangan kegiatan pada Kelurahan Mrican (Jl. Sersan Bahrin – Jl. Gatot Subroto).

Pengembangan kegiatan yang berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah :

- a) Industri (Pabrik Gula Mrican dan industri kecil batik);

- b) Pendidikan (Universitas Brawijaya);
- c) Perdagangan Jasa;
- d) Perumahan dan kost-kost an;
- e) Dekat *exit* tol;
- f) Dekat bandara.

c. Kawasan Pengembangan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu :

1. Kawasan Gunung Klothok yang terdapat Situs/Candi Klothok, Goa Selomangleng, Makam Mbah Boncolono, dan Museum Airlangga, dengan kriteria yang terpenuhi yaitu:
 - a) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
 - b) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan
 - c) tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota.
2. Kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat Pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil Kel. Setono Gedong, Bank Indonesia Kel. Pocanan, Hotel Merdeka Kel. Balowerti, Masjid Aulia Kel. Setono Gedong, Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kel. Ringinanom, Makam Aulia Sunan Geseng Kel. Singonegaran.

d. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ini berupa:

1. Kawasan hutan lindung, yakni berada di Kecamatan Mojoroto.
2. Kawasan sempadan sungai yakni pada sempadan Sungai Brantas yang berada di wilayah kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto.
3. Kawasan Resapan Air
Di Kota Kediri terdapat kawasan resapan air yang memiliki kemampuan tinggi dalam meresapkan air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (*akuiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air, antara lain di Kecamatan Pesantren, yaitu di Kelurahan Betet, Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Jamsaren), serta di Kecamatan Mojoroto yaitu di Kelurahan Pojok. Kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini sebagian besar merupakan kawasan lahan pertanian dan hutan yang perlu dilestarikan untuk menjaga kemampuan resapan air.
4. Kawasan Perlindungan Setempat
Beberapa mata air dan sungai berfungsi sebagai sumber air bersih maupun drainase. Untuk melindungi kelestarian mata air dan sungai diperlukan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan mata air dan sempadan sungai yang tersebar di Kecamatan Mojoroto yaitu di Kelurahan Pojok dan Gayam; Kecamatan Kota yaitu di Kelurahan Ngadirejo, Rejomulyo dan Banjaran; serta Kecamatan Pesantren tepatnya di Kelurahan Singonegaran, Blabak dan Betet.
5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,

kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota perlu dipertahankan keberadaannya minimal 30% (20% dari luas kawasan perkotaan yaitu 61,54 Km2 RTH publik dan 10% RTH privat).

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Kediri tahun 2020 sebesar 1.043,27 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah kota dikurangi luas kawasan lindung seluas 6.154,04 Ha (6.340 Ha – 185.96 Ha), RTH yang seharusnya yaitu : 20 % x 6.154,04 Ha = 1.230,81 Ha, maka persentase luasan RTH dari luas Kota Kediri sebesar 16,95%. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi seluas 509,96 Ha. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan komponen dari RTH, sehingga persentase luasan RTH Kota Kediri tahun 2020 menjadi 16,95% (1.043,27 Ha).

Luasan RTH publik yang ada di Kota Kediri secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 - Luas Eksisting RTH Kota Kediri Tahun 2020

NO.	RTH	LUAS (Ha)	%
1.	Tempat Rekreasi	12	0,19%
2.	Hutan Kota	309	5,02%
3.	Makam	59,2789	0,96%
4.	Sempadan Sungai	34	0,55%
5.	Jalur Hijau	16	0,26%
6.	Pulau dan Median	8,5	0,14%
7.	Kebun Bibit	15	0,24%
8.	Sempadan Rel	10	0,16%
9.	Taman – Taman Di Kota Kediri	41,6955	0,68%
10.	Taman Kediri Memorial Park Depan TMP	0,24	0,00%
11.	Perluasan Taman Ngronggo	1,02	0,02%
12.	Taman Tempurejo	1,67	0,03%
13.	Eks Lokalisasi Semampir	1,3	0,02%
14.	Sumber – Sumber Mata Air	14,9193	0,24%
15.	Taman Rusunawa	6,910	0,11%
16.	RTH Balowerti	0,1159	0,00%
17.	Taman Gajah Mada	0,0500	0,00%
18.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	509,96	8,29%
19.	RTH 8 Kelurahan	0,11	0,00
20.	RTH Taman Brantas	1,50	0,02
LUAS		1.043,27	16,95%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA

Bencana yang rawan terjadi di wilayah Kota Kediri meliputi kebakaran, banjir dan erosi. Secara fisik kepadatan penduduk yang terpusat di wilayah perkotaan diiringi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan daerah perkotaan rawan terhadap bencana kebakaran dan banjir, sedangkan wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam serta jenis tanah alluvial berisiko mengalami erosi.

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Kediri yaitu pada Kelurahan Dandangan, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kemasan, Kelurahan Setonopande, Kelurahan

Ringinanom dan Kelurahan Bandar Lor. Sedangkan kawasan rawan bencana banjir di Kota Kediri yaitu pada Kelurahan Balowerti, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Ngadirejo wilayah Ngadisimo, dan Kelurahan Mojoroto. Adapun kawasan rawan bencana erosi di Kota Kediri ada di wilayah Kecamatan Mojoroto bagian barat yang merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng sekitar 40%. Kawasan tersebut merupakan pusat suaka alam dan cagar budaya, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk mengurangi risiko terjadinya erosi.

2.1.4 DEMOGRAFI

Penduduk Kota Kediri selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kota Kediri pada tahun 2020 tercatat berjumlah 289.109 jiwa, naik sebanyak 1.700 jiwa atau 0,59% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 287.409 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 67,19 km², kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2020 sebesar 4.303 jiwa/km². Selengkapnya komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2016-2020 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 - Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Kediri Tahun 2016-2020

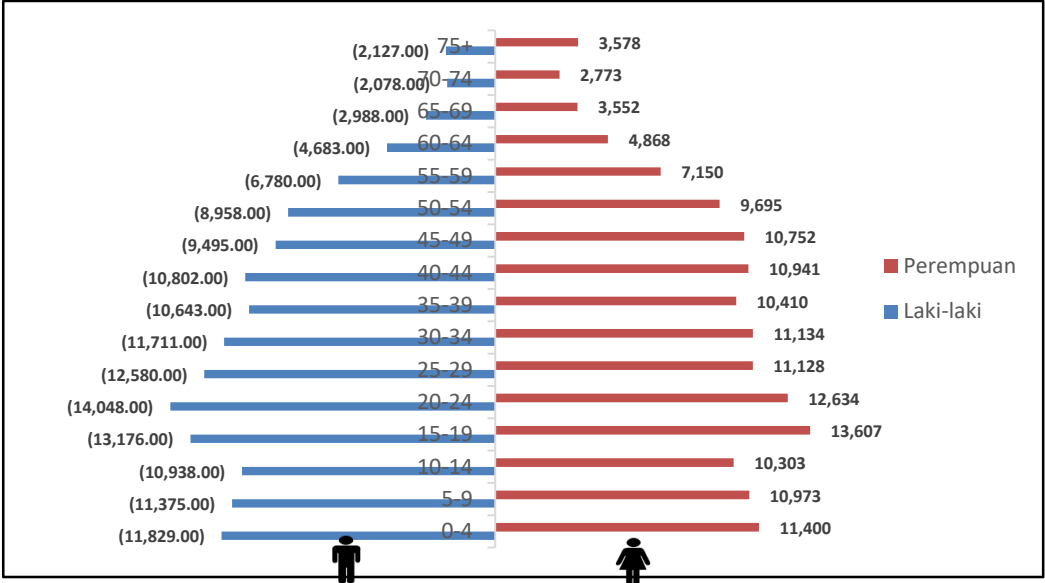
Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 4	22.667	22.829	22.952	23.095	23.229
5 – 9	21.812	21.964	22.083	22.220	22.348
10 – 14	20.726	20.873	20.987	21.119	21.241
15 – 19	26.139	26.323	26.465	26.630	26.783
20 – 24	26.050	26.229	26.370	26.532	26.682
25 – 29	23.143	23.304	23.428	23.572	23.708
30 – 34	22.298	22.454	22.575	22.715	22.845
35 – 39	20.542	20.687	20.800	20.931	21.053
40 – 44	21.206	21.359	21.478	21.615	21.743
45 – 49	19.736	19.879	19.995	20.125	20.247
50 – 54	18.173	18.307	18.414	18.537	18.653
55 – 59	13.562	13.666	13.747	13.843	13.930
60 – 64	9.296	9.367	9.425	9.491	9.551
65 – 69	6.364	6.413	6.452	6.498	6.540
70 – 74	4.719	4.756	4.785	4.819	4.851
75<	5.545	5.593	5.626	5.667	5.705
JUMLAH	281.978	284.003	285.582	287.409	289.109

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri pada tahun 2020 lebih kecil dari penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan komposisi 144.211 jiwa penduduk laki-laki (49,88%) dan 144.898 jiwa penduduk perempuan (50,12%). Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin penduduk di Kota Kediri sebesar 99, artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Berdasarkan usia, penduduk Kota Kediri tahun 2020 didominasi oleh usia produktif, sebagaimana disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.3 - Piramida Penduduk Kota Kediri Tahun 2020



Sumber : Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Berdasarkan grafik diatas penduduk Kota Kediri tahun 2020 usia produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 205.195 jiwa atau sekitar 70,97%, sedangkan jumlah penduduk usia non produktif hanya 83.914 jiwa atau 29,03%. Kondisi ini sangat menguntungkan karena penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan. Jumlah penduduk usia muda lebih banyak bila dibandingkan jumlah penduduk usia tua, bila digambarkan dalam bentuk piramida penduduk masuk dalam kategori piramida ekspansif atau piramida penduduk muda.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Sasaran pembangunan nasional maupun daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik jasmani maupun rohani yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan ekonomi serta kesejahteraan sosial dalam rangka membentuk sumber daya insani yang berkualitas.

Salah satu unsur penting yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan adalah pemerataan. Kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ingin dicapai oleh setiap daerah selain meningkat kualitas dan kuantitasnya, juga manfaatnya harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan dan pemerataan pendapatan penduduk. Begitu pula dari sisi kualitas masyarakat, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

Keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan pengeluaran dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan untuk mengukur kualitas SDM dengan mempertimbangkan hasil pembangunan yang dicapai menurut gender dapat dijelaskan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) sehingga dapat diketahui kesenjangan capaian pembangunan antar kelompok gender. Indeks Pembangunan Gender merupakan rasio capaian IPM perempuan terhadap capaian IPM

laki-laki, sedangkan nilai IDG merupakan indikator yang lebih melihat pada keterbandingan pemberdayaan perempuan terhadap laki-laki pada dunia publik.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian daerah secara makro dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB. Perhitungan PDRB saat ini menggunakan tahun dasar 2010 mengacu pada *System of National Account* (SNA) 2008 dan klasifikasi baku komoditi Indonesia (KBKI) 2014 revisi IV. Jumlah sektor dalam PDRB yang sebelumnya 9 sektor dan didukung oleh 39 sub sektor, saat ini pada perhitungan PDRB dengan metode baru menggunakan 17 kategori dengan 54 industri sebagai pendukungnya. Perkembangan PDRB Kota Kediri pada tahun 2016-2020 berdasarkan metode perhitungan baru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 - PDRB Kota Kediri dan Peranan Industri Pengolahan

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
PDRB ADHB dengan Industri Pengolahan (Milyar Rp)	106.396,45	115.650,22	127.716,77	139.244,87	132.406,06
PDRB ADHB tanpa Industri Pengolahan (Milyar Rp)	19.637,47	23.665,85	25.800,26	27.532,61	26.430,32
Peranan Industri Pengolahan Tembakau (%)	81,54%	79,54%	79,80%	80,23%	80,04%
PDRB ADHK dengan Industri Pengolahan (Milyar Rp)	76.988,36	80.946,16	85.337,68	90.001,52	84.374,98
PDRB ADHK tanpa Industri Pengolahan (Milyar Rp)	15.370,96	17.893,40	18.937,20	19.929,5	19.018,8
Peranan Industri Pengolahan Tembakau (%)	80,03%	77,89%	77,81%	77,86%	77,46%

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Selama kurun waktu lima tahun terakhir Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri dari industri pengolahan tembakau memiliki kontribusi rata-rata 80% dari total PDRB. Peranan industri pengolahan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Kediri tahun 2016-2020 berturut-turut sebesar 81,54%, 79,54%, 79,80%, 80,23% dan 80,04%.

Sedangkan, peranan industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kecenderungan menurun. Dari tahun 2016 hingga 2020 berturut-turut sebagai berikut: 80,03%, 77,89%, 77,81%, 77,86% dan 77,46%. Penurunan peranan industri pengolahan perlu terus dilakukan agar tingkat ketergantungan semakin kecil.

Peranan 17 sektor/kategori dalam pembentukan PDRB Kota Kediri ADHB berdasarkan lapangan usaha tahun 2016-2020 terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.5 - PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	288,660.53	297,761.46	304,292.02	305,950.02	323,441.35
B	Pertambangan dan Penggalian	38.60	40.40	42.66	42.54	40.33
C	Industri Pengolahan	86,758,986.05	93,995,897.55	104,129,792.58	114,237,065.82	108,748,945.99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,532.12	9,924.82	10,712.92	11,249.94	11,020.98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,133.38	21,554.52	22,933.14	23,430.63	24,601.76
F	Konstruksi	1,974,788.05	2,148,171.94	2,261,907.38	2,328,789.81	2,174,614.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,865,915.38	10,994,460.91	12,188,613.19	12,968,712.58	11,482,357.93
H	Transportasi dan Pergudangan	435,378.26	494,962.13	550,151.16	591,358.44	590,700.24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,642,011.91	1,836,665.59	1,974,713.47	2,157,004.26	1,958,325.09
J	Informasi dan Komunikasi	2,057,198.73	2,181,373.51	2,277,514.38	2,325,484.95	2,749,751.13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,004,572.27	1,095,329.05	1,194,306.24	1,274,569.32	1,278,303.59
L	Real Estate	437,034.13	477,716.10	512,410.08	541,303.03	561,404.86
M,N	Jasa Perusahaan	204,112.91	238,361.06	262,246.22	276,963.57	264,532.86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,554.26	401,668.10	452,133.98	506,408.39	517,226.60
P	Jasa Pendidikan	813,267.54	882,313.14	954,223.59	1,030,044.62	1,082,125.47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,334.71	194,016.33	214,049.42	231,609.30	258,974.26
R,S,T,U	Jasa lainnya	345,933.70	380,000.59	406,731.26	434,886.44	379,693.98
	PDRB	106,396,452.52	115,650,217.21	127,716,773.70	139,244,873.64	132,406,061.08

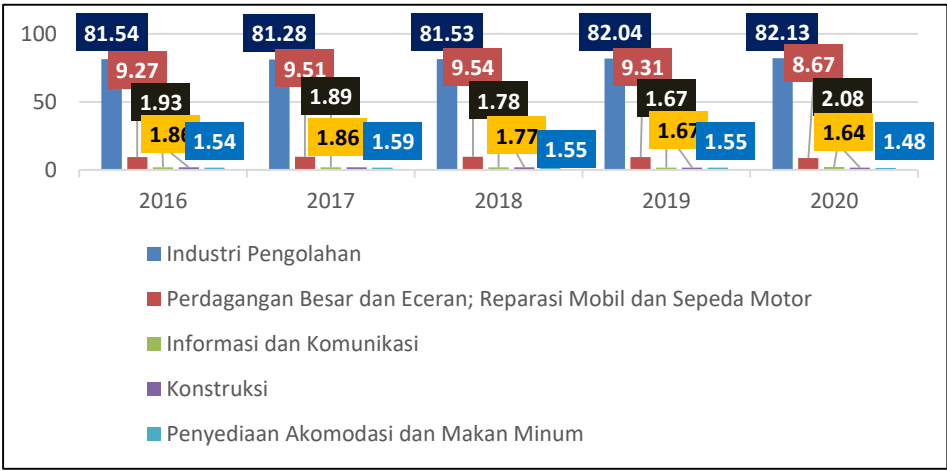
*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri,2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri didominasi oleh 5 lapangan usaha, perkembangan kontribusi dari kelima lapangan usaha dominan tersebut tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.4 - Perkembangan Kontribusi Lima Sektor Dominan Dalam Struktur Perekonomian Kota Kediri Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri adalah sektor industri pengolahan dengan angka rata-rata 80%. Kontribusi terbesar kedua disumbang dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dengan rata-rata 9%. Sektor informasi dan komunikasi menempati kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Kota Kediri. Sementara, sektor konstruksi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menempati urutan keempat dan kelima dalam mendukung struktur perekonomian Kota Kediri.

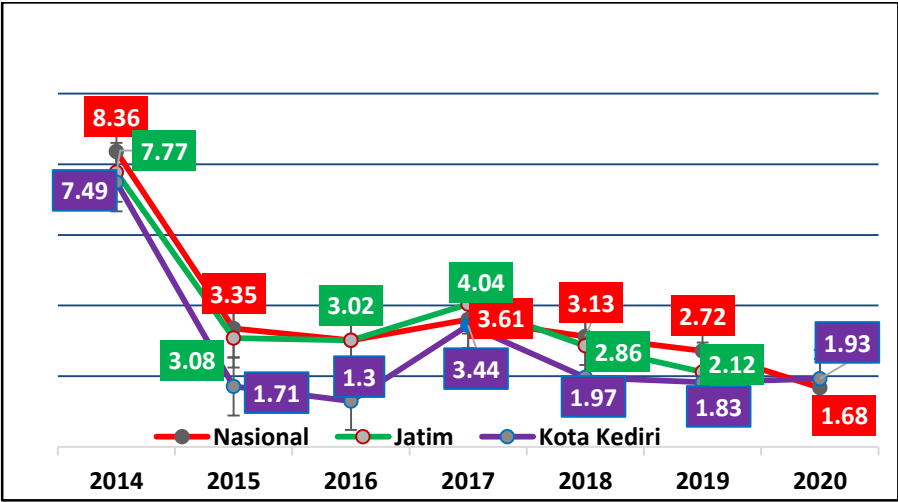
b. Laju Inflasi

Tingkat inflasi pada suatu daerah merupakan salah satu tolak ukur yang mencerminkan tingkat stabilitas perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil. Rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit. Inflasi kumulatif Kota Kediri pada tahun 2020 sebesar 1,93%.

Sedangkan apabila dicermati selama kurun waktu lima tahun terakhir, laju inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,44%. Sementara inflasi kumulatif Kota Kediri terendah sepanjang kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,30%. Sebagai catatan inflasi Kota Kediri pada tahun 2015, 2016 dan 2018 merupakan inflasi terendah seJawa-Bali.

Berikut grafik tren laju inflasi tahunan Kota Kediri dibanding Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.5 - Laju Inflasi Kota Kediri



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

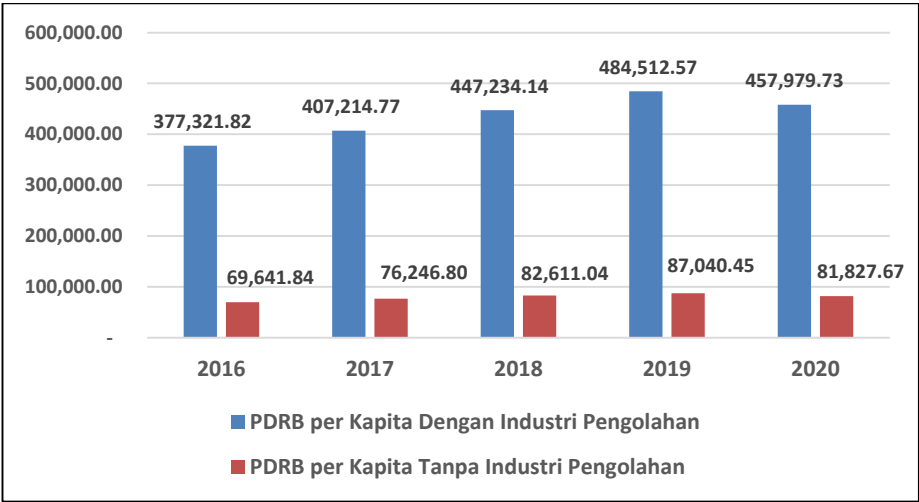
Kestabilan harga yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil di Kota Kediri sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan stabilitas harga ini membutuhkan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Diperlukan sinergi kebijakan makro ekonomi yang mencakup kebijakan fiskal, moneter dan sektoral untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Peran kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting karena inflasi banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran.

Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mencapai inflasi yang rendah tidak terlepas dari peran aktif anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri yang berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi serta menindaklanjuti fenomena yang terjadi di lapangan seperti melakukan pemantauan inflasi secara periodik, memantau ketersediaan komoditas pada momen-momen khusus, melaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM), mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan dan melakukan langkah-langkah antisipatif-preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi di Kota Kediri. Kota Kediri secara berturut-turut telah mendapatkan apresiasi sebagai TPID Terbaik se Jawa-Bali Tahun 2016, 2017 dan 2018.

c. Tingkat Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita adalah besaran PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Penghitungan PDRB perkapita bisa dibedakan menurut PDRB harga berlaku dan PDRB dengan harga konstan (Tahun dasar 2010). PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima penduduk jika seluruh nilai PDRB diterima oleh penduduk kota Kediri, tanpa melihat sumber perolehan PDRB apakah dari luar atau dari dalam wilayah Kota Kediri. Pendapatan PDRB per kapita bermanfaat sebagai indikator standar hidup atau kesejahteraan suatu daerah dari tahun ke tahun, menjadi pembanding kesejahteraan antar daerah, serta digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah. Perkembangan PDRB per kapita Kota Kediri dapat dilihat pada grafik. Perkembangan PDRB per kapita Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.6 - Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kota Kediri Tahun 2016-2020 (Rp Ribu)



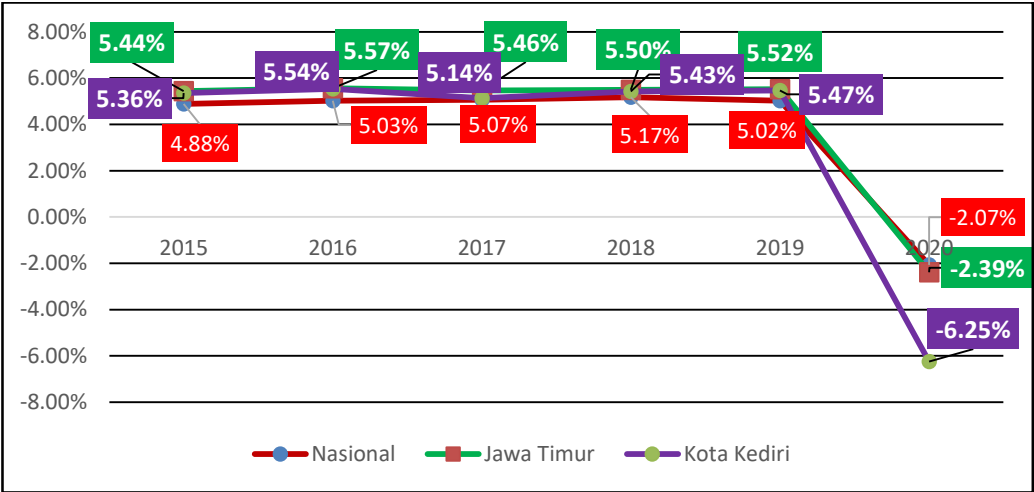
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Berdasarkan grafik diatas, nilai PDRB per Kapita ADHB Kota Kediri dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, baik PDRB dengan PT Gudang Garam Tbk. ataupun tanpa PT Gudang Garam Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Kediri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun akibat pandemi Covid-19, PDRB per Kapita ADHB Kota Kediri mengalami penurunan.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah yang merupakan suatu proses perubahan perekonomian suatu daerah dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi tiap tahun. Namun pada tahun 2020 Kota Kediri mengalami penurunan yang signifikan sebesar minus 6,25% akibat pandemi Covid-19 berada di bawah Nasional dan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2015-2020 ditunjukkan oleh grafik berikut:

Grafik 2.7 - Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri
Tahun 2015-2020 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2016 sampai dengan 2020 dibentuk atas dasar pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2016 sampai 2020 menurut lapangan usaha ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.6 - Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (%)

No	Lapangan usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*)	2020**)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	0,33	1,63	-0,53	2,90
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,96	-0,96	-0,98	-0,87	-7,63
3.	Industri Pengolahan	5,41	4,71	5,38	5,70	-6,37
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,66	2,36	3,11	2,74	-0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,53	3,53	3,66	2,46	4,58
6.	Konstruksi	4,01	3,18	4,76	3,98	-6,95
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,04	8,78	6,34	4,58	-12,45
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,12	7,59	8,37	5,50	-0,68
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	8,28	4,78	7,24	-10,27
10.	Informasi dan Komunikasi	7,92	3,79	3,91	2,04	17,82
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,92	4,37	5,77	5,75	0,44
12.	Real Estate	5,88	5,95	2,76	4,38	2,00
13.	Jasa Perusahaan	6,46	6,51	5,58	4,30	-7,04
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,92	2,97	6,07	5,83	-2,29
15.	Jasa Pendidikan	6,28	6,39	6,31	6,44	3,16
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,91	6,94	6,99	5,97	9,94
17.	Jasa lainnya	5,10	4,80	3,87	5,71	-14,33
PDRB ADHK		5,54	5,14	5,43	5,47	-6,25

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Pada kurun waktu 2016-2020 seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB di Kota Kediri mengalami fluktuasi dengan tren cenderung meningkat, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebagai dampak larangan

penambangan pasir di Sungai Brantas. Namun, pada tahun 2020 hampir seluruh lapangan usaha mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

e. Kemiskinan dan Ketimpangan

1. Perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan. Meskipun tren persentase penduduk Kota Kediri yang hidup dibawah garis kemiskinan fluktuatif selama tahun 2016-2020, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,81%, kemudian turun lagi sebesar 0,52%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat dari 20.540 jiwa penduduk miskin menjadi sebanyak 22.190 jiwa, dengan nilai kebutuhan minimum masyarakat atau garis kemiskinan sejumlah Rp.493.438,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 - Indikator Kemiskinan di Kota Kediri

Jenis Data	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	23.640	24.070	21.900	20.540	22.190
Persentase Kemiskinan (%)	8,40	8,49	7,68	7,16	7.69
Garis Kemiskinan (Rp)	400.096	420.712	453.807	471.893	493.438
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,96	0,99	0,87	1,23	0,96
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,20	0,19	0,18	0,32	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

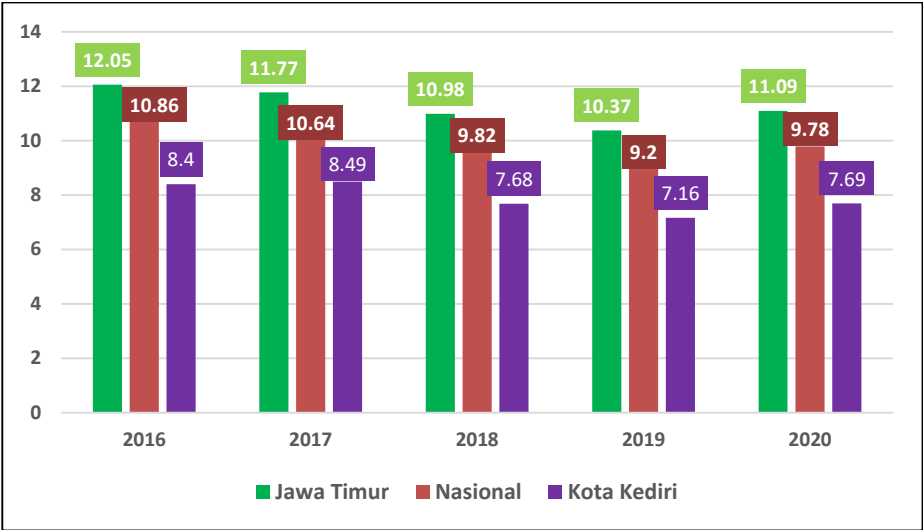
Selanjutnya untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi selain dengan melihat capaian dan perkembangan jumlah maupun persentase penduduk miskin, juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Pada tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Kediri sebesar 0,96, lebih rendah 0,27 poin dibanding tahun 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Kediri lebih baik karena semakin kecil, mendekati garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Kediri menunjukkan angka 0,17 mengalami penurunan sebesar 0,15 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Kediri menunjukkan perkembangan yang lebih baik karena tingkat kesenjangan semakin menurun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi maupun Nasional, tingkat kemiskinan di Kota Kediri jauh menunjukkan angka yang lebih rendah sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.8 - Tingkat Kemiskinan Kota Kediri dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

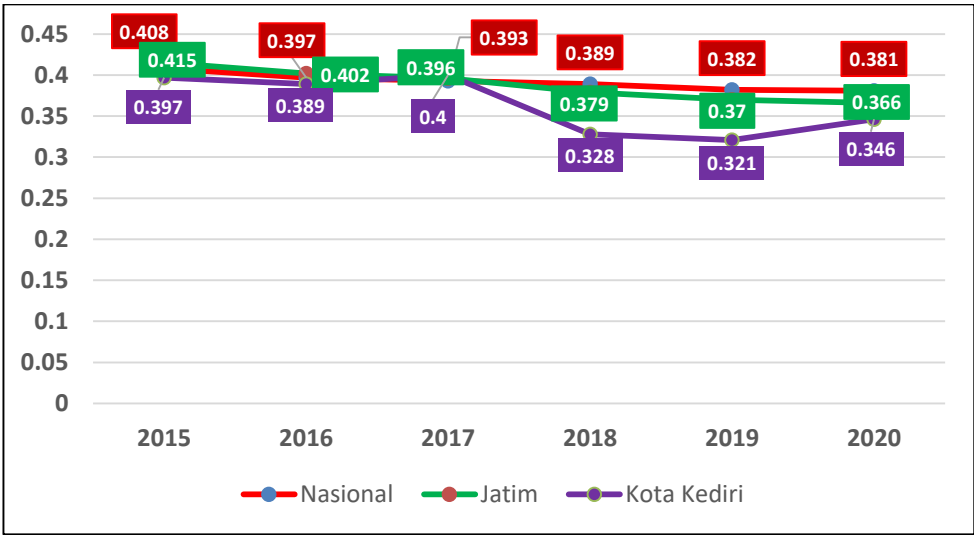


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 turun sebesar 0,06% atau menjadi 7,69% akibat pandemi Covid-19.

2. Salah satu ukuran untuk melihat peningkatan kesejahteraan dalam konteks ekonomi adalah manakala terdapat peningkatan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Namun, meningkatnya pendapatan penduduk tersebut seharusnya merata dan dirasakan semua lapisan strata sosial masyarakat. Artinya, bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab, pemerataan pendapatan merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Kediri, digunakan nilai Indeks Gini yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Grafik 2.9 – Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Selama lima tahun terakhir, indeks gini Kota Kediri berfuktuasi berada di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

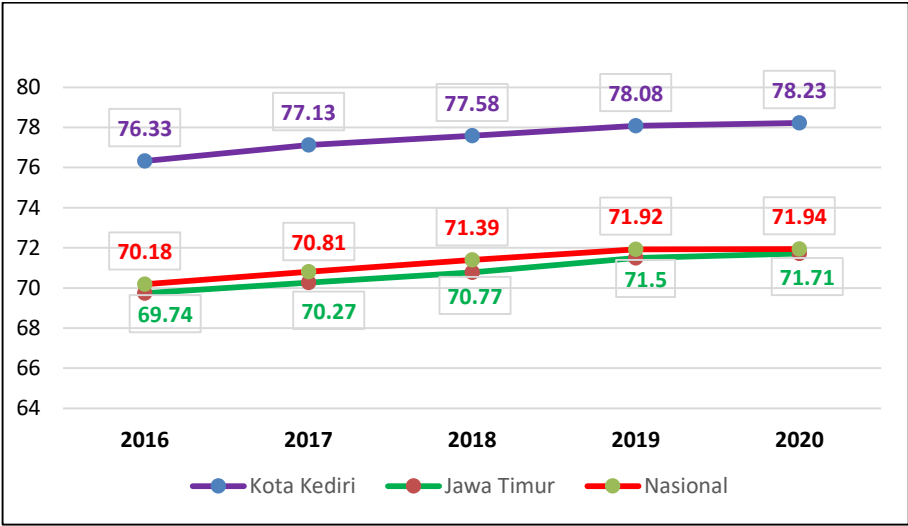
2.2.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Diantara indeks komposit yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai ukuran untuk mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index* atau HDI), Indeks Pembangunan Gender atau IPG (*Gender Related Development Index* atau GDI), dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG (*Gender Empowerment Measure* atau GEM).

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Terhitung sejak tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah metode penghitungan IPM yang disebabkan karena ada beberapa indikator yang dianggap tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar penghitungan. Perubahan tersebut terdapat pada indikator Angka Melek Huruf yang tidak lagi digunakan sebagai salah satu indikator pendidikan, diganti dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Perubahan lainnya adalah PDRB per kapita tidak lagi digunakan sebagai dasar penghitungan indeks daya beli, yang digantikan oleh Produk Domestik Regional Netto (PDRN) per Kapita, karena dianggap lebih akurat dalam menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Perkembangan nilai IPM Kota Kediri Tahun 2016-2020 menggunakan metode baru adalah seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.10 - Perkembangan IPM Kota Kediri Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa perkembangan IPM Kota Kediri selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kota Kediri 76,33, dan sebesar 77,13 pada tahun 2017. Tahun 2018 IPM Kota Kediri mencapai 77,58 atau mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya. Selanjutnya, nilai IPM Kota Kediri tahun 2020 sebesar 78,23, jauh berada diatas capaian IPM Provinsi Jatim sebesar 71,71 dan IPM Nasional sebesar 71,94 serta menempatkan pembangunan manusia di Kota Kediri pada peringkat ke-6 diantara Kab/Kota se-Jawa Timur. Capaian ini termasuk dalam kelompok tinggi berdasarkan skala internasional ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sehingga secara umum dapat

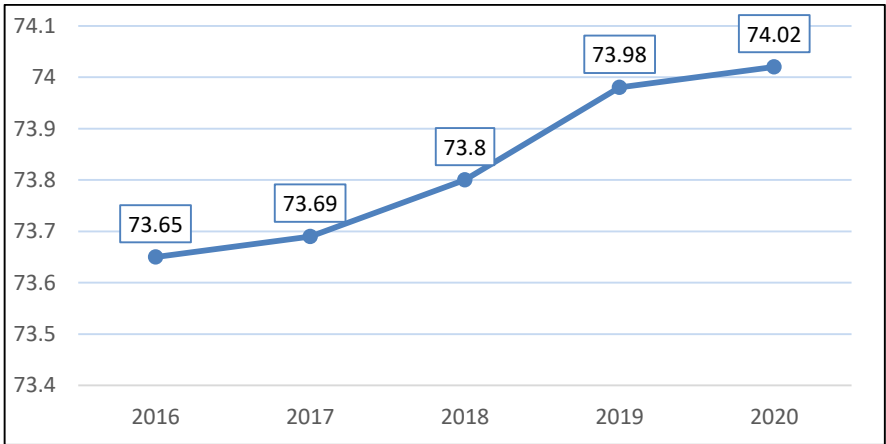
dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Kediri mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik.

Komponen penyusun IPM yaitu angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat, capaian pendidikan yang direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta tingkat pendapatan yang disesuaikan. Selama lima tahun terakhir seluruh komponen penyusun IPM tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Grafik 2.11 - Angka Harapan Hidup



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup Kota Kediri tahun 2020 mengalami peningkatan 0,04 poin. Dari tahun 2019 sebesar 73,98 menjadi sebesar 74,02 pada tahun 2020. Peningkatan capaian Angka Harapan Hidup ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri.

2. Indeks Pendidikan

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat diukur melalui indeks pendidikan dengan pendekatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

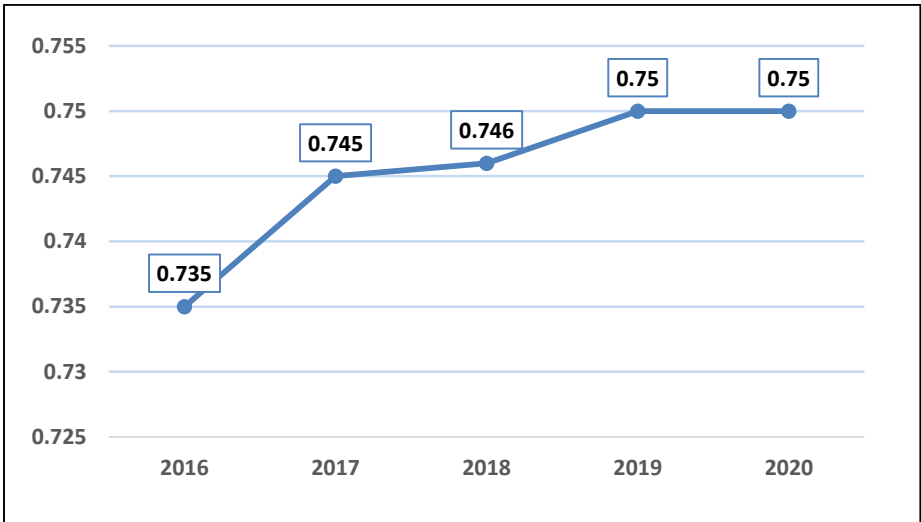
Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-

umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Kediri pada tahun 2020 telah mencapai 15,26 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 9,93 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk Kota Kediri telah menempuh pendidikan dasar 9 tahun dan kualitas pendidikan Kota Kediri berada pada tingkatan di atas rata-rata.

**Grafik 2.12 - Indeks Pendidikan Kota Kediri
Tahun 2016-2020**



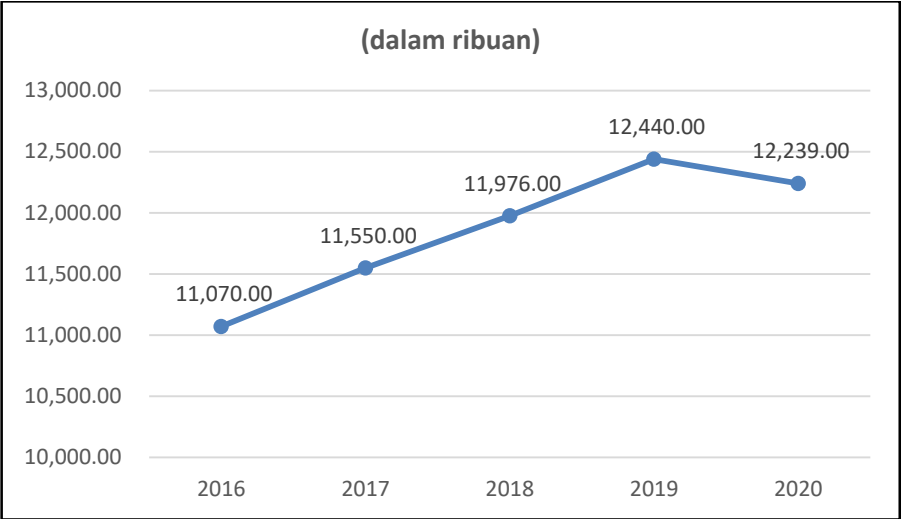
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Dari kedua angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Kediri bisa disusun indeks pendidikan. Indeks pendidikan Kota Kediri pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,01 poin menjadi 0,745. Peningkatan terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,001 poin menjadi 0,746 dan Indeks Pendidikan Kota Kediri tahun 2019 meningkat menjadi 0,75 sedangkan untuk tahun 2020 sama seperti tahun 2019 yang artinya tidak ada peningkatan ataupun penurunan.

3. Pengeluaran Per Kapita disesuaikan

Pengukuran hasil pembangunan manusia dalam dimensi standar hidup layak menggunakan angka pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan

Grafik 2.13 - Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan



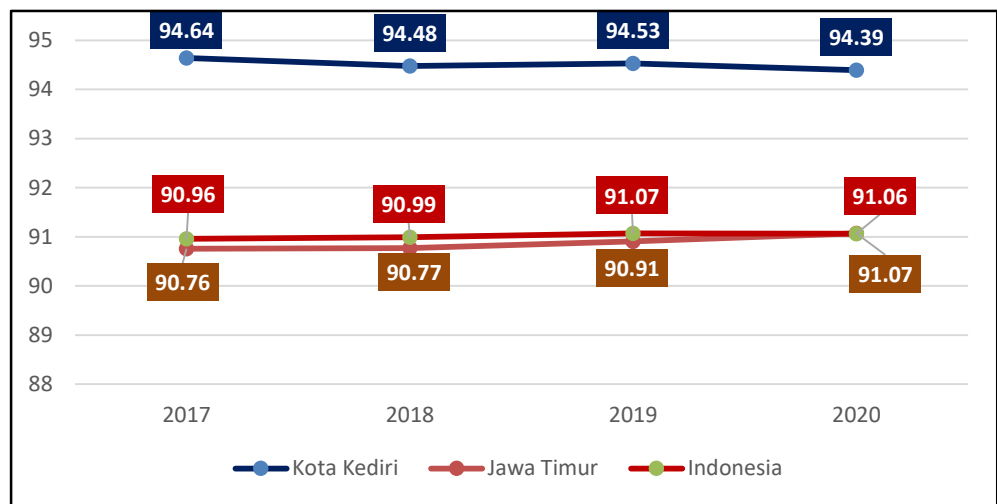
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2016 nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kota Kediri telah mencapai 11 juta lebih, atau tepatnya sebesar Rp.11.070.000,00. Apabila nilai ini dibagi dengan dua belas bulan akan diperoleh angka sebesar Rp.922.500,00. Artinya, pengeluaran per-orang di Kota Kediri mencapai Rp. 922.500,00 dalam satu bulan. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.12.440.000,00 dengan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.036.666,67. Selanjutnya, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 12.239.000,00.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indek Pembangunan Gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender, sehingga dapat diketahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, IPG adalah IPM yang disesuaikan (dikurangi) oleh adanya ketimpangan gender. Makin besar kesenjangan antar gender dalam pembangunan manusia, makin rendah nilai IPG suatu daerah dibandingkan dengan nilai IPM-nya. Penghitungan IPG pada dasarnya hampir sama dengan IPM dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Angka IPG merupakan rasio dari angka IPM Perempuan (IPM-P) terhadap Angka IPM laki-laki (IPM-L). Bila capaian IPG semakin mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan gender semakin baik. Nilai IPG sama dengan 100 memberikan gambaran hasil capaian pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara, dan sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dari nilai 100, maka terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kota Kediri selama tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.14 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri Tahun 2017-2020



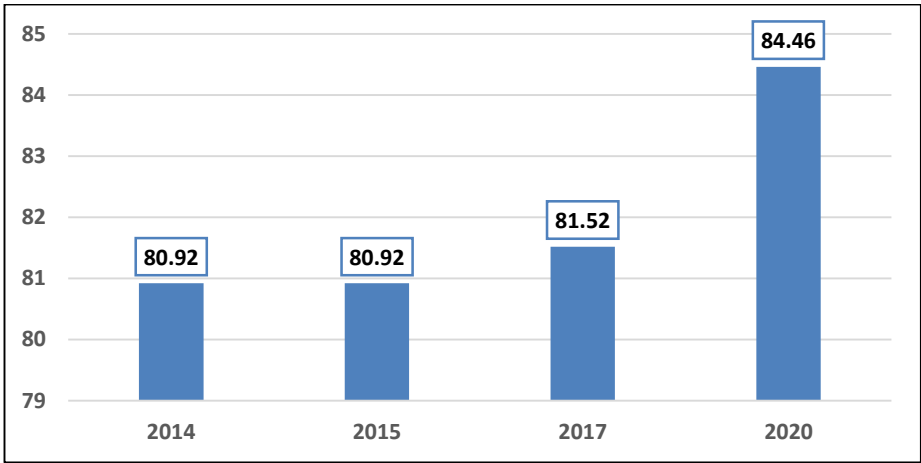
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim, 2020

Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan pengukuran IPG bagi Kab/Kota dikarenakan adanya pengurangan sampel Sakernas. IPG Kota Kediri tahun 2018 sebesar 94,48 dan naik menjadi 94,53 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 94,39. Capaian IPD Kota Kediri selama 4 tahun terakhir berada diatas Jawa Timur dan Nasional. Hal mendasar yang untuk memperkecil gap capaian pembangunan gender dipengaruhi oleh beberapa indikator pembentuk IPM yang meliputi peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan peranan perempuan pada perekonomian. Keberhasilan capaian indikator penyusun IPG tersebut tidaklah bisa instan namun perlu adanya konsistensi dan keberlanjutan program serta sinergitas seluruh *stakeholders* untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam upaya meminimalisir kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Kediri.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender dibidang ekonomi yang tergambarkan melalui komponen sumbangan pendapatan; partisipasi perempuan dalam berpolitik digambarkan melalui komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen serta partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan yang digambarkan melalui perempuan sebagai tenaga profesional (manajer, tenaga administrasi dan teknisi), serta persentase penghasilan wanita dibandingkan penghasilan laki-laki. Berbeda dengan IPG, IDG melihat ketimpangan kesempatan di beberapa bidang. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Kediri selama tahun 2014-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.15 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Kediri Tahun 2014-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim, 2020
*) Data tahun 2016, 2018, 2019 tidak tersedia karena ada pengurangan sampel Sakernas

Seperti terlihat pada grafik diatas, selama periode 2014-2020 perkembangan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terus menunjukkan tren meningkat dengan kenaikan signifikan dari sebesar 80,92 pada tahun 2014 hingga mencapai 84,46 pada tahun 2020..

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kota Kediri dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipatif, transparansi, kesetaraan, *responsive*, visioner, akuntabel, efisien dan efektif serta profesional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada 3 (tiga) aspek pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu penyelenggaraan Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang.

2.1.3 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

a. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan wajib pendidikan diarahkan untuk meningkatnya pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan dasar. Tingkat aksesibilitas dan kualitas pendidikan dapat dilihat dari Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan direpresentasikan oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang diukur dengan menjumlahkan Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah dibagi dua.

Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata menjalani pendidikan formal. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah dimaksudkan untuk memperkirakan berapa lama anak-anak pada umur tertentu dapat menyelesaikan sekolahnya. Dalam hal ini yang dihitung mulai umur tujuh tahun keatas karena mengikuti program kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perkembangan Indeks Pendidikan di Kota Kediri selama lima tahun terakhir berikut komponen pendukungnya dapat dicermati pada Tabel 2.9 dan Grafik 2.16 berikut :

**Tabel 2.8 - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Tahun 2016-2020**

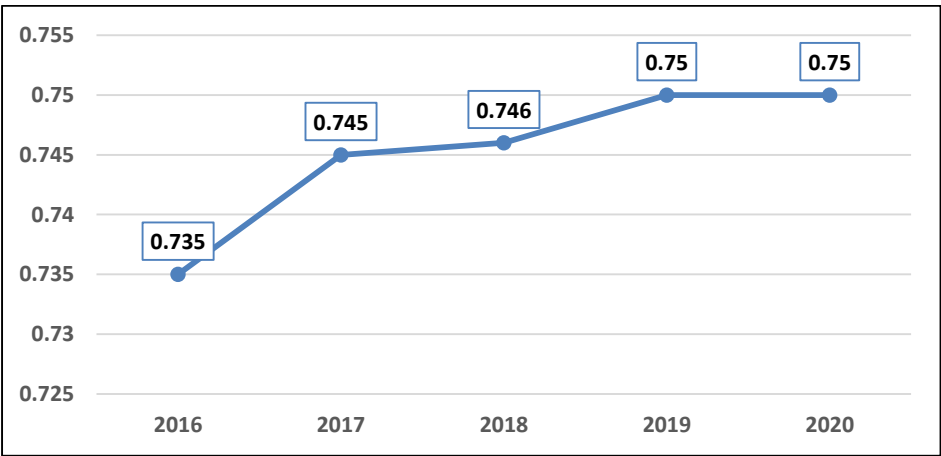
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,89	9,90	9,91	9,92	9,93
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,61	14,95	14,96	14,97	15,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Kediri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan walaupun perkembangannya lambat, seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Pada tahun 2016 hingga 2020, angka rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk Kota Kediri selama 9,93 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah yang telah diduduki oleh penduduk Kota Kediri adalah sampai dengan kelas 1 SMA.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Kediri menunjukkan peningkatan yang cukup berarti selama lima tahun terakhir. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Kediri tahun 2016 sebesar 14,61 tahun. Tahun 2017 meningkat sebesar 0,34 menjadi 14,95 tahun. Dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,01 tahun menjadi 14,96 tahun. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan 0,67 tahun menjadi 14,97 tahun dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,29 menjadi 15,26 tahun. Artinya, penduduk Kota Kediri yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2020 diharapkan bisa bersekolah hingga tingkat tiga perguruan tinggi.

Grafik 2.16 - Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Dari kedua angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Kediri bisa disusun indeks pendidikan. Indeks pendidikan Kota Kediri pada tahun 2016 sebesar 0,735. Sedikit demi sedikit Indeks Pendidikan Kota Kediri terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 0,01 poin menjadi 0,745. Peningkatan terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,001 poin menjadi 0,746 dan Indeks Pendidikan Kota Kediri tahun 2019 meningkat menjadi

0,75 begitu juga tahun 2020 yang artinya tahun 2020 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

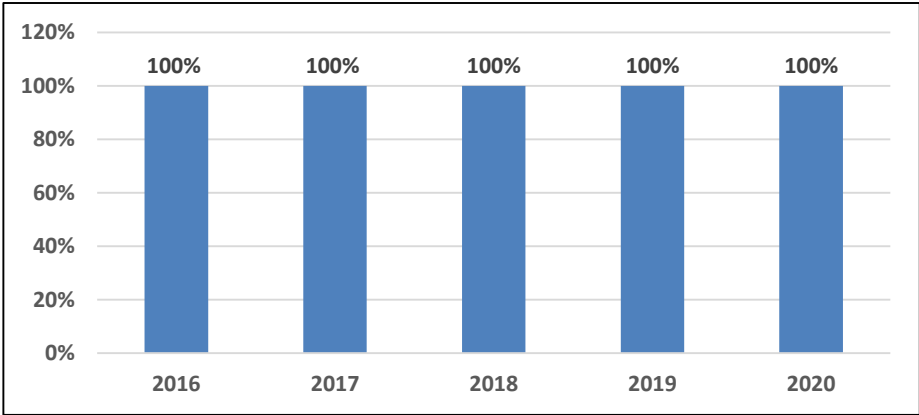
2. Angka Melek Huruf (AMH)

Indikator angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

Realisasi jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis pada tahun kelima (2020) sebesar 100%, dimana dari keseluruhan penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 230.152 orang, semuanya telah dapat membaca dan menulis. Sehingga target yang ditetapkan sebesar 100% berhasil tercapai.

Partisipasi sekolah di tingkat dasar yang ditunjukkan oleh capaian APM dan APK diatas 100% berpengaruh pada kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) atau kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya bagi penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Kediri menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun terakhir. Realisasi AMH pada tahun dasar (2013) sebesar 99,54% dan sejak tahun 2014 berhasil mencapai 100% hingga sekarang. Hal ini berarti penduduk Kota Kediri usia 15 tahun ke atas tidak ada yang mengalami buta huruf.

Grafik 2.17 - Angka Melek Huruf



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2020

Berdasarkan grafik diatas, lima tahun terakhir penduduk usia 15 tahun ke atas tidak ada yang buta huruf.

Tabel 2.9 - Jumlah Penduduk Usia ≥15 Yang Dapat Baca Tulis

Tahun	Penduduk 15 th yang dapat Baca Tulis	Penduduk Usia ≥15
2016	244.383	244.383
2017	242.934	242.934
2018	224.266	224.266
2019	227.436	227.436
2020	230.152	230.152

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2020

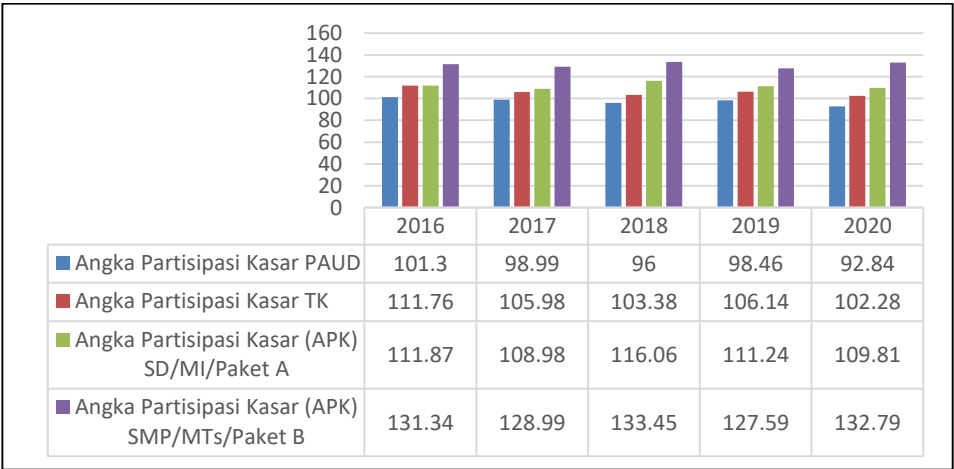
Meskipun capaian AMH di Kota Kediri telah mencapai 100%, Pemerintah Kota Kediri terus konsisten melakukan upaya penghapusan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional pada Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Masyarakat (PKBM), program kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C. Untuk program

kejar paket A dan paket B, warga belajarnya tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kota memfasilitasi penyediaan buku bacaan bermutu melalui layanan Perpustakaan Keliling pada sekolah-sekolah maupun fasilitas umum seperti taman kota dan tempat wisata di Kota Kediri, penyediaan perpustakaan di Rusunawa/Apartemen Rakyat (ARA), layanan perpustakaan digital terintegrasi dengan *Online Public Access Catalog* Perpustnas RI, gerakan literasi sekolah melalui pojok buku di masing-masing kelas, lomba bercerita, *library expo*, dan kegiatan kreatif lainnya, serta ikut mensosialisasikan dan mendukung Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Buku).

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator Angka Partisipasi Kasar menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan sekolah pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Formula indikator yang digunakan adalah perbandingan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang terealisasi pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.18 - Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar pada semua jenjang pendidikan di Kota Kediri secara umum rata-rata telah melebihi 100% dengan rata-rata APK pada tahun 2020 terealisasi sebesar 109,43%. Hal ini menunjukkan citra Kota Kediri sebagai Pusat Pendidikan bermutu yang mendorong tingginya minat masyarakat luar Kota Kediri untuk bersekolah di Kota Kediri.

Indikator SPM jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) tahun 2020 capaiannya adalah 100,25 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 jumlah usia sekolah usia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs adalah sebanyak 44.411 orang dengan jumlah penduduk usia 7-15 sebanyak 44.300 orang.

Sedangkan indikator SPM jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam

pendidikan kesetaraan tahun 2020 capainnya adalah 100 % dengan rincian warga belajar paket A sejumlah 176 orang, paket B 405 orang dan paket C 806 orang.

Selanjutnya, indikator SPM jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD tahun 2020 capaiannya adalah 100.27 %. Hal ini dikarenakan di Kota Kediri penduduk usia 6 tahun sudah ada yang masuk sekolah pada jenjang Sekolah Dasar utamanya pada Sekolah Swasta.

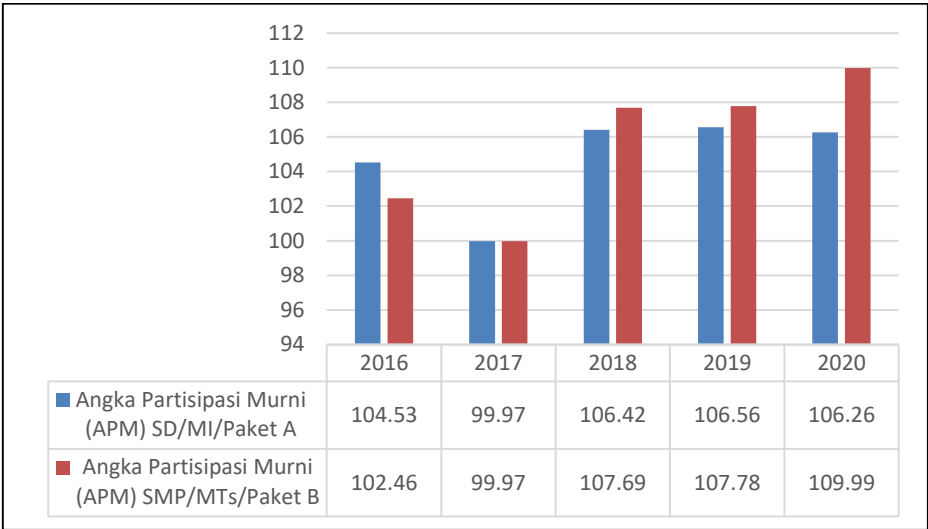
4. **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menempuh pendidikan sekolah sesuai jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu.

Formula indikator yang digunakan adalah jumlah siswa sesuai usia sekolah (SD/MI usia 7-12 tahun dan SMP/MTs usia 13-15 tahun), dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APM di Kota Kediri pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2016-2020 diuraikan pada grafik berikut :

Grafik 2.19 - Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2020

Selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Kediri menunjukan nilai yang fluktuatif sekitar 100%. Pencapaian APM mendekati angka 100% atau bahkan lebih dari 100% akan menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah dasar di Kota Kediri telah dapat tertampung di lembaga pendidikan yang ada.

5. **Angka Putus Sekolah**

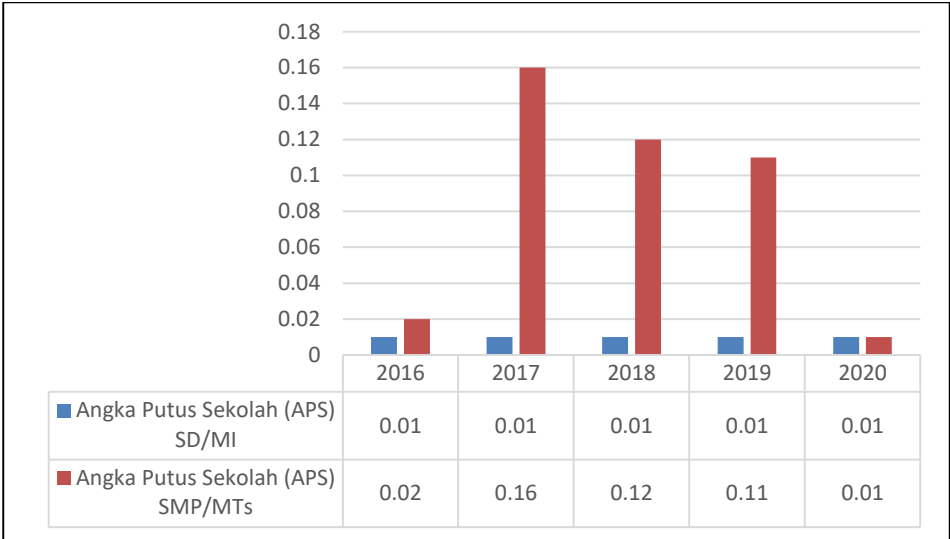
Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi anak menurut kelompok usia sekolah (umur 7-12 tahun untuk jenjang SD, dan umur 13-15 tahun untuk jenjang SMP) yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Putus Sekolah menunjukkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS memperhitungkan adanya perubahan

penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti perkembangan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga meningkatnya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Angka Putus Sekolah di Kota Kediri pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2016-2020 diuraikan pada grafik berikut :

**Grafik 2.20 - Angka Putus Sekolah (APS)
Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2020

Selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Kediri menunjukan nilai yang fluktuatif berada di bawah 0,2%.

6. Angka Lulus Sekolah

Indikator ini menggambarkan jumlah siswa yang lulus dibandingkan jumlah keseluruhan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan. Perkembangan angka kelulusan siswa di Kota Kediri pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10 – Angka Lulus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Kediri

Tahun	SD/MI	SMP/MTs
2016	100	100
2017	99,91	99,85
2018	99,96	99,53
2019	100	100
2020	99,91	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2020

Informasi tambahan terkait tabel di atas antara lain

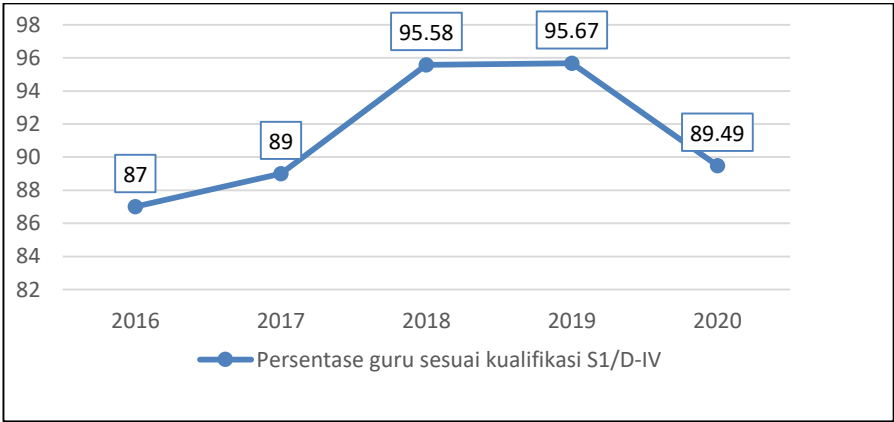
- 1) Tingkat SD/MI : Siswa berhasil lulus 99,91%, yaitu sebanyak 6.627 siswa dari 6.633 siswa SD/MI yang mengikuti ujian SD/MI di tahun 2020.
- 2) Tingkat SMP/MTs : Siswa berhasil lulus 100%, yaitu sebanyak 6.702 siswa SMP/MTs yang lulus dari 6.703 siswa yang mengikuti ujian SMP/MTs di tahun 2020.
- 3) Kedepan kinerja angka kelulusan siswa di Kota Kediri harus terus ditingkatkan hingga mencapai target 100%, khususnya untuk kelulusan SD/MI, melalui pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif dengan didukung manajemen penyelenggaraan pendidikan yang semakin baik.

7. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya dilihat dari sisi jumlahnya saja, melainkan juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru yang secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar siswa, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka semakin baik pula kemampuan mengajar seorang tenaga pendidik yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Perkembangan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 dari tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2.21 – Presentase guru yang berkualifikasi S1/D-IV



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2020

Persentase guru sesuai kualifikasi S1/D4 pada tahun 2019 sebesar 95,67%, yaitu sebanyak 3.096 guru telah memiliki ijazah S1/D4 dari 3.236 guru yang ada di Kota Kediri. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah guru sesuai kualifikasi sebesar 6,18%. Pada tahun 2020 terdapat 3.771 guru berkualifikasi S1/D4 dengan jumlah seluruh guru sebanyak 4.214.

b. Urusan Kesehatan

Pada pelaksanaan RPJMD tahun pertama, urusan kesehatan mengalami ujian yang cukup besar dengan adanya pandemi Covid-19. Urusan kesehatan mengalami dampak yang cukup besar. Berbagai langkah telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri sehingga penularan Covid-19 terus mengalami penurunan. Perkembangan Covid-19 sampai dengan akhir minggu III bulan November 2021 diuraikan sebagai berikut: Jumlah kumulatif terkonfirmasi positif sebanyak 4.031 orang, sembuh 3.41 orang, meninggal dunia 386 orang dan dirawat sebanyak 4 orang. Sementara capaian

cakupan vaksinasi yang telah dilakukan sampai dengan akhir minggu III bulan November 2021 adalah sebagai berikut: vaksinasi Dosis 1 sebesar 121,56%, Dosis 2 sebesar 99,03% dan Dosis 3 (tenaga kesehatan) sebesar 98,58%.

Kinerja keberhasilan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat antara lain dapat ditunjukkan melalui indikator sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi dihitung berdasarkan jumlah bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. Perkembangan AKB di Kota Kediri selama lima tahun terakhir fluktuatif dengan tren menurun, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

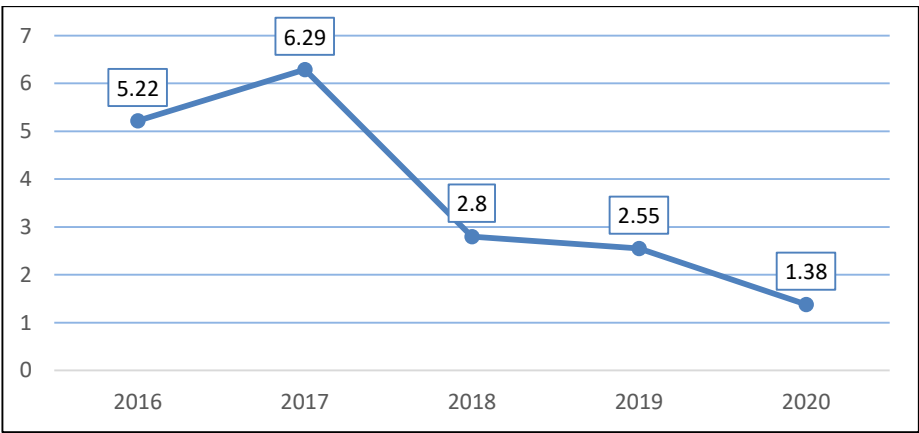
Tabel 2.11 – Jumlah Kematian Bayi di Bawah 1 Tahun dan Jumlah Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	22	27	12	11	6
Jumlah Kelahiran Hidup	4.214	4.293	4.283	4.312	4.347

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun mulai tahun 2018 selalu mengalami penurunan. Sedangkan untuk jumlah kelahiran hidup 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Dari jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dengan jumlah kelahiran hidup dapat dicari angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.22 - Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 AKB sebesar 1,38 per 1.000 kelahiran yaitu sebanyak 6 kasus kematian bayi dari 4.347 kelahiran bayi hidup. Jumlah bayi yang lahir meninggal di Kota Kediri mengalami penurunan dari 11 bayi menjadi 6 bayi dengan AKB sebesar 2,55 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu, yang diperoleh dengan perhitungan jumlah kasus kematian ibu melahirkan per 100.000 ibu melahirkan hidup.

Perkembangan capaian Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran di Kota Kediri selama lima tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut:

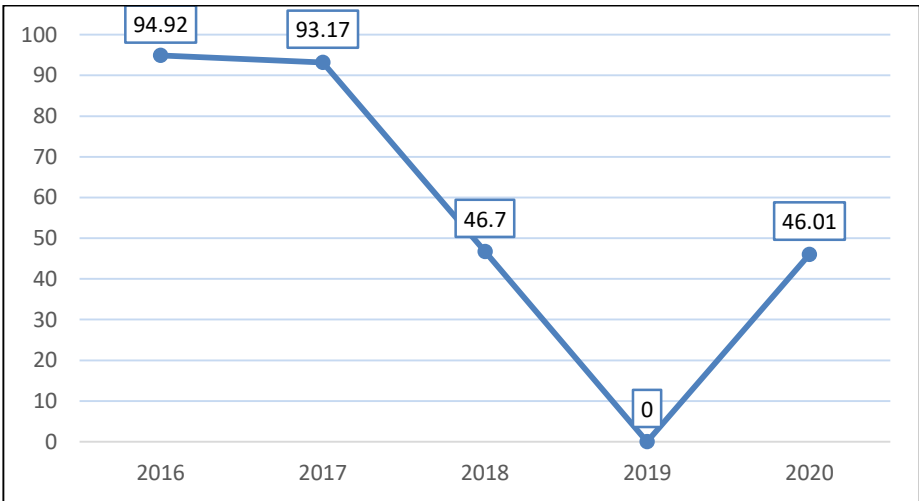
Tabel 2.12 – Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian ibu	4	4	2	0	2
Jumlah kelahiran hidup	4.214	4.293	4.283	4.312	4.347

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Dari angka-angka tersebut dapat dicari angka kematian ibu per seratus ribu kelahiran hidup. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.23 - Angka Kematian Ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



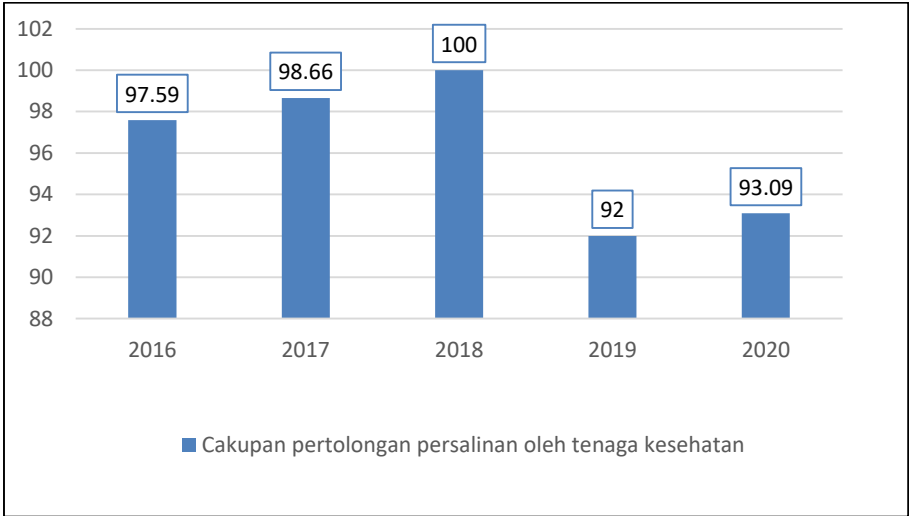
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup yaitu sebanyak 0 kasus dari jumlah ibu melahirkan sebanyak 4.312 orang. Namun angka kematian ibu meningkat pada tahun 2020 sebesar 46,01 yaitu sebanyak 2 kasus dari 4.347 orang.

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Pelayanan yang sesuai standar oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (tenaga bidan, dokter/dokter spesialis), baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2016-2020 digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.24 - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi pertolongan persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan dokter spesialis tahun 2020 mencapai 93,09%, yaitu sebanyak 4.120 persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kebidanan dan dokter spesialis dari keseluruhan tindakan sebanyak 4.426 persalinan.

4. Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus gizi buruk pada balita dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Jumlah balita gizi buruk di Kota Kediri pada tahun 2020 sebanyak 24 balita dari 20.958 balita yang diperiksa atau sebesar 0,11%. Kondisi balita gizi buruk di Kota Kediri tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

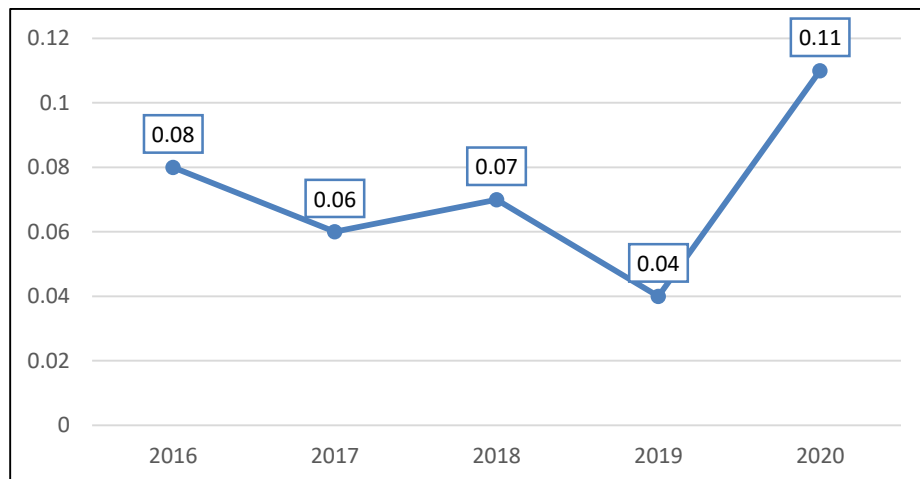
Tabel 2.13 - Jumlah Balita dan Jumlah Balita dengan Gizi Buruk Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Balita	Balita Dengan Gizi Buruk
2016	18.210	14
2017	20,521	13
2018	21.250	14
2019	21.098	8
2020	20.958	24

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Selama 5 tahun terakhir, tahun 2020 menjadi tahun balita dengan gizi buruk tertinggi. Kenaikan ini cukup tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan, agar tahun-tahun kedepan balita dengan gizi buruk tidak meningkat kembali. Persentase balita dengan gizi buruk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.25 - Persentase Balita dengan Gizi Buruk (%)
Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 balita dengan gizi buruk mengalami penurunan sebesar 0.02%. Kemudian untuk tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0.01%. Untuk tahun 2019 mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 0.03%. Pada tahun 2020 balita dengan gizi buruk di Kota Kediri mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0.07%.

Sementara itu, prevalensi balita gizi kurang 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Indikator prevalensi balita gizi kurang diukur dengan membandingkan jumlah balita gizi kurang dibanding dengan jumlah balita yang ada. Jumlah balita gizi kurang pada tahun 2019 sebanyak 619 balita dari 23.250 jumlah balita yang ada atau terealisasi sebanyak 0,04%. Balita gizi kurang mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 964 balita dari 20.956 jumlah balita yang ada atau terealisasi sebanyak 4.6%. Peningkatan prevalensi balita gizi kurang ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid 19 menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, terbatasnya anggaran dalam penanggulangan dan pemenuhan gizi balita serta ibu hamil, adanya penyakit bawaan pada balita, masih kurangnya pemantauan pertumbuhan pada balita di Posyandu karena di masa pandemi covid 19 posyandu tutup dan hanya memantau melalui kunjungan rumah pada balita beresiko.

Pemerintah Kota Kediri terus melakukan upaya untuk mengurangi kasus gizi kurang dan gizi buruk di Kota Kediri melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perhatian khusus dari keluarga dan harus adanya kerjasama yang terpadu dan komprehensif antara orang tua dan petugas kesehatan
- 2) Pertemuan lintas program dan lintas sektor program gizi;
- 3) Pemberian Makanan Tambahan – Pemulihan (PMT-P) kepada balita dan bumil KEK (ibu hamil Kekurangan Energi Kronis);
- 4) Penyuluhan gizi
- 5) Evaluasi program gizi di Puskesmas secara rutin;
- 6) Pemetaan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi);
- 7) Pemetaan Kecamatan Rawan Gizi;
- 8) Pemetaan Desa Rawan Gizi;
- 9) Pembentukan kelompok pendukung ASI.

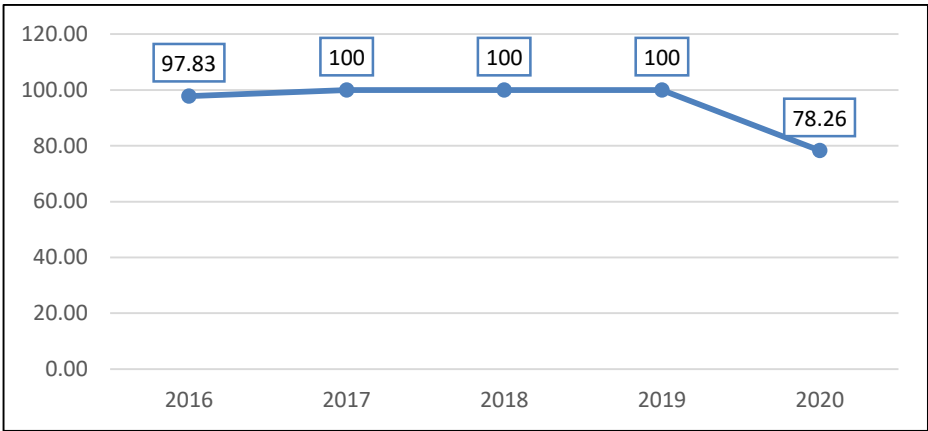
5. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan Kelurahan UCI menunjukkan persentase kelurahan yang seluruh balitanya telah tercakup imunisasi.

Jumlah kelurahan yang balita tercakup imunisasi pada tahun 2016 sebanyak 45 dari 46 jumlah kelurahan, atau terealisasi sebesar 97,83%.

Hambatan yang dihadapi adalah pendataan sasaran belum sesuai kondisi riil. Sehingga untuk meningkatkan cakupan UCI dilakukan upaya-upaya sosialisasi ke Kelurahan akan pentingnya imunisasi yang bisa didapat secara gratis di puskesmas, efektifitas supervisi suportif, terdapatnya tenaga yang terlatih dari pemerintah maupun unit swasta, serta adanya kerjasama lintas program sehingga penanganan UCI bisa terlaksana secara maksimal.

Grafik 2.26 - Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dalam %



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Sehingga pada tahun 2020, dari 46 Kelurahan yang ada di Kota Kediri sebanyak 36 kelurahan atau 78,26% telah tercakup imunisasi. Artinya Kelurahan cakupan UCI di Kota Kediri telah terdeteksi dan telah dilakukan penanganan secara optimal.

6. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Peningkatan peran serta masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup sehat menuju terwujudnya keluarga berkualitas tercermin dari meningkatnya jumlah posyandu aktif di Kota Kediri.

Tabel 2.14 - Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	336	336	337	337	346
Jumlah Balita	18.210	20.251	21.250	21.098	20.956
Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:54	1:61	1:63	1:62	1:61

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 346 posyandu dan jumlah balita sebanyak 20.956 balita, artinya pada tahun 2020 dari 346 posyandu yang ada telah melayani 20.956 balita atau 1 posyandu melayani 61 balita.

7. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Tabel 2.15 - Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	1 : 976	1 : 1.301	1 : 879	1 : 500	1 : 645

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Data rasio tenaga medis per satuan penduduk tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis di Kota Kediri cenderung mengalami peningkatan. Sehingga ketersediaan tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat.

8. Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun.
Perkembangan capaian pelayanan bayi baru di Kota Kediri Kediri selama empat tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut :

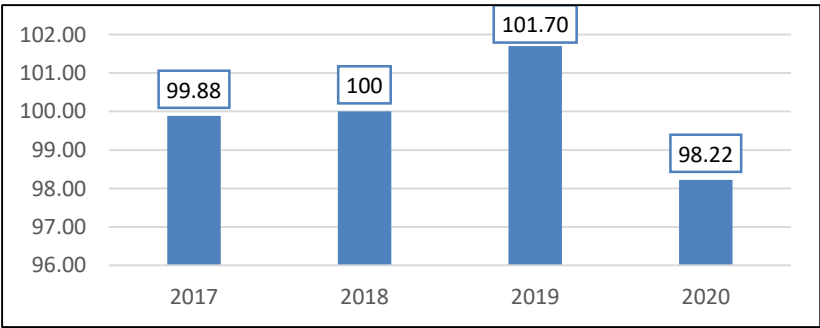
Tabel 2.16 - Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun	4.293	4.266	4.312	4.140
Jumlah sasaran bayi baru lahir diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	4.298	4.266	4.240	4.215

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 4.140 yang artinya angka ini pada empat tahun terakhir menjadi angka yang paling rendah. Begitu juga untuk jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama juga menjadi angka yang paling rendah.

Grafik 2.27 - Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Angka Cakupan bayi baru lahir pada tahun 2019 sebesar 4.312 bayi. Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kota Kediri dalam waktu yang sama 4.240 bayi pada tahun 2019 sebesar 101,70 cakupan bayi baru lahir. Namun Jumlah bayi baru lahir menurun pada tahun 2020 sebesar 98.22 yaitu sebanyak 4.140 bayi dari 4.215 bayi.

9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan anak balita usia 12-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun.

Perkembangan capaian pelayanan kesehatan balita di Kota Kediri Kediri selama empat tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut :

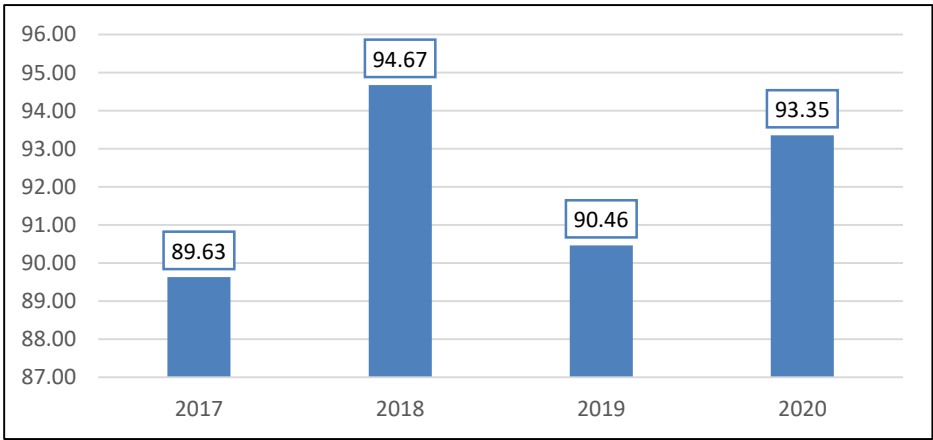
Tabel 2.17 - Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.216	20.118	14.973	15.345
Jumlah balita usia 12-59 bulan pada kurun waktu 1 tahun yang sama	21.439	21.250	16.552	16.438

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan keshatan sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 15.345 bayi. Sedangkan jumlah balita usia 12-59 bulan pada kurun waktu 1 tahun yang sama sebanyak 16.438. artinya sebanyak 1.093 anak balita usia 12-59 bulan belum mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

Grafik 2.28 – Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 adalah 14.973 anak balita sedangkan Jumlah anak balita usia 12-59 bulan Kota Kediri pada kab/kota pada kurun 1 waktu yang sama 16.552 anak balita pada tahun 2019 sebesar 90,46 anak balita. Namun jumlah cakupan pelayanan kesehatan anak balita meningkat pada tahun 2020 sebesar 93,35 yaitu sebanyak 15.345 anak balita dari 16.438 anak balita.

10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di Kota Kediri dalam waktu kurun 1 tahun ajaran

Perkembangan capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Kediri Kediri selama empat tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut :

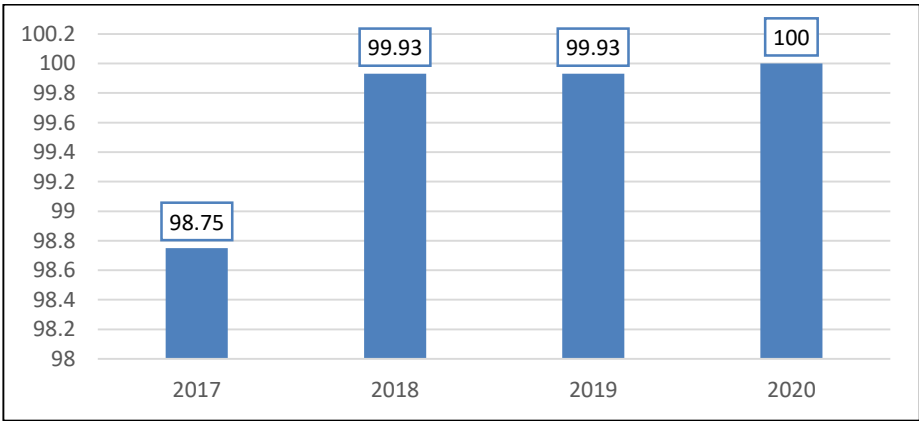
Tabel 2.18 - Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun ajaran	12.057	12.240	12.240	37.128
Jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran yang sama	12.210	12.249	12.249	37.128

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun ajaran adalah sebanyak 37.128 anak. Sedangkan jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran yang sama sebanyak 37.128 anak juga. Artinya pada tahun 2020 seluruh anak usia pendidikan dasar di Kota Kediri telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Grafik 2.29 - Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada Tahun 2019 sebesar 12.240 anak sedangkan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran yang sama 12.249 anak sehingga capaiannya sebesar 99,93 anak. Namun jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meningkat Tahun 2020 sebesar 100 yaitu sebanyak 37.128 anak dari 37.128 anak.

11. Cakupan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari presentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas.

Perkembangan capaian pelayanan hipertensi di Kota Kediri Kediri selama empat tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut :

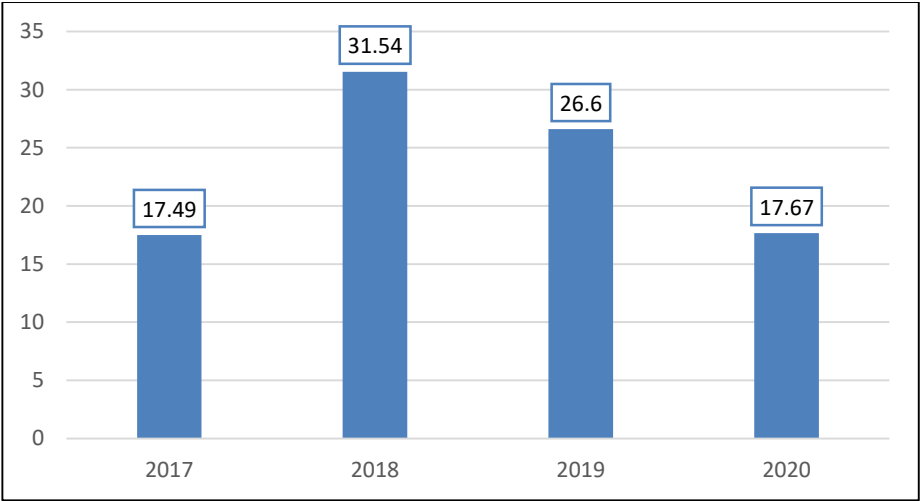
Tabel 2.19 - Pelayanan Hipertensi

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	10.453	18.618	21.760	14.586
Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	59.759	59.024	81.814	82.560

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun sebanyak 14.586 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama sebanyak 82.560 orang. Sehingga sebanyak 67.974 orang penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kota Kediri tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun. Persentase cakupan pelayanan hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kota Kediri pada tahun 2017-2020 dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.30 - Cakupan Pelayanan Hipertensi



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun pada Tahun 2019 sebesar 21.760 orang sedangkan Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama 81.814 orang sehingga capaiannya sebesar 26,6. Namun jumlah pelayanan kesehatan hipertensi menurun Tahun 2020 sebesar 17,67 yaitu sebanyak 14.586 orang dari 82.560 orang.

12. Cakupan Pelayanan Diabetes Militus (DM) Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari presentase penderita DM usia 15 tahun ke atas dalam kurun waktu 1 tahun.

Perkembangan capaian pelayanan DM di Kota Kediri Kediri selama empat tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut :

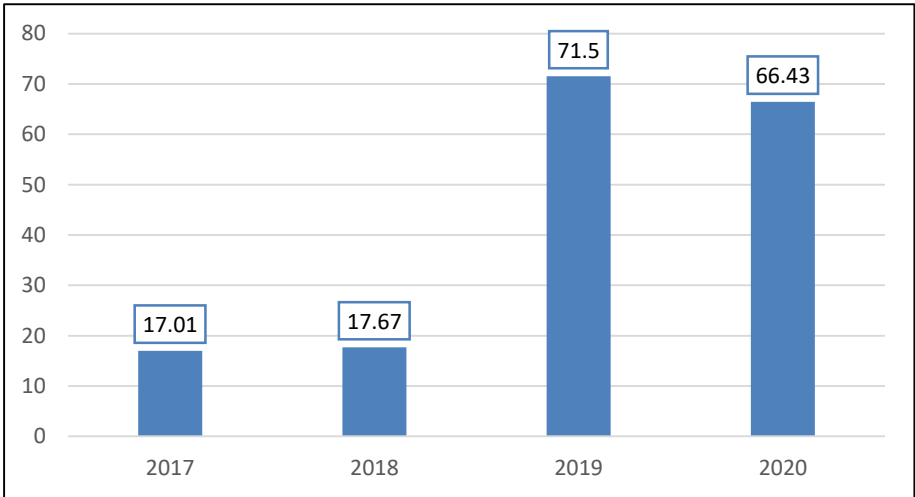
Tabel 2.20 - Pelayanan Diabetes Militus

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun	2.599	3.482	5.479	5.137
Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	15.272	19.705	7.663	7.733

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun sebanyak 5.137 orang sedangkan jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama adalah sebanyak 7.733 orang. Sehingga sebanyak 2.596 orang penderita DM usia ≥ 15 tahun di Kota Kediri tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun. Angka-angka tersebut cukup besar, namun tidak lebih besar dari tahun 2019.

Grafik 2.31 - Cakupan Pelayanan Diabetes Militus



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun pada Tahun 2019 sebesar 5.479 orang sedangkan Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama 7.663 orang sehingga capaiannya sebesar 71.5%. Namun jumlah pelayanan kesehatan DM menurun Tahun 2020 sebesar 66.43% yaitu sebanyak 5.137 orang dari 7.733 orang.

13.Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Sesuai Standar

Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun.

Perkembangan capaian pelayanan ODGJ berat di Kota Kediri Kediri selama empat tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut :

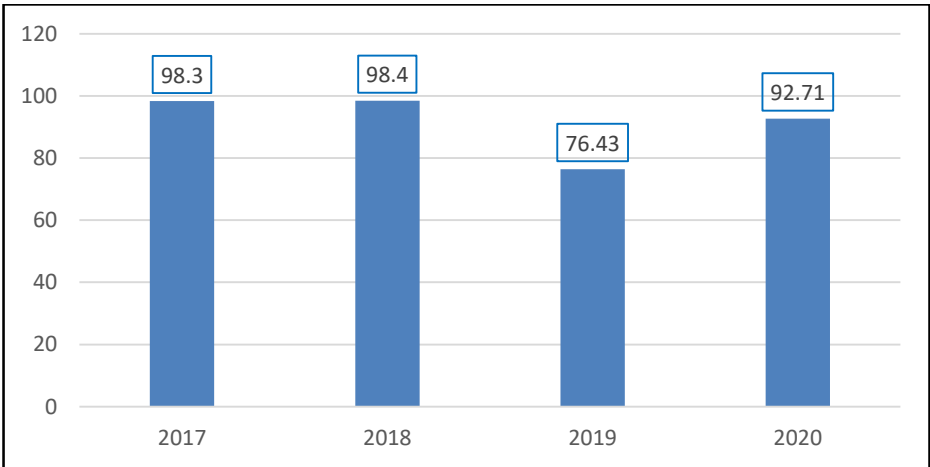
Tabel 2.21 - Pelayanan ODGJ berat

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	463	370	415	509
Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu 1 tahun	471	376	543	549

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Tahun 2020 jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 509 orang. Sedangkan jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebnayak 549 orang. Sehingga terdapat 40 orang penderita ODGJ berat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun. Pada tahun 2020 menjadi tahun dengan jumlah penderita ODGJ berat terbanyak daripada 3 tahun sebelumnya. Persentase cakupan pelayanan ODGJ berat pada tahun 2017-2020 di Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.32 - Cakupan Pelayanan ODGJ berat



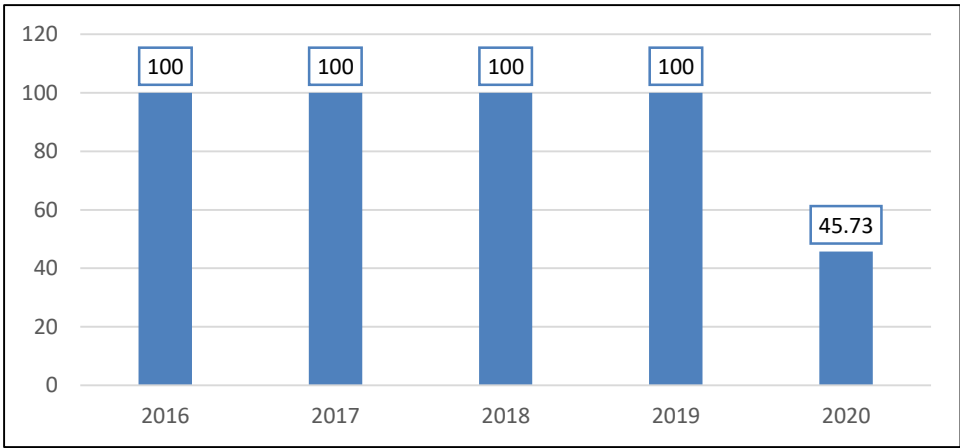
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun pada Tahun 2019 sebesar 415 orang sedangkan Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu 1 tahun 543 orang sehingga capaiannya sebesar 76,43%. Namun cakupan pelayanan ODGJ berat meningkat Tahun 2020 sebesar 92.71% yaitu sebanyak 509 orang dari 549 orang.

14. Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Indikator ini menggambarkan pelayanan kesehatan bagi orang yang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Perkembangan tingkat pelayanan orang yang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, sebagai berikut :

Grafik 2.33 - Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Tahun 2016-2020



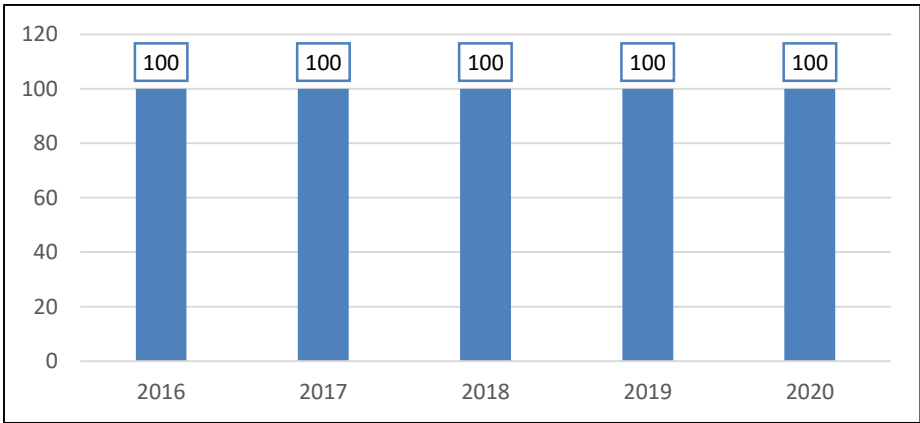
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Selama kurun waktu tahun 2016-2019 orang terduga TBC di Kota Kediri mendapatkan layanan sesuai standar seluruhnya. Hal ini perlu dilanjutkan pada periode mendatang. Namun pada tahun 2020 jumlah persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebanyak 45,73% atau hanya 2.761 dari 6.037 orang terduga TBC sehingga capaian kinerja hanya sebesar 45,73% atau kurang berhasil.

15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengeue (DBD)

Indikator ini menggambarkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD yang diperoleh dengan perhitungan jumlah penanganan penderita penyakit DBD dibanding jumlah penemuan penderita penyakit DBD.

Grafik 2.34 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2016-2020



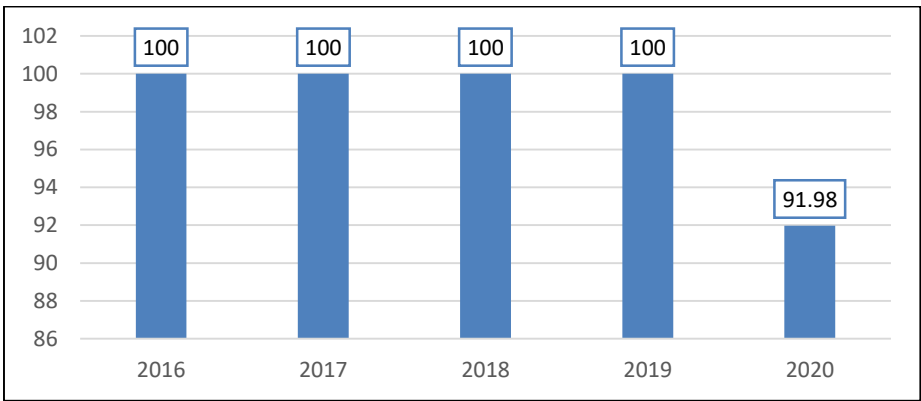
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri

Keberhasilan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Kediri tidak terlepas dari peran Kader Jumantik yang telah melakukan pemantauan pada kondisi sanitasi dan lingkungan rumah tangga melalui gerakan 3 M Plus dan peningkatan kebutuhan kembali fungsi kader jumantik sebagai peran aktif masyarakat.

16. Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)

Perkembangan penyakit HIV/AIDS terus menunjukkan peningkatan, seperti fenomena gunung es yang senantiasa tampak kecil di permukaan tetapi sebenarnya lebih besar di dalamnya, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas penduduk antar wilayah, menyebarnya sentra-sentra pembangunan ekonomi di Indonesia. Hubungan seksual sejenis (homoseksual) dan *Injecting Drug User* (IDU) secara stimulan telah memperbesar tingkat resiko penyebaran HIV/AIDS. Tidak seluruh kasus HIV/AIDS yang ada atau baru sebagian kecil dilaporkan (*under reported*).

Grafik 2.35 - Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Selama tahun 2016-2019 orang dengan resiko terinfeksi HIV/ AIDS di Kota Kediri mendapatkan layanan seluruhnya. Namun pada tahun 2020 hanya 6.446 dari 7.008 orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS atau hanya 91,98%.

17. Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pemerintah Pusat telah menargetkan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN dan UHC ini sangat strategis. Dukungan Pemda ini meliputi penganggaran maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Kediri telah berkomitmen dalam mendukung pencapaian target tersebut dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri tanpa terkecuali untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) 2020.

Cakupan jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) tahun 2020 sebesar 89,05%. Indikator ini merupakan indikator yang baru diterapkan pada tahun 2018.

18. Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta

Sesuai dengan kebijakan khususnya berkaitan dengan penanggulangan P2 Kusta yaitu SURAT EDARAN No. : HK.02.31.9517/2020 tentang : Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta Frambusia Dalam Era new New Normal Pandemi Covid 19, ditandatangani pada Bulan Juni Tahun 2020 bahwa upaya pencegahan dan pengendalian Kusta harus tetap dilaksanakan untuk

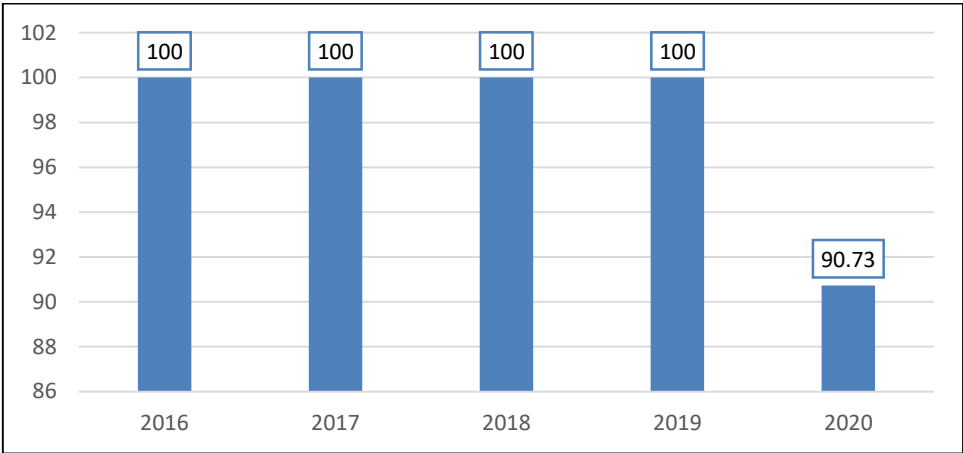
memutus rantai penularan serta menekan risiko penularan COVID serendah mungkin.

Prevalensi kasus Kusta di Kota Kediri tahun 2019 sebesar 0,07% per 10.000 penduduk. Dimana penduduk pada tahun 2019 sebesar 287.409 penduduk. Sedangkan di tahun 2020 jumlah penduduk ada 289.109 dan prevalensi kasus Kusta sebesar 0,1% naik sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya.

19. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Kediri dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.36 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2020

Pelayanan kesehatan ibu hamil yang optimal merupakan implementasi program GEMAKIBA yaitu **Gerakan Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi** dengan menggerakkan kader pendamping yang ada di Kelurahan. Dengan gerakan ini diharapkan isu nasional terkait *stunting* dapat dicegah. Tahun 2019 balita dengan prevalensi *stunting* di Kota Kediri sebesar 10,9%. Namun pada tahun 2020, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil menurun menjadi 90,73%. Pemerintah juga mencanangkan juga program **SIDORA** (Siaga Donor Darah) untuk persiapan donor bagi ibu melahirkan yang mengalami pendarahan. Adanya program **One Day Service ANC Terpadu** yaitu paket layanan pemeriksaan ibu hamil lengkap dalam satu hari sehingga terciptanya alur pemeriksaan pasien hamil terpadu dan cepat di Puskesmas wilayah Campurejo. Kader pendamping berasal dari unsur PKK, kader posyandu serta bidan puskesmas. Tugas bidan pukesmas tidak hanya memantau kesehatan ibu hamil, melainkan juga memastikan pemeriksaan diri ibu hamil sesuai jadwal termasuk memberi pemahaman pada ibu hamil tentang asupan makanan yang benar selama proses kehamilan serta adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan semua rumah sakit, bidan koordinator puskesmas/bidan penanggungjawab wilayah dan bidan praktik mandiri dalam memperkuat sistem jejaring rujukan.

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Dalam rangka mengukur aksesibilitas layanan kesehatan pada usia produktif, maka ditetapkan indikator cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pengunjung usia 15-59

tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibanding dengan jumlah warga usia 15-59 tahun. Pemerintah Daerah berkewajiban menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali. Indikator ini belum digunakan sebelumnya sehingga belum dihitung realisasinya. Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pengukuran capaian SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 26,09%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 100%, sehingga indikator SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tidak memenuhi target. Hal tersebut disebabkan hal-hal berikut:

- a) Meningkatnya sasaran penduduk usia 15 sampai 59 tahun.
- b) Tingginya target sasaran yang mengakibatkan sulit dijangkau untuk dilakukan skrining.
- c) Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan.
- d) Belum efektifnya fungsi posbindu untuk melakukan skrining.
- e) Terbatasnya jumlah bahan berupa stik dan BMHP lainnya untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol.
- f) Adanya kegiatan akreditasi yang dilakukan Puskesmas yang mengakibatkan tertundanya skrining di sekolah-sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan skrining dengan Posbindu Mobile, baik di kelurahan, TTU, kegiatan kemasyarakatan, juga kantor-kantor.
- b) Memberdayakan kader Kilisuci yang terdapat di semua Kelurahan yang salah satu tugasnya adalah sebagai kader Posbindu, untuk mencari dan melakukan skrining.
- c) Menindaklanjuti program Posbindu on Kampus yang sdh di-*launching* pada tahun 2019 untuk memberbanyak sasaran.
- d) Menganggarkan pembelian BMHP untuk keperluan skrining.
- e) Melakukan koordinasi lintas program, khususnya dengan Gudang Obat untuk pemenuhan BMHP melalui Dinkes.

21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Masalah kesehatan pada lanjut usia berawal dari kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakit pun meningkat. Masalah kesehatan yang sering dialami lanjut usia adalah malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak, dan lain-lain. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. Selain itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin

ketersediaan pelayanan kesehatan. Dalam rangka mengukur aksesibilitas layanan kesehatan pada usia lanjut, maka ditetapkan indikator cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Dari pengukuran SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2020 diperoleh data capaian 34,95 %, sedangkan target capaian yang ditetapkan adalah 100%, sehingga indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut tidak memenuhi target. Hal tersebut disebabkan hal-hal berikut:

- a) Keterbatasan reagen untuk pemeriksaan, khususnya kolesterol.
- b) Pemeriksaan skrining lansia cukup lama, petugas tidak bisa optimal dalam menjangkau semua sasaran.

Upaya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas skrining usia lanjut meliputi:

- a) Penyediaan Kit Lansia.
- b) Penyediaan Media KIE Lansia.
- c) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang skrining lansia.
- d) Peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan kader kesehatan lansia di kelurahan.
- e) Penyediaan sarana prasarana pemeriksaan laboratorium lansia (gula darah, kolesterol) oleh puskesmas.

Mobile screening untuk menjangkau sasaran lansia yang tidak pernah periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

22. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif dan ODF Akses

Saat ini, seluruh kelurahan (46 kelurahan) di Kota Kediri termasuk siaga aktif. Namun, tingkat perkembangan Purnama Mandiri masih 17% dari target 8 kelurahan, kelurahan Purnama 3 dan Mandiri 0. Adapun upaya –upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Kelurahan Siaga Purnama Mandiri diperlukan koordinasi dengan pihak terkait dan kegiatan pembinaan pada kader-kadernya. Seluruh kelurahan di Kota Kediri sejak tahun 2018 telah 100% ODF Akses.

23. Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kinerja layanan RSUD diantaranya dapat dilihat dari indikator angka kunjungan pasien dan angka kematian pasien. Angka kunjungan pasien ke RSUD dapat dilihat dari indikator *Bed Occupancy Ratio* (BOR) rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat yang jumlahnya terus meningkat. *Net Death Rate* (NDR) menggambarkan kematian pasien rumah sakit > 48 jam yang dirawat dibandingkan dengan jumlah pasien keluar, dengan standar nasional sebesar kurang dari 25, sedangkan *Gross Death Rate* (GDR) menggambarkan jumlah kematian seluruh pasien rumah sakit dibanding dengan jumlah pasien keluar, dengan standar nasional sebesar kurang dari 49. Perkembangan angka kunjungan dan angka kematian pasien RSUD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22 - Angka Kunjungan Pasien dan
Angka Kematian Pasien RSUD

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
BOR Rawat Inap (%)	74,83	73,50 70.559/ 95.995	53,50 65.606/ 122.617	57,23	40,64
Rawat Jalan (orang)	175.986	186.426	147.855	138.238	77.106
Rawat Darurat (orang)	22.557	21.011	18.287	22.843	13.966
NDR (‰)	30,76	30,55	40,28	36,48	45,32
GDR	76,02	62,93	77,05	74,03	91,70

Sumber : RSUD Gambiran Kota Kediri, 2020

Net Death Rate (NDR) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 45,32‰. Angka ini menjadi angka yang paling tinggi selama lima tahun terakhir. Sedangkan *Gross Death Rate* (GDR) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 91,70. Angka ini juga menjadi angka yang paling tinggi selama lima tahun terakhir. Yang artinya di Kota Kediri masih melebihi angka standar nasional.

c. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. **Indeks Infrastruktur**

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadi input atau masukan bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain. Untuk mengetahui kinerja bidang infrastruktur Pemerintah Kota Kediri menggunakan indikator indeks infrastruktur. Indeks infrastruktur dihitung dengan beberapa komponen penilaian, sebagai berikut:

- Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
- Penyediaan transportasi;
- Penyediaan infrastruktur air bersih;
- Penyediaan infrastruktur irigasi.

2. **Tingkat Pelayanan Jalan**

Tingkat pelayanan jalan adalah ukuran kinerja ruas jalan/simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, kepadatan dan hambatan yang terjadi. Tingkat pelayanan jalan dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas ruas jalan. Tingkat pelayanan jalan dikategorikan dari yang terbaik A sampai yang terburuk E, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- 0,01-0,7 Kategori A. Kondisi pelayanan sangat baik, dimana kendaraan bisa berjalan dengan lancar.
- 0,7-0,8 Kategori B. Kondisi pelayanan baik, dimana kendaraan bisa berjalan dengan lancar dengan sedikit hambatan.
- 0,8-0,9 Kategori C. Kondisi pelayanan cukup baik, dimana kendaraan berjalan dengan lancar tetapi adanya hambatan lalu lintas sudah lebih mengganggu.
- 0,9-1,0 Kategori D. Kondisi pelayanan kurang baik, dimana kendaraan berjalan dengan banyak hambatan.

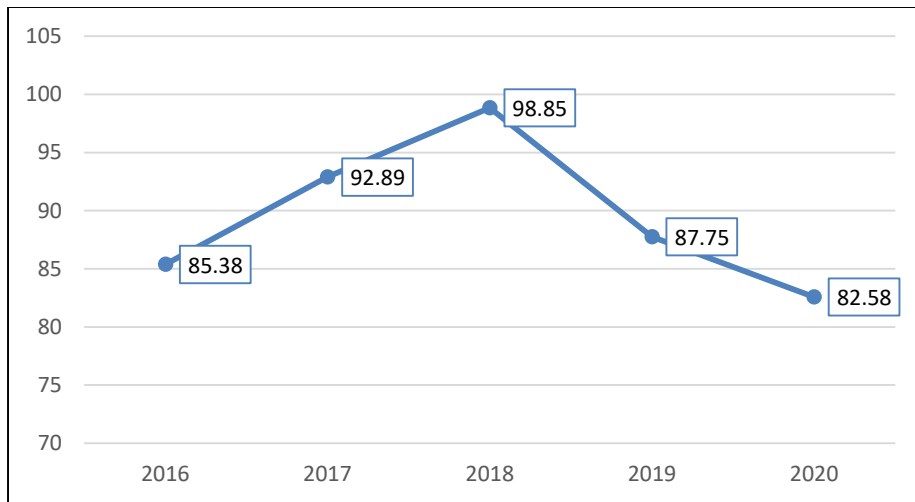
- >1,0 Kategori E. Kondisi pelayanan buruk, dimana kendaraan berjalan sangat lamban dan cenderung macet, banyak kendaraan berjalan pada bahu jalan.

Pemerintah Kota Kediri menggunakan indikator tingkat pelayanan jalan untuk mengukur kualitas layanan jalan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi sosial masyarakat.

3. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap mempunyai andil besar untuk mempermudah mobilitas perdagangan barang dan jasa, mobilitas penumpang, mobilitas sosial dan kemudahan akses terhadap sarana prasarana pelayanan umum. Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik akan memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan mobilitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi serta memperluas aksesibilitas pelayanan umum administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan dan sosial kemasyarakatan yang bermuara pada percepatan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Grafik 2.37 - Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2020

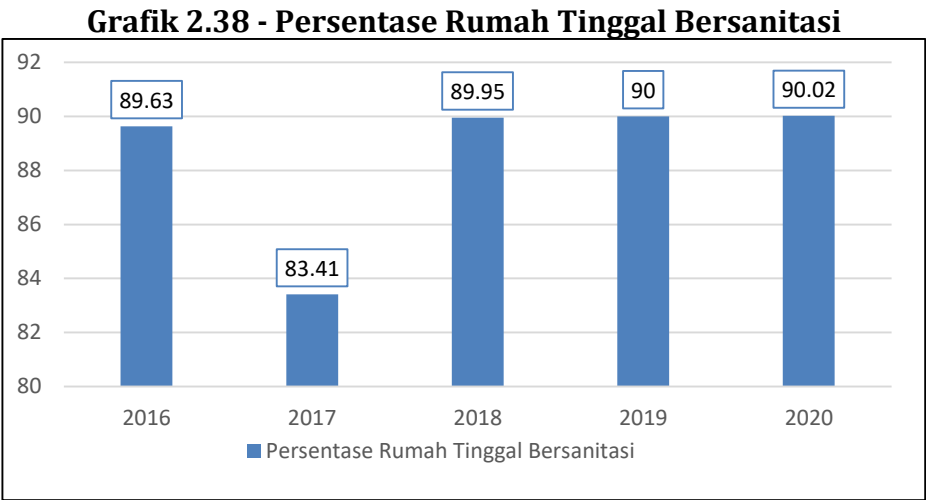
Panjang jalan kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/163/419.033/2021 adalah sepanjang 265,333 km. Sedangkan, panjang jalan dalam kondisi mantap di Kota Kediri mengalami fluktuasi dari 85,38% pada tahun 2016, naik menjadi 98,85% pada tahun 2018 dan menjadi 82,58% pada tahun 2020. Penurunan realisasi tahun 2020 disebabkan karena fokus Pemerintah Kota Kediri adalah untuk penanganan Covid-19, sehingga anggaran untuk jalan mengalami pengurangan. Secara bertahap panjang jalan kondisi baik akan terus ditingkatkan untuk menunjang tingginya aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Kediri.

4. Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik

Jembatan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan dan memelihara jembatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Proporsi jembatan dalam kondisi baik merupakan indikator baru sehingga data tersedia adalah tahun 2020, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh jembatan di Kota Kediri dalam kondisi baik. Pemerintah Kota Kediri akan terus meningkatkan kondisi jembatan agar dapat berfungsi secara optimal.

5. **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Indikator ini menggambarkan sejauh mana tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana sanitasi, diperoleh dengan mengukur jumlah rumah tinggal bersanitasi dibanding jumlah rumah tinggal di Kota Kediri.



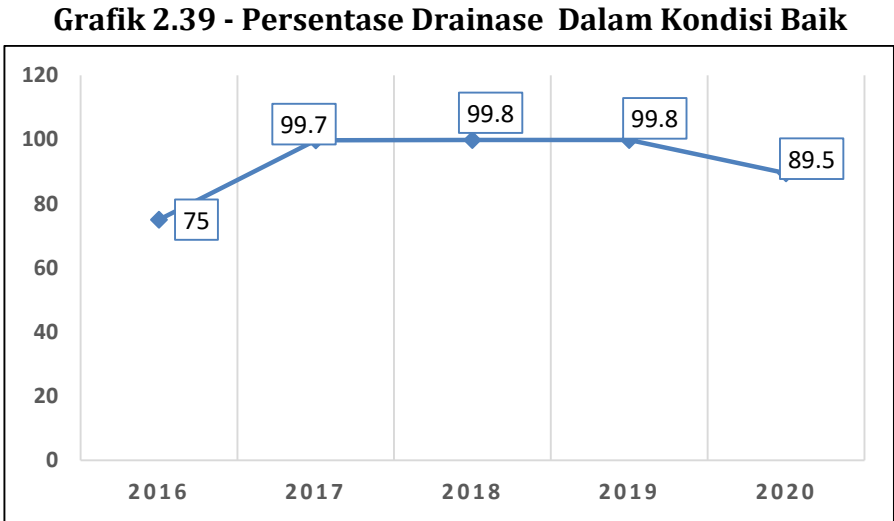
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Pada tahun 2020 jumlah rumah tinggal bersanitasi di Kota Kediri mencapai 91.860 unit dari keseluruhan rumah tangga di Kota Kediri mencapai 102.042 unit.

6. **Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Sistem drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang merupakan komponen penting dalam perencanaan kota khususnya perencanaan infrastruktur. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Indikator persentase drainase dalam kondisi baik ini menggambarkan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dibandingkan dengan seluruh panjang drainase. Data persentase drainase dalam kondisi baik yang terdapat pada grafik berikut :



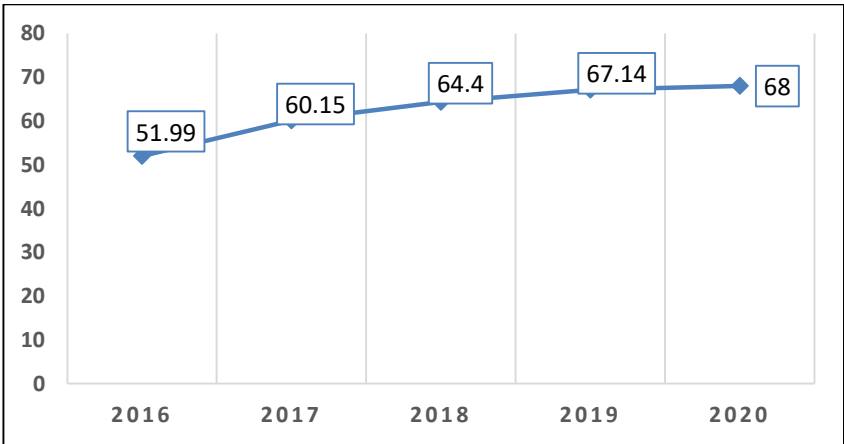
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2020

Secara umum, dengan kondisi drainase dan saluran pembuangan di Kota Kediri dapat berfungsi baik (89,5 %). Pemerintah Kota Kediri akan berfokus pada peningkatan persentase jaringan drainase terintegrasi.

7. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Indikator ini menggambarkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat dibandingkan dengan panjang jaringan irigasi. Data persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yang terdapat pada grafik berikut :

Grafik 2.40 - Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2020

Jaringan irigasi pada umumnya tersambung dengan badan sungai, sehingga pengelolaan jaringan irigasi tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan sungai. Kewenangan pengelolaan sungai dan bantarannya termasuk plengsengan/tanggul sebagian berada dalam kewenangan provinsi. Ada beberapa plengsengan yang rusak parah hingga menyebabkan erosi dan membahayakan masyarakat namun tidak dapat direhabilitasi karena merupakan kewenangan provinsi.

8. Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian. Rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan adalah panjang jaringan irigasi terbangun dibagi luas lahan baku sawah yang aktif. Rasio ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Realisasi rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan tahun 2020 sebesar 30% (513 Km/ 1.708 Km2).

9. Prasarana dan Sarana Sumber Air Baku Untuk Air Bersih

Kota Kediri memiliki 7 (tujuh) sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan prasarana sumberdaya air baku untuk air bersih, adalah :

- 1) Mata air Sendang Kembar di Kelurahan Gayam seluas 385 m²;
- 2) Mata air Jiput di Kelurahan Rejomulyo seluas 12.828 m²;
- 3) Mata air Sendang Ngembak seluas 1.795 m²;

- 4) Mata air Cakarsi di Kelurahan Tosaren seluas 11.955 m²;
- 5) Mata air Sumber Bulus di Kelurahan Tosaren;
- 6) Sumber Rempu di Kelurahan Betet seluas 3.990 m²; dan
- 7) Sumber Banteng Kelurahan Tosaren.

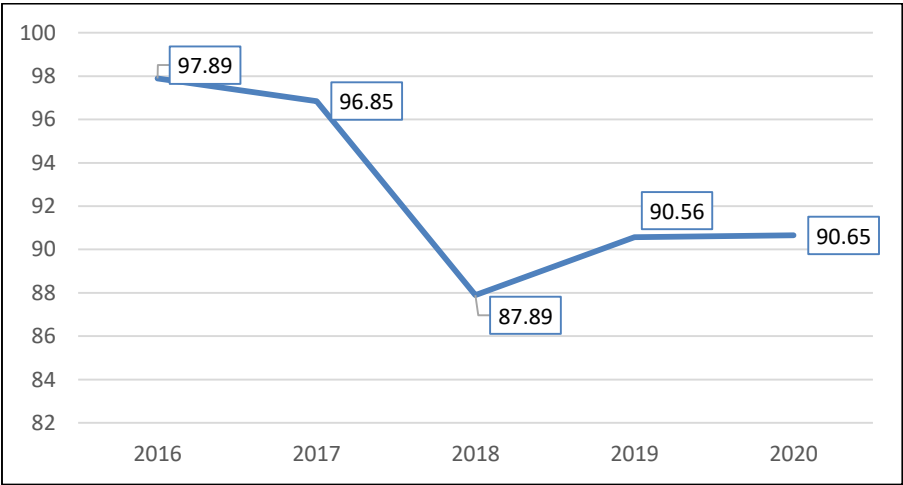
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber air tersebut perlu didukung peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air.

10. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

Kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Di Kota Kediri terdapat banyak potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air. Namun hingga tahun 2019, hanya Sumber Cakarsi yang telah direvitalisasi guna penyelamatan dan pengamanan mutu air baku di sumber tersebut. Sumber-sumber yang lainnya dalam kondisi yang tidak terkelola dengan maksimal sehingga tidak diketahui kualitas air dan jumlah debitnya, yang seringkali melimpah saat musim hujan dan mengering saat musim kemarau. Sumber-sumber air tersebut pun tidak lepas dari ancaman kerusakan lingkungan yang secara otomatis akan menurunkan kuantitas dan kualitas air di dalam sumber. Hal ini menyebabkan PDAM Kota Kediri selaku penyedia fasilitas jaringan air perpipaan bagi rumah tangga tidak dapat memanfaatkan potensi sumber air tersebut.

Pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat di Kota Kediri adalah melalui PDAM Kota Kediri, sumber air dan pengeboran air tanah. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemenuhan akses air bersih adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Kediri.

Grafik 2.41 - Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan



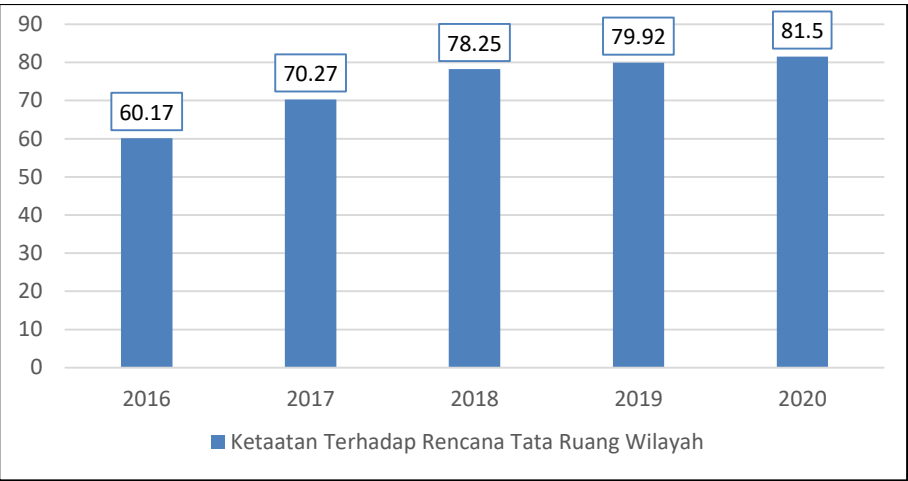
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2020

11. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Presentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap RTRW dengan membandingkan

jumlah pemanfaatan lahan yang sesuai RTRW berbanding dengan jumlah rencana pemanfaatan lahan dalam RTRW.

Grafik 2.42 - Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah



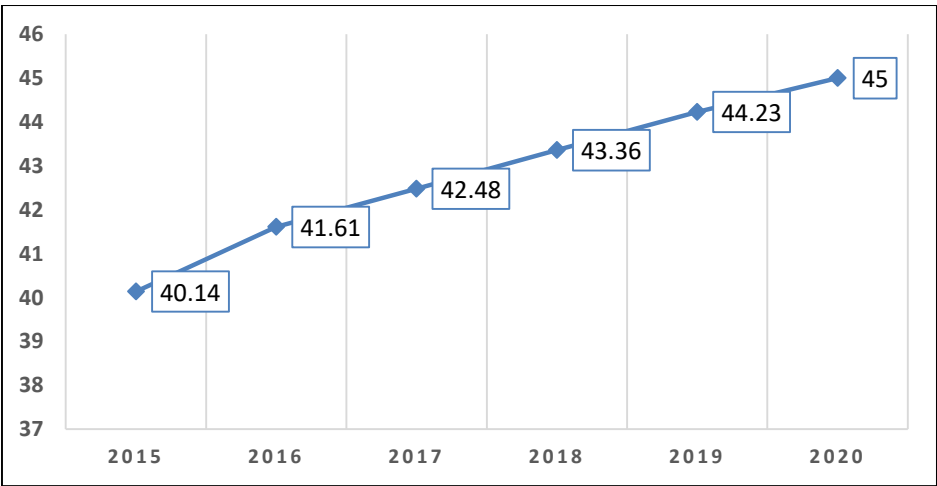
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2020

Ketataan terhadap tata ruang di Kota Kediri dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 79,92% menjadi 81,5%. Pada periode selanjutnya ketaatan terhadap tata ruang perlu ditingkatkan secara terus menerus.

12. Rasio Bangunan ber-IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) per Satuan Bangunan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana bangunan-bangunan di Kota Kediri memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada.

Grafik 2.43 - Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)



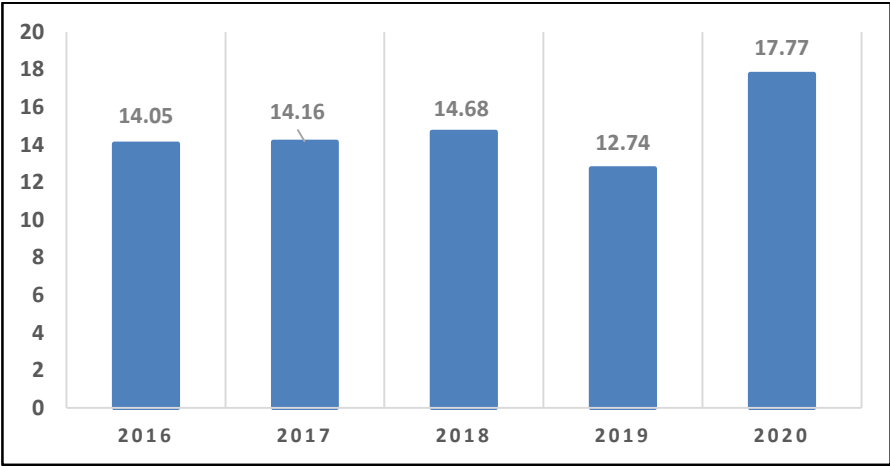
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Rasio bangunan ber-IMB di Kota Kediri pada tahun 2019 sebesar 44,23%. Sedangkan jumlah bangunan per-IMB pada tahun 2020 sebanyak 24.299 bangunan dari jumlah bangunan yang ada sebanyak 54.245 atau terealisasi sebesar 45%.

13.Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas trotoar bagi pejalan kaki di Kota Kediri. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah panjang trotoar dengan jumlah panjang jalan yang ada.

Grafik 2.44 - Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar (%)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2020

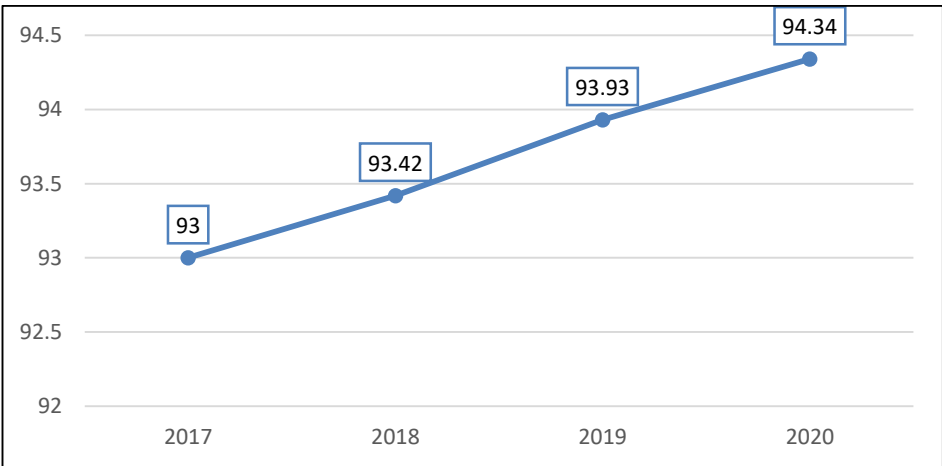
Panjang trotoar yang terbangun sampai tahun 2020 adalah sepanjang 47,161 km dari panjang jalan yang ada sepanjang 265,333 km atau sebesar 17,77%.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2017 jumlah rumah yang ada di Kota Kediri sebanyak 58.432 dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 54.310 atau 93%, sedangkan pada tahun 2018 jumlah rumah 58.432, rumah layak huni sejumlah 54.585, atau 93,42%. Pada tahun 2019 capaian realisasinya yang mengalami kenaikan sebesar 0,51% yaitu mencapai 93,93%. Sedangkan tahun 2020, jumlah rumah yang ada di Kota Kediri sebanyak 59.302 dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 55.946 atau 94,34%.

Grafik 2.45 - Rasio Rumah Layak Huni



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri, 2020

Rasio rumah layak huni perlu terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan dana APBD dan dukungan pendanaan dari transfer pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus.

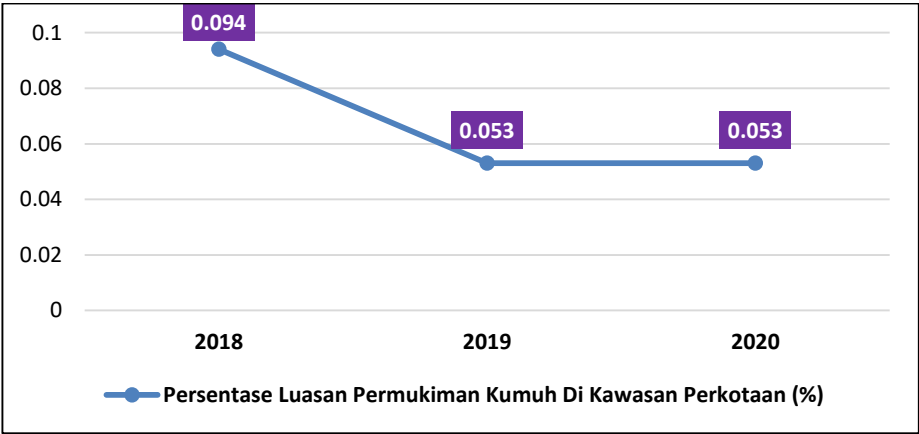
2. Persentase Pemukiman Yang Tertata

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Pemukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga pemukiman yang tertata akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk menghitung persentase permukiman yang tertata dilakukan dengan membandingkan perumahan yang ber-IMB dengan jumlah perumahan. Saat ini, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sedang dilakukan penyusunan *database* perumahan sebagai dasar untuk menghitung persentase permukiman yang tertata.

3. Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Pada Tahun 2018 luas pemukiman kumuh Kota Kediri seluas 595 Ha, sedangkan luas wilayah Kota Kediri 6.340 Ha, sehingga persentase lingkungan Pemukiman Kumuh adalah 0,094%. Selanjutnya, pada tahun 2019 perumahan kumuh turun menjadi 334Ha atau sebesar 0,053%.

Grafik 2.46 - Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri, 2020

Luas pemukiman kumuh Kota Kediri pada tahun 2020 adalah 106,16 Ha dan luas wilayah Kota Kediri 6.340 Ha, sehingga persentase lingkungan pemukiman kumuh adalah 0,053%.

4. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

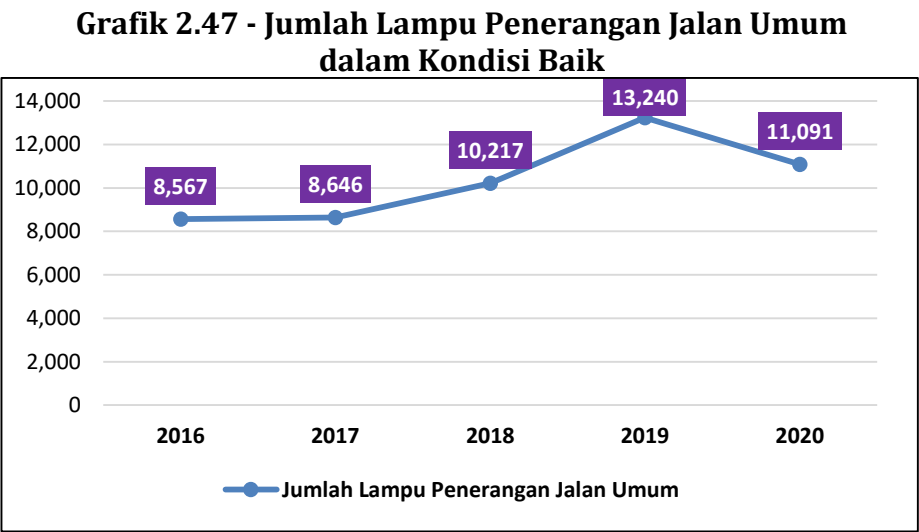
Lingkungan yang sehat dan aman merupakan pelayanan wajib dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman adalah cakupan lingkungan yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Kelengkapannya merujuk pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak yang Dibangun Oleh Pengembang. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Indikator ini merupakan indikator baru yang akan dihitung mulai tahun 2020 dengan menggunakan formula sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana umum (PSU) tahun 2020 terealisasi 80,00% melampaui target pada tahun 2020 yang sebesar 20,00% sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 400% dengan jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 1.512 dari 1.890 rumah.

5. Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik

Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Kota Kediri. Kebutuhan PJU disesuaikan dengan kelas-kelas jalan guna untuk menentukan daya lampu yang dibutuhkan. Jumlah lampu PJU yang terpasang di kota Kediri tahun 2017 (termasuk Prodamas) sebanyak 8.646 titik yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan. Sampai dengan tahun 2018 jumlah penerangan lampu jalan yang terpasang (termasuk Prodamas) sebanyak 10.217 titik. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah penerangan jalan umum sebanyak 11.091 titik. Hal tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut :



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri, 2020

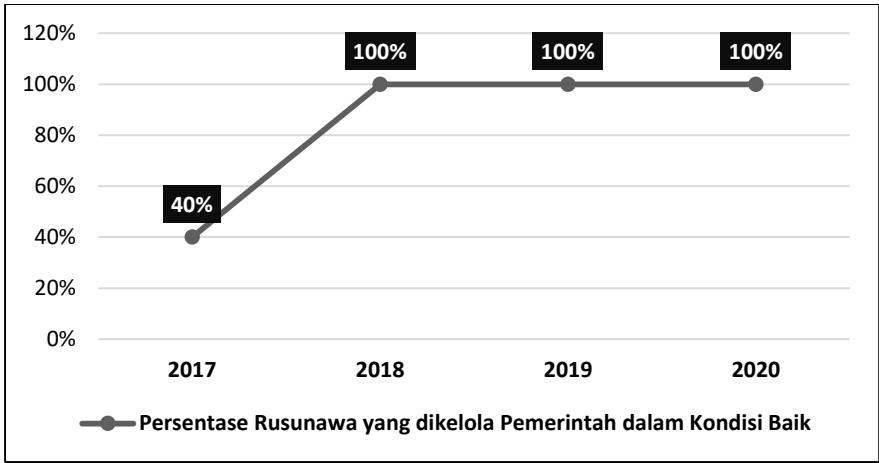
Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lampu penerangan jalan umum, maka ditetapkan indikator kinerja yang menunjukkan kualitas penerangan jalan umum, yaitu: rasio lampu penerangan jalan umum dalam kondisi baik. Pada tahun 2020 capaian rasio lampu penerangan jalan umum dalam kondisi baik sebesar 75%.

6. Persentase Jaringan Drainase Lingkungan Yang Berfungsi dengan Baik

Indikator ini menunjukkan kondisi drainase lingkungan kawasan permukiman yang berfungsi dengan baik. Formula indikator ini adalah panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang drainase lingkungan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik sebesar 89,77% dengan panjang drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik sepanjang 27.920 m dibanding jumlah keseluruhan yaitu sepanjang 31.100 m.

7. Persentase Rusunawa yang dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik
Rusunawa di Kota Kediri hingga saat ini sebanyak 8 unit, sejumlah 5 twin blok dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri sedangkan 3 unit dikelola oleh swasta. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Rusunawa, maka ditetapkan indikator persentase Rusunawa yang dikelola pemerintah dalam kondisi baik.

Grafik 2.48 - Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik



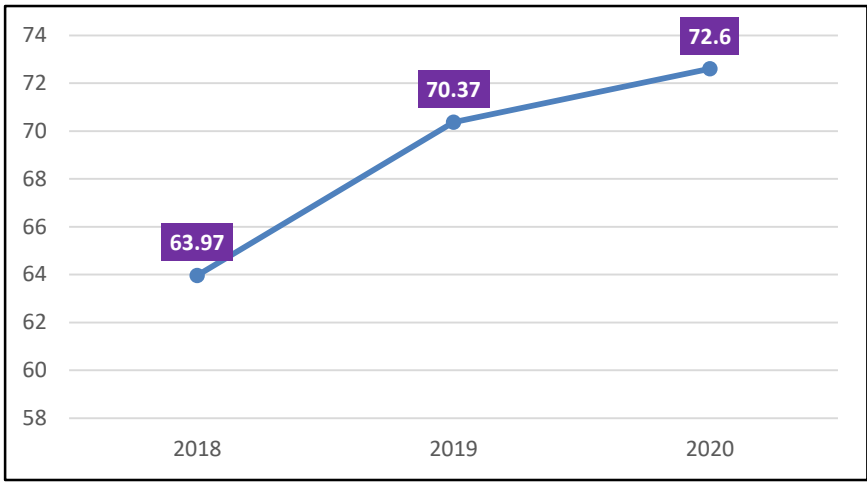
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri

Pada kurun waktu tahun 2014-2015 pembangunan 5 twin blok rusunawa masih berjalan dan belum terhuri. Sejumlah 2 unit twin blok atau 40% mulai terhuri dan dikelola Pemerintah Kota Kediri di tahun 2017, hingga akhir tahun 2020 sejumlah 5 twin blok telah terhuri seluruhnya atau 100% dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri. Rusunawa menjadi salah satu alternatif untuk penyediaan hunian yang murah, harga rumah yang tidak terjangkau bagi MBR menyebabkan *backlog*. Berdasarkan RP3KP Tahun 2019 jumlah backlog di Kota Kediri 13.114 unit.

8. Indeks Kota Layak Huni

Peningkatan jumlah penduduk beserta berbagai macam kebutuhannya bukan hanya menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan, tetapi juga menyebabkan terjadinya berbagai macam permasalahan lain. Permasalahan lain yang timbul adalah penurunan kualitas lingkungan dan permasalahan-permasalahan lain dalam lingkungan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Permasalahan lain yang tidak kalah penting akibat dari peningkatan jumlah penduduk beserta berbagai macam kebutuhannya adalah tidak efisiennya tata kelola perkotaan. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi tingkat layak huni Kota Kediri. Kota layak huni adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Indeks Kota Layak Huni diukur melalui penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Indeks Kota Kediri terus mengalami peningkatan sebagaimana tercermin pada grafik berikut.

Grafik 2.49 – Indeks Kota Layak Huni



Sumber : Barenlitbang Kota Kediri, 2020

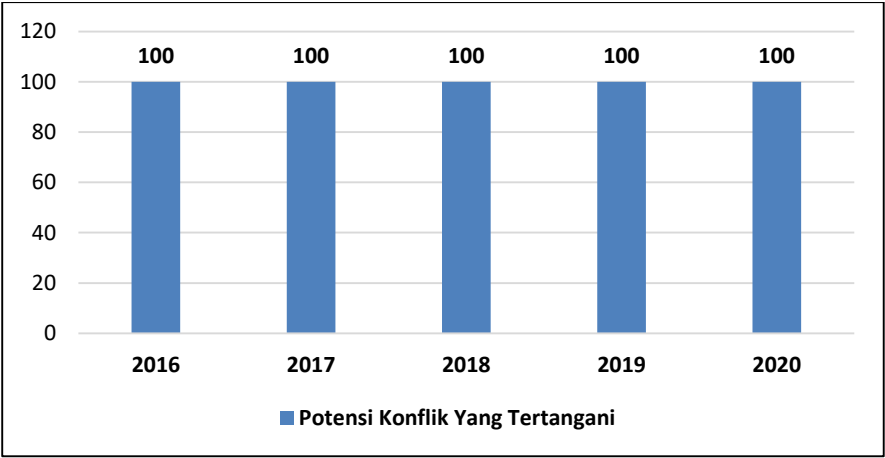
Peningkatan Indeks Kota Layak Huni di Kota Kediri merupakan hasil dari upaya peningkatan keamanan kota, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas taman kota, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan serta komponen lainnya.

e. **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

1. **Potensi Konflik Yang Tertangani**

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali sehingga dapat mengakibatkan potensi konflik. Indikator potensi konflik yang tertangani menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani potensi konflik. Potensi konflik yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 telah mencapai 100%

Grafik 2.50 - Potensi Konflik Yang Tertangani (%)



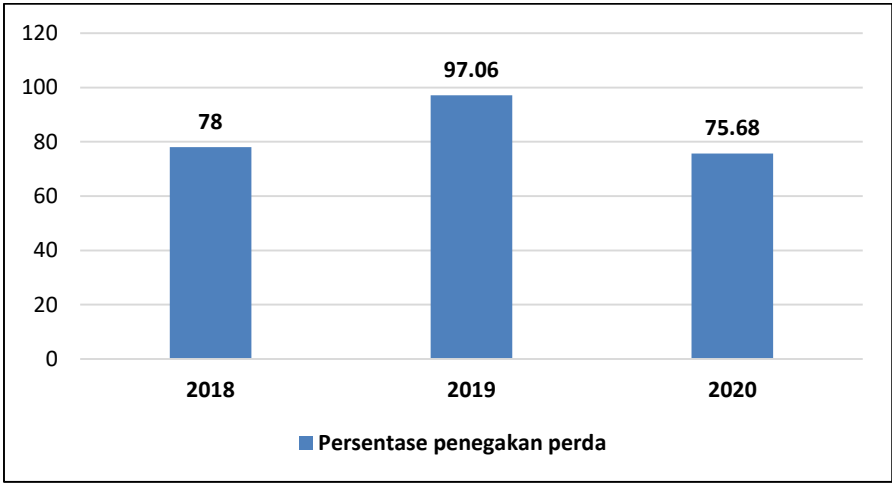
Sumber : Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri, 2020

Untuk mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan koordinasi yang intensif antar forum komunikasi pimpinan daerah dengan organisasi kemasyarakatan serta meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kota Kediri.

2. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Persentase penegakan perda dihitung dari Jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda dikali seratus persen. Indikator ini bertujuan menghitung jumlah kasus pelanggaran perda yang berhasil terselesaikan sesuai prosedur yang berlaku dalam satu tahun. Tahun 2018 terdapat 65 kasus pelanggaran Perda dan terselesaikan sebanyak 47 kasus. Belum terselesaikan 18 kasus akan diselesaikan pada awal tahun 2019, dari 138 kasus pelanggaran perda sebanyak 132 kasus telah terselesaikan. Namun pada tahun 2020 persentase penegakan perda menurun menjadi 75,68%.

Grafik 2.51 - Persentase Penegakan Peraturan Daerah



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 2020

Sementara itu, tingkat pelayanan warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan dan perkada tahun 2020 sebesar 100%.

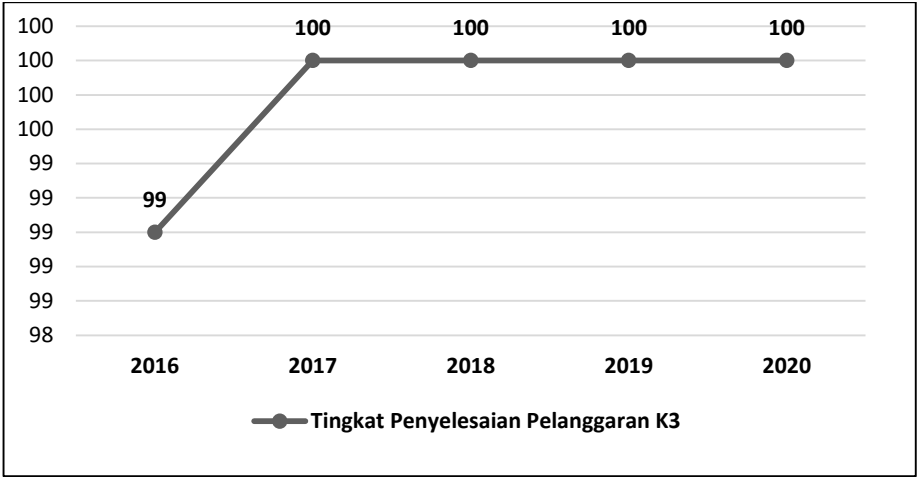
3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)

Tingkat penyelesaian K3 dihitung dengan membandingkan pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali seratus persen. Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Kediri tahun 2020 mencapai 100%.

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kasus pelanggaran dan gangguan ketentraman, ketertiban, serta keindahan di Kota Kediri.

Gangguan Ketentraman misalnya adanya gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang seringkali meresahkan masyarakat. Gangguan ketertiban misalnya pengusaha yang mengoperasikan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, adanya ruang terbuka hijau yang semakin menambah peluang maraknya pelanggaran ketertiban. Gangguan keindahan misalnya pemasangan reklame yang tidak sesuai aturan penempatan dan perizinannya sehingga mengurangi keindahan kota.

Grafik 2.52 - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

4. **Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dihitung dengan Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 20 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali seratus persen.

Pada tahun 2019, UPT Pemadam Kebakaran melakukan penanganan kedaruratan atau kebakaran sebanyak 122 kali dari 46 kasus penanganan kebakaran dan 16 kasus penanganan kedaruratan lainnya pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Kediri ditambah 60 kasus yang terjadi di luar WMK dengan kemampuan *response time* 100%. Sedangkan pada tahun 2020, UPT Pemadam Kebakaran melakukan penanganan kedaruratan atau kebakaran sebanyak 26 kali dari 27 kasus penanganan kebakaran dengan kemampuan *response time* 96,30%. Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2020 sebesar 96,30%.

5. ***Response Time* Penanganan Bencana**

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *Respons Time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kejadian bencana diterima oleh Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), pengiriman Tim Reaksi Cepat, sampai pada penanganan darurat bencana dilakukan. Berdasarkan data kejadian bencana di Kota Kediri, pada Tahun 2020 rata-rata waktu penanganan bencana adalah 15 menit.

6. **Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indeks ketahanan daerah terhadap bencana. Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Kota Kediri sebesar 0,62. Pengukuran indeks ketahanan daerah terhadap bencana berpedoman pada 7 prioritas, yaitu:

- 1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
- 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
- 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik;
- 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
- 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- 6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
- 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Terkait dengan indeks ketahanan bencana di Kota Kediri, capaian SPM tahun 2020 untuk pelayanan informasi rawan bencana adalah 100% karena telah terlayannya untuk informasi rawan bencana dalam buku kajian resiko bencana Kota Kediri Tahun 2020. Sedangkan, capaian SPM Tahun 2020 untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah 100% karena telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana serta mitigasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. Diantaranya, Sosialisasi sekolah aman bencana kepada seluruh SMA/SMK sederajat di Kota Kediri, simulasi kebencanaan pada beberapa instansi pemerintah di Kota Kediri serta pelaksanaan Siaga Bencana pada beberapa Kelurahan di Kota Kediri.

Sementara itu, capaian SPM tahun 2020 untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 100%, dimana untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah tertangani semua dengan baik. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan penyelamatan dan evakuasi akibat terjadinya bencana hidrometeorologi berupa hujan lebat disertai angin kencang yang mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk di Kota Kediri.

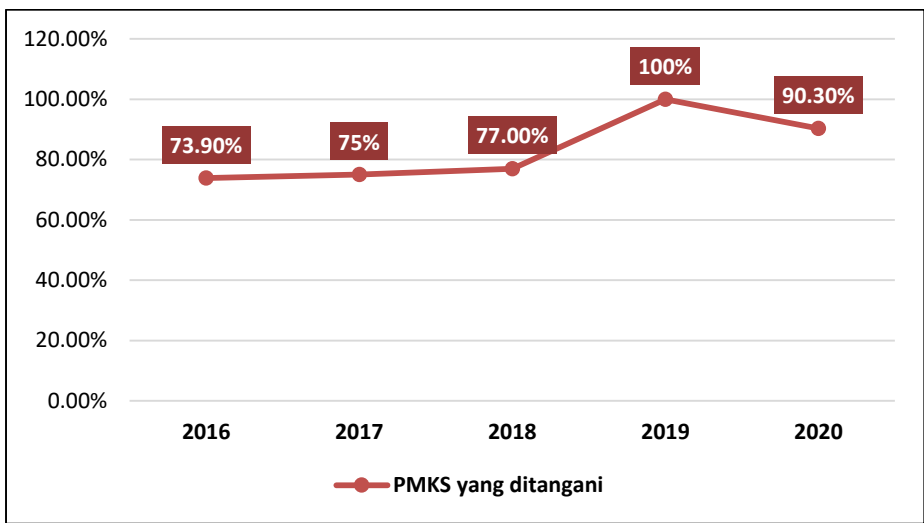
Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan penanganan dan pemulihan dampak bencana pandemi covid-19 (corona) melalui 3 aspek, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Penanganan dampak kesehatan melalui peningkatan kapasitas layanan kesehatan, penyelenggaraan pemakaman korban covid-19, pengendalian penyebaran covid-19 melalui patroli keamanan dan ketertiban, pengadaan sarana prasarana pola hidup sehat, dan penyediaan ruang observasi/isolasi. Penanganan dampak ekonomi dilaksanakan melalui promosi produk usaha mikro secara virtual, kegiatan padat karya, dan memberikan keringanan pajak daerah bagi pelaku usaha. Sedangkan jaring pengaman sosial dilaksanakan penyediaan bantuan sosial dasar bagi warga terdampak covid-19.

f. Urusan Sosial

Sasaran Pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu, seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara

mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS yang ditangani di Kota Kediri tahun 2016-2020 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.53 - PMKS yang Ditangani



Sumber : Dinas Sosial Kota Kediri, 2020

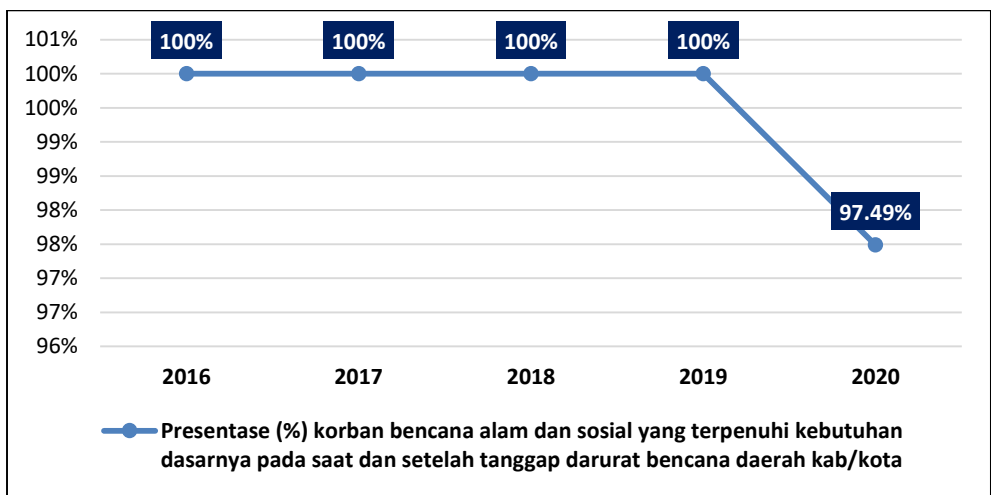
Pemerintah Kota Kediri telah melakukan berbagai pembinaan terhadap PMKS, diantaranya adalah memberi pelatihan kewirausahaan pada PMKS, pemberian layanan bagi anak terlantar di panti sosial, memberi pelatihan keterampilan kepada anak jalanan, bantuan sosial uang tunai bagi orang dengan kecacatan berat, pengiriman dan pemberian bantuan peralatan sekolah kepada petirah, rehabilitasi sosial, pemberian santunan kematian kepada masyarakat tidak mampu, penyaluran Program Keluarga Harapan, santunan kepada anak yatim, pemberian jaminan hidup bagi lansia terlantar (Aslut), pemberian bantuan pangan non tunai.

Pemerintah Kota Kediri telah memberikan bantuan kepada PMKS selama tahun 2016 sampai 2020 dengan jumlah secara berturut-turut 3.491 orang (2016), 4.700 org (2017), 4.577 orang (2018), 4.502 orang (2019) dan 5.169 orang (2020).

Pada tahun 2020, jumlah anak terlantar di Kota Kediri sebanyak 29 jiwa, keseluruhannya telah mendapatkan penanganan/pembinaan dari pemerintah Kota Kediri atau terealisasi sebesar 100%. Sedangkan jumlah penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensial yang ada di Kota Kediri sebanyak 35 orang, dan mayoritas telah menerima jaminan sosial dari pemerintah Kota Kediri. atau terealisasi sebesar 91,43%.

Sementara itu dalam penanganan bencana, Pemerintah Kota Kediri memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat. Di setiap bencana yang terjadi, Pemerintah Kota Kediri selalu hadir dan mencukupi kebutuhan dasar bagi korban. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Kediri dalam kurun waktu 5 tahun disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.54 - Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota



Sumber : Dinas Sosial Kota Kediri, 2020

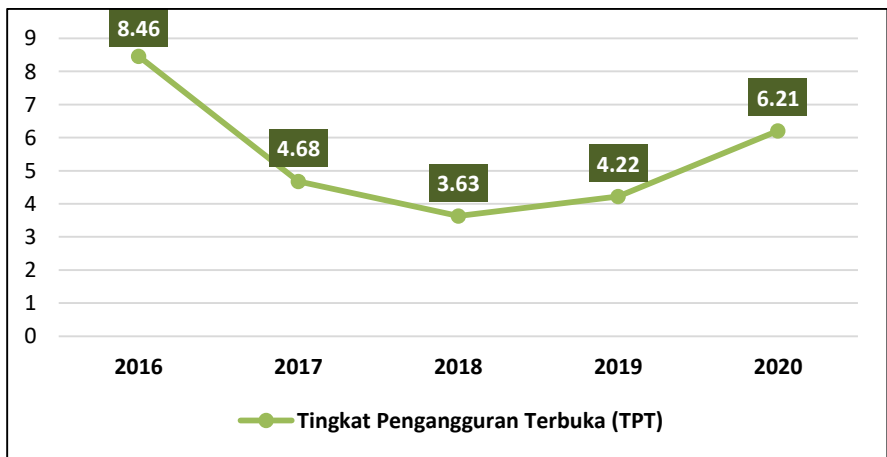
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Kediri tahun 2016-2019 telah mencapai 100%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 97,49%.

g. Urusan Tenaga Kerja

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran pada 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) tidak menyediakan data ketenagakerjaan untuk tingkat Kabupaten/Kota, sehingga data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Kediri tahun 2016 dianggap sama dengan nilai tahun 2015, yaitu sebesar 8,46 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sebesar 4,68. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Kota Kediri sebesar 3,63 persen, mengalami penurunan 1,05 persen dari tahun 2017. Namun, pada tahun 2019 dari 145.802 angkatan kerja di Kota Kediri terdapat 6.157 yang menganggur, atau TPT-nya sebesar 4,22%. Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga TPT di Kota Kediri mengalami lonjakan menjadi 6,21%.

Grafik 2.55 - Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020



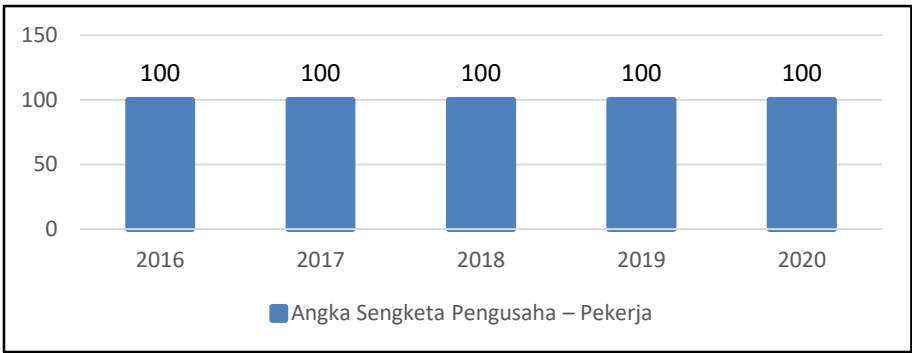
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Kediri tahun 2020 sebesar 66,00%. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian

2. Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ini yaitu dengan membandingkan jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun dengan jumlah perselisihan pengusaha-pekerja yang masuk per tahun.

Grafik 2.56- Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, 2020

Perselisihan pengusaha-pekerja pada tahun 2016-2020 setiap tahun selalu dapat terselesaikan dengan baik atau 100%.

h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk melaksanakan pembangunan berwawasan gender salah satunya dengan meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak dan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Untuk menangani permasalahan perempuan dan anak Pemerintah Kota Kediri membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di 46 Kelurahan serta Satgas Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan Seksual pada Anak (GM AKSA) di tingkat kota. Satgas PPA Kota Kediri dikukuhkan langsung oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yambise pada 15 Agustus 2016 dan menjadi role model Satgas di tingkat nasional. Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi dan melakukan advokasi terhadap permasalahan perempuan dan anak secara optimal, baik oleh Satgas PPA di tingkat Kelurahan, pendampingan oleh Rumah Kemitraan yang tersebar di 3 Kecamatan Kota Kediri, rumah aman maupun melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Kota.

Tabel 2.23 - Kinerja Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kediri Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Predikat Kota Layak Anak	Tidak ada penilaian	Pratama	Madya	Madya	Madya
2.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu	Tidak ada penilaian (Indikator Baru)	Tidak ada penilaian (Indikator Baru)	100%	100%	100%
3	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu	Tidak ada penilaian (Indikator Baru)	Tidak ada penilaian (Indikator Baru)	100%	100%	100%
4.	Rasio KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
5.	PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kediri, 2020

Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu merupakan indikator baru yang dipergunakan dalam periode tahun 2020-2024 dengan target awal pada tahun 2020 sebesar 82,50%.

Mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ada sejumlah 80 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi perempuan dan anak dan telah ditangani oleh petugas terlatih sejumlah 80 kasus (100%). Pada tahun 2019, terdapat 13 kasus KDRT dan telah tertangani 100%. Demikian juga tahun 2020 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu sebesar 100% dengan rincian jumlah perempuan sebanyak 13 orang dan anak sebanyak 27 orang.

Sedangkan jumlah PKK yang ada di Kota Kediri pada Tahun 2020 sebanyak 3.353 kelompok dan semuanya aktif.

i. **Urusan Pangan**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

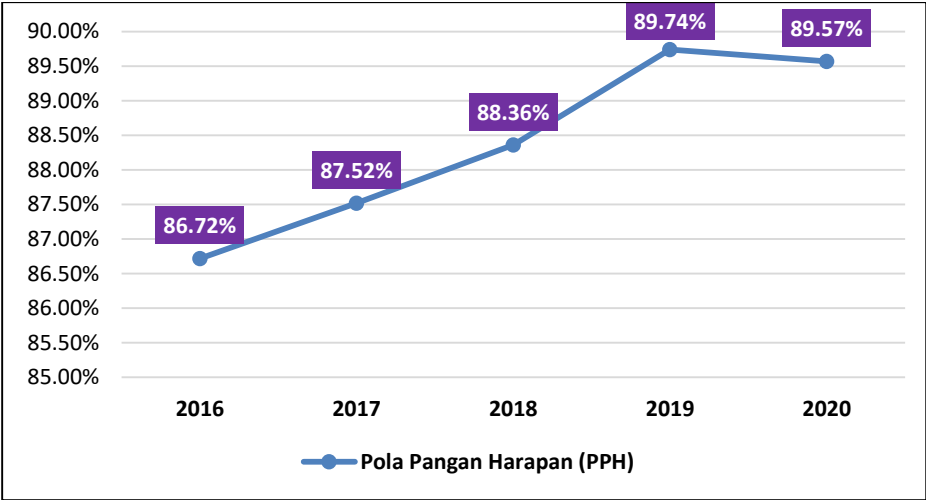
Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk melaksanakan urusan ketahanan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri dengan tolak ukur sebagai berikut :

1. **Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietary score*) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Tujuan PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi

kebutuhan gizi penduduk, sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), serta kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Skor Pola Pangan Harapan selama 5 tahun terakhir tersaji pada grafik berikut :

**Grafik 2.57 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kota Kediri Tahun 2016-2020**



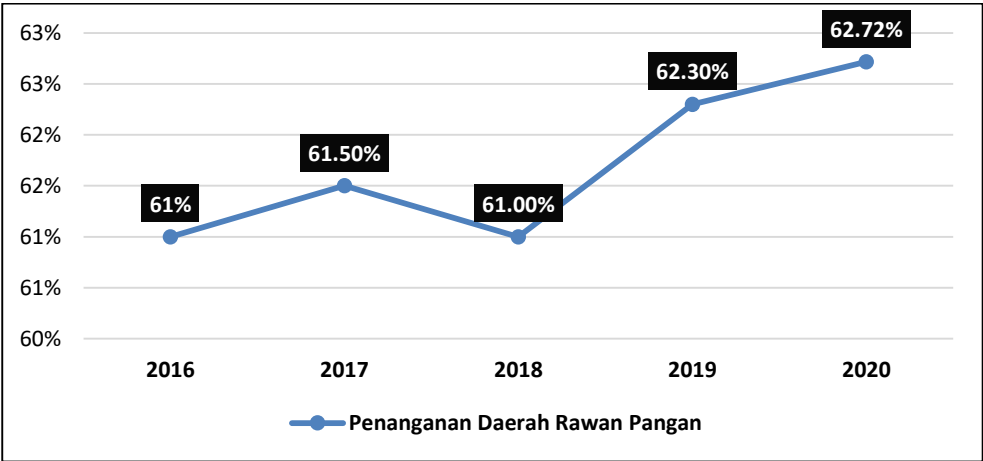
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2020

Pada Tahun 2020 Skor Pola Pangan Harapan sebesar 89,57%. Dalam rangka memenuhi informasi tentang pangan, Pemerintah Kota Kediri melakukan survei setiap hari dari 30 sumber data di pasar, hasil survei dikirim ke Provinsi Jawa Timur dan dipublikasikan lewat media.

2. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Berdasarkan data hasil analisis peta rawan pangan 2016, ada empat kelurahan yang tergolong rawan pangan yaitu Semampir, Bandar Lor, Jamsaren, dan Tamanan.

Grafik 2.58 - Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 dilakukan penanganan daerah rawan pangan untuk kelurahan Semampir, Bandar Lor, Tamanan, dan Jamsaren melalui kegiatan Pelatihan

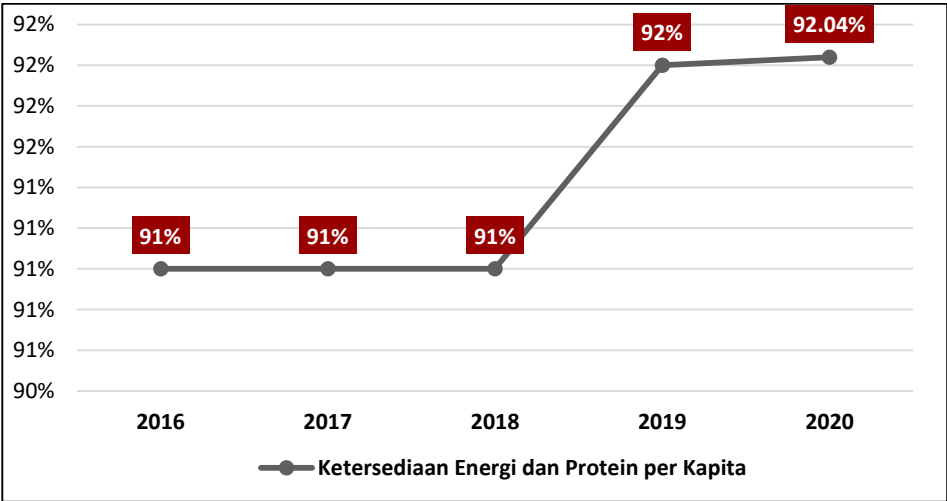
Pengolahan Pangan. Berarti 4 lokasi di Kota Kediri yang termasuk lokasi rawan pangan telah tertangani. Meskipun Kota Kediri merupakan wilayah perkotaan, namun Pemerintah Kota Kediri mendukung upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah Kota Kediri telah menyusun Rencana Aksi Daerah-Pangan dan Gizi sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

3. **Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita**

Ketersediaan energi dan protein perkapita perhari merupakan parameter dari kemampuan pemerintah dalam penyediaan pangan dari hasil produksi dalam daerah, pemasokan pangan dan pengelolaan cadangan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Untuk mengetahui persentase ketersediaan energi dan protein dilakukan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).

Hasil dari analisis Neraca Bahan Makanan yang bersumber dari pemantauan secara periodik dan kontinyu pengumpulan data stok ketersediaan pangan di wilayah kota Kediri, menunjukkan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2688 kkal/kap/hari, sedangkan standar nasional AKE adalah 2400 kkal/kap/hari. Persentase AKE Kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 112%. Begitu pula untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) diperoleh hasil yang lebih tinggi yaitu 77,3 gr/kap/hari dibanding standar AKP nasional sebesar 63 gr/kap/hari. Persentase AKP kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 119%. Realisasi tahun 2019 untuk persentase angka ketersediaan Energi dan protein adalah sebesar 92%. Pada tahun 2020, persentase AKP Kota Kediri sebesar 92,04%. Target ketersediaan energi dan protein perkapita pada tahun 2020 yaitu 92% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Grafik 2.59 - Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Kota Kediri Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2020

Tolok ukur keberhasilan indikator ini ditempuh dengan menjaga dan meningkatkan kualitas alur distribusi pangan agar distribusi pangan (keluar

masuk) wilayah Kota Kediri terjaga stok ketersediaannya serta meningkatkan produksi pangan domestik baik pangan konvensional maupun pangan olahan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Kediri dengan tidak menimbulkan kekurangan pangan ataupun gejolak sosial yang berarti. Adapun faktor pendorong antara lain :

- a) Penyusunan Data Base potensi Produksi Pangan;
- b) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
- c) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

j. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kualitas lingkungan menjadi parameter bagi kualitas kehidupan masyarakat. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pemerintah menetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indeks kinerja Pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Selain ketiga komponen tersebut, dalam melaksanakan kewenangan urusan lingkungan hidup, Kota Kediri juga menggunakan indikator luasan RTH Publik dan timbunan sampah yang dikelola. Adapun penjelasan setiap indikator adalah sebagai berikut:

1. Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari RTH Publik sebesar 20 % dan RTH Privat sebesar 10 %. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) % yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) % yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Luas Kota Kediri sebesar 6.340 Ha, sedangkan berdasarkan UU RI No 26 Tahun 2007 dan Permen

PU RI No. 05/PRT/M/2008, maka Luas RTH Publik yang harus tersedia adalah 20 (dua puluh) % dari wilayah kota dikurangi luas Kawasan lindung, maka luas RTH Publik yang harus tersedia adalah sebesar 20 % dari 6.154,04 Ha sehingga luas RTH Publik sebesar 1.230,81 Ha.

Luas RTH Publik yang ada di Kota Kediri dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai mana tabel berikut :

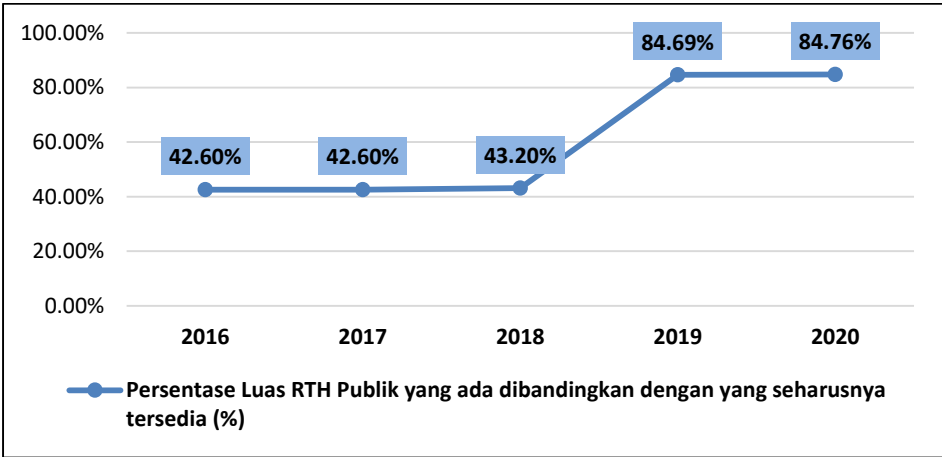
Tabel 2.24 – Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas RTH Publik (Ha)	524,32	524,32	531,70	1.041,77	1.043,27
2.	Luas RTH Publik yang seharusnya = 20 % dari Luas Kota (Ha)	1.230,81	1.23081	1.230,81	1.230,81	1.230,81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

Luas RTH publik di Kota Kediri dari tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 luas RTH di Kota Kediri adalah 1.043,27 ha. Jika dibandingkan dengan luas RTH publik yang seharusnya ada yaitu 1.230,81 ha, maka persentase yang diperoleh sebesar 84,76%.

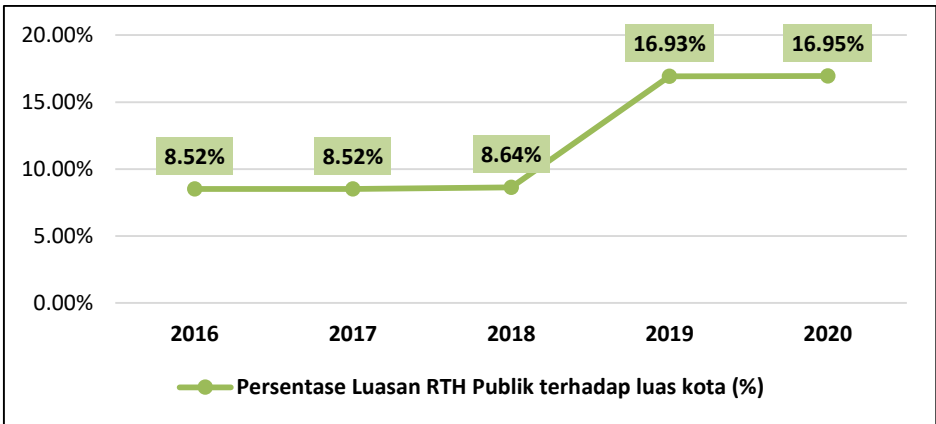
Grafik 2.60 – Persentase Luas RTH Publik yang Ada di Kota Kediri Dibandingkan Dengan yang Seharusnya Tersedia



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

Sementara persentase luas RTH Publik di Kota Kediri terhadap luas kota dari tahun ke tahun dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 2.61 – Persentase Luasan RTH Publik di Kota Kediri Terhadap Luas Kota (%)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020, luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kediri seluas

1.043,27 hektar, dengan luas wilayah kota 6.340 hektar dan luas kawasan lindung seluas 185,96 hektar. Sehingga persentase luasan RTH dari luas Kota Kediri adalah 16,95%.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : (1) Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian indikator yang digunakan untuk perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

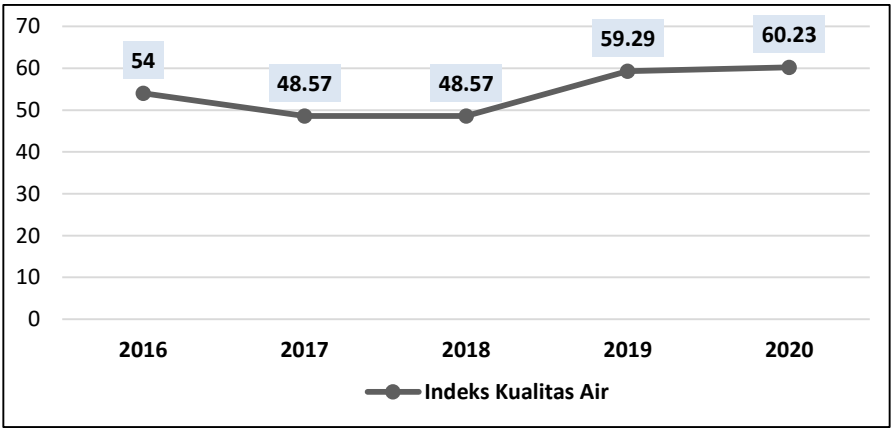
a) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Pemantauan kualitas air dilakukan pada sungai utama dengan 7 parameter (TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Coliform). Pemantauan kualitas air sungai dilakukan paling sedikit 4 kali setahun pada tiga lokasi. Pengukuran indeks kualitas air berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Kategori indeks kualitas air sebagai berikut :

- 1) Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$;
- 2) Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$;
- 3) Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$;
- 4) Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$.

Hasil pengukuran indeks kualitas air dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.62 - Indeks Kualitas Air



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

Indeks Kualitas Air sejak tahun 2016-2018 menunjukkan tren yang menurun karena masih tingginya tingkat pencemaran dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Namun, Pemerintah Kota Kediri terus melakukan upaya menjaga dan meningkatkan kualitas air dengan menegakkan aturan-aturan pengendalian lingkungan kepada pelaku

usaha dan masyarakat sehingga terjadi kenaikan indeks kualitas air pada tahun 2019 dan 2020. Semakin bertambahnya jumlah dan aktivitas masyarakat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan air. Kebutuhan pemenuhan air di Kota Kediri sebagian besar dipenuhi dari air tanah yang berasal dari pengeboran, walau pun juga masih ada sebagian kecil yang memanfaatkan air permukaan dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan kualitas air di Kota Kediri masih cukup bagus. Indeks kualitas air diukur dengan cara membandingkan antara jumlah sampel air sungai yang tercemar dengan jumlah sampel yang diambil. Pengambilan sampel dilakukan di sungai-sungai di wilayah Kota Kediri. Untuk pengambilan sampel di tahun 2020, dilakukan pengambilan titik sampel air sungai sebanyak 43 (empat puluh tiga) titik sampel. Dari 43 (empat puluh tiga) titik air sungai yang diuji disimpulkan bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) sampel memenuhi baku mutu, sebanyak 9 (sembilan) sampel tercemar ringan, sebanyak 6 (enam) sampel tercemar sedang dan untuk yang tercemar berat nihil (0) sampel. Target capaian kinerja tingkat pencemaran air sungai di tahun 2020 dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 63,30% dengan realisasi kinerja di tahun 2020 sebesar 60,23% maka capaian kinerja mencapai 95,15%.

b) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Indeks kualitas udara merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NO_x). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Pengukuran indeks kualitas udara berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Kategori indeks kualitas air sebagai berikut :

1) 0 – 51 (Baik)

Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

2) 51 – 101 (Sedang)

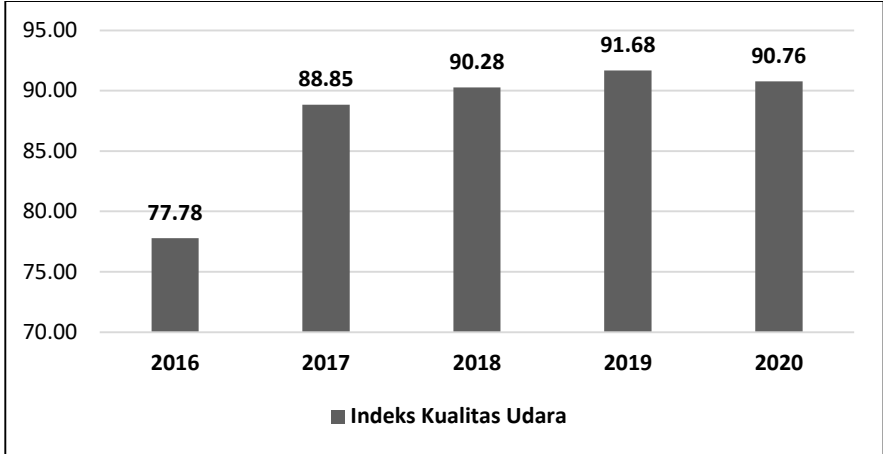
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.

3) 101 – 199 (Tidak Sehat)

Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Hasil pengukuran indeks kualitas udara dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.63 - Indeks Kualitas Udara



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

Udara yang berkualitas menentukan kesehatan manusia, sedangkan pencemaran udara dapat terjadi dari adanya aktivitas industri, listrik maupun mobilitas kegiatan masyarakat. Untuk memastikan kualitas udara di Kota Kediri memenuhi baku mutu, selama tahun 2020 telah dilakukan uji sampling udara sebanyak 15 (lima belas) titik di berbagai wilayah Kota Kediri. Seluruh sampling menunjukkan bahwa udara di wilayah Kota Kediri masih memenuhi baku mutu. Selanjutnya, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari kadar Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) dalam udara. Semakin kecil kadar SO₂ dan NO₂ maka akan semakin tinggi nilai IKU di suatu daerah. Berdasarkan RPJMD tahun 2020-2024 telah ditetapkan target nilai IKU pada tahun 2020 sebesar 91,50%. Sedangkan hasil pengujian terhadap kandungan NO₂ dan SO₂ menunjukkan hasil 90,76% dengan capaian kinerja sebesar 99,19%.

c) **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indeks kualitas tutupan lahan dihitung menggunakan formula :

IKTL : $100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times (50/54,3)]$

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TH : Tutupan Hutan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

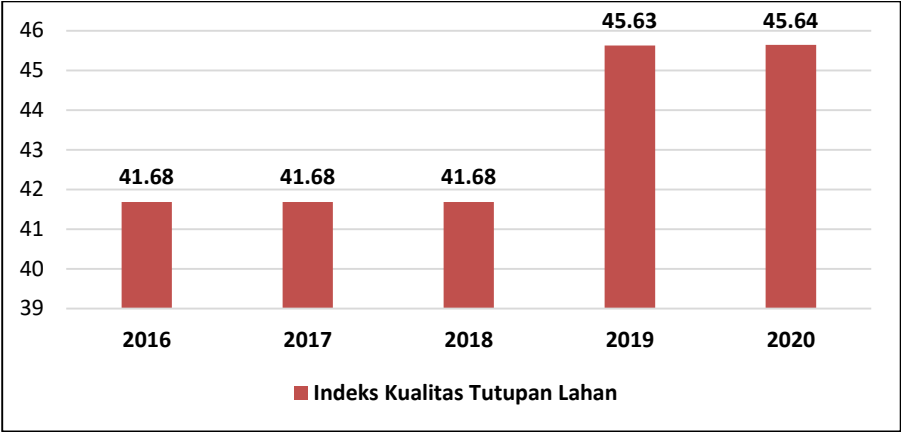
- 1) Nilai maksimum IKTL > 114.46
- 2) Nilai IKTL=100 pada saat %TL = 84.3%
- 3) Nilai minimum IKTL = 22.38

Data penutupan lahan yang digunakan merupakan hasil interpretasi Landsat liputan tahun sebelumnya. Persentase perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah administrasi kota, yaitu tutupan hutan yang meliputi klasifikasi penutupan lahan :

- 1) Hutan lahan kering primer dan sekunder;
- 2) Hutan mangrove primer dan sekunder;
- 3) Hutan rawa primer dan sekunder;
- 4) Hutan tanaman.

Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.64 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan

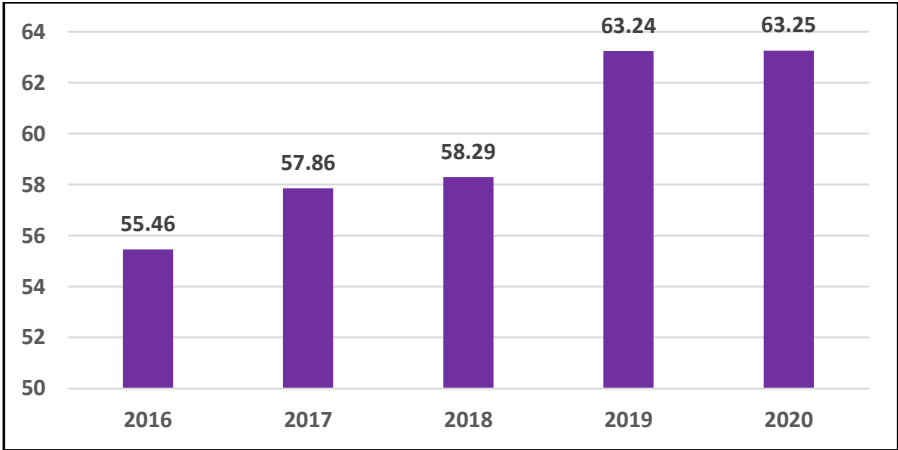


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

Indeks kualitas tutupan lahan di Kota Kediri meningkat secara signifikan berkat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019, di mana dengan ditetapkan sebagai LP2B maka lahan sawah dapat dianggap sebagai sabuk hijau kota. Target tutupan lahan tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 41,90% sedangkan realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 45,64%. Dengan realisasi tersebut, maka capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah sebesar 108,93 % atau dapat dikatakan BERHASIL. Sedangkan bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 45,63%, mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

Berdasarkan data capaian ketiga indikator di atas, maka dapat diperoleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kediri pada grafik berikut :

Grafik 2.65 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kediri



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2020

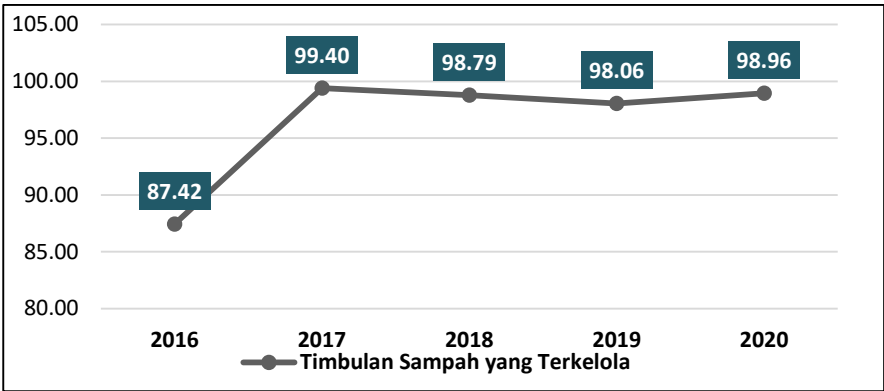
Dari data grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri dari tahun 2015 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 50,51 hingga mencapai nilai 63,24 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kediri meningkat menjadi 63,25.

3. Timbulan Sampah yang Terkelola

Indikator ini menunjukkan total timbulan sampah yang dikelola dibandingkan dengan jumlah total timbulan sampah. Timbulan sampah di Kota Kediri tahun 2020 sudah mencapai 98,96% yang terkelola.

Kinerja pengelolaan timbulan sampah di Kota Kediri dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.66 - Timbulan Sampah yang Terkelola



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2020

Dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, indikator persentase capaian layanan persampahan dihitung dengan membandingkan luas area yang terlayani pengelolaan persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Kediri. Sementara itu, target penanganan sampah tahun 2020 adalah sebesar 98,80%. Pada tahun 2020 jumlah volume sampah yang ditangani seluruh Kota Kediri sebesar 137.240 m3, sedangkan volume produksi sampah Kota Kediri sebesar 138.678,32 m3/tahun sehingga kinerja penanganan persampahan tercapai sebesar 98,96 %. Dalam rangka menampung volume sampah tersebut, Kota Kediri memiliki TPA seluas 4,2 ha dan TPS seluas 5.036 m² serta TPST seluas 4.600 m². Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga melakukan pengecekan secara berkala terhadap limbah industri di Kota Kediri. Sedangkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pengelolaannya masih melibatkan pihak swasta. Faktor-faktor pendukung tercapainya kinerja sebesar 100,16% adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sarana prasarana angkutan persampahan pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mengadakan pembelian sarana dan prasarana pengangkutan sampah yaitu 1 (satu) unit Dump Truck melalui sumber dana alokasi umum (DAU)
2. Jumlah sarana pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri tahun sebanyak 47 (Empat Puluh enam) TPS/TPST dan TPA, yang diharapkan mampu menampung dan mengelola sampah di Kota Kediri sampai akhir tahun 2023. Pada tahun 2020 ada penambahan pembangunan prasarana pengelolaan persampahan baru yaitu : 1 (satu) unit TPS di Kelurahan Manisrenggo dan 1 (satu) unit TPST 3R Kelurahan Blabak sehingga jumlah TPS/ TPST seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh sembilan).

3. Selama tahun 2020 juga dilaksanakan rehabilitasi tempat penampungan sementara (TPS) dan TPST 3R melalui program pemulihan ekonomi masyarakat/ kegiatan padat karya dengan lokasi sebagai berikut :
- 1) Rehabilitasi TPS Pajang

2) Rehabilitasi TPS Balowerti

3) Rehabilitasi TPS Setonobetek

4) Rehabilitasi TPS Semampir

5) Rehabilitasi TPS 3R Ngronggo

6) Rehabilitasi TPS Ngronggo

7) Rehabilitasi TPS 3R Kaliombo

8) Rehabilitasi TPS 3R Bajaran

9) Rehabilitasi TPS Banjaran

10) Rehabilitasi TPS P.Polim

11) Rehabilitasi TPS 3R Rejomulyo

12) Rehabilitasi TPS Mrican

13) Rehabilitasi TPS Mrican Baru

14) Rehabilitasi TPS Muning

15) Rehabilitasi TPS Bandar

16. Rehabilitasi TPS Bangsal

17. Rehabilitasi TPS Mojoroto

18. Rehabilitasi TPS Wilis

19. Rehabilitasi TPS Gayam

20. Rehabilitasi TPS Tamanan

21. Rehabilitasi TPS 3R Tempurejo

22. Rehabilitasi TPS Tosaren

23. Rehabilitasi TPS Pesantren

24. Rehabilitasi TPS Pasar pahing

25. Rehabilitasi TPS Ketami

26. Rehabilitasi TPS Centong Bawang

27. Rehabilitasi TPS Burengan

28. Rehabilitasi TPS Bawang

29. Rehabilitasi TPA Klotok Kota Kediri

k. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu masalah yang perlu dicermati dan diperhatikan untuk mewujudkan sistem *good governance* adalah masalah demografi (kependudukan). Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25 - Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	91,00	98,46	98,47	99,18	98,35
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	92,88	96,00	99,15	99,08	99,11
3.	% Kepemilikan KK	82,00	94,30	96,01	96,19	97,19
4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	49,79	51,69	54,48	98,37	98,52
5.	Cakupan kepemilikan KIA	0	54,90	75,18	76,35	77,47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, 2020

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Kediri telah mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi, serta penggunaan Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi) berbasis web sejak tahun 2016. Aplikasi SAKTI berfungsi sebagai media pelayanan kepada masyarakat dengan sistem informasi yang mempermudah dalam pengurusan administrasi kependudukan secara online. Aplikasi ini dapat diakses melalui dispendukcapil.kedirikota.go.id/sakti sehingga memudahkan pengajuan pembuatan dokumen kependudukan bagi warga Kota Kediri, karena memungkinkan pendaftaran dan upload dokumen persyaratan pengajuan oleh warga, dan dapat melihat validasi/persetujuan pengajuan dokumen yang diajukan secara *online*.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Kediri adalah 292.262 jiwa dengan penduduk yang wajib memiliki KTP sebesar 212.722 jiwa, sedangkan yang telah ber-KTP sebanyak 211.171 jiwa (98,35%). Selain itu, penduduk kota kediri yang telah memiliki akte kelahiran sebesar 99,11% per 1.000 penduduk.

Pemerintah Kota Kediri merupakan satu dari 50 Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai *final project* dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2020 sebanyak 60.072 anak atau 77,47% telah memiliki Kartu Identitas Anak dari keseluruhan anak yang wajib KIA di Kota Kediri sebanyak 77.540 anak. Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri sebagai salah satu *pilot project* KIA dikarenakan tercapainya cakupan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran sesuai target Nasional.

Pemerintah Kota Kediri memberikan inovasi pelayanan administrasi kependudukan SEMAR (Sedino Mari) khusus untuk pelayanan pencatatan perkawinan; pelayanan Jemput Bola pelayanan KTP-el kepada masyarakat melalui *Home visite* bagi penduduk Difabel,sakit keras dan lanjut usia; GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekaman KTP-el di seluruh Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan ke Sekolah GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekaman KTP-el di seluruh Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan ke Sekolah; Pelayanan 3 in 1 antara lain pelayanan untuk KK, Akte Kelahiran, KIA dan untuk KK, KTP-el, Akte Kelahiran; DRIVE THRU Pelayanan untuk penerbitan KTP-e yang rusak dan hilang tanpa merubah elemen data; dan PETA SIWA Pelayanan pendaftaran untuk Akta Catatan Sipil system WA (WhatsApp).

I. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Pembangunan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian fasilitasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui indikator Persentase Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi Persentase Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26 – Persentase Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat	80%	80%	100%	16,67%

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2020

Persentase Fasilitasi Program Pemberdayaaan Masyarakat dihitung dengan membandingkan jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan dengan jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2019, indikator kinerja Persentase Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat ditargetkan sebesar 90%. Realisasi indikator ini pada tahun 2019 sebesar 100%. Namun, akibat pandemi Covid-19 dilakukan refokusing anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Plus sehingga realisasi Persentase Fasilitasi Program Pemberdayaan

Masyarakat sebesar 16,67%. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga banyak kelompok masyarakat yang terbina dan berpartisipasi dalam pembangunan.

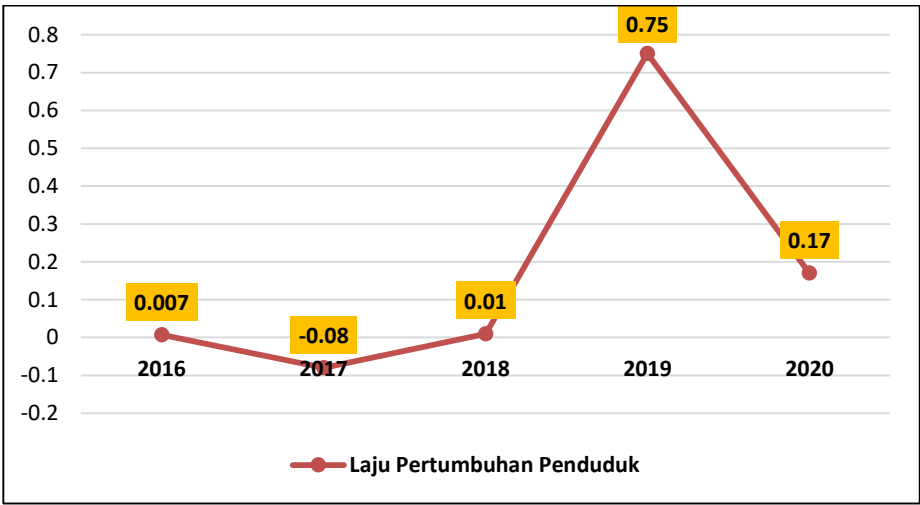
m. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan selisih jumlah penduduk 2 (dua) tahun terakhir dengan jumlah penduduk tahun awal.

Jumlah penduduk tahun 2020 menurun menjadi 292.262 jiwa, sedangkan tahun 2019 sebanyak 294.950 jiwa. Sehingga selisih jumlah penduduk Kota Kediri selama 1 (satu) tahun terakhir adalah 2.688 jiwa.

Grafik 2.67 - Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kediri, 2020

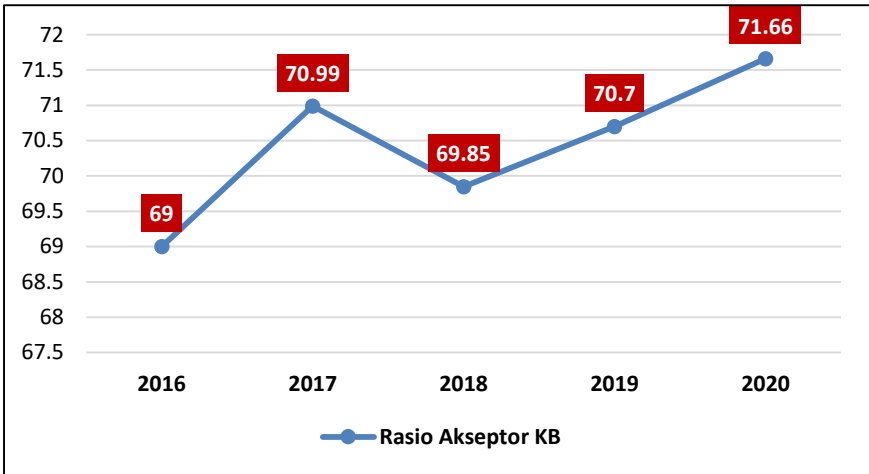
Berdasarkan data tersebut laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri tahun 2020 adalah 0,17%. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan karena perpindahan penduduk dan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian.

2. Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kota Kediri.

Rasio Akseptor KB pada tahun 2020 sebesar 71,66%, yaitu sebanyak 32.050 peserta KB aktif dari keseluruhan PUS sebanyak 44.723 pasangan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,96%. Perkembangan Rasio Akseptor KB selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik 2.68 - Rasio Akseptor KB



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kediri, 2020

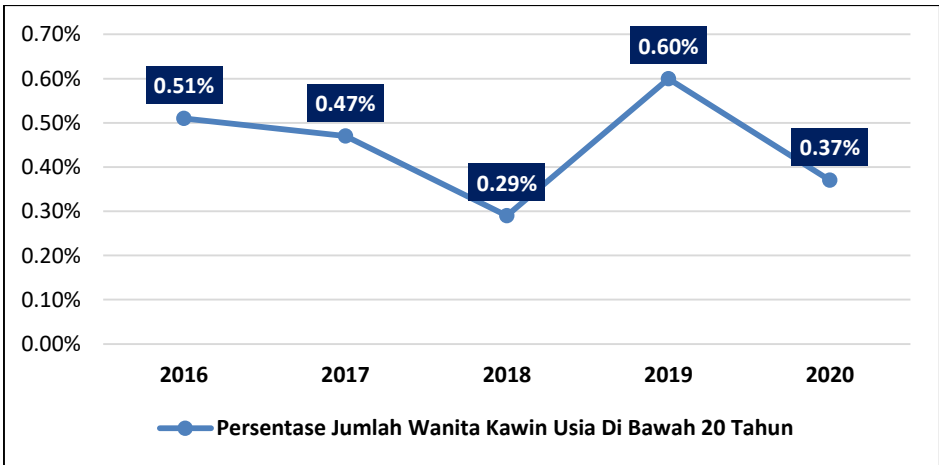
Pemerintah Kota Kediri berupaya meningkatkan cakupan peserta KB aktif diantaranya melalui advokasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber-KB serta meningkatkan pelayanan melalui KB gratis program Safari KB IUD, konseling oleh tenaga kesehatan dan penyediaan kebutuhan peralatan KB yang semakin lengkap. Pada tahun 2020 *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Kediri sebesar 1,44, *Modern Contraceptive Rate* (mCPR) sebesar 71,67%, *unmet need* KB 10,56% dan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) sebesar 5.

Dalam bidang pengendalian penduduk inovasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diinisiasi dengan menggaungkan kembali program KB melalui pengembangan Kampung KB dengan sinergitas mitra lintas sektor yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat melalui penguatan 8 fungsi keluarga untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

3. Persentase Jumlah Wanita Kawin Usia Dibawah 20 Tahun

Pada tahun 2019, dari jumlah Pasangan Usia Subur sebesar 44.110 ada wanita kawin usia muda (20 tahun) sejumlah 268 atau 0,60%. Trend lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.69 - Persentase Jumlah Wanita Kawin Usia Di Bawah 20 Tahun



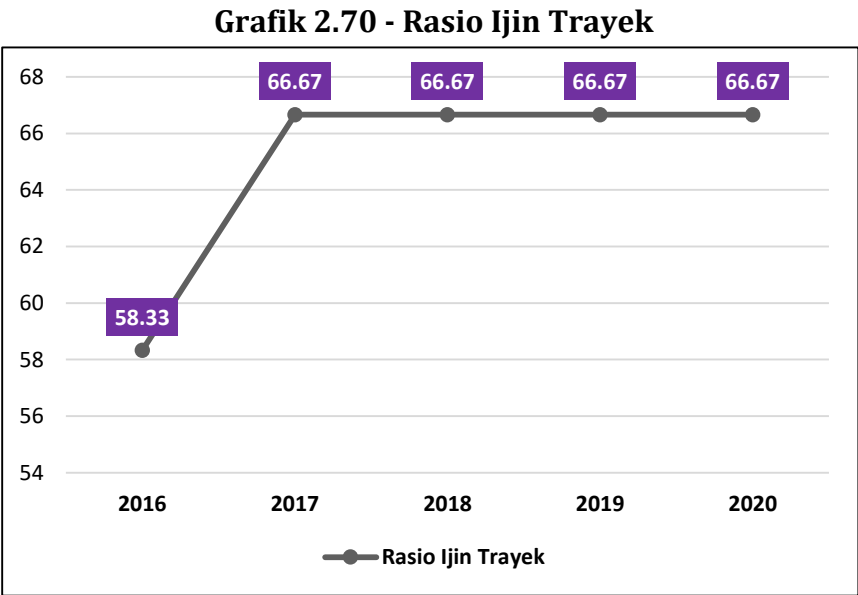
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kediri, 2020

Pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 166 atau 0,37 % dari PUS sejumlah 44.721 pasangan.

n. **Urusan Perhubungan**

1. **Rasio Ijin Trayek**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas angkutan umum perkotaan di Kota Kediri, diperoleh dengan perhitungan jumlah rute trayek angkutan kota yang tersedia dibandingkan dengan jumlah rute trayek angkutan kota yang dibutuhkan.



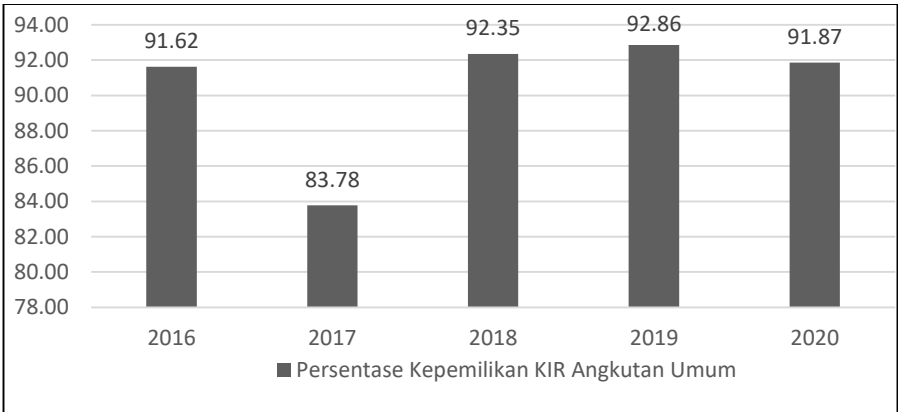
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2021

Pada tahun 2018 rasio ijin trayek ditargetkan sebesar 58,54, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 66,67%. Trend dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan Rasio Ijin Trayek, disebabkan oleh beroperasinya kembali Lyn D yang telah mati suri beberapa tahun. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak ada peningkatan ijin trayek. Jumlah jin trayek yang tersedia pada tahun 2020 sebanyak 8 ijin dari 12 ijin trayek yang dibutuhkan atau terealisasi sebesar 66,67%. Sedangkan target yang telah ditetapkan adalah sebesar 68% sehingga capaian kinerja sebesar 98,04%.

2. **Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Angkutan Umum yang Memiliki KIR dibandingkan dengan Jumlah Angkutan Umum.
Perkembangan kepemilikan KIR angkutan umum selama lima tahun terakhir, sebagai berikut :

Grafik 2.71 - Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum



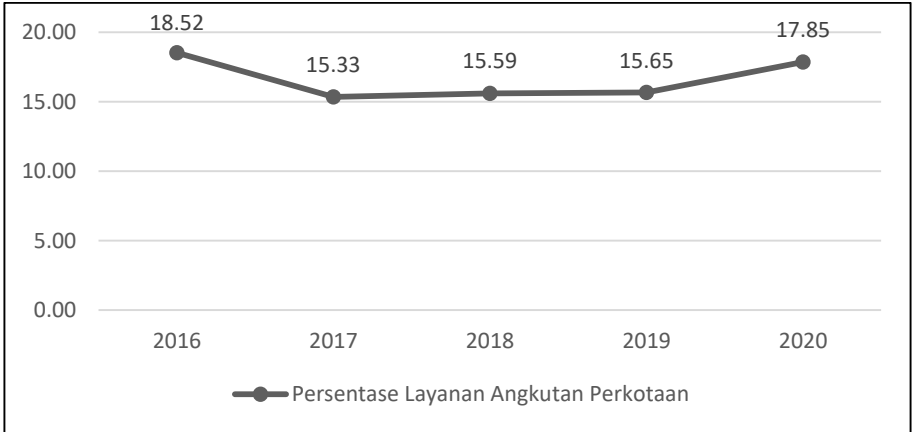
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2018 realisasi persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum adalah 92,35%, sedangkan pada tahun 2017 adalah 83,78%. Perubahan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah angkutan umum yang mati uji sebanyak 26 kendaraan dan bertambahnya 11 kendaraan angkutan umum. Pada tahun 2019 realisasi persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum adalah 92,86%. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi 91,87% perubahan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah angkutan umum yang memiliki KIR sebanyak 192 dari total 209 kendaraan umum.

3. Persentase Layanan Angkutan Perkotaan

Kebutuhan akan angkutan perkotaan di Kota Kediri, terutama di kalangan pelajar cukup tinggi. Adanya angkutan khusus pelajar diharapkan dapat menekan kasus kecelakaan yang melibatkan pengendara di bawah umur. Kota Kediri telah menyediakan bus sekolah yang kehadirannya disambut antusias oleh masyarakat. Layanan angkutan perkotaan publik pada dasarnya sangat dibutuhkan karena peningkatan kemacetan di beberapa titik persimpangan di Kota Kediri. Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat ketersediaan layanan angkutan perkotaan adalah persentase layanan angkutan perkotaan. Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Penumpang Angkutan Umum Perkotaan dibanding dengan Kapasitas Kendaraan Angkutan Umum Perkotaan (*load factor*). Perkembangan layanan angkutan perkotaan selama lima tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut

Grafik 2.72 - Persentase Layanan Angkutan Perkotaan



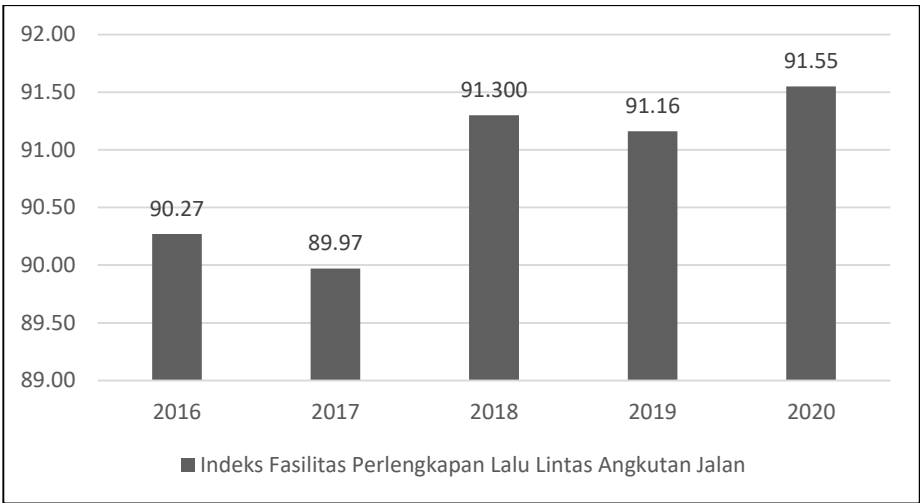
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2020

Adapun capaian indikator ini masih sangat rendah. Pada tahun 2019 realisasi Layanan Angkutan Perkotaan adalah 15,65%, sedangkan pada tahun 2018 adalah 15,59%. Dan pada tahun 2020 realisasi Layanan Angkutan Perkotaan adalah 17,85%. Rendahnya capaian indikator menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kediri masih kurang berminat menggunakan sarana angkutan umum perkotaan yang tersedia.

4. Indeks Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di Kota Kediri masih cukup rendah. Berdasarkan hasil operasi kepatuhan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kediri Kota pada tahun 2017 tercatat 26.786 pelanggaran lalu lintas. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebanyak 12.496 pelanggaran. Jenis pelanggaran lalu lintas yang paling dominan yang terjadi di Kota Kediri adalah kelengkapan surat-surat pengemudi dan kendaraan bermotor, yaitu sebanyak 11.485 pelanggar. Sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan kesadaran tertib lalu lintas, yaitu kepatuhan terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas menjadi yang tertinggi kedua setelah kelengkapan surat-surat, yaitu sebanyak 9.963 pelanggaran. Sedangkan kejadian kecelakaan di Kota Kediri pada tahun 2017 adalah sebanyak 363 kejadian. Dalam rangka meningkatkan keamanan dalam berlalu lintas, maka sangat diperlukan adanya rambu-rambu dan perlengkapan lalu lintas yang memadai. Indeks fasilitas Perlengkapan LLAJ digunakan untuk menggambarkan capaian realisasi jumlah rambu-rambu, marka jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpasang di Kota Kediri dibandingkan dengan kebutuhan yang ditargetkan. Perkembangan Indeks Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) selama lima tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut:

**Grafik 2.73 - Indeks Fasilitas Perlengkapan
Lalu Lintas Angkutan Jalan**



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2019 Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ sebesar 91,16%. Tahun 2020, Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ meningkat menjadi sebesar 91,55%.

o. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Kemajuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang berperan memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait berita, permasalahan dan informasi yang membangun mendorong munculnya globalisasi dalam berbagai perspektif yang ada. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi baik media cetak seperti surat kabar maupun media elektronik seperti radio, TV Lokal maupun kepemilikan *website*.

Tabel 2.27 - Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	6	6	9	32	48
2.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5-4	6-5	5-5	7-13	7-14
3.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2020

Selain ketiga indikator di atas, terdapat indikator baru yang dipergunakan mulai tahun 2019, yaitu *Level Smart City* yang merupakan indikator yang baru dipergunakan sejak tahun 2019. Indikator ini digunakan untuk mendukung program Pemerintah Pusat, yaitu “Gerakan menuju 100 *Smart City*”, yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. *Smart city* didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumberdaya manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumberdaya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Adanya konsep *smart city* ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini akan terpenuhi apabila kota tersebut sudah mampu untuk mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan menggunakan sistem terintegrasi serta memiliki infrastruktur dasar yang terpenuhi seperti air, listrik, sanitasi limbah, keamanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan, baik pemerintahan maupun masyarakat dan transportasi yang efisien sehingga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

Perwujudan *smart city* ditopang oleh enam pilar, yaitu *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Dalam pelaksanaannya, penerapan *Smart City* terbagi menjadi 6 tingkatan atau level, yaitu :

- 1) Level 0, merupakan level awal dari pengimplementasian konsep Smart City, level ini ditandai dengan masih kota biasa namun terdapat potensi menjadi Smart City.
- 2) Level 1, merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi *Smart City*, ditandai dengan tersedia internet secara menyeluruh di wilayah kota.
- 3) Level 2, merupakan tahap kelanjutan dari level pertama, dimana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya.
- 4) Level 3, merupakan level *open information*, dimana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara *online*.

- 5) Level 4, merupakan level yang telah memiliki proses pengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya.
- 6) Level 5, merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level 2,3 dan 4.

Berdasarkan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) Tahun 2020, level *smart city* Kota Kediri adalah level 2,87 dari target tahun 2020 yaitu 3 sehingga capaian kinerja tahun 2020 sebesar 96%.

1. Persentase Aplikasi e-Gov yang Terintegrasi

Dalam pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi, salah satu hal terpenting adalah tersajikannya data dan informasi yang konkuren dalam berbagai aplikasi, layanan, secara real time dan akurat. Secara teknis hal tersebut bisa dilakukan melalui integrasi data dan informasi.

Kedepannya untuk mendukung integrasi data dan informasi seluruh aplikasi layanan, khususnya layanan publik di kota kediri seyogyanya dapat dibangun peta integrasi (*masterplan integrasi*) sebagai acuan standart pentahapan yang dibutuhkan. Saat ini aplikasi e-gov yang terintegrasi sebanyak 29 dari aplikasi 96 yang dimiliki, atau 30,21%.

2. Persentase Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti

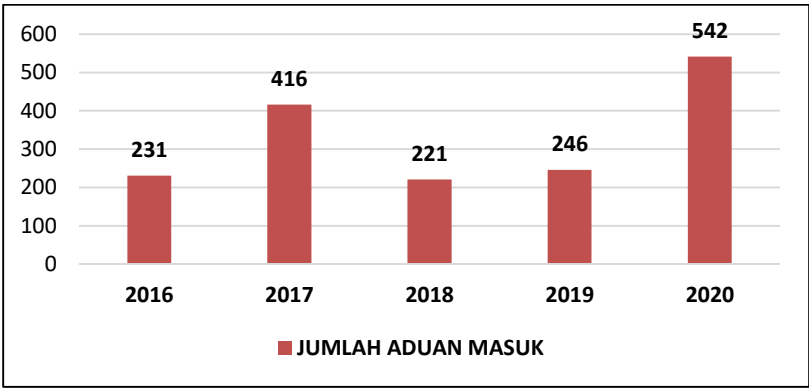
Pemerintah Kota Kediri membuat terobosan dalam pelayanan birokrasi melalui layanan pengaduan, saran, dan informasi berbasis informatika yang bernama Surga (Suara Warga Kota Kediri). Layanan ini dapat diakses oleh masyarakat Kota Kediri melalui sms ke nomor 1708 atau melalui *website* di <http://www.surga.kedirikota.go.id>. Asas Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari:

- a) kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
- b) transparan, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
- c) terkoordinir, yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
- d) efektif dan efisien, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- e) akuntabel, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) objektif, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu;
- g) proporsional, mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang; dan

h) kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

Selama tahun 2016-2020 jumlah aduan yang masuk melalui Surga sebagai berikut:

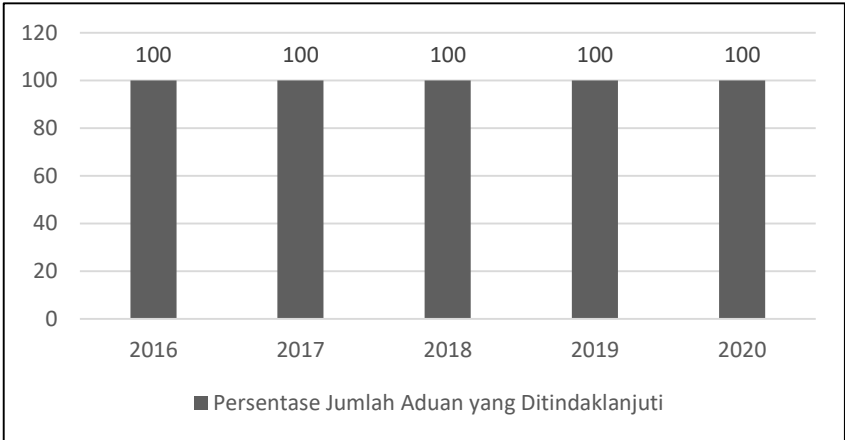
Grafik 2.74 - Jumlah Aduan Masuk Melalui Surga Kota Kediri Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2020

Jumlah aduan yang masuk melalui Surga Kota Kediri tahun 2020 sebanyak 542. Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 246. Selama tahun 2016-2020 jumlah aduan yang masuk melalui Surga tersebut seluruhnya ditindaklanjuti, sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.75 - Persentase Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2020

3. Persentase Kebijakan Daerah yang Dipublikasikan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, maka dilakukan publikasi atas kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada, diantaranya: radio, media cetak, media sosial, televisi. Untuk mengukur keberhasilan publikasi maka disusun indikator persentase kebijakan daerah yang dipublikasikan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kebijakan daerah/program pemerintah daerah yang dipublikasikan dengan kebijakan daerah/program pemerintah daerah yang diterbitkan. Pada tahun 2020 jumlah kebijakan yang dipublikasikan

sebanyak 190 dari jumlah total sebanyak 190 kebijakan yang mengindikasikan bahwa seluruh kebijakan daerah dipublikasikan.

p. Urusan Statistik

Persentase Data Sektoral yang Akurat

Data yang akurat merupakan kunci dari kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang akurat. Sayangnya, dalam praktiknya data masih sering tidak dikelola secara serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya. Melalui indikator persentase data sektoral yang akurat dan tepat waktu Pemerintah Kota Kediri melakukan upaya untuk mendapatkan data yang kredibel dan dapat memberikan landasan yang sesuai dengan kondisi yang riil dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya data yang sesuai dengan prinsip standar, pembangunan akan berjalan dengan lebih baik, akurat, dan juga efisien. Dalam rangka mengukur keberhasilan urusan ini, maka ditetapkan indikator persentase data sektoral yang akurat dan tepat waktu.

q. Urusan Persandian

Persentase Informasi Persandian yang Diamankan

Dalam rangka menjamin keamanan informasi, Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi persandian. Persandian identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai diretas maupun gagal sampai. Persentase informasi persandian yang diamankan merupakan Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Kediri. Sebagai usaha dalam hal pengamanan informasi Pemerintah Provinsi melakukan pengamanan berkelanjutan atas segala informasi baik yang keluar maupun yang masuk.

r. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

1. Persentase Koperasi Sehat

Salah satu upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Kediri adalah melalui koperasi. Jumlah koperasi di Kota Kediri tahun 2020 sebanyak 600 koperasi, 498 koperasi kategori aktif dan 102 koperasi kategori tidak aktif. Jumlah anggota koperasi tahun 2020 sebanyak 88.556 anggota. Data koperasi tahun 2016 sampai 2020, sebagai berikut.

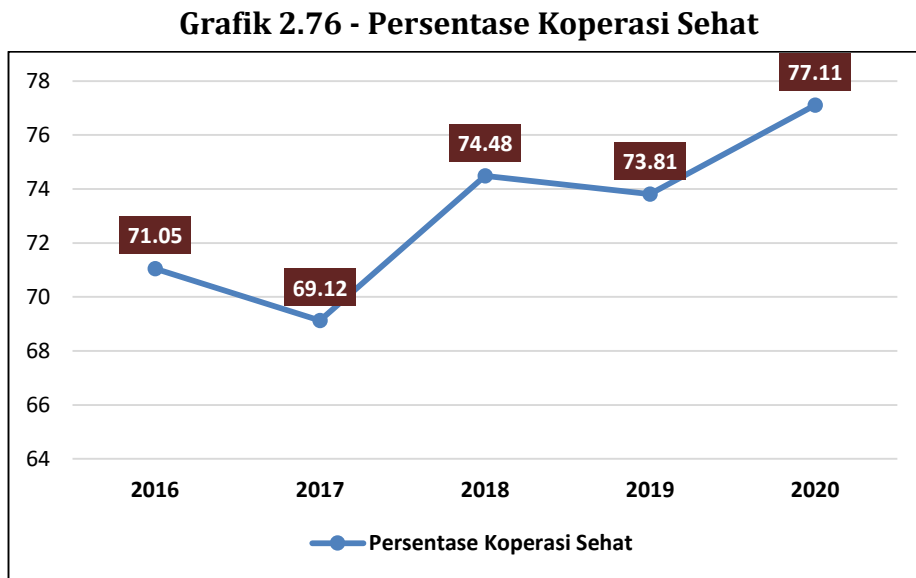
Tabel 2.28 – Data Koperasi

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	612	544	550	560	600
2	Jumlah Anggota Koperasi	65.818	80.457	82.516	82.676	88.556
3	Volume usaha	Rp 162,23 M	Rp 2.335,17 M	Rp 2.365,54 M	Rp 3.161,40 M	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, 2020

Peningkatan jumlah koperasi, anggota dan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa perkembangan koperasi di Kota Kediri semakin baik. Pemerintah Kota Kediri berupaya agar koperasi di Kota Kediri dalam kondisi sehat untuk

menunjang perekonomian. Keberadaan koperasi yang sehat diharapkan mampu menjadi salah satu pilar penyangga penguatan ekonomi masyarakat. Indikator untuk mengetahui banyaknya koperasi sehat di Kota Kediri adalah persentase koperasi sehat. Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah koperasi sehat dengan koperasi aktif. Perkembangan koperasi sehat di Kota Kediri digambarkan pada grafik berikut :



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2016, jumlah koperasi sehat di Kota Kediri sebanyak 71,05% dari jumlah koperasi aktif. Tahun 2017, Jumlah tersebut menurun menjadi 69,12%. Hal tersebut dikarenakan tumbuhnya jumlah koperasi baru (Koperasi RW) yang aktif namun belum berkewajiban RAT sebagai salah satu formula yang dijadikan indikator pembandingan. Padahal, syarat koperasikan aktif dapat dikategorikan sehat diantaranya adalah harus melaksanakan RAT. Pada tahun 2018, jumlah koperasi sehat 74,48% dari koperasi aktif, tahun 2019 jumlah koperasi sehat terealisasi 73,81%. Pada tahun 2020, dari 498 koperasi aktif 384 koperasi dinyatakan sehat atau 77,11%.

2. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro

Salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan kesejahteraan keluarga di kota Kediri adalah melalui penciptaan wirausaha baru (usaha mikro), pendampingan, pembinaan dan pelatihan-pelatihan sehingga mereka mampu menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing sehingga mampu menciptakan peluang kerja baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.

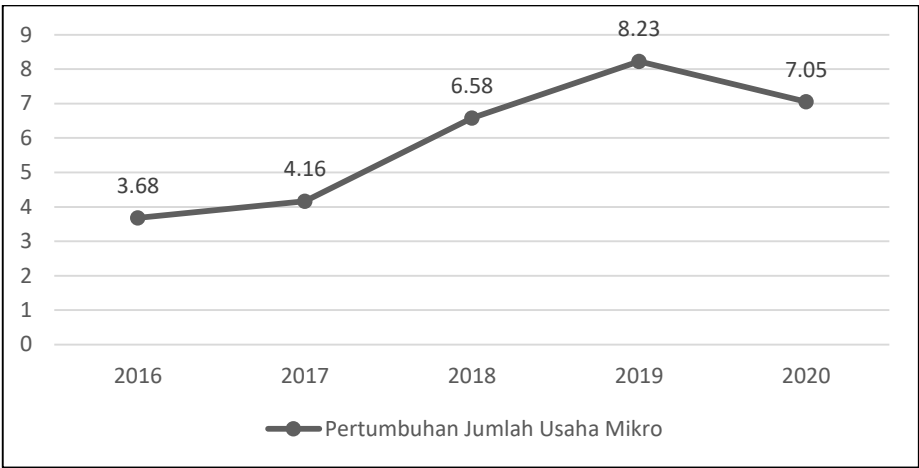
Jumlah usaha mikro di kota Kediri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk mengetahui perkembangan jumlah usaha mikro di kota Kediri diukur dengan indikator Pertumbuhan jumlah usaha mikro, yang diukur berdasarkan selisih jumlah usaha mikro tahun berjalan dengan jumlah usaha mikro tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah usaha mikro tahun sebelumnya.

Pertumbuhan jumlah usaha mikro diukur berdasarkan selisih jumlah usaha mikro tahun berjalan dengan jumlah usaha mikro tahun sebelumnya, tahun 2016 jumlah usaha mikro meningkat dari 3.802 menjadi 3.942 atau tumbuh sebesar 3,68%, pada tahun 2017 menjadi 4.106 atau ada pertumbuhan sekitar 4,16%. Selanjutnya, pada tahun 2018 pertumbuhan jumlah usaha mikro meningkat lagi

menjadi 6,58%. Dan pada tahun 2019 jumlah usaha mikro sebanyak 4.376 atau pertumbuhannya meningkat menjadi 8,23%. Dan pada tahun 2020 pertumbuhan jumlah usaha mikro sebesar 7,05% menjadi 4.736. Dilihat dari perkembangannya jumlah usaha mikro dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan semakin banyaknya masyarakat kota Kediri yang memiliki jiwa kewirausahaan.

Pertumbuhan jumlah usaha mikro selama lima tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.77 - Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro

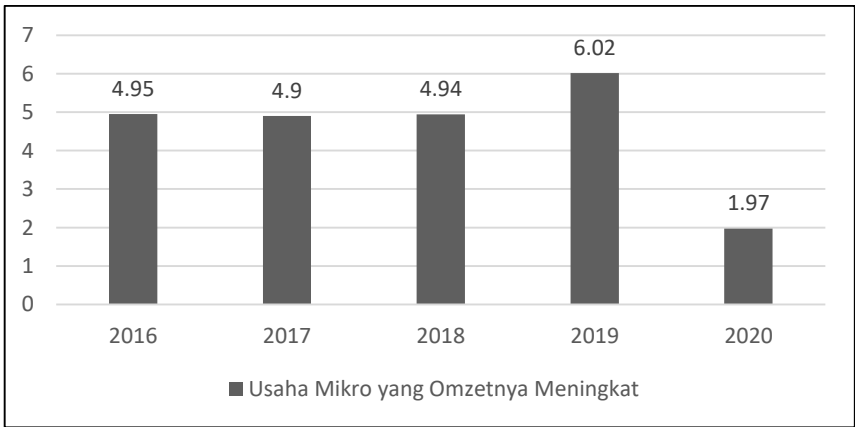


Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, 2020

3. Pertumbuhan Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat

Pertumbuhan usaha mikro yang omzetnya meningkat diukur dengan membandingkan jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat dengan jumlah usaha mikro. Tahun 2016 usaha mikro yang omzetnya meningkat sebanyak 195 atau 4,95%, dan tahun 2017 usaha mikro yang omzetnya meningkat menjadi 201 dari 4.106 usaha yang dibina atau 4,90%. Pada tahun 2018 usaha mikro yang omzetnya meningkat sebesar 0,04% menjadi 4,94%. Pada tahun 2019 usaha mikro yang omzetnya meningkat sebesar 1,08% menjadi 6,02%. Jika dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2020 yakni sebesar 5,34% dengan realisasi 1,97%, maka capaian kinerja ini sebesar 36,94%. Pertumbuhan usaha mikro yang omzetnya meningkat selama lima tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.78 - Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat (%)



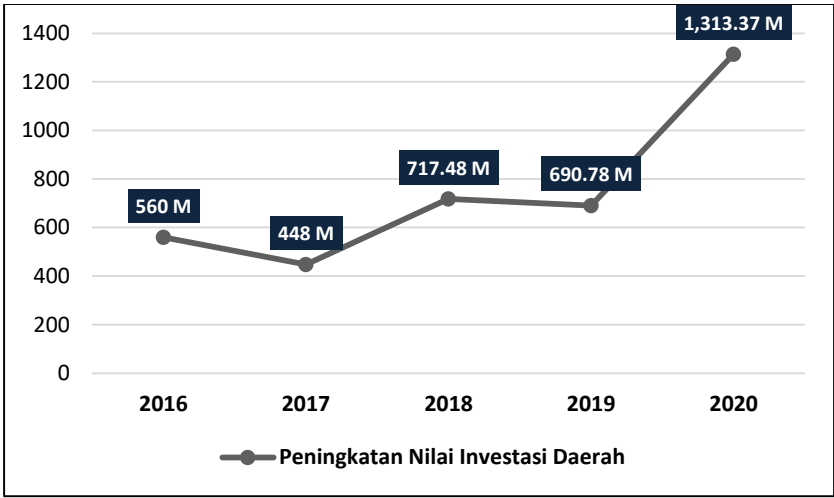
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, 2020

s. **Urusan Penanaman Modal**

Untuk mengukur kinerja bidang penanaman modal, maka ditetapkan indikator peningkatan nilai investasi daerah. Indikator ini digunakan untuk mengetahui peningkatan nilai investasi yang direalisasikan di Kota Kediri dengan membandingkan nilai investasi setiap akhir tahun dengan nilai investasi akhir tahun sebelumnya. Nilai investasi yang ditanamkan menunjukkan peningkatan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang akan menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Nilai realisasi investasi di Kota Kediri selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Nilai investasi dari tahun 2016-2020 tampak dalam grafik berikut:

Grafik 2.79 - Peningkatan Nilai Investasi Daerah



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri, 2020

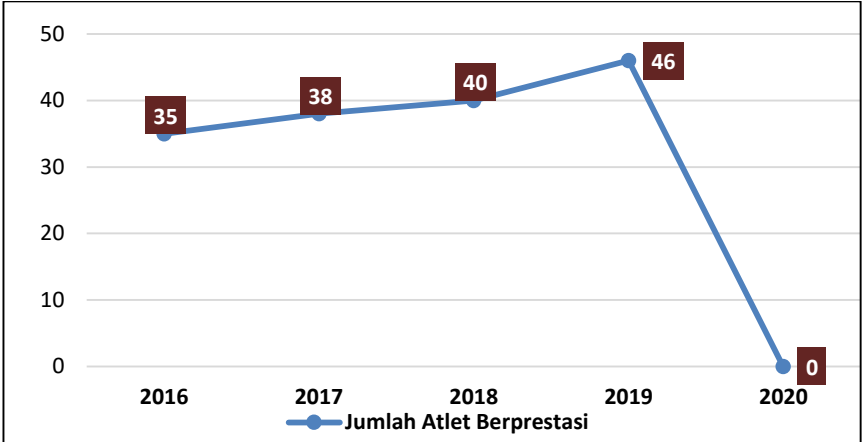
Pada tahun 2014 terjadi realisasi investasi yang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 nilai realisasi investasi Kota Kediri mencapai rata-rata pada kisaran 565 Milyar Rupiah per tahun. Tahun 2018 mengalami kenaikan investasi menjadi 717,48 Milyar Rupiah. Namun pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 26,7 Milyar Rupiah menjadi 690,78 Milyar Rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2020 nilai investasi daerah menjadi sebesar 1.313,7 Milyar. Kenaikan nilai investasi yang terjadi pada tahun 2020 merupakan hasil laporan kegiatan penanaman modal pada bidang usaha perdagangan dari PG Mrican PTPN X senilai Rp 723.025.013.541,- yang sebelumnya belum pernah dilaporkan.

t. **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

1. **Jumlah Atlet Berprestasi**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah daerah dalam membina atlet agar berprestasi. Perkembangan peningkatan prestasi olahraga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.80 - Jumlah Atlet Berprestasi



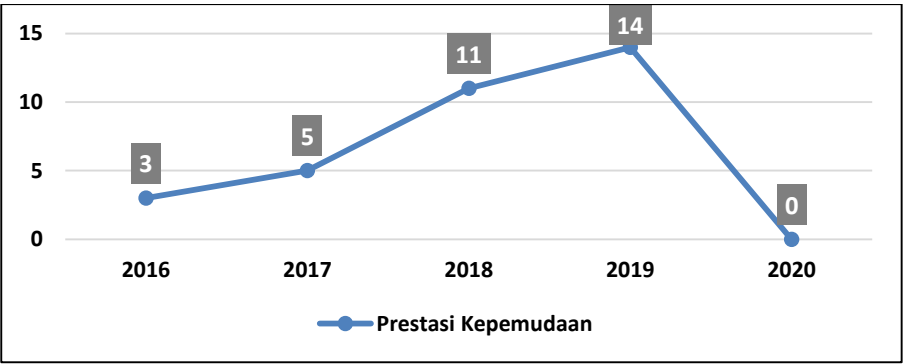
Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri, 2020

Atlet berprestasi di Kota Kediri mengalami kenaikan secara terus-menerus sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun, akibat pandemi Covid-19 tidak ada kegiatan kompetisi olahraga sehingga tidak ada atlet berprestasi. Selama tahun 2020, Pemerintah Kota Kediri melakukan pembinaan terhadap 7.841 atlet.

2. Prestasi Kepemudaan

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa sehingga pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pemuda. Keberhasilan pembinaan pemuda diwujudkan dengan prestasi yang diraih pemuda. Perkembangan prestasi kepemudaan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.81 - Prestasi Kepemudaan



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri, 2020

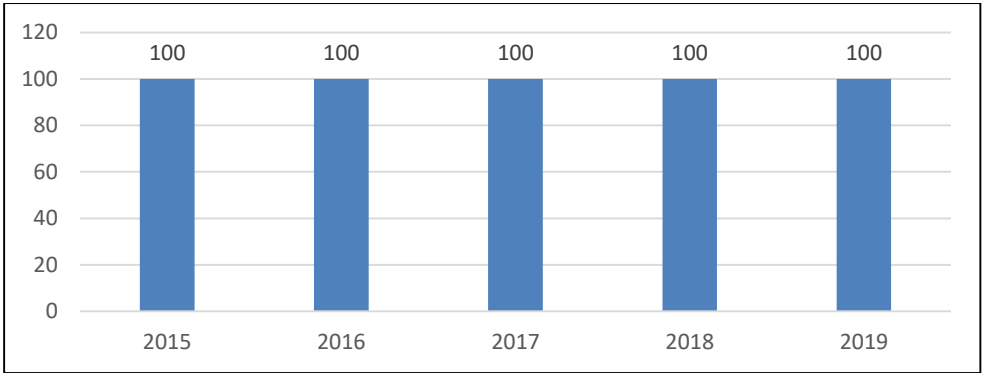
Prestasi kepemudaan di Kota Kediri mengalami kenaikan secara terus-menerus sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun, akibat pandemi Covid-19 tidak ada kegiatan kepemudaan sehingga tidak ada prestasi kepemudaan. Selama tahun 2020, Pemerintah Kota Kediri melakukan pembinaan terhadap 5.970 pemuda.

u. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya daerah melalui pemeliharaan situs-situs sejarah dan penyelenggaraan even budaya. Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya daerah maka harus ada upaya untuk memelihara keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.

Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dilaksanakan melalui perawatan, pembersihan dan pemeliharaan rutin untuk menjaga keberlangsungan benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai warisan untuk generasi selanjutnya. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kajian mengenai potensi cagar budaya Candi Klotok dan pada tahun 2018 dimulai ekskavasi candi tersebut bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur dan tenaga ahli khusus. Candi Klotok ini diharapkan akan menjadi salah satu cagar budaya yang dapat menambah daya Tarik wisata dan kekayaan budaya Kota Kediri. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan selama lima tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 2.82 - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri, 2020

Kota Kediri tidak memiliki sekolah khusus kebudayaan, namun banyak sekolah yang memiliki jurusan terkait pengembangan kebudayaan sebanyak 16 sekolah. Berdasarkan pendataan, ditemukan data pemajuan kebudayaan, yaitu: 2 manuskrip kuno, 8 rapalan, 23 cerita rakyat, 3 adat istiadat kelahiran, 3 adat istiadat perkawinan, 2 busana tradisional, 6 ritus, 3 pengetahuan tradisional, 7 teknologi tradisional, 12 karya seni, 9 bahasa, 14 permainan tradisional, 8 olahraga tradisional, 92 cagar budaya. Dalam rangka melestarikan kesenian/ kebudayaan, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Kediri melaksanakan/ mengikuti berbagai pertunjukan kesenian/ festival sebanyak 39 event.

v. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan Indeks Minat Baca masyarakat. Indeks ini menggambarkan tendensi penduduk suatu wilayah untuk membiasakan diri membaca. Minat membaca tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur seperti ketersediaan perpustakaan, perpustakaan keliling maupun taman baca, melainkan juga harus dilakukan pembiasaan anak membaca sejak dini. Pembiasaan ini akan menjadi karakter dan apabila dipupuk terus maka akan terwujud budaya baca. Indikator ini merupakan indikator yang baru dipergunakan mulai tahun 2018 dengan capaian sebesar 83,96, namun untuk capaian periode tahun 2014 sampai 2017 belum dapat diukur. Salah satu indikator peningkatan minat baca masyarakat adalah banyaknya pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2020, indeks minat baca Kota Kediri sebesar 73,7%.

w. **Urusan Kearsipan**

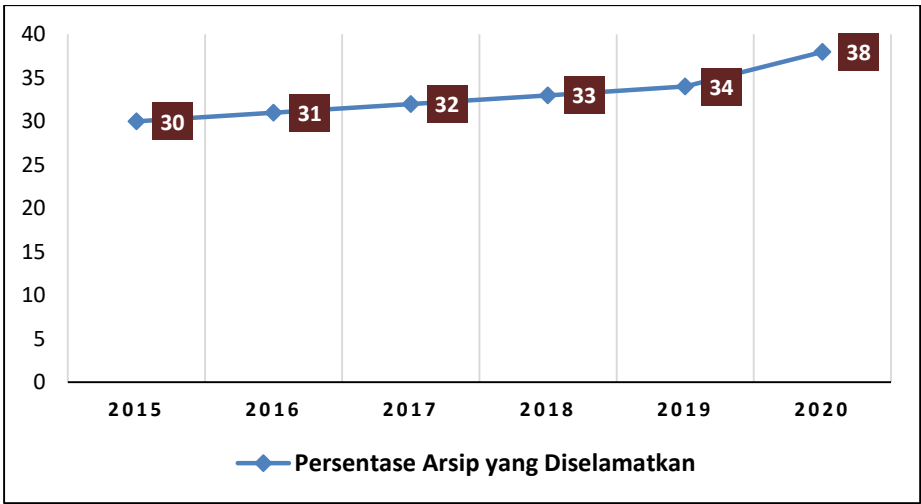
1. **Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas pengelolaan arsip yang dilaksanakan perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2018 sebesar 25% meningkat menjadi 30% pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian formula indikator menjadi perangkat daerah yang audit internal kearsipannya bernilai baik, dengan capaian sebesar 22,22%.

2. **Persentase Arsip yang Diselamatkan**

Indikator ini menunjukkan tingkat arsip yang diselamatkan dibandingkan dengan jumlah arsip yang harus diselamatkan. Perkembangan arsip yang diselamatkan selama lima tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.83 - Persentase Arsip yang Diselamatkan



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020, persentase arsip yang diselamatkan meningkat menjadi 38% dengan jumlah arsip inaktif unit kearsipan yang diselamatkan sebanyak 12 unit dari 32 unit kearsipan. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat kenaikan capaian kinerja hal ini didukung adanya sosialisasi dan pendampingan penataan arsip pada perangkat daerah.

2.3.2 **FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**

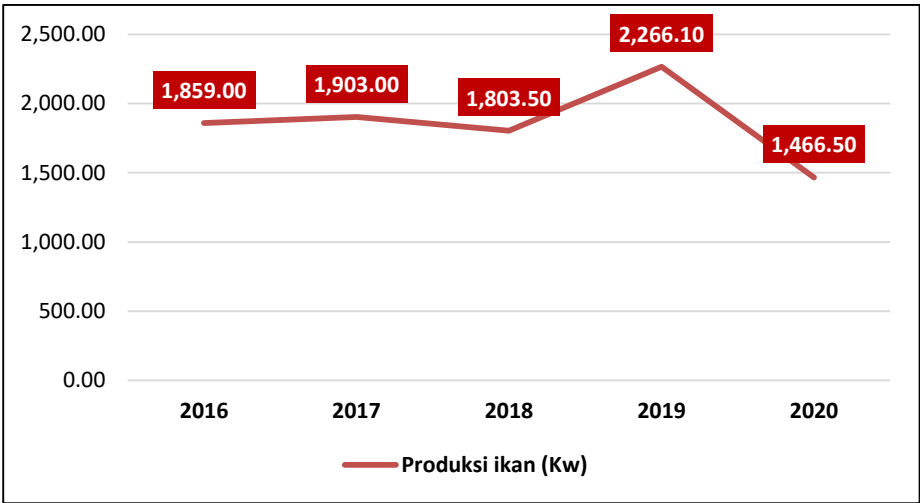
a. **Urusan Perikanan**

Produksi hasil perikanan di wilayah Kota Kediri merupakan hasil budidaya air tawar. Beberapa jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain adalah ikan lele, gurame dan nila. Potensi ikan hias air tawar cukup membanggakan, seperti halnya ikan konsumsi, budidaya ikan hias berkembang cukup pesat di tiga kecamatan yang ada. Jenis-jenis ikan hias yang dibudidayakan adalah Koi, Betta, Oscar.

Secara umum jumlah target produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 1.821,5 Kw dan terealisasi sebesar 1.466,5 Kw, hasil ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi produksi ikan pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar 2.266,10 Kw.

Secara umum, perkembangan pada tiap tahun selalu ada peningkatan produksi ikan. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.84 - Produksi Perikanan (Kw)



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2020

Faktor pendorong keberhasilan peningkatan produksi ikan 2019 karena penambahan luas areal perikanan dengan pembangunan kolam-kolam baru dan penerapan teknologi budidaya dengan sistim Probiotik. Disamping itu juga ditunjang dengan direhabnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembenihan dan Kolam Ikan, sehingga diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat atas benih ikan yang bermutu. Indikator sasaran ini dapat diketahui dengan membandingkan produksi hasil perikanan tahun yang bersangkutan dengan target jumlah hasil perikanan tahun yang bersangkutan.

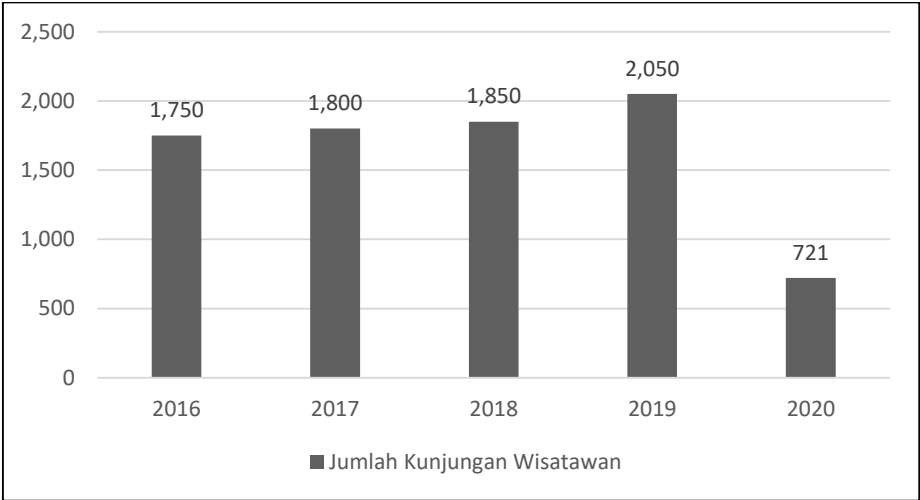
b. Urusan Pariwisata

Pariwisata di Kota Kediri meliputi wisata alam, wisata budaya (wisata religi, cagar budaya), wisata buatan, wisata religi, wisata kuliner, *sport science*, wisata belanja dan wisata minat khusus. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Kediri antara lain:

1. Wisata Alam : Kawasan Wisata Selomangleng, Dermaga Joyoboyo, Sumber Alam Sumber Bulus, Sumber Cakarsi, Mata Air (sumber) Lo, Gunung Klotok, Sumber Gayam dan Jalan Tembus Lebak Tumpang;
2. Wisata Religi/Budaya : Museum Airlangga (Cagar Budaya dilindungi), Makam Kuno Eyang Boncolono, Komplek Makam Islam Kuno Mbah Wasil, Makam Sunan Geseng, Masjid Aulia Setonogedong, Religi Kedung Lo, Religi Lirboyo, Religi LDII, Gereja Merah, Gereja Vicencius, Pura Sekartaji, Klenteng Tri Dharma, Masjid Agung Kota Kediri, Goa Padedean, Goa Selobale;
3. Wisata Minat Khusus: Taman Wisata Selomangleng, Taman Wisata Paggora, Taman Wisata Tirtoyoso, Taman Sekartaji, Taman Alun-alun Kota.
4. Wisata Kuliner: Kuliner Jalan Dhoho, Kuliner Soto Bok Ijo, Kuliner pusat oleh-oleh, Kuliner café dan resto;
5. Wisata Belanja: Wisata mall dan pasar modern;
6. Wisata event: event hari jadi Kota Kediri, event atraksi budaya dan pariwisata
7. Perhotelan/ penginapan

Jumlah kunjungan wisatawan dapat menjadi ukuran untuk meningkatkan pariwisata daerah maka perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah untuk menarik kunjungan wisatawan yang dapat memberikan motivasi bagi Pemerintah Kota untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata yang ada sehingga lebih menarik wisatawan. Kunjungan wisata ke Kota Kediri selama tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, selengkapnya dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.85 - Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2020 (dalam ribuan)



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

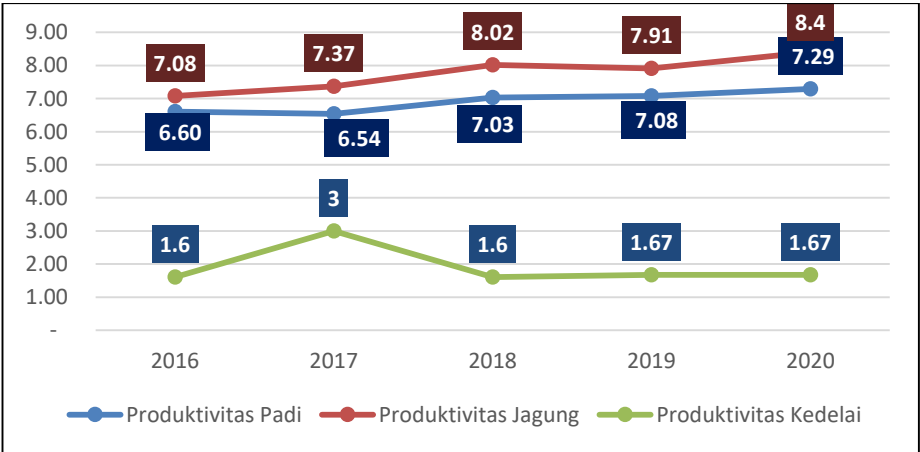
Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Kediri Tahun 2020 sebanyak 721.134 wisatawan dengan rincian 721.134 wisatawan lokal dan 7 wisatawan mancanegara. Bidang pariwisata diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi kreatif di Kota Kediri. Ekonomi kreatif yang dikembangkan saat ini antara lain kuliner, musik, seni rupa, fashion, tenun ikat Bandar Kidul, fotografi dan seni pertunjukan.

c. Urusan Pertanian

1. Produktivitas Tanaman Pangan

Indikator ini diukur dengan menghitung produktivitas tanaman padi, jagung dan kedelai. Produktivitas tanaman pangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.86 - Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)

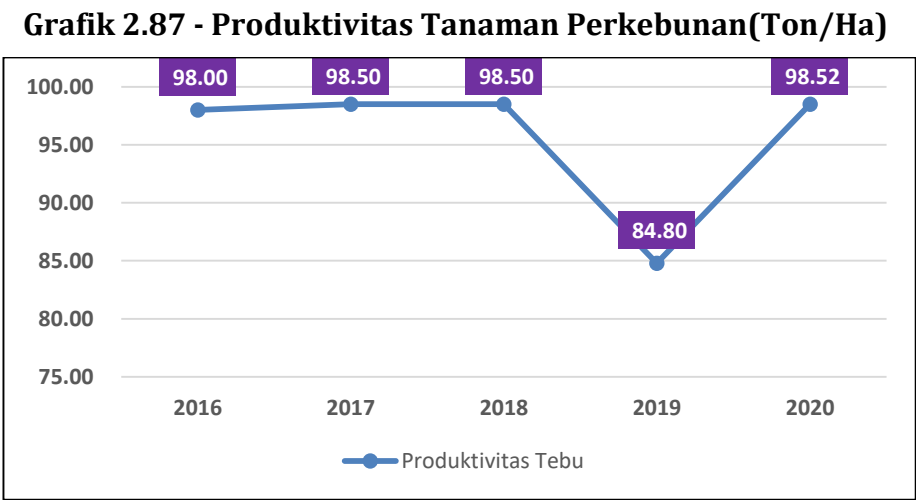


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2020

Dalam rangka menjaga produksi tanaman pangan, Pemerintah Kota Kediri menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengalokasikan sekitar 509,64 ha sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

2. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Indikator ini diukur dengan menghitung produktivitas tanaman tebu. Produktivitas tanaman perkebunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan pada grafik berikut :

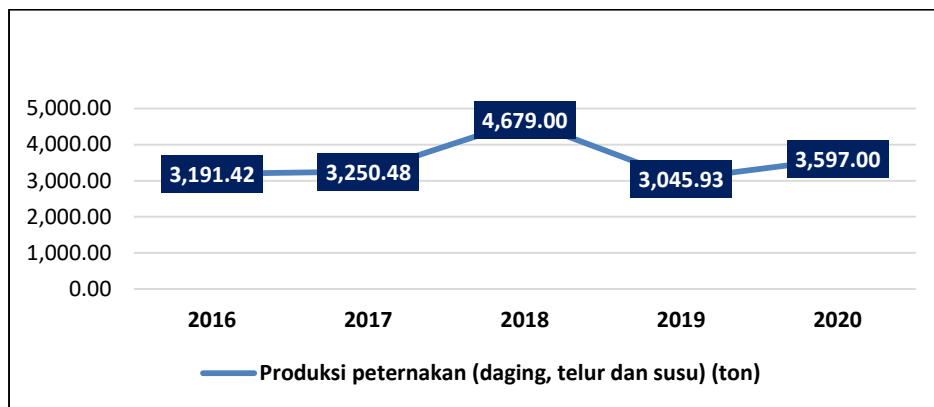


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2020

3. Produksi Peternakan

Pembangunan usaha peternakan di Kota Kediri terus dilanjutkan dari tahun ke tahun dengan semakin memberdayakan peternakan rakyat melalui pembangunan sapi potong dan pengembangan unggas. Produksi hasil peternakan dapat diketahui melalui jumlah produksi hasil ternak. Jumlah produksi hasil ternak (daging, telur dan susu) tahun 2018 sebesar 4.679,00 ton. Hasil tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2017 sebesar 3.250,48 ton. Pada tahun 2019 jumlah produksi hasil ternak sebesar 3.045,93 sedangkan target sebesar 3.042,89 ton. Sehingga capaian target kinerja sebesar 100,10%. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah produksi hasil ternak sebesar 3.597 melampaui target sebesar 3.260 sehingga capaian kinerja sebesar 110.31%. Perkembangan jumlah produksi peternakan tiap tahun mengalami peningkatan, secara lengkap dapat dilihat pada grafik dibawah. Beberapa faktor pendorong dalam meningkatkan produksi peternakan antara lain karena peningkatan kompetensi peternak dalam pengelolaan peternakan, peningkatan mutu genetik bibit ternak dan tersedianya sarana prasarana budidaya dan pemasaran yang memadai.

Grafik 2.88 - Produksi Peternakan



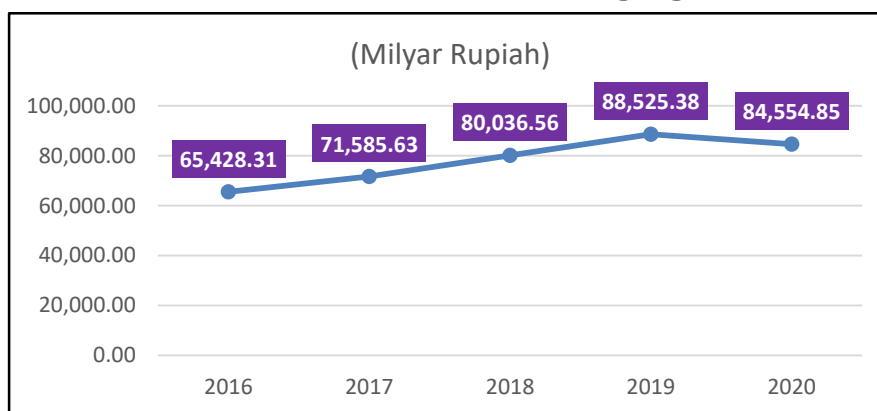
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2020

Saat ini, Pemerintah Kota Kediri memiliki 1 (satu) Rumah Potong Hewan (RPJH) yang melayani pemotongan hewan di wilayah Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri di sekitarnya.

d. **Urusan Perdagangan**

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri bisa dilihat dari nilai PDRB. Sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kota Kediri. Sedangkan kondisi perekonomian suatu daerah secara makro bisa dilihat dari neraca perdagangan, yaitu perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan bisa dihitung dengan rumus yang sederhana yaitu nilai ekspor daerah dikurangi nilai impor daerah. Nilai ekspor daerah adalah nilai transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk ke bukan penduduk. Nilai impor impor merupakan nilai transaksi perdagangan barang dan jasa dari bukan penduduk ke penduduk. Perkembangan neraca perdagangan Kota Kediri tahun 2016-2020 dapat dilihat grafik berikut :

Grafik 2.89 – Neraca Perdagangan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Kota Kediri mempunyai neraca perdagangan yang surplus dan terus meningkat dari tahun 2016-2020. Suatu daerah dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang surplus apabila daerah tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Kondisi ini tidak terlepas dari peran penting industri besar (PT Gudang Garam Tbk, PG Meritjan dan PG Pesantren Baru) dalam kegiatan ekspor impor Kota Kediri yang juga didukung oleh industri kecil dan menengah serta pedagang besar dan eceran lainnya. Selain industri

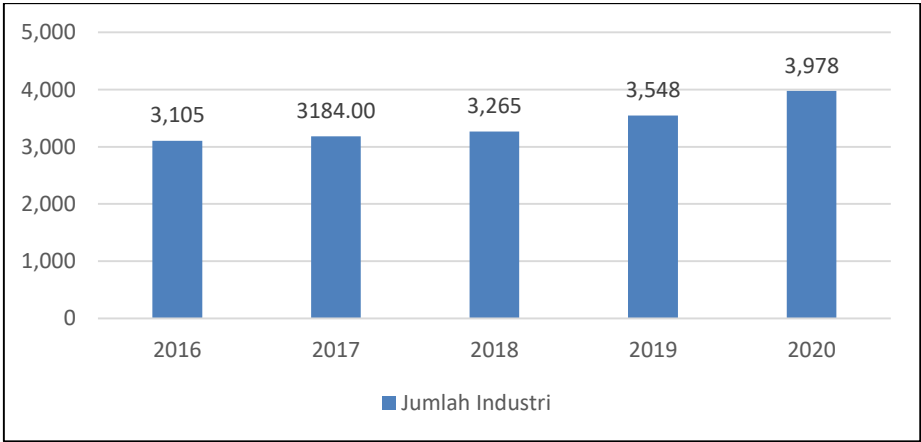
tembakau, terdapat komoditi lain yang mendorong surplus perdagangan Kota Kediri, antara lain produk konsumsi rumah tangga, barang/ jasa informasi dan komunikasi, barang/ jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi dan keuangan serta produk pertanian. Surplus ini didukung oleh keberadaan pusat perdagangan dan jasa seperti mall/ pusat perbelanjaan, toko modern, pasar grosir, sarana pendidikan dan sarana jasa keuangan.

Perdagangan yang adil tercermin dari konsumen yang memperoleh ketepatan kuantitas terhadap barang dan jasa yang dibeli. Metrologi legal mempunyai peran untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan tertib ukur dalam kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan. Salah satu upaya untuk menjamin kebenaran pengukuran tersebut adalah dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Kondisi Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran yang digunakan pemilik usaha dalam aktivitas usaha perdagangan dan perindustrian. Tingkat tertib ukur suatu daerah diketahui dari indeks tertib ukur yaitu indeks yang mengukur tingkat pemahaman, kemampuan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur. Indeks tertib ukur ditentukan dengan bobot 68,4% Persentase UTTP bertanda tera sah ditambah dengan 31,6% Persentase BDKT yang memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas. Pada tahun 2020 indeks tertib ukur Kota Kediri berada pada level paham dengan nilai 37%. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat tiga pasar yang sudah mendapatkan predikat Pasar Tertib Ukur, yaitu Pasar Bandar, Pasar Pahing dan Pasar Setonobetek.

e. Urusan Perindustrian

Ekonomi masyarakat Kota Kediri lebih dominan digerakkan oleh aktivitas sektor industri dan perdagangan. Selama ini Kota Kediri terus berupaya meningkatkan peran sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Kota Kediri mempunyai 3 unit industri besar yang merupakan penyumbang PDRB terbesar untuk sektor industri pengolahan. Pemerintah Kota Kediri juga terus mendorong pertumbuhan IKM terutama industri kreatif yang didukung dengan pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Kediri, Asosiasi Pengrajin Kota Kediri (ASPEKORI), Asosiasi Pengusaha Tahu Kota Kediri (APETA) dan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Kota Kediri (ASPEMMTARI).

Grafik 2.90 - Jumlah Industri



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, 2020

Jumlah industri di Kota Kediri meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah industri tahun 2020 sebanyak 3.978 sedangkan tahun 2019 sebanyak 3.548 unit. Sehingga diperoleh pertumbuhan sebesar 12,12%. Pertumbuhan industri di Kota Kediri mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan capaian pertumbuhan industri tahun 2019 yang tercatat hanya sebesar 8,67%. Kenaikan jumlah industri tahun 2020 tersebut, antara lain: industri makanan dan minuman 195 unit, kerajinan 46 unit, film, animasi dan video 13 unit, fashion 45 unit, desain produk 7 unit, industri aneka 65 unit, sentra rajut Kelurahan Banaran 20 unit dan industri non formal 49 unit. Komoditi yang mampu bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 antara lain: produk kerajinan dan fashion terutama tenun ikat dan batik serta produk olahan makanan dan minuman. Dalam rangka memperluas pasar produk industri kecil, Pemerintah Kota Kediri memberikan fasilitasi promosi baik secara offline dan online.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kemampuan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha optimalisasi sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan ekonomi daerah dan/atau kota. Letak geografis Kota Kediri sangat strategis karena berada di tengah dan menjadi jalur perlintasan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Kondisi ini memungkinkan Kota Kediri untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sektor perdagangan dan jasa guna menyerap pangsa pasar daerah *hinterland*-nya.

Melalui peningkatan daya saing daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Kota Kediri yang diorientasikan sebagai pusat penyedia layanan jasa dan perdagangan, sekaligus meningkatkan produktivitas daya beli dan kemampuan berwirausaha masyarakat.

2.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

2.4.1.1 FOKUS LAYANAN URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG

a. Urusan Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan reformasi birokrasi Otonomi Daerah merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat, penguatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui implementasi SAKIP yang direpresentasikan oleh nilai SAKIP, dan perwujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya melalui penetapan produk hukum daerah. Sementara itu, peningkatan laba BUMD yang berkontribusi pada

sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diupayakan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

- a) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;
- b) Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- c) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- f) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- g) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- h) Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- i) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

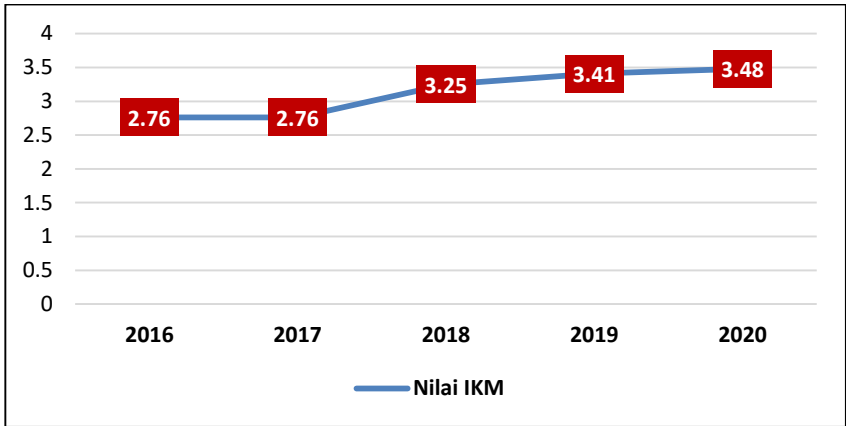
Dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

- a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Perkembangan nilai IKM Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.91 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat



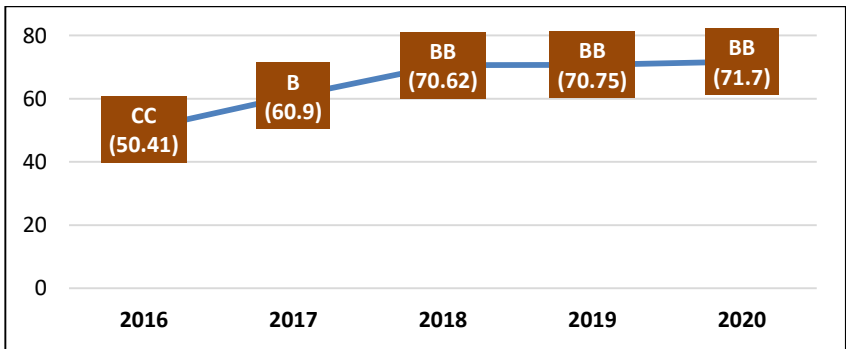
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri, 2020

Berdasarkan hasil survei IKM tahun 2019, nilai IKM Kota Kediri adalah B dengan skor 3,41. Nilai IKM ini mengalami kenaikan jika dibandingkan nilai IKM tahun 2018 sebesar 0,16 poin. Nilai IKM Kota Kediri naik signifikan menjadi 3,25 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 IKM Kota Kediri meningkat menjadi 3,48.

2. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap tahun dilaksanakan evaluasi SAKIP untuk menilai akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Hasil penilaian SAKIP Kota Kediri selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.92 - Nilai SAKIP



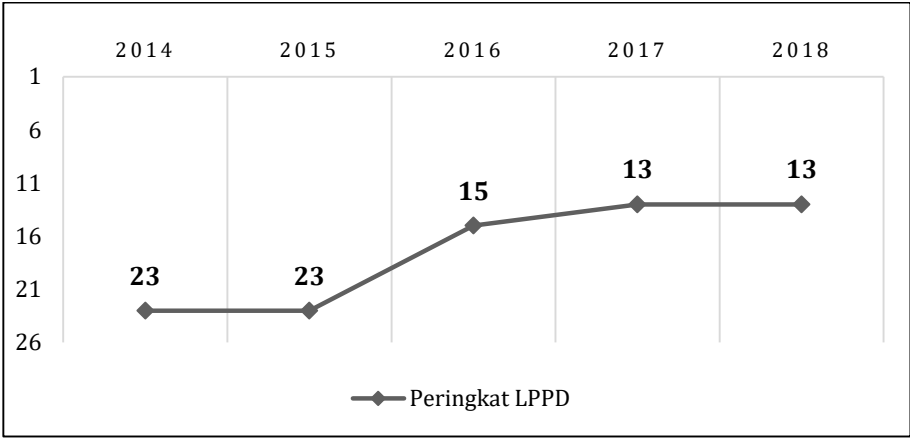
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri, 2020

Mulai tahun 2016, setiap nilai SAKIP Kota Kediri mengalami kenaikan. Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 terhadap Pemerintah Kota Kediri diperoleh predikat penilaian BB (Sangat Baik) dengan skor 71,7.

3. Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tingkat Nasional

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Kediri mengalami kenaikan sejak tahun 2014 sampai 2018, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 2.93 - Peringkat LPPD Tingkat Nasional



Sumber : Bagian Pemerintahan Kota Kediri, 2020

Capaian EKPPD Kota Kediri tahun 2017-2018 adalah peringkat 13 (sangat tinggi) merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir, dimana selama tahun 2014-2015 capaian EKPPD Pemerintah Kota Kediri masih berada pada kategori “tinggi” di peringkat 15. Mengingat bahwa pemerintah pusat tidak lagi mengeluarkan peringkat, maka sejak tahun 2020 kinerja EKPPD di hitung berdasarkan skor. Realisasi Skor EKPPD tahun 2020 sebesar 3,42 (sangat tinggi).

4. Persentase kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Harga Satuan Pengadaan Barang dan Jasa (HSPBJ)

Indikator sasaran ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah kegiatan yang RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya sudah disusun serta sesuai HSPBJ dengan jumlah total kegiatan dalam APBD. Pada Tahun 2020, jumlah kegiatan yang RKA dan DPA nya sudah disusun sesuai dengan HSPBJ berjumlah 3.092 kegiatan dari 3.092 kegiatan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2020, sehingga terealisasi sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 indikator sasaran ini relatif stabil, dimana pada tahun 2019 jumlah kegiatan yang RKA dan DPA nya sudah disusun serta sesuai dengan HSPBJ sebanyak 2.949 kegiatan dari 2.949 kegiatan atau terealisasi 100%.

Faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini adalah adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan kinerja tim penyusun HSPBJ sehingga buku HSPBJ tersusun tepat waktu yaitu sebelum perangkat daerah menyusun RKA dan DPA.

5. Tingkat Kematangan UKPBJ

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal mencapai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang Jasa tersebut diperlukan peningkatan kapabilitas UKPBJ yaitu peningkatan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ secara berjenjang dan kerja sama antar UKPBJ dalam rangka penerapan Model Kematangan UKPBJ. Model Kematangan ini merupakan instrument pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Model Kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain atau focus area yang dibangun dan dikembangkan yaitu 1) Domain Proses dengan 4 variabel; 2) Domain Kelembagaan dengan 2 variabel; 3) Domain Sumber Daya Manusia dengan 2 variabel; 4) Domain Sistem Informasi dengan 1 variabel dan masing-masing variabel memiliki 5 tingkat kematangan yang terdiri dari: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul.

Pada tahun 2019 UKPBJ Kota Kediri diverifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dengan hasil 7 dari 9 variabel memperoleh nilai level kematangan 3 atau proaktif yaitu Variabel Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Resiko, Pengorganisasian, Tugas/Fungsi, Perencanaan SDM, dan Pengembangan SDM. Untuk 2 variabel yaitu variabel Manajemen Pengadaan dan Sistem Informasi memperoleh nilai level kematangan 2 atau Esensi.

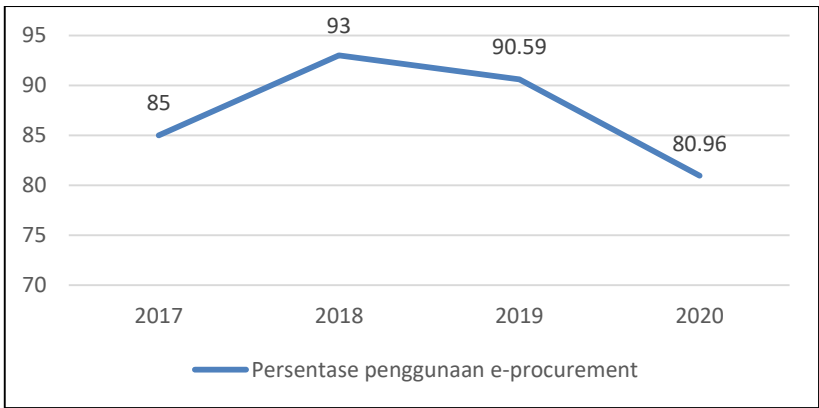
Pada tahun 2020 pencapaian level kematangan UKPBJ Kota Kediri masih sama dengan pencapaian pada tahun 2019.

6. Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan

E-procurement merupakan inovasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Belanja pengadaan yang menggunakan *e-procurement* ini adalah pengadaan langsung dan tender/ seleksi yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan *e-procurement* secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Keuntungan dari pelaksanaan *e-procurement* adalah peningkatan kualitas pelayanan. Karena pelayanan dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu seperti pelayanan 24 jam dan dilakukan secara online di mana saja atau tanpa tatap muka dan transparan. Salah satu aplikasi yang telah dikembangkan

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menjalankan *e-procurement* adalah SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Sistem Pengadaan Secara Elektronik merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Sistem Pengadaan Secara Elektronik mulai dikembangkan sejak tahun 2008 dan telah mengalami pengembangan beberapa kali, yang terakhir adalah SPSE 4.3. Pemerintah Kota Kediri mulai menggunakan aplikasi SPSE dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahun 2012. Data persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.94 - Persentase Penggunaan *e-procurement* Terhadap Belanja Pengadaan



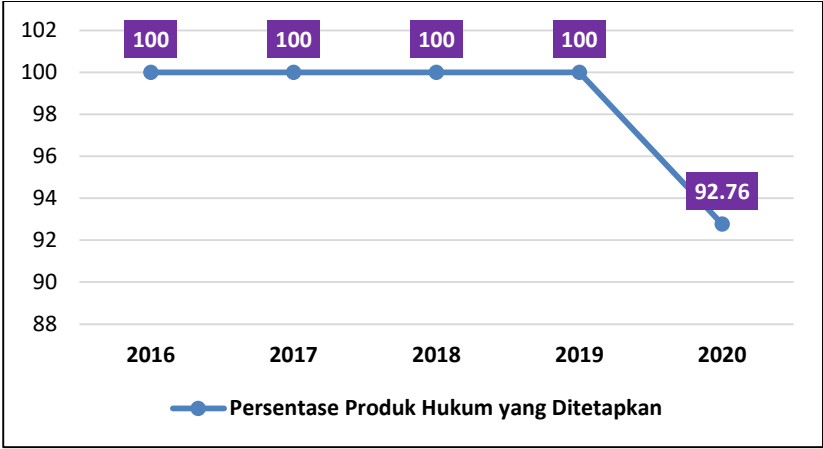
Sumber : Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi SPSE 3.6 yang masih fokus pada pelaksanaan lelang untuk pengadaan di atas 200 juta yang dilakukan secara elektronik capaian pengadaan melalui *e-procurement* dari 120 paket yang ada pada SIRUP ada 102 paket telah dilakukan pengadaan secara elektronik dengan nilai sebesar 85 %, dari 18 paket yang tidak dilaksanakan *e-procurement* ada beberapa paket penunjukan langsung dilakukan secara *offline* karena belum terfasilitasi dalam aplikasi SPSE dan beberapa paket dari OPD dilakukan secara *e-purchasing*. Sedangkan pada tahun 2018 dari 72 paket lelang di atas 200 juta yang ada pada SIRUP sejumlah 67 paket lelang telah dilakukan pengadaan secara elektronik dengan aplikasi SPSE 4.0 sehingga mencapai 93 %. Pada tahun 2019 dan 2020, persentase penggunaan *e-procurement* mengalami penurunan menjadi 90,95% dan 80,96% karena terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.

7. Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan

Salah satu indikator dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah persentase penetapan produk hukum daerah. Persentase produk hukum yang ditetapkan selama tahun 2016-2020 sebagaimana diuraikan dalam grafik berikut :

Grafik 2.95 - Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan

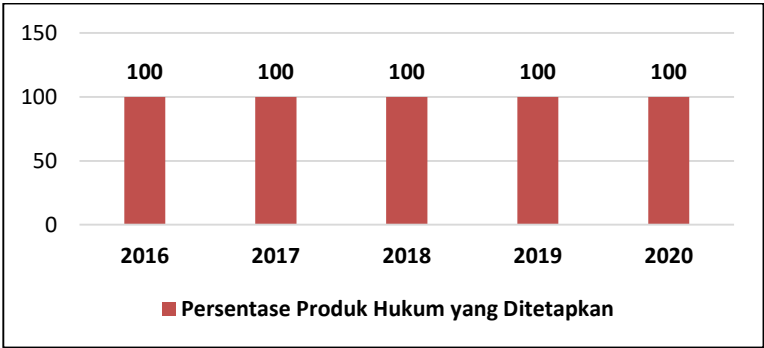


Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2020

8. Persentase Penanganan Kasus Hukum

Terkait jumlah penanganan kasus tidak dapat dibandingkan dengan jumlah penanganan kasus pada tahun-tahun sebelumnya, karena gelar perkara kasus mengikuti pengajuan perkara dalam proses peradilan. Jumlah kasus hukum yang terjadi tiap tahun, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah, semua dapat ditangani dan ditindak lanjuti 100%. Pada tahun 2019, terdapat 4 kasus hukum yang semuanya ditangani sedangkan pada tahun 2018 terdapat 14 kasus hukum yang semuanya juga dapat tertangani. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 3 kasus hukum yang semuanya ditangani.

Grafik 2.96 - Jumlah kasus hukum yang ditangani



Sumber : Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2020

9. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus menjaga, menciptakan dan melestarikan kerukunan hidup antar umat beragama, yang dilandasi dengan tiga variabel utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Kediri melakukan penghitungan terhadap indeks kerukunan antar umat beragama yaitu sebesar 3,76 (tinggi) dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,91 (tinggi).

Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian tersebut adalah :

- a) Faktor historis, kultur dan budaya yang kondisional;
- b) Dukungan pemerintah terhadap FKUB;
- c) Doktrin agama yang moderat;
- d) Tingkat pendidikan yang semakin baik;

e) Peran strategis aktifis lintas agama yang mengedepankan azas kerukunan.

10. Harmonisasi Sosial Kemasyarakatan

Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk menjaga harmonisasi sosial kemasyarakatan yang telah terjalin dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Kediri. Beberapa hal yang dilakukan antara lain mendukung lembaga keagamaan/sosial melalui berbagai bentuk bantuan, mendukung kegiatan kemasyarakatan, serta menjamin terselenggaranya kegiatan keagamaan yang aman nyaman dan khidmad. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkannya antara lain dengan :

- a) Tetap terjaganya hubungan yang baik antara Pemerintah Kota Kediri dengan Ormas dan tokoh agama;
- b) Menjalin kerjasama melalui program-program terpadu yang mampu mewujudkan harmoni dan kerukunan umat beragama di Kota Kediri.

Adapun indikator dan capaian yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan harmonisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.29 - Indikator Harmonisasi Sosial Kemasyarakatan

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	% lembaga keagamaan/sosial yang mendapat bantuan	80	82	82	83	87
2	% kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	89	90	93	93	113
3	% kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	93	93	93	93	89

Sumber : Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2020

Pada tahun 2020 terdapat 87% lembaga keagamaan/sosial telah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Kediri. Sedangkan, kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi sebesar 113% dan kegiatan keagamaan yang terfasilitasi terealisasi sebesar 89%

11. BUMD yang Menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG)

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya.

Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Kota Kediri telah berupaya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan bagian laba dari BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dibina oleh Pemerintah Kota Kediri antara lain :

- a) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- b) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR); dan
- c) Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar).

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, utamanya Pasal 343 tentang Pengelolaan BUMD menegaskan bahwa Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi BUMD untuk mengelola perusahaan dengan baik dengan mengimplementasikan GCG dalam pengelolaan perusahaan.

Penerapan azas GCG yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ini meliputi sejumlah prinsip dasar antara lain transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran. *Transparansi atau keterbukaan*, bisa diwujudkan melalui penyediaan informasi yang relevan serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, penerbitan laporan-laporan secara berkala dan tepat waktu, serta publikasi informasi publik melalui media cetak maupun elektronik. *Akuntabilitas*, dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Prinsip GCG juga mensyaratkan bahwa perusahaan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ atau divisi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak maupun bidang lain.

12. Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat

Penerapan tata kelola yang baik dapat mendorong terwujudnya BUMD yang sehat. Untuk itu dilakukan Penilaian tingkat kesehatan yang merupakan tolak ukur kinerja BUMD. Aspek penilaiannya berupa aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Adapun klasifikasi tingkat kesehatan dalam pengukuran kinerja BUMD adalah “Sehat”, “Kurang Sehat”, dan “Tidak Sehat”. Berikut ini perkembangan BUMD Dalam Kondisi Sehat di Kota Kediri.

Tabel 2.30 – Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

Sumber : Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2020

Capaian prosentase BUMD Kondisi Sehat pada tahun 2016 – 2020 hanya dicapai oleh PDAM, sedangkan untuk PD Pasar dan PD BPR belum ada penilaian sehingga kondisi evaluasi kinerja BUMD belum ada.

13. Peningkatan Jumlah Laba BUMD

Untuk mengetahui kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satunya menggunakan indikator peningkatan jumlah laba BUMD. Perkembangan laba BUMD di Kota Kediri tahun 2016-2020, sebagai berikut.

Tabel 2.31 – Perkembangan Laba BUMD

Tahun/BUMD	2016	2017	2018	2019	2020
PDAM	825,666,782	808,202,605	804,431,393	718,468,647	898,774,670
PD Pasar	950,094,173	206,311,345	697,457,425	(714,962,156)	(364,700,392)
PD BPR	1,529,998,714	685,854,305	244,682,178	(1,611,964,073)	(2,571,441,823)
Jumlah Laba/Rugi	3,305,761,685	1,700,370,272	1,746,573,014	(1,608,455,563)	(2,037,365,525)

Sumber : Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2020

Tahun 2019-2020 PD Pasar dan PD BPR mengalami kerugian sehingga perlu usaha keras untuk meningkatkan laba BUMD.

b. Urusan Pengawasan

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Kota Kediri senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun prestasi kinerja yang diraih, pada tahun 2014 sampai 2020 Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri.

Tabel 2.32 - Opini BPK

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kota Kediri, 2020

Opini WTP atas LKPD Kota Kediri yang dicapai 7 tahun berturut-turut. Diperolehnya opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya kinerja yang telah dicapai selama ini.

2. Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pengawasan yang difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan (obrik) di seluruh SKPD perlu dilakukan agar kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tahun 2020 level SPIP Kota Kediri pada level 3.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Program-program

reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi. Peningkatan jumlah opini audit BPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara langsung dapat meningkatkan pencapaian target jumlah opini audit BPK berpredikat WTP. Selain itu, peningkatan kualitas SAKIP dan LAKIP akan berpengaruh langsung pada pencapaian target jumlah instansi pemerintah yang akuntabel. Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri sebesar 58,11 dengan Kategori CC. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam rangka peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi sehingga diharapkan tahun 2021 bisa mencapai minimal kategori B.

c. Urusan Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan memiliki peran kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Indikator kinerja penyelenggaraan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33 - Indikator Kinerja Perencanaan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	% Capaian indikator kinerja sasaran Pembangunan Daerah berkategori berhasil	96,92	96,57	96,94	93,55	81,48
2.	Persentase Renstra Perangkat Daerah yang Berkualitas Baik	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %
3.	RKPD yang Berkualitas	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %
4.	Rencana Kerja (Renja) yang Berkualitas	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %

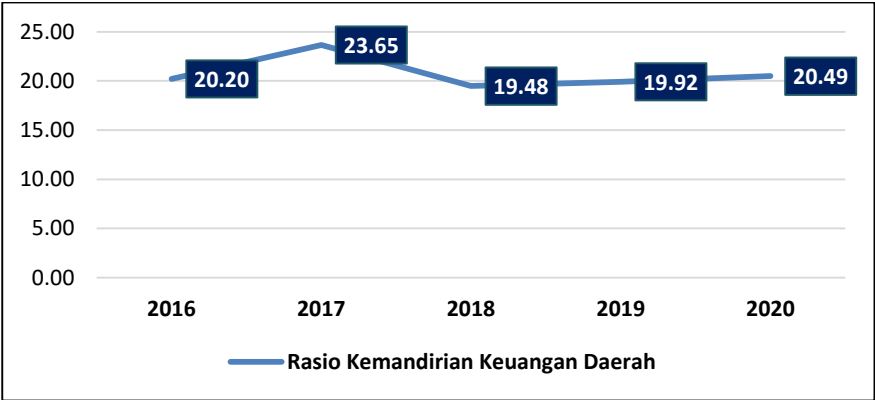
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri, 2020

Pada urusan perencanaan terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan, baik yang merupakan indikator kinerja yang digunakan pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2015-2019 maupun indikator baru yang digunakan pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Indikator persentase capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah berkategori berhasil terealisasi sebesar 81,48%, capaiannya tersebut turun daripada tahun 2019 dikarenakan perbedaan jumlah indikator sasaran pada RPJMD yang berbeda. Namun demikian, pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 jumlah sasaran yang ditetapkan sebanyak 32 indikator, sehingga perlu penyesuaian terhadap target kinerja. Selanjutnya, terdapat indikator baru yang akan digunakan pada RPMJD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dan pada tahun 2020 capaian kinerjanya semuanya mencapai 100%, yaitu: a) Persentase Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas baik, dihitung melalui perbandingan antara renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD dengan jumlah renstra perangkat daerah; b) RKPD yang berkualitas, dihitung melalui perbandingan antara sasaran RKPD yang selaras RPJMD dengan jumlah sasaran RKPD; c) Rencana Kerja yang berkualitas, dihitung melalui perbandingan antara program Renja yang selaras sasaran RKPD dengan jumlah program Renja.

d. Urusan Keuangan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk melakukan belanja daerah merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah sebagai wujud semangat desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Selama lima tahun terakhir, tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan trend yang positif dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 dan 2017 yang berasal dari pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun demikian, pendapatan tersebut bersifat tidak berulang sehingga PAD mengalami penurunan di tahun 2018. Perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.97 - Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2020

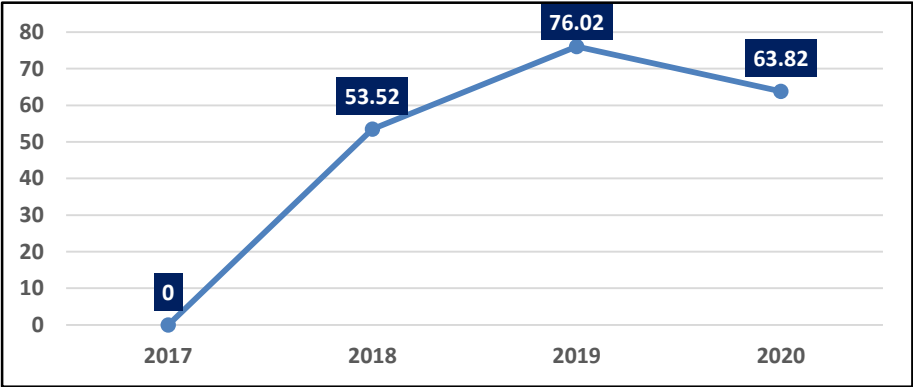
e. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mengetahui kualitas dan kompetensi pegawai, Pemerintah Kota Kediri melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sejalan dengan program Badan Kepegawaian Nasional. Indeks ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi sehingga tersedia indikator kualitas pegawai negeri sipil yang lebih terukur serta ketersediaan data yang kredibel.

Indeks ini dimaksudkan untuk menambah informasi mengenai tingkat pencapaian profesionalitas ASN sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesionalitas ASN dalam organisasi pada masa mendatang.

Komponen penghitungan indeks profesionalitas meliputi hasil penilaian obyektif potensi pegawai berdasarkan pendidikan formal, pelatihan teknis dan pelatihan kepemimpinan, sasaran kinerja pegawai, dan disiplin pegawai.

Grafik 2.98 - Indeks Profesionalitas ASN



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kediri, 2020

Pada Tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN Kota Kediri masih di angka 76.02 dimana peningkatannya sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 53.52. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan indeks profesionalitas ASN menjadi 63.82. Hal ini dikarenakan penghitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kota Kediri Tahun 2019 dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sumber data Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) Kota Kediri.

Untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Adapun rincian Diklat Aparatur Kota Kediri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34 - Diklat Aparatur Kota Kediri 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Diklat Struktural	610	536	610	-	30
2.	Diklat Fungsional	80	-	80	N/A	-
3.	Diklat Teknis	23	15	23	149	11
4.	Diklat Prajabatan	6.358	6.288	6.358	-	10

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kediri, 2020

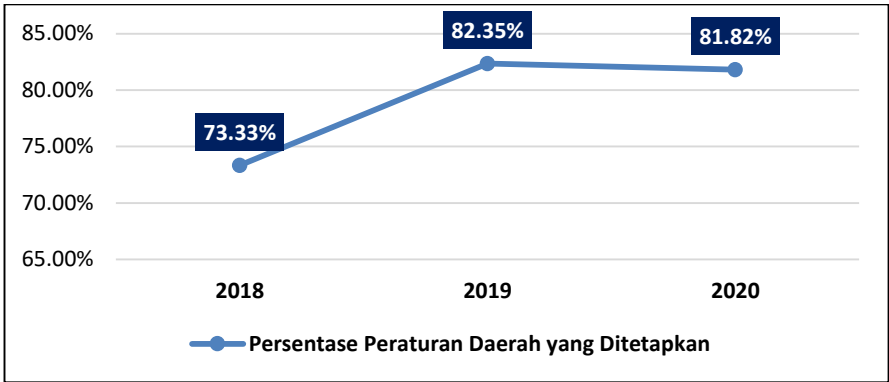
f. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Untuk mengukur keberhasilan urusan penelitian dan pengembangan, maka ditetapkan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Capaian indikator kinerja diukur dengan membandingkan antara jumlah penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dengan jumlah penelitian yang ada. Pada tahun 2020 jumlah penelitian yang dimanfaatkan sebanyak 7 dari 8 penelitian atau terealisasi sebesar 87,50%. Dengan target kinerja yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 78,57% maka capaian kinerjanya 111,36%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, capaian kinerja indikator kinerja sasaran ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 95,23% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 111,10%. Faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah terselaksananya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah dalam pemanfaatan hasil kelitbangan untuk pelaksanaan pembangunan.

g. Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Persentase peraturan daerah yang ditetapkan merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pada penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan di Sekretariat DPRD. Formula indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu jumlah Raperda yang ditetapkan dibanding dengan jumlah Raperda yang diusulkan.

Grafik 2.99 - Persentase Peraturan Daerah yang Ditetapkan



Sumber : Bagian hukum Setda dan Sekretariat DPRD, 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan sebesar 82,35% dengan rincian terdapat 14 Raperda yang dapat ditetapkan tahun 2019 dari target 13 Raperda yang direncanakan. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 9 Raperda yang ditetapkan dari 11 Raperda yang diusulkan atau sebesar 81,82%.

2.4.1.2 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kota Kediri selama 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan. Pengeluaran penduduk dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok konsumsi makanan dan kelompok konsumsi non makanan. Pengeluaran kelompok konsumsi non makanan tahun 2020 sebesar 55,08% lebih besar dibanding kelompok pengeluaran konsumsi makanan sebesar 44,92%.

Tabel 2.35 - Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita menurut Jenis Pengeluaran (Makanan dan Non Makanan) di Kota Kediri Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan	612.056	642.035	553.949,60	614.527,27	688.323,00
Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan	457.589	515.417	507.768,61	512.133,34	561.467,00
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan (Persen)	52,22	55,47	52,17	54,54	55,08
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan (Persen)	47,78	44,53	47,83	45,46	44,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Selama 5 (lima) tahun ke belakang rata-rata pengeluaran untuk konsumsi non makanan lebih tinggi dibanding rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan, hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Kediri yang semakin baik. Secara ekonomi terdapat hubungan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka semakin tinggi pula persentase pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Sebaliknya jika pendapatan semakin rendah, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi, bahkan pada kondisi rumah tangga tertentu hampir semua pendapatannya dikeluarkan untuk pemenuhan konsumsi makanan.

2.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi dengan baik mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Dalam hal ini keberadaan infrastruktur telah berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antar wilayah.

a. Perhubungan

Untuk mendukung aksesibilitas antar wilayah di Kota Kediri, diperlukan infrastruktur jalan yang memadai untuk menampung kendaraan yang ada. Berdasarkan Kediri data Dalam Angka Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS Kota Kediri diketahui bahwa jumlah kendaraan roda 4 tahun 2020 sebanyak 30.379 unit sedangkan panjang jalan kota sepanjang 265,333 km sehingga rasio panjang jalan kota terhadap jumlah kendaraan sebesar 8,734 m/ kendaraan.

b. Penataan Ruang

Pemerintah Kota Kediri melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030.

Tingkat ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 42,95% pada tahun 2015 menjadi 81,50% pada tahun 2020. Hal ini didorong dengan telah disusunnya Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) sehingga dapat mengurangi penyimpangan atas rencana tata ruang yang telah disahkan.

c. Daya Saing Infrastruktur

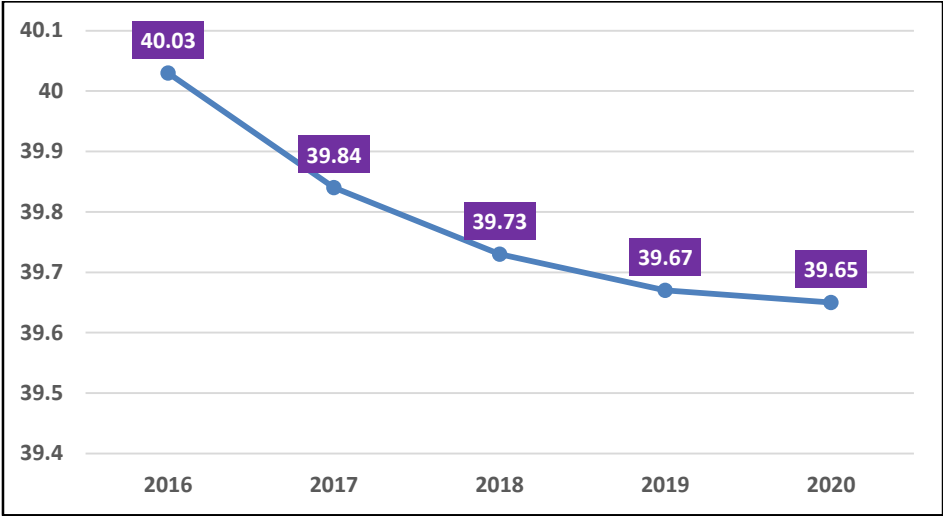
Faktor infrastruktur merupakan faktor utama dalam mendorong kegiatan perekonomian daerah. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu ujung tombak dalam menggenjot pembangunan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor utama untuk mendorong dan mendukung peningkatan daya saing suatu daerah. Faktor infrastruktur dalam hal ini meliputi akses perhubungan/jalan/jembatan, dan akses jaringan listrik/air/telepon.

2.4.3 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan sebuah ukuran yang mencerminkan seberapa besar beban penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun).

Semakin tinggi persentase tingkat ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan Rasio Ketergantungan pada grafik di bawah, diketahui bahwa tingkat ketergantungan di Kota Kediri terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir..

Grafik 2.100 - Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020

Rasio ketergantungan Kota Kediri tahun 2020 sebesar 39,65, artinya bahwa di tahun 2020 setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 39 orang yang belum produktif dan atau tidak produktif.

2.5 ASPEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran terhadap Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu:

- 1. SPM Bidang Pendidikan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018;
- 2. SPM Bidang Kesehatan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
- 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018;
- 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018;
- 5. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- 6. SPM Bidang Sosial pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Capaian penerapan SPM Kota Kediri tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.36 Capaian SPM Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2020
1. SPM Bidang Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100,25%
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2020
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100,27%
2. SPM Bidang Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	90,73%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	93,09%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	98,22%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	93,35%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	26,09%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	34,95%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	17,67%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	66,,43%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	92,71%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	45,87%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	91,98%
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,65%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,02%
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-
5. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			
1	Pelayanan ketentraman dan tertib Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	96%
6. SPM Bidang Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	93,76%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang	93,76%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2020
	sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	97,49%

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pada umumnya

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu, diperlukan Analisis kinerja keuangan masa lalu. Analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi Neraca Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD meliputi struktur dan akurasi Belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) dan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah). Sedangkan Neraca Daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi Aset Pemerintah Daerah, kondisi Kewajiban Pemerintah Daerah serta kondisi Ekuitas Dana yang tersedia.

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 2,26% setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kota Kediri Tahun Anggaran 2015-2019 sebesar 5,39%.

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 – 2019 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan yang Sah lainnya. Adapun aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selanjutnya untuk aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Gambaran umum pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2015 – 2019 sebagai berikut.

**Tabel 3.1 - Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

NO. URUT	URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Rata rata Pertumbuhan
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	PENDAPATAN	1.190.483.918.936,26	1.227.985.595.702,59	1.196.520.301.350,43	1.179.920.839.071,41	1.200.134.270.120,18	1.239.131.382.633,36	1.130.510.377.625,17	1.278.488.601.890,94	1.306.196.429.983,53	1.339.405.675.036,73	2.26
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	184.099.489.762,18	221.927.133.610,59	209.506.605.365,43	238.318.315.508,41	245.706.760.283,18	293.065.134.148,36	241.268.069.987,86	249.093.229.531,44	249.757.851.397,53	266.745.042.377,64	5.61
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	62.816.531.500,00	70.437.104.843,27	72.586.785.990,43	87.639.179.627,82	82.263.821.913,00	111.457.000.109,87	89.292.525.000,00	100.112.983.048,85	101.659.200.000,00	115.891.296.479,41	14.30
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.759.515.927,00	9.445.300.595,00	9.092.268.466,00	9.989.929.184,67	10.336.650.300,00	10.509.049.281,00	10.531.851.042,00	11.662.528.010,00	10.144.009.000,00	11.991.620.390,00	6.19
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	997.859.588,78	997.859.588,73	1.986.379.708,70	1.517.999.708,70	1.995.845.162,82	1.995.845.162,82	1.676.369.424,86	1.539.840.664,86	1.635.440.464,53	1.513.099.375,53	14.75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.525.582.746,40	141.046.868.583,59	125.841.171.200,30	139.171.206.987,22	151.110.442.907,36	169.103.239.594,67	139.767.324.521,00	135.777.877.807,73	136.319.201.933,00	137.349.026.132,70	0.41
1.2	DANA PERIMBANGAN	795.903.778.000,00	774.087.250.166,00	904.244.061.454,00	842.341.149.826,00	870.629.499.837,00	839.311.216.993,00	849.783.916.000,00	880.243.891.871,00	916.866.381.290,00	894.171.424.641,00	3.73
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	127.623.869.000,00	112.202.429.166,00	119.872.955.454,00	125.649.030.826,00	128.024.573.837,00	108.715.250.187,00	121.786.006.000,00	162.363.535.388,00	142.323.505.000,00	135.944.574.065,00	7.90
1.2.2	Dana Alokasi Umum	634.461.169.000,00	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	617.780.644.000,00	625.797.945.000,00	625.797.945.000,00	606.928.225.000,00	606.558.865.000,00	637.453.134.000,00	637.453.134.000,00	0.17
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	33.818.740.000,00	27.423.652.000,00	166.590.462.000,00	98.911.475.000,00	116.806.981.000,00	104.798.021.806,00	121.069.685.000,00	111.321.491.483,00	137.089.742.290,00	120.773.716.576,00	70.34
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	210.480.651.174,08	231.971.211.926,00	82.769.634.531,00	99.261.373.737,00	83.798.010.000,00	106.755.031.492,00	134.079.183.235,39	149.151.480.488,50	139.572.197.296,00	178.489.208.018,09	2.43
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.085.373.235,39	26.591.978.422,50	27.236.820.296,00	26.793.452.496,09	0.76
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.668.009.174,08	72.682.839.926,00	63.708.004.531,00	79.760.622.737,00	73.750.000.000,00	96.657.021.492,00	85.800.000.000,00	98.365.692.066,00	77.250.000.000,00	116.626.778.522,00	12.81
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	114.960.439.000,00	115.436.169.000,00	0,00	439.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.846.958.000,00	31.846.958.000,00	(99.81)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.852.203.000,00	43.852.203.000,00	14.061.630.000	14.061.630.000,00	2.548.010.000	2.598.010.000,00	2.943.810.000	5.943.810.000,00	3.238.419.000,00	3.222.019.000,00	(16.62)
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	18.250.000.000	18.250.000.000,00	0,00	0,00	31.11
2	BELANJA	1.618.913.077.843,30	1.120.702.813.857,83	1.732.232.242.102,23	1.484.725.405.962,16	1.421.041.643.981,23	1.269.944.308.580,97	1.425.225.617.136,69	1.237.745.256.862,92	1.547.034.173.917,81	1.312.905.390.345,00	5.39
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	681.616.589.910,12	528.261.178.165,07	643.218.529.095,25	561.753.904.614,90	528.400.339.415,68	484.632.275.127,23	637.390.499.618,92	549.558.308.369,28	711.548.342.726,98	598.343.394.474,94	3.72
2.1.1	Belanja Pegawai	605.583.176.687,12	490.502.785.923,65	571.020.718.626,25	503.214.970.483,54	435.156.995.140,68	405.527.740.796,30	487.592.170.930,33	436.714.503.635,58	537.066.430.280,73	446.144.874.570,00	(1.74)
2.1.4	Belanja Hibah	27.658.986.000,00	21.711.780.000,00	30.660.220.000,00	29.589.010.000,00	43.441.290.250,00	40.796.497.750,00	64.524.397.150,00	57.227.271.926,90	101.584.491.000,00	95.915.614.605,00	45.51
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	35.590.277.448,00	15.202.566.312,42	35.210.770.000,00	27.517.848.901,36	43.421.518.350,00	37.580.975.905,93	81.539.294.943,59	54.857.838.881,80	71.170.360.771,25	55.499.603.639,94	41.18
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	726.827.727,00	(0.01)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.057.089.100,00	116.985.254,00	5.599.759.794,00	705.014.555,00	5.653.475.000,00	0,00	3.007.575.920,00	31.633.250,00	1.000.000.000,00	56.473.933,00	78.53

NO. URUT	URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Rata rata Pertumbuhan
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2.2	BELANJA LANGSUNG	937.296.487.933,18	592.441.635.692,76	1.089.013.713.006,98	922.971.501.347,26	892.641.304.565,55	785.312.033.453,74	787.835.117.517,77	688.186.948.493,64	835.485.831.190,83	714.561.995.870,06	8.09
2.2.1	Belanja Pegawai	114.093.625.331,20	102.547.907.299,00	136.859.249.210,00	126.098.632.251,00	143.019.695.901,00	137.715.438.345,00	139.867.372.968,00	127.839.637.412,00	145.377.221.013,00	134.661.143.735,00	7.59
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	399.512.932.329,39	315.430.879.038,76	471.716.311.038,28	415.027.359.366,76	452.918.241.020,55	404.401.036.982,26	487.577.849.072,77	427.121.160.053,37	454.053.445.735,83	397.140.891.041,80	6.90
2.2.3	Belanja Modal	423.689.930.272,59	174.462.849.355,00	480.438.152.758,70	381.845.509.729,50	296.703.367.644,00	243.195.558.126,48	160.389.895.477,00	133.226.151.028,27	236.055.164.442,00	182.759.961.093,26	18.63
A	SURPLUS / (DEFISIT)	(428.429.158.907,04)	107.282.781.844,76	(535.711.940.752)	(304.804.566.890,75)	(220.907.373.861,05)	(30.812.925.948,00)	(200.094.447.913,44)	40.743.345.028,02	(240.837.743.934,28)	26.500.284.691,73	(185.30)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	428.429.158.907,04	428.429.158.907,04	535.711.940.751,80	535.711.940.751,80	220.907.373.861,05	230.907.373.861,05	200.094.447.913,44	200.094.447.913,44	240.837.743.934,28	240.839.243.934,28	(6.21)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	435.429.158.907,04	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	535.711.940.751,80	230.907.373.861,05	230.907.373.861,05	200.094.447.913,44	200.094.398.906,26	240.837.743.934,28	240.839.243.934,28	(6.71)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	435.429.158.907,04	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	535.711.940.751,80	230.907.373.861,05	230.907.373.861,05	200.094.398.906,26	200.094.398.906,26	240.837.743.934,28	240.839.243.934,28	(6.71)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	PEMBIAYAAN NETTO	428.429.158.907,04	428.429.158.907,04	535.711.940.751,80	535.711.940.751,80	220.907.373.861,05	230.907.373.861,05	200.094.447.913,44	200.094.398.906,26	240.837.743.934,28	240.839.243.934,28	(6.21)
C	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	535.711.940.751,80	0,00	230.907.373.861,05	0,00	200.094.447.913,44	0,00	240.837.743.934,28	0,00	267.339.528.626,01	(9.72)

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Pelaksanaan anggaran Kota Kediri Tahun Anggaran 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 diuraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

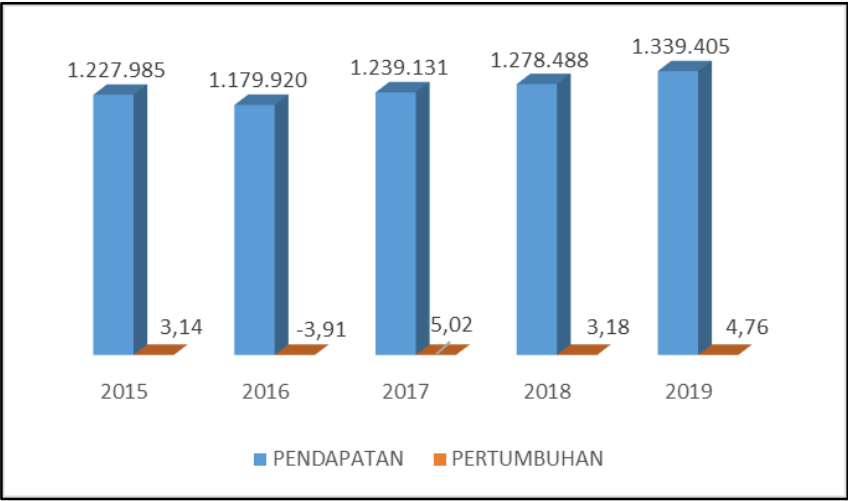
Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Kediri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Pendapatan Daerah Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2015-2019, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Kediri dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,61%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 3,73% serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,43%.

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp.1.179.920.839.071,41 (-3,91%) dari tahun 2015, sedangkan tahun 2017-2019 mengalami kenaikan pertumbuhan. Salah satu faktor penyebab penurunan pendapatan daerah tahun 2016 adalah terdapat penurunan alokasi pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Hal ini karena adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dimana disebutkan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut serta kesiapan pelaksanaan pengalihan kewenangan, maka pada tahun 2017 Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Kediri kewenangannya berpindah ke Provinsi Jawa Timur. Sehingga Tunjangan Profesi Guru PNSD mulai tahun 2016 tidak dialokasikan dan mulai tahun 2017 SMAN/SMKN tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kota Kediri.

Gambaran Pendapatan Daerah Kota Kediri dan pertumbuhannya selama tahun 2015-2019 berdasarkan struktur APBD Kota Kediri, dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut :

**Grafik 3.1 - Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Kediri
Tahun 2015 s.d Tahun 2019 (dalam Jutaan)**



Sumber : BPPKAD Kota Kediri

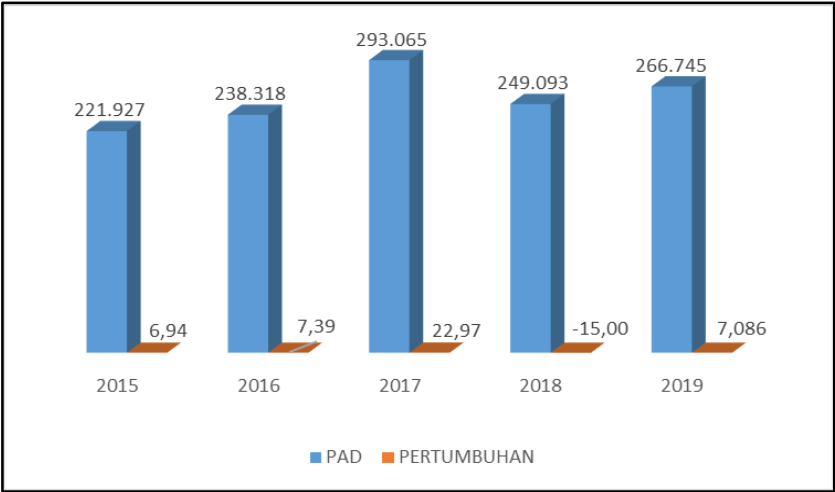
Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri merupakan komponen utama dari Pendapatan daerah, pada tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) masih didominasi oleh sumbangan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Persentase rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri sebesar 5,61%, pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan optimalisasi sumber-sumber PAD yang cukup efektif. Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memaksimalkan perolehan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi terbesar lainnya untuk PAD adalah pajak daerah, berikutnya adalah retribusi daerah, dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD). Perkembangan pendapatan dari BUMD cukup baik, namun mengingat kontribusinya yang masih rendah maka perlu untuk lebih ditingkatkan.

Adapun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2019 sebagaimana pada grafik 3.2 berikut ini :

Grafik 3.2 - Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019 (dalam Jutaan)

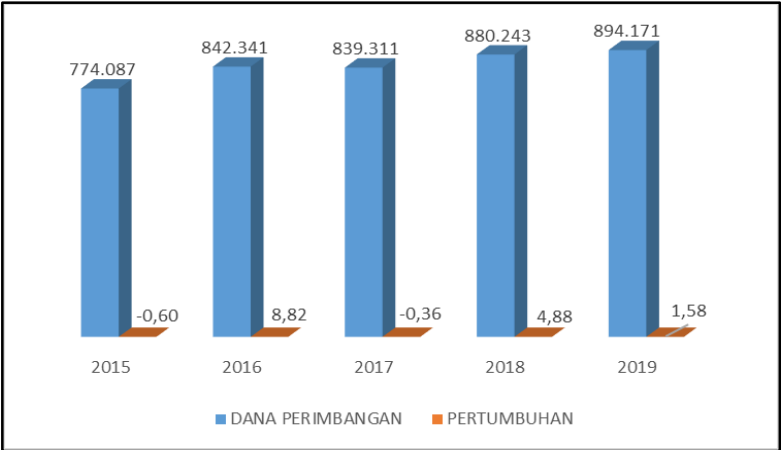


Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Pada tahun 2015-2019 Dana Perimbangan mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019, jumlah realisasi Dana Perimbangan mengalami kenaikan menjadi Rp. 894.171.424.641. Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) merupakan komponen pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk Kota Kediri, hal ini menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kota Kediri cukup tinggi. Aspek kinerja tata kelola keuangan daerah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat untuk menentukan besaran dana perimbangan yang diterima masing-masing Kota/Kabupaten.

Gambaran pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Kediri selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut :

Grafik 3.3 - Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019 (dalam Jutaan)

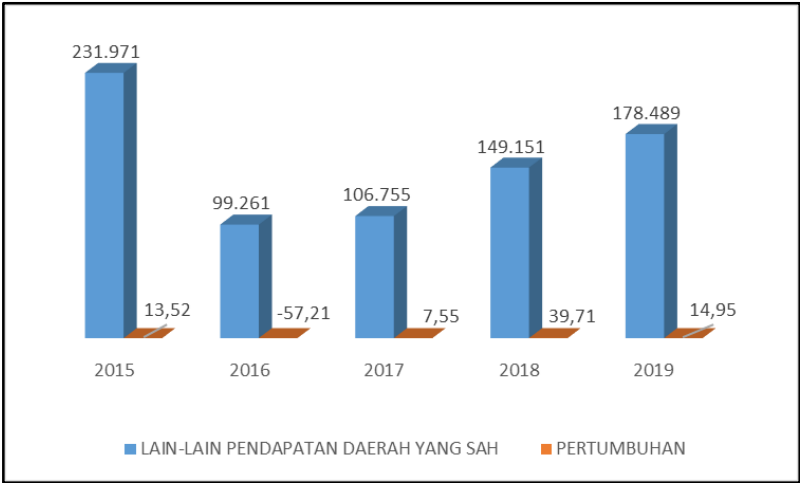


Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen ketiga pada struktur Pendapatan Daerah. Selama tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pendapatan hibah mulai dialokasikan pada tahun 2018, dengan realisasi sebesar Rp.26.591.978.422,50 dan pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp26.793.452.496,09 (0,76%). Sedangkan Alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mulai Tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi, demikian juga dengan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, selama kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Kediri memperoleh Dana Insentif Daerah yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,00, untuk Tahun 2017 sebesar Rp.7.500.000.000,00 serta meningkat menjadi Rp. 18.250.000.000,00 pada tahun 2018, ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kediri semakin baik.

Gambaran Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.4 - Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019 (dalam Jutaan)



Sumber : BPPKAD Kota Kediri

b. Belanja Daerah

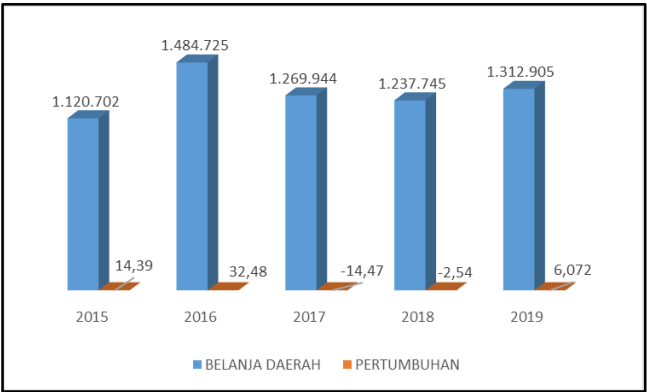
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja Daerah pada periode 2015-2019 dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik untuk urusan wajib atau pilihan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Selama kurun waktu tahun 2015 sebesar Rp.1.120.702.813.857,83 meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp.1.484.725.405.962,16. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.1.269.944.308.580,97 demikian pula pada tahun 2018 menjadi Rp.1.237.745.256.862,92. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan belanja daerah sebesar Rp.1.312.905.390.345,00. Sedangkan pada sisi Belanja Langsung pertumbuhan belanja modal mencapai 18,63%.

Pada Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015-2019 untuk realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,72%, sedangkan untuk Belanja Langsung pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, namun menurun pada tahun 2017-2018 dan kembali naik pada tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 8,09. Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah sebagaimana pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5 - Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019 (dalam Jutaan)



Sumber : BPPKAD Kota Kediri

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 3.1 Pemerintah Kota Kediri melakukan pembiayaan selama kurun waktu 2015-2019. Besarnya SiLPA tahun lalu cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh capaian atas pelampauan dari target penerimaan serta penghematan belanja program dari Perangkat Daerah. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal yang bersifat produktif serta meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah BPR dan Pasar.

3.1.2. NERACA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 - Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019

NO.	URAIAN	CaLK	SALDO (Rp.)					Rata-rata Pertum- buan
			31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	
1	ASET							
2	ASET LANCAR	7.5.3.1						
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1	515.490.945.625,68	216.016.380.267,18	182.296.786.082,06	220.796.237.220,68	253.206.513.982,85	-9,48
4	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.2	0,00	2.222.683,00	537.030,00	15.766.500,00	-	886,68
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.3	1.000,00	1.702.200,00	1.500.000,00	-	4.048.905,00	56.669,37
6	Kas di BLUD	7.5.3.1.4	20.220.994.126,12	7.385.307.347,87	11.173.079.095,83	19.821.940.829,00	13.093.166.270,27	7,82
7	Kas Lainnya	7.5.3.1.5	685.315.527,34	408.208.041,36	6.622.545.705,55	-	-	740,96
8	Kas di Bendahara JKN/FKTP	7.5.3.1.6	0,00	7.501.761.363,00	0,00	-	-	
9	Kas di Bendahara BOS		-	-	-	210.289.892,60	1.039.798.191,89	394,46
10	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00	0,00	-	-	
11	Piutang Pendapatan	7.5.3.1.7	34.624.465.103,00	32.473.058.407,99	50.624.634.801,00	40.793.714.419,00	77.134.383.904,00	29,84
12	Piutang Lainnya	7.5.3.1.8	17.500.000,00	30.622.400,00	5.500.000,00	123.345.486,95	-	
13	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.9	(12.778.287.756,00)	(14.863.952.229,00)	(16.058.897.891,00)	(17.387.956.774,00)	(18.930.496.811,75)	10,38
14	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.10	144.253.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	842.934.517,00	
15	Persediaan	7.5.3.1.11	16.048.632.167,78	22.157.607.509,97	24.740.511.382,58	19.694.751.140,41	18.439.338.804,38	5,74
16	Jumlah Aset Lancar		574.453.818.793,92	271.137.917.991,37	259.431.196.206,02	284.068.088.714,64	344.829.687.763,64	-6,56
17	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.2						
18	Investasi Non Permanen							
19	Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.3.2.1	9.090.000.000,00	9.090.000.000,00	9.090.000.000,00	9.090.000.000,00	9.090.000.000,00	0
20	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	7.5.3.2.2	(312.587.465,07)	(417.603.791,22)	(386.317.245,67)	(47.917.322,04)	(39.951.255,88)	-19,53
21	Jumlah Investasi Non Permanen		8.777.412.534,93	8.672.396.208,78	8.703.682.754,33	9.042.082.677,96	9.050.048.744,12	0,79
22	Investasi Permanen							
23	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.2.3	180.079.923.918,78	181.774.793.656,08	185.398.935.243,69	212.791.448.074,00	207.842.786.348,00	3,85
24	Jumlah Investasi Permanen		180.079.923.918,78	181.774.793.656,08	185.398.935.243,69	212.791.448.074,00	207.842.786.348,00	3,85
25	Jumlah Investasi Jangka Panjang		188.857.336.453,71	190.447.189.864,86	194.102.617.998,02	221.833.530.751,96	216.892.835.092,12	3,71
26	ASET TETAP	7.5.3.3						
27	Tanah	7.5.3.3.1	1.014.111.248.443,38	1.013.991.312.194,38	988.739.460.920,38	988.056.760.006,25	973.892.278.589,16	-1
28	Peralatan dan Mesin	7.5.3.3.2	452.286.428.683,02	566.148.462.447,10	578.543.071.152,11	600.960.735.213,58	666.015.241.341,11	10,52
29	Gedung dan Bangunan	7.5.3.3.3	565.592.507.867,18	921.810.626.710,61	1.095.004.542.716,18	1.106.015.301.054,65	1.049.821.195.440,55	19,42
30	Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.5.3.3.4	451.848.324.181,99	561.883.300.052,72	611.821.640.762,73	721.305.391.908,00	775.330.555.442,66	14,66
31	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.3.5	36.968.221.526,51	44.539.864.261,81	43.328.975.707,68	46.151.190.965,68	47.440.678.905,68	6,77
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.3.6	304.911.785.555,00	160.603.175.369,00	60.539.154.748,00	7.830.120.525,00	9.681.733.771,00	-43,26
33	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.3.7	(641.449.109.515,33)	(759.478.628.592,09)	(849.312.323.270,61)	(960.867.652.727,71)	(1.079.635.356.157,99)	13,93
34	Jumlah Aset Tetap		2.184.269.406.741,75	2.509.498.112.443,53	2.528.664.522.736,47	2.509.451.846.945,45	2.442.546.327.332,17	3,06
35	ASET LAINNYA	7.5.3.4						

NO.	URAIAN	CaLK	SALDO (Rp.)					Rata-rata Pertum- buan
			31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	
36	Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.4.1	276.100.000,00	243.187.500,00	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	-6,49
37	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.5.3.4.2	7.573.603.859,23	7.573.603.859,23	7.619.988.737,23	7.750.157.968,23	7.750.157.968,23	0,58
38	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.4.3	1.673.914.776,00	2.889.301.125,71	3.048.574.785,75	2.475.246.021,92	2.232.544.253,92	12,38
39	Aset Lain-lain	7.5.3.4.4	28.025.789.929,69	28.751.069.442,53	26.127.800.310,86	23.629.009.361,76	23.823.104.410,10	-3,82
40	Jumlah Aset Lainnya		37.549.408.564,92	39.457.161.927,47	37.005.363.833,84	34.063.413.351,91	34.014.806.632,25	-2,31
41	JUMLAH ASET		2.985.129.970.554,30	3.010.540.382.227,23	3.019.203.700.774,35	3.049.416.879.763,96	3.038.283.656.820,18	0,44
42	KEWAJIBAN							
43	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.5						
44	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00	0,00	6.490.508,00	3.297.360,00	-0,49
45	Pendapatan Diterima di Muka	7.5.3.5.1	4.745.392.480,75	6.006.586.158,73	6.758.044.932,01	7.261.397.444,87	7.274.398.866,07	11,68
46	Utang Belanja	7.5.3.5.2	0,00	11.616.934.961,70	11.337.057.973,66	10.017.248.440,00	8.826.944.916,30	-0,09
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.5.3	226.666.550,00	0,00	356.414.730,00	4.084.687.532,00	452.817.950,00	4,79
48	Utang Pengadaan Aset Tetap	7.5.3.5.4	14.070.481.670,00	466.963.460,00	0,00		-	
49	Utang Beban		25.887.913.553,64	0,00	0,00			
50	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		44.930.454.254,39	18.090.484.580,43	18.451.517.635,67	21.369.823.924,87	16.557.459.092,37	-16,11
51	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
52	Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan							
53	Utang Dalam Negeri- Obligasi							
54	Utang Pemerintah Pusat							
55	Utang Pemerintah Provinsi							
56	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota							
57	Utang Luar Negeri/Sektor Perbankan							
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang					-		
59	JUMLAH KEWAJIBAN		44.930.454.254,39	18.090.484.580,43	18.451.517.635,67	21.369.823.924,87	16.557.459.092,37	-16,11
60	EKUITAS							
61	EKUITAS							
62	EKUITAS	7.5.3.6	2.940.199.516.299,91	2.992.449.897.646,80	3.000.752.183.138,68	3.028.047.055.839,09	3.021.726.197.727,81	0,69
63	JUMLAH EKUITAS		2.940.199.516.299,91	2.992.449.897.646,80	3.000.752.183.138,68	3.028.047.055.839,09	3.021.726.197.727,81	0,69
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.985.129.970.554,30	3.010.540.382.227,23	3.019.203.700.774,35	3.049.416.879.763,96	3.038.283.656.820,18	0,44

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Aset Daerah Kota Kediri terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pada tahun 2015-2019 pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai -6,56%. Pertumbuhan investasi jangka panjang sebesar 3,71%, hal ini disebabkan karena adanya penambahan penyertaan modal selama tahun 2014-2018. Penyertaan modal terbesar pada tahun tersebut merupakan penyertaan modal pada PD Pasar baik yang berupa pengeluaran pembiayaan maupun penyerahan aset-aset pasar dari Pemerintah Kota Kediri kepada PD Pasar.

Rata-rata pertumbuhan aset tetap selama tahun 2015-2019 mencapai 3,06%. Hal ini disebabkan sejak tahun 2015 kebijakan akuntansi yang digunakan menggunakan basis akrual yang sebelumnya masih basis CTA (*Cash Toward Accrual*). Sejak tahun itu pula

mulai diterapkan penyusutan aset tetap, sehingga nilai yang disajikan dalam neraca atas aset tetap lebih menunjukkan pada nilai yang riil.

Selama kurun waktu 2015-2019 pertumbuhan aset lainnya sebesar -2,31%. Kenaikan tersebut sebenarnya tidak banyak memberikan pengaruh yang berarti, karena perubahan terbesar pada kemitraan pihak ketiga di tahun 2015 yang disebabkan adanya revisi atas nilai kemitraan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kewajiban Jangka Pendek maupun Jangka Panjang memberikan informasi tentang Utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ke-3 atau Klaim Pihak Ke-3 terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kota Kediri dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dengan rata-rata sebesar -16,11%, menunjukkan bahwa Pemerintah telah maksimal dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek selama kurun waktu tersebut.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban Pemerintah Daerah, terdiri dari Dana Lancar dan Dana Investasi. Pertumbuhan rata-rata Ekuitas Dana Pemerintah Kota Kediri selama kurun waktu 5 tahun sebesar 0,69%.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi, dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah antara lain :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Beberapa kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain :

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Melaksanakan pendataan untuk menjaring wajib pajak/retribusi baru;
 - 2) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi daerah;

- 3) Melaksanakan pemutakhiran data pajak dan retribusi;
 - 4) Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;
 - 5) Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur;
 - 6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah;
 - 7) Penerapan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan dan peningkatan PAD;
 - 8) Meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD;
 - 9) Melaksanakan pembinaan kepada BUMD.
- b. Meningkatkan koordinasi, informasi dan pelaporan Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat, sehingga Dana Perimbangan maupun dana lain dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berdasar pada anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dan Belanja Publik. Belanja Aparatur dipergunakan untuk Belanja Gaji Pegawai, sedangkan Kebijakan Belanja Publik diarahkan untuk :

- a. Menunjang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan prioritas daerah;
- b. Menjamin ketersediaan dana untuk pelayanan dasar bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja serta pengurangan tingkat kemiskinan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada program dan kegiatan.

3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi, yang pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran kebijakan belanja daerah Kota Kediri pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di

masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, antara lain :

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Gambaran tentang Belanja Daerah Kota Kediri dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3 - Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Kediri
Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

NO. URUT	URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2	BELANJA	1.618.913.077.843,30	1.120.702.813.857,83	1.732.232.242.102,23	1.484.725.405.962,16	1.421.041.643.981,23	1.269.944.308.580,97	1.425.225.617.136,69	1.237.745.256.862,92	1.547.034.173.917,81	1.312.905.390.345,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	681.616.589.910,12	528.261.178.165,07	643.218.529.095,25	561.753.904.614,90	528.400.339.415,68	484.632.275.127,23	637.390.499.618,92	549.558.308.369,28	711.548.342.726,98	598.343.394.474,94
2.1.1	Belanja Pegawai	605.583.176.687,12	490.502.785.923,65	571.020.718.626,25	503.214.970.483,54	435.156.995.140,68	405.527.740.796,30	487.592.170.930,33	436.714.503.635,58	537.066.430.280,73	446.144.874.570,00
2.1.4	Belanja Hibah	27.658.986.000,00	21.711.780.000,00	30.660.220.000,00	29.589.010.000,00	43.441.290.250,00	40.796.497.750,00	64.524.397.150,00	57.227.271.926,90	101.584.491.000,00	95.915.614.605,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	35.590.277.448,00	15.202.566.312,42	35.210.770.000,00	27.517.848.901,36	43.421.518.350,00	37.580.975.905,93	81.539.294.943,59	54.857.838.881,80	71.170.360.771,25	55.499.603.639,94
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	726.827.727,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.057.089.100,00	116.985.254,00	5.599.759.794,00	705.014.555,00	5.653.475.000,00	0,00	3.007.575.920,00	31.633.250,00	1.000.000.000,00	56.473.933,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	937.296.487.933,18	592.441.635.692,76	1.089.013.713.006,98	922.971.501.347,26	892.641.304.565,55	785.312.033.453,74	787.835.117.517,77	688.186.948.493,64	835.485.831.190,83	714.561.995.870,06
2.2.1	Belanja Pegawai	114.093.625.331,20	102.547.907.299,00	136.859.249.210,00	126.098.632.251,00	143.019.695.901,00	137.715.438.345,00	139.867.372.968,00	127.839.637.412,00	145.377.221.013,00	134.661.143.735,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	399.512.932.329,39	315.430.879.038,76	471.716.311.038,28	415.027.359.366,76	452.918.241.020,55	404.401.036.982,26	487.577.849.072,77	427.121.160.053,37	454.053.445.735,83	397.140.891.041,80
2.2.3	Belanja Modal	423.689.930.272,59	174.462.849.355,00	480.438.152.758,70	381.845.509.729,50	296.703.367.644,00	243.195.558.126,48	160.389.895.477,00	133.226.151.028,27	236.055.164.442,00	182.759.961.093,26

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Sesuai tabel tersebut di atas, realisasi anggaran belanja daerah tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 83,93%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan terdapat efisiensi anggaran belanja.

- b. Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur
- Untuk gambaran tentang Belanja Daerah yang menggambarkan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 - Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan-kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2015	650.333.825.753,65	1.127.702.813.857,83	57,67
2	Tahun 2016	715.324.444.023,54	1.484.725.405.962,16	48,18
3	Tahun 2017	570.666.605.131,30	1.269.944.308.580,97	44,94
4	Tahun 2018	584.006.204.414,58	1.237.745.256.862,92	47,18
5	Tahun 2019	605.052.960.670,00	1.312.905.390.345,00	46,08

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dimana persentase pada tahun 2016 sebesar 48,18% serta 44,94% pada tahun 2017, namun mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 47,18% dan menurun lagi di tahun 2019 yakni sebesar 46,08%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.5 - Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Kediri Tahun 2015 s.d Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI BELANJA KEBUTUHAN APARATUR					Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
A	Belanja Tidak Langsung	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	405.527.740.796,30	436.714.503.635,58	447.103.765.280,00	5,43
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	366.129.364.938,00	380.308.177.681,00	368.695.402.422,00	366.496.844.916,00	374.143.652.732,00	5,50
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	117.066.039.535,00	116.105.605.554,00	28.162.039.050,00	59.612.049.493,00	60.136.440.936,00	9,02
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.667.000.000,00	2.868.000.000,00	3.246.000.000,00	4.306.500.000,00	5.892.000.000,00	0,83
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	4.305.395.711,80	3.493.262.687,69	4.995.133.515,25	5.885.823.779,13	5.507.767.491,00	(1,18)
5	Belanja pemungutan Retribusi Daerah*	334.985.738,85	439.924.560,85	429.165.809,05	413.285.447,45	465.013.411,00	(5,00)
B	Belanja Langsung	159.831.039.830,00	212.109.473.540,00	165.138.864.335,00	147.291.700.779,00	157.949.195.390,00	0,32
1	Belanja Honorarium PNS**)	33.070.004.917,00	39.361.030.933,00	37.726.790.487,00	35.356.187.177,00	41.380.768.424,00	(4,34)
2	Belanja Honorarium Non PNS	27.815.934.900,00	34.300.326.595,00	38.430.576.700,00	35.599.849.600,00	33.843.401.500,00	(1,47)
3	Belanja Uang Lembur**)	3.924.214.333,00	4.206.475.000,00	3.220.109.000,00	2.525.232.000,00	2.492.378.500,00	(6,25)
4	Belanja jasa pelayanan kesehatan	37.737.753.149,00	48.230.799.723,00	8.840.594.026,00	1.630.249.362,00	914.295.200,00	(22,18)
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	40.000.000,00	(9,50)
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3.177.840.650,00	3.657.796.000,00	2.201.067.000,00	1.725.843.800,00	1.870.311.000,00	(4,73)
7	Belanja premi asuransi kesehatan	4.106.000,00	8.830.000,00	6.000.000,00	0	0	

NO	URAIAN	REALISASI BELANJA KEBUTUHAN APARATUR					Rata-rata Pertum- buhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
8	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	-	-	-	-		
9	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	296.962.500,00	400.178.000,00	401.424.000,00	314.154.500,00	592.407.820,00	(13,90)
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	449.313.800,00	471.338.000,00	314.967.728,00	330.474.450,00	446.803.499,00	(10,11)
11	Belanja perjalanan dinas**)	25.727.535.987,00	40.074.512.131,00	48.979.740.158,00	56.436.916.484,00	62.056.036.031,00	(7,33)
12	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-		
13	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-		
14	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	27.627.373.594,00	41.398.187.158,00	25.017.595.236,00	13.362.793.406,00	14.312.793.416,00	(7,30)
TOTAL		650.333.825.753,65	715.324.444.023,54	570.666.605.131,30	584.006.204.414,58	605.052.960.670,00	(0,01)

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Rata-rata pertumbuhan belanja untuk memenuhi Kebutuhan Aparatur tahun 2015-2019 sebesar -0,01% artinya bahwa belanja aparatur mengalami penurunan pada periode 2015-2019 sebesar -0,01%.

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup selisih tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA). Pada tahun 2018-2019 realisasi belanja lebih kecil dari pada pendapatan sehingga terjadi surplus sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 menunjukan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kota Kediri masih lebih besar dari pada realisasi pendapatan sehingga mengalami defisit anggaran. Kondisi Pembiayaan Daerah selama tahun 2015-2019 digambarkan pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 - Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Kediri
Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

NO	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.227.985.595.702,59	1.179.920.839.071,41	1.239.131.382.633,36	1.278.488.601.890,94	1.339.405.675.036,73
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.120.702.813.857,83	1.484.725.405.962,16	1.269.944.308.580,97	1.237.745.256.862,92	1.312.905.390.345,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) riil	100.282.781.844,76	(304.804.566.890,75)	(30.812.925.947,61)	40.743.345.028,68	26.500.284.691,73

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Tabel 3.7 - Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Kediri
Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

NO	Uraian	Proporsi dari total defisit riil anggaran				
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	230.907.373.861,05	200.094.398.906,26	240.839.243.934,28
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Untuk realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kediri, selama tahun 2015-2019, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.8 - Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Kediri
Tahun 2015 s.d. Tahun 2019**

NO	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	435.429.158.907,04	100	535.711.940.751,80	100	230.907.373.861,05	100	200.094.447.913,44	100	240.839.243.934,28	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	39.765.512.489,42	9,13	37.827.643.848,41	7,06	28.811.710.142,98	12,48	47.358.373.865,18	23,67	7.825.159.543,58	3,25
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	2.528.398.927,00	0,58	(21.816.527.834,00)	-4,07	(61.902.911.628,00)	-6,81	(31.318.282.844,00)	-15,65	30.459.975.871,00	12,65
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	22.586.885.136,47	5,19	21.490.560.751,92	4,01	16.491.739.206,00	7,14	22.957.021.492,00	11,47	15.072.297.253,11	6,26
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	370.548.362.354,15	(85,10)	498.210.263.985,47	93	247.506.836.140,07	107,19	161.097.335.400,26	80,51	187.481.860.273,77	77,85
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	-	0,00	-			0,00	-	0,00	-
7.	Kegiatan lanjutan	0,00	-	0,00	-			0,00	-	0,00	-

Sesuai tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pemerintah Kota Kediri mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Untuk pembiayaan sarana dan prasarana strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah serta penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat serta dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema, antara lain :

- a. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Publik Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah; dan
- c. Kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kebijakan umum kerjasama pembiayaan pembangunan tersebut, yaitu :

- a. Kebijakan umum kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*), kerjasama ini diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah serta menurunkan disparitas wilayah sekaligus meningkatkan perekonomian daerah;

- b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan;
- c. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada kerangka pendanaan ini akan dijelaskan berkaitan dengan pendapatan serta belanja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Kediri melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah terutama sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

- a. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain :
 - Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, membuka tempat-tempat pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada sistem pembayaran pajak/retribusi secara non tunai dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi;
 - Meningkatkan koordinasi dan monitoring dengan antar Organisasi Perangkat Daerah Penghasil;
 - Penyampaian SKPD dan SKRD tepat waktu;
 - Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan PAD;
 - Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.
- b. Ekstensifikasi penerimaan PAD, dengan beberapa pendekatan yaitu :
 - Melaksanakan survey potensi wajib pajak/retribusi yang ditindaklanjuti dengan proses pendataan untuk pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
 - Penggalan sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
 - Melaksanakan pemeriksaan secara berkala kepada Wajib Pajak;
 - Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
 - Mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan ledang secara langsung terhadap wajib pajak/wajib retribusi.

Belanja daerah diarahkan pada pencapaian target sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
- c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat
- d. Meningkatnya penerapan *Smart City*
- e. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat
- f. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
- g. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- h. Meningkatnya produk domestik regional bruto terutama produk-produk unggulan daerah
- i. Meningkatnya ekonomi kreatif
- j. Meningkatnya jumlah investasi
- k. Meningkatnya kinerja BUMD
- l. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
- m. Meningkatnya daya tarik wisata
- n. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
- o. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
- p. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang
- q. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan
- r. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana
- s. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH

3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri dalam 5 tahun kedepan.

Pada perubahan RPJMD tahun 2020-2024 ini struktur APBD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 219. Proyeksi pendapatan, belanja serta pembiayaan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 - Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kota Kediri Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	PROYEKSI			Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	1.207.565.404.905,51	1.283.093.769.233,74	1.225.576.071.899,00	1.216.099.455.608,13	1.270.384.253.260,29	1.280.804.560.908,20	1,50%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	239.764.641.013,51	262.886.289.227,78	272.346.756.588,00	280.286.691.608,13	285.892.425.440,29	291.610.273.949,10	5,13%
4.1.01	Pajak Daerah	101.550.323.000,00	112.204.944.288,62	112.888.250.000,00	113.085.000.000,00	115.346.700.000,00	117.653.634.000,00	3,83%
4.1.02	Retribusi Daerah	9.427.273.000,00	10.293.135.651,00	18.917.716.600,00	26.132.452.200,00	26.655.101.244,00	27.188.203.268,88	35,70%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	1.209.685.603,43	1.209.685.603,43	1.439.972.315,00	1.440.735.219,83	1.469.549.924,23	1.498.940.922,71	5,77%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	127.577.359.410,08	139.178.523.684,73	139.100.817.673,00	139.628.504.188,30	142.421.074.272,07	145.269.495.757,51	3,35%
4.2	Pendapatan Transfer	939.585.563.892,00	992.118.443.735,00	925.014.115.311,00	907.597.564.000,00	956.135.551.820,00	960.696.229.579,10	0,60%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	868.316.936.842,00	895.353.725.667,00	832.431.728.311,00	813.397.564.000,00	861.464.551.820,00	865.551.874.579,10	-0,01%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71.268.627.050,00	96.764.718.068,00	92.582.387.000,00	94.200.000.000,00	94.671.000.000,00	95.144.355.000,00	8,16%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.215.200.000,00	28.089.036.270,96	28.215.200.000,00	28.215.200.000,00	28.356.276.000,00	28.498.057.380,00	0,25%

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	28.215.200.000,00	28.089.036.270,96	28.215.200.000,00	28.215.200.000,00	28.356.276.000,00	28.498.057.380,00	0,25%
5	BELANJA	1.474.904.933.531,52	1.207.691.610.980,16	1.428.487.199.778,00	1.478.808.473.299,00	1.481.913.971.092,93	1.487.397.052.785,97	0,24%
5.1	Belanja Operasi	1.200.446.928.340,69	1.005.007.203.988,26	1.330.896.725.617,00	1.323.676.436.607,00	1.326.456.157.123,87	1.331.364.044.905,23	2,73%
5.2	Belanja Modal	117.017.140.029,54	98.314.709.094,90	81.520.113.361,00	135.061.666.692,00	135.345.296.192,05	135.846.073.787,96	8,98%
5.3	Belanja Tidak Terduga	157.440.865.161,29	104.369.697.897,00	15.500.000.000,00	19.500.000.000,00	19.540.950.000,00	19.613.251.515,00	-15,94%
5.4	Belanja Transfer	-	-	570.360.800,00	570.370.000,00	571.567.777,00	573.682.577,77	0,19%
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(267.339.528.626,01)	75.402.158.253,58	(202.911.127.879,00)	(262.709.017.690,87)	(211.529.717.832,64)	(206.592.491.877,77)	-4,11%
		-	-	-	-			
6	PEMBIAYAAN	267.339.528.626,01	267.341.428.526,01	202.911.127.879,00	262.709.017.690,87	211.529.717.832,64	206.592.491.877,77	-4,11%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	267.339.528.626,01	267.341.428.526,01	202.911.127.879,00	267.709.017.690,87	250.529.717.832,64	206.592.491.877,77	-4,13%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	267.339.528.626,01	267.341.428.526,01	202.911.127.879,00	267.709.017.690,87	250.529.717.832,64	162.592.491.877,77	-8,43%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000.000,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00	0,00
	Silpa Tahun Berjalan	0,00	342.743.586.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.2. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Penghitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program Jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10 - Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

No	URAIAN	PROYEKSI				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendapatan	1.207.565.404.905,51	1.225.576.071.899,00	1.216.099.455.608,13	1.270.384.253.260,29	1.280.804.560.908,20
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	44.000.000.000,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	267.339.528.626,01	202.911.127.879,00	262.709.017.690,87	255.529.717.832,64	162.592.491.877,77
	Total penerimaan	1.474.904.933.531,52	1.428.487.199.778,00	1.478.808.473.299,00	1.525.913.971.092,93	1.487.397.052.785,97
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	819.873.112.547,29	-	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	44.000.000.000,00	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	655.031.820.984,23	1.428.487.199.778,00	1.478.808.473.299,00	1.481.913.971.092,93	1.487.397.052.785,97

Berdasarkan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah di atas, maka alokasi anggaran harus sesuai dengan prioritas daerah agar dalam penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 - Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp)				
		2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	655.031.820.984,23	1.428.487.199.778,00	1.478.808.473.299,00	1.481.913.971.092,93	1.487.397.052.785,97
II	Rencana pengeluaran prioritas I	186.090.746.064,04	712.188.946.951,00	737.277.204.517,27	738.825.486.646,76	741.559.140.947,35
III	Rencana pengeluaran prioritas II	311.500.209.758,90	685.798.252.827,00	709.956.846.243,93	711.447.755.621,05	714.080.112.316,84
IV	Rencana pengeluaran prioritas III	157.440.865.161,29	30.500.000.000,00	31.574.422.537,79	31.640.728.825,12	31.757.799.521,78

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 3 (tiga) Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai Belanja wajib dan mengikat;
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas walikota dan wakil walikota juga termasuk hal tersebut;
- c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana Anggaran Pemerintah Kota Kediri tahun 2020-2024 ini diharapkan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran sehingga lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *performance based budgeting*.

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan terjadi karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam perencanaan yang telah disusun. Kesenjangan terjadi karena tidak atau kurang tercapainya target pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dimasa datang. Pada umumnya penyelenggaraan pembangunan di Kota Kediri dalam kurun waktu 2014-2019 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan masih terdapat permasalahan dan tantangan pembangunan daerah dari berbagai bidang. Permasalahan tersebut timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah/eksternal yang tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, permasalahan pembangunan daerah harus diidentifikasi agar dapat dicarikan solusinya. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan agar rencana pembangunan yang akan disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Berdasarkan identifikasi kinerja pembangunan yang telah disajikan dalam gambaran umum kondisi di Kota Kediri pada bab 2, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

4.1.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

a. Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2014-2019 menunjukkan tren yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,46%. Namun akibat adanya pandemi Covid-19 menimbulkan gangguan pada aktivitas ekonomi. Dampak yang dirasakan seperti terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, serta terganggunya mobilitas masyarakat sehingga terjadi perlambatan ekonomi di Kota Kediri dengan proyeksi sebesar minus 6,25%. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan rakyat perlu adanya kebijakan terpadu di berbagai bidang.

b. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Indeks Gini Kota Kediri selama 5 tahun terakhir berfluktuasi dibawah 4 dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Peningkatan indeks gini Kota Kediri mengindikasikan adanya masalah ketimpangan pendapatan. Untuk itu perlu ada upaya untuk pemerataan pendapatan sehingga indeks gini menurun.

c. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Pada periode 2015 sampai 2019 Pemerintah Kota Kediri berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,93% yaitu dari 8,51% ke 7,16%. Walaupun angka kemiskinan Kota Kediri masih dibawah Provinsi Jawa Timur, namun tingkat kemiskinan Kota Kediri menempati posisi kedua tertinggi dari 9 Kota di Jawa Timur pada tahun 2020. Karena adanya pandemi covid-19 sejak awal tahun mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 7,69 atau naik sebesar 0,53%.

d. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri pada Tahun 2020 berada di posisi 6 tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Mengingat SDM merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, mendorong Kota Kediri untuk dapat memanfaatkan kondisi ini menjadi potensi dan bukan menjadi masalah dalam pembangunan.

4.1.2 ASPEK PELAYANAN DASAR UMUM

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar masih perlu ditingkatkan dari segi kuantitatif dan kualitatif untuk menunjang pembelajaran yang bermutu;
2. Jumlah sekolah menengah pertama negeri masih belum sebanding dengan jumlah murid;
3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV masih perlu ditingkatkan;
5. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan di semua satuan pendidikan;
6. Peningkatan pelaksanaan kejar paket bagi masyarakat yang berusia diatas 25 tahun dan masih berpendidikan rendah;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan non formal;
8. Pembelajaran berbasis teknologi informasi perlu dikembangkan guna memenuhi tuntutan penyelenggaraan kualitas pembelajaran yang inovatif;
9. Perlu percepatan pelaksanaan pendidikan secara luring agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri;
10. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka penyediaan sekolah luar biasa di Kota Kediri.

b. Bidang Kesehatan

1. Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang perlu ditangani secara komprehensif serta perlu dukungan dari seluruh unsur baik pemerintah maupun masyarakat;
2. Sarana prasarana pelayanan kesehatan dan peralatan medis maupun non medis yang ada baik di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan poskeskel masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
3. Perlu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan dokter spesialis pada unit-unit pelayanan kesehatan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Kemandirian masyarakat di bidang kesehatan dengan pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pengelolaan tempat-tempat umum yang sehat dan lingkungan yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) perlu ditingkatkan;
5. Penurunan stunting dengan memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik;
6. Pemerintah daerah belum memiliki rumah sakit tipe C/D untuk menjadi rujukan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
7. Perlu peningkatan kualitas layanan pada rumah sakit umum daerah;
8. Belum optimalnya pencapaian tujuan *Universal Health Coverage* (UHC) dalam meningkatkan kualitas pelayanan di layanan kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan terkait bidang pekerjaan umum antara lain :

1. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaannya dan normalisasi jaringan drainase;
2. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur prasarana sumber daya air;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sistem pengolahan limbah terpusat bagi pelaku usaha/ industri kecil dan rumah tangga;
4. Kurang tercukupinya kebutuhan jaringan irigasi yang baik untuk meningkatkan produksi pertanian;
5. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (*system sewerage*) IPAL/IPAL Komunal dan belum adanya IPLT;
6. Terbatasnya lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) perkotaan sehingga diperlukan perluasan TPA Klotok Kota Kediri serta penguatan kerjasama dalam pembangunan TPA Regional dengan Kabupaten Kediri yang difasilitasi Provinsi Jawa Timur;
7. Masih diperlukannya koordinasi yang intensif dengan provinsi terutama terkait pembangunan dan pemeliharaan plengsengan/tanggul yang menjadi kewenangan provinsi;
8. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan bangunan di Kota Kediri terlihat dari rendahnya rasio bangunan ber-IMB;
9. Diperlukannya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Selingkar Wilis di Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 antara lain berupa pembangunan kampung tenun;
10. Diperlukannya pembangunan jaringan infrastruktur pasif berupa pipa saluran media transmisi kabel (*ducting*) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan perkotaan;

11. Perlu peningkatan kualitas bangunan untuk layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Kediri melalui revitalisasi RS Kilisuci;
12. Perlunya peningkatan perekonomian melalui penyediaan sarana perdagangan skala regional dan peningkatan kualitas pasar tradisional;
13. Perlu peningkatan akses dari bandara atau jalan tol ke pusat-pusat ekonomi di Kota Kediri;
14. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga antara lain revitalisasi Stadion Brawijaya dan GOR Jayabaya;
15. Perlunya penyediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi kreatif dan kepemudaan antara lain melalui revitalisasi Gedung Nasional Indonesia (GNI).

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Cakupan rumah layak huni di Kota Kediri di tahun 2020, jumlah rumah yang ada di Kota Kediri sebanyak 59.302 dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 55.946 atau 94,34%, telah mencapai target sebesar 94,34%. Permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Kota Kediri antara lain :

1. Belum optimalnya penataan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Kediri yang disebabkan antara lain :
 - a) Masih adanya *backlog* dikarenakan harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan di bawah MBR;
 - b) Masih perlu penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c) Masih adanya perumahan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sehingga banyak PSU Perumahan yang rusak belum dapat diperbarui.
2. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemenuhan perbaikan rumah tidak layak huni, kebersihan, penerangan jalan umum;
3. Masih adanya kelurahan yang masuk kawasan kumuh maupun kawasan rawan kumuh yang memerlukan penanganan dan antisipasi agar tidak menurun menjadi kawasan kumuh;
4. Infrastruktur jalan dan drainase lingkungan perumahan dan permukiman masih perlu ditingkatkan;
5. Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman masih perlu ditingkatkan;
6. Masih rendahnya jumlah tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri;
7. Perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana perkotaan antara lain peningkatan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU).

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Permasalahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, antara lain:

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasana penunjang pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seperti mobil pemadam kebakaran dan sarana pendukungnya,

poskamling yang aktif serta lainnya sehingga terkadang mempengaruhi *response time* pelayanan;

2. Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) seperti peredaran miras, penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika, dan tindak asusila terselubung, bangunan tanpa izin dan gepeng;
3. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi perda, seperti pelanggaran pemasangan reklame dan kawasan bebas reklame, kawasan bebas PKL;
4. Perlu peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri;
5. Perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme, terorisme dan konflik antar elemen masyarakat yang ada;
6. Perlunya menumbuhkan kembali rasa Cinta Tanah Air dan Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya :
 - a) Pergeseran nilai budaya lokal gotong royong dan kekeluargaan;
 - b) Derasnya pengaruh budaya asing dan paham liberalisme, sosialisme, komunisme, radikalisme dengan segala bentuk manifestasinya;
 - c) Pengaruh negatif media sosial.

f. Bidang Sosial

Beberapa permasalahan sosial di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Database kemiskinan masih perlu dilakukan *updating* secara berkala;
2. Belum tuntasnya penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan data susenas jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 23.770 jiwa (2015) dan menurun menjadi 22.196 jiwa (2020). Angka tersebut masih cukup tinggi (7,69%) jika dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada pemerintahan kota seluruh Jawa Timur;
3. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui tempat penampungan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Belum optimalnya peran dan fungsi tenaga Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat;
5. Perlu adanya program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas;
6. Perlu peningkatan fasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas pada berbagai *event* di Kota Kediri;
7. Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar PMKS belum seluruhnya tepat sasaran;
8. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana non alam.

4.1.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Kediri berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 menjadi 4,22%. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 telah meningkatkan pengangguran menjadi 6,21% pada tahun 2020. Masih ada beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Kota Kediri yang perlu ditangani antara lain:

1. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang memiliki daya saing di pasar kerja, hal tersebut dikarenakan :
 - a) Tenaga kerja yang sesuai kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan masih perlu ditingkatkan;
 - b) Minimnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja;

- c) Berkurangnya kontribusi penempatan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
- 2. Belum optimalnya pelaksanaan hubungan industrial. Permasalahannya antara lain :
 - a) Belum optimalnya kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kepatuhan hukum peraturan ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) dan pemberian jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja;
 - b) Belum optimalnya pelaksanaan norma dan syarat-syarat kerja secara berkelanjutan.
- 3. Perlu peningkatan pelatihan kewirausahaan untuk penciptaan wirausaha baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Beberapa permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Kediri antara lain sebagai berikut:

- 1. Pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan;
- 2. Masih adanya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3. Pencapaian indikator kota layak anak belum optimal;
- 4. Pengaruh teknologi informasi pada anak usia remaja yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar berdampak buruk terjadinya kejahatan seksual, tindak kekerasan dan perdagangan orang, perilaku seks bebas, penggunaan narkoba dan kasus perkawinan usia muda.

c. Bidang Pangan

Beberapa permasalahan ketahanan pangan yang perlu ditangani antara lain:

- 1. Belum terpenuhinya pola konsumsi pangan sesuai PPH Nasional dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang komposisi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman);
- 2. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasar, harga dan akses pangan daerah karena belum intensifnya pengumpulan data pasar, harga dan akses pangan;
- 3. Masih ada beberapa kelurahan yang rentan terhadap kerawanan pangan.

d. Bidang Pertanahan

Identifikasi masalah pada bidang pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagai kepastian dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Beberapa permasalahan antara lain :

- 1. Proses pengadaan tanah memerlukan waktu yang relatif panjang;
- 2. Pemahaman masyarakat terhadap bidang pertanahan masih perlu ditingkatkan.

e. Bidang Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari dan penurunan kualitas lingkungan. Sehingga permasalahan terkait dengan lingkungan hidup di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Masih diperlukannya peningkatan luasan RTH Publik di Kota Kediri dalam mencapai luasan RTH 20% dari luas wilayah;
2. Kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Masih diperlukan peningkatan penanganan dan pengurangan sampah perkotaan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan air limbah, baik limbah industri, domestik maupun tinja terutama dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup untuk mengendalikan pencemaran limbah industri pada lingkungan di sekitarnya; yang menyebabkan indeks kualitas air di Kota Kediri semakin menurun;
5. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja perlu diikuti dengan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup yang ketat.

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam menilai tertib administrasi kependudukan di Kota Kediri, indikator yang dapat digunakan adalah jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan akte nikah, Kartu Identitas Anak. Persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk tahun 2020 sebesar 98,35%. Kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa penduduk tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri sudah sangat baik, namun perlu peningkatan sehingga seluruh penduduk yang tinggal di Kota Kediri secara administrasi terdaftar dalam *database* kependudukan. Beberapa permasalahan di bidang catatan sipil dan kependudukan antara lain sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil masih perlu ditingkatkan;
2. Perlu peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil terutama peningkatan kualitas SDM;
3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana layanan kependudukan;
4. Belum optimalnya digitalisasi data kependudukan dan catatan sipil.

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Permasalahan terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Masih besarnya ketergantungan masyarakat kelurahan terhadap bantuan pemerintah, sehingga perlu peningkatan keswadayaan masyarakat;
2. Manajemen di tingkat pemerintah kelurahan masih perlu ditingkatkan;
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan.

h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri tahun 2018 hanya 0,01. Upaya pengendalian penduduk tersebut berhasil karena Pemerintah Kota Kediri turut menggalakkan Gerakan Kampung Keluarga Berencana sebagai perwujudan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga. Pada tahun 2019, jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) mencapai 70,07% dari seluruh pasangan usia subur di Kota Kediri. Persentase keikutsertaan KB tersebut sudah cukup tinggi, namun perlu ditingkatkan lagi,

terutama di Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Beberapa permasalahan di urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sebagai berikut :

1. Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal;
2. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional penyuluh KB/PLKB;
3. Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja kurang optimal;
4. Masih terdapat pernikahan dibawah umur 20 tahun.

i. Bidang Perhubungan

Kualitas pelayanan pemerintah daerah yang baik pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas/konektivitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Permasalahan pada urusan perhubungan antara lain :

1. Capaian indikator rasio ijin trayek dan layanan angkutan umum perkotaan masih perlu ditingkatkan sehingga membutuhkan pengembangan jaringan angkutan umum orang perkotaan di Kota Kediri;
2. Peningkatan fasilitas perlengkapan lalu lintas angkutan jalan sangat diperlukan untuk menekan angka kecelakaan di Kota Kediri;
3. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan angkutan umum perkotaan terutama armada bus sekolah dan pelayanan angkot;
4. Kurang tersedianya halte di tempat-tempat strategis, serta masih perlunya peningkatan pemeliharaan untuk fasilitas penumpang di halte.

j. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan terkait dengan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerapan *e-Government* dalam rangka peningkatan layanan publik;
2. Pengelolaan keamanan prasarana perangkat keras dan perangkat lunak yang ada masih perlu ditingkatkan;
3. Ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan komunikasi teknologi informasi masih perlu ditingkatkan;
4. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur teknologi informasi masih perlu ditingkatkan;
5. Penggiat teknologi informasi belum diberdayakan dan komunitas teknologi informasi belum dikelola dengan optimal.

k. Bidang Koperasi, Usaha Mikro

Permasalahan terkait dengan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pertumbuhan produktivitas usaha mikro sehingga daya saing Usaha Mikro rendah, karena pengelolaan manajemen, kelembagaan, pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi belum optimal;
2. Pembinaan koperasi belum optimal, sehingga koperasi sehat belum terwujud secara optimal;
3. Masih kurangnya minat koperasi dan usaha mikro dalam memanfaatkan program penyertaan modal;
4. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro belum optimal.

l. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan terkait dengan bidang penanaman modal di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan, penanaman modal dan prosedur perizinan karena keterbatasan infrastruktur perizinan dan penanaman modal;
2. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan secara periodik kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dalam rangka pengkinian data investasi untuk tujuan pemantauan realisasi investasi, pembentukan strategi meningkatkan investasi dan memelihara iklim investasi yang kondusif;
3. Perlu peningkatan promosi dan penciptaan iklim investasi di Kota Kediri.

m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan terkait dengan kepemudaan dan olah raga antara lain adalah :

1. Sarana dan wadah bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya seni, inovasi dan kreatifitasnya perlu ditingkatkan;
2. Sarana dan prasarana olahraga masih perlu ditingkatkan;
3. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan/kompetisi kepemudaan dan olahraga.

n. Bidang Statistik

Permasalahan terkait dengan statistik adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral disebabkan belum terbangunnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok fungsi serta peran wali data sektoral Pemerintah Kota Kediri;
2. Belum optimalnya sistem satu data dan pengelolaan statistik sektoral. Akar masalah antara lain :
 - a) Karena masih kurangnya tim teknis yang mengelola database dan belum tersosialisasi;
 - b) Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;
 - c) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas sarana, prasarana dan infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral.

o. Bidang Persandian

Permasalahan terkait dengan persandian adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang terbatas;
2. Pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan;
3. Kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi perlu ditingkatkan.

p. Bidang Kebudayaan

Permasalahan terkait Urusan Kebudayaan di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu dioptimalkan integrasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan;
2. Masih terbatasnya apresiasi terhadap budaya lokal Kota Kediri;

3. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal;
4. Terbatasnya event besar karena dampak covid-19.

q. Bidang Perpustakaan

Permasalahan terkait dengan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana prasarana infrasturktur Perpustakaan Umum Daerah sehingga tingkat apresiasi terhadap perpustakaan dan partisipasi pemanfaatan perpustakaan masih rendah;
2. Gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masih bersifat parsial belum terintegrasi;
3. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan;
4. Penyelenggaraan perpustakaan masih perlu ditingkatkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

r. Bidang Kearsipan

Permasalahan terkait dengan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga arsiparis dan pengelola arsip yang handal dari segi kualitas dan kuantitas;
2. Kurang sadarnya pemangku kepentingan akan pentingnya arsip sehingga banyak program kearsipan yang belum dapat dilaksanakan;
3. Kurangnya fasilitas kearsipan (sarana dan prasarana) menjadikan belum optimalnya penanganan arsip perangkat daerah disimpan arsipnya di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

a. Bidang Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan Kelautan dan Perikanan di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih perlu ditingkatkan;
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap sistem budidaya dan pemasaran ikan yang baik;
3. Belum adanya pasar ikan yang representatif;
4. Harga jual ikan air tawar tidak stabil tergantung harga pakan, cuaca dan pemasok ikan.

b. Bidang Pariwisata

Permasalahan Pariwisata di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Kurang kepedulian lingkungan masyarakat sekitar obyek wisata untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan obyek wisata;
2. Kurang optimalnya penggalan potensi dan penanganan objek wisata serta terbatasnya obyek wisata yang ada di Kota Kediri;
3. Perlu penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada tempat-tempat wisata di Kota Kediri;
4. Kurang tersedianya informasi terkait hal-hal menarik dari tempat-tempat wisata di Kota Kediri;
5. Pemulihan sektor pariwisata dari dampak pandemi Covid-19.

c. Bidang Pertanian

Beberapa permasalahan pada urusan pertanian antara lain sebagai berikut :

1. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian produktif dan peternakan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan industri serta komoditas lainnya dan intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi;
2. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian serta kurangnya penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang modern dan efisien yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian;
3. Kesuburan tanah yang semakin berkurang karena kadar organik tanah yang rendah; akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia;
4. Banyak organisme pengganggu tumbuhan yang mengakibatkan turunnya produktivitas;
5. Rendahnya regenerasi petani dan peternak;
6. Kurangnya sarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang standart untuk memenuhi kebutuhan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
7. Peningkatan sarana-prasarana pertanian;
8. Kurangnya sarana pendukung dalam kegiatan Puskeswan.

d. Bidang Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
2. Makin besarnya persaingan baik produk maupun harga antara barang impor dan buatan dalam negeri yang menjadi komoditas perdagangan;
3. Terbatasnya kerjasama dan akses pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor serta terbatasnya pasar ekspor;
4. Makin maraknya pedagang kaki lima (PKL) sebagai dampak pandemic covid-19 sementara sumber daya untuk pembinaan PKL masih terbatas sehingga perlu dilakukan revitalisasi PKL;
5. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok dan penting;
6. Belum optimalnya pengawasan peredaran barang pokok dan penting;
7. Kurangnya sumber daya untuk pelayanan metrologi legal; dan
8. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga.

e. Bidang Perindustrian

Permasalahan sektor Industri di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagai upaya untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi;
2. Lemahnya kualitas sumber daya aparatur sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi dalam pengolahan produk, peningkatan kualitas/mutu, diversifikasi produk dan packaging;
3. Kurangnya daya saing industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri dikarenakan kurangnya kualitas dan mutu produk IKM dan industri kreatif;

4. Belum optimalnya pengetahuan teknologi informasi pemasaran serta lemahnya akses pemasaran terhadap hasil-hasil produksi;
5. Ketergantungan bahan baku impor mengakibatkan biaya produksi tinggi;
6. Kurangnya industri yang berwawasan lingkungan sehingga belum tersedia IPAL terutama di sentra potensial;
7. Beberapa IKM menghentikan kegiatan produksi dan melakukan PHK akibat pandemic covid-19; dan
8. Masih terbatasnya sarana prasarana produksi dan akses permodalan IKM.

4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah:

1. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan perlu ditingkatkan sehingga menjadi *feedback* untuk perencanaan selanjutnya;
2. Koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal serta lintas sektoral dalam perumusan rencana pembangunan daerah perlu ditingkatkan;
3. Perlu peningkatan kualitas perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial.

b. Bidang Keuangan

Beberapa permasalahan bidang keuangan pembangunan adalah:

1. Kesadaran wajib pajak masih perlu ditingkatkan;
2. Optimalisasi pemanfaatan dan kualitas pengelolaan aset daerah;
3. Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan belum teragendakan secara teratur oleh perangkat daerah;
4. Rasio kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan;
5. Adanya perubahan regulasi/ sistem pengelolaan keuangan memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat.

c. Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa permasalahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah:

1. Perlu peningkatan instrumen untuk mengukur kinerja pegawai guna menentukan *reward* dan *punishment*;
2. Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi PNS Kota Kediri sehingga belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;
4. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional;
5. Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat serta belum optimalnya penerapan SOP pelayanan yang ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai.

d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu:

1. Penelitian dan pengembangan perlu diarahkan untuk penyediaan data perencanaan;
2. Persentase hasil riset, penelitian, pengembangan yang diterapkan dan dimanfaatkan belum optimal.

e. Fungsi Lainnya

Permasalahan terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, pengawasan, Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Implementasi SAKIP pada beberapa perangkat daerah masih perlu dioptimalkan;
2. Perlu peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Belum semua kesepakatan kerjasama ditindak lanjuti secara optimal oleh perangkat daerah terkait;
4. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
5. Masih kurangnya ketaatan Obyek Pemeriksaan (Obrik) terhadap aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun kinerja, sehingga selama ini masih sering terjadi adanya temuan yang berulang;
6. Terlalu lamanya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan daya tanggap obyek pemeriksaan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;
7. Belum efektifnya BUMD melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
8. Ketidakstabilan Peningkatan Laba Bersih BUMD;
9. Perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan BUMD;
10. Masih banyaknya lembaga keagamaan/sosial yang memerlukan bantuan;
11. Masih banyaknya kegiatan perorangan/kelompok masyarakat dibidang keagamaan, sosial, budaya yang memerlukan dukungan pemerintah;
12. Perlu optimalisasi peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat untuk menjaga stabilitas Kota Kediri.

4.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pada Aspek Daya Saing Daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Jumlah tindak pidana kriminalitas masih perlu diturunkan;
2. Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI) di Kota Kediri perlu ditekan.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Selain dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan Kota Kediri melalui berbagai pertimbangan di antaranya dengan mempertimbangkan (1). Dinamika internasional, nasional dan regional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempengaruhi pembangunan Kota Kediri; (2). Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pembangunan Kota Kediri; (3). Kebijakan pembangunan

Kota Kediri yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Kediri. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 PENELAAHAN AGENDA INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL dan PROVINSI

Penentuan isu strategis didahului dengan penelaahan atau mengkaji agenda pembangunan internasional dan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang relevan dan dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang dalam memberi arah pembangunan Kota Kediri.

a. Penelaahan Isu Strategis Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan penelaahan atau mengkaji agenda pembangunan internasional dan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang relevan dan dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang dalam memberi arah pembangunan Kota Kediri.

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan daerah antara lain: pandemi Covid-19 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Pada awal tahun 2020, Corona Virus Disease-19 (Covid-19) ditetapkan menjadi pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO). Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga di sektor lainnya seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial, dan lain-lain. Pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan akibat Covid-19 menjadi agenda penting bagi dunia.

Sedangkan, SDGs dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai dari Tahun 2000-2015. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup;
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. *Sustainable Development Goals* terdiri dari 17 tujuan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 tidak melaksanakan tujuan ke-14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan karena bukan menjadi kewenangan Kota Kediri. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis berkaitan dengan pelaksanaan SDGs di Kota Kediri, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik
2. Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau
3. Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif
4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
5. Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kota
6. Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat akibat Dampak Covid-19
7. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Kesenjangan dan Lapangan Kerja
8. Peningkatan Hubungan Industrial
9. Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak
10. Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH)
11. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Inflasi, Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

b. Penelaahan Isu Strategis Regional

Permasalahan Covid-19 telah menjadi permasalahan global. Perlemahan ekonomi terjadi hampir di seluruh negara. Melemahnya sektor ekonomi kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan, misalnya meningkatnya kemiskinan, pengurangan produksi oleh sektor industri, meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), hingga menimbulkan permasalahan sosial. Terlebih lagi kawasan Asia Tenggara tengah merintis perkembangan sektor industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital dalam upaya transformasi sektor jasa dan manufaktur untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun, kehadiran Covid-19 membuat ekonomi menjadi lesu dan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang berdampak juga pada produktivitasnya yang harus ditahan. Tercatat negara-negara di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, kecuali Vietnam yang berhasil mencatatkan pertumbuhan positif 2,91% sedangkan Indonesia berada di posisi kedua teratas dengan pertumbuhan ekonomi -2,07%. Di sisi lain, kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) yang mewajibkan masyarakat untuk memprioritaskan aktivitas di dalam rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah menyebabkan penggunaan internet dan sarana teknologi lainnya berkembang dengan pesat. Hal ini mendorong masyarakat untuk semakin terampil dalam memanfaatkan internet dan teknologi dalam menjalankan setiap aktivitasnya, seperti *Work From Home* (WFH), pembelajaran via daring, dan transaksi bisnis yang dilakukan secara digital (*e-commerce*). Pembiasaan ini akan menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan era *society 5.0*, yaitu tatanan masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dengan dunia nyata.

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2016 menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan *Gross Domestic Product* GDP Indonesia.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Masyarakat Ekonomi ASEAN juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan

bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

Isu demografi menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia dalam menghadapi MEA. Meskipun peran dominan dalam meningkatkan kualitas SDM menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu kesadaran dari masyarakat bahwa MEA akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama.

Terkait isu demografi, yang menjadi isu strategis bagi Kota Kediri adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia terutama pada usia yang produktif untuk mampu memanfaatkan dan memiliki daya saing tinggi baik daya saing lokal maupun regional bahkan internasional serta bagaimana produk-produk UKM yang ada memenuhi standard ISO, *eco labelling*, atau standart-standart yang dipersyaratkan untuk dapat menembus pasaran ekspor baik regional maupun internasional.

c. Penelaahan Isu Strategis Nasional

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tujuan tahap IV RPJPN 2005-2025 yang diakomodir dalam dalam RPJMN 2020-2024 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu diperlukan struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah dan SDM berkualitas. Sehingga Visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut kemudian ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, 7 agenda pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjawab isu strategis, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa);
- 2) Peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- 3) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
- 4) Peningkatan sinergi pemanfaatan ruang wilayah;
- 5) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 6) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 7) Pemenuhan layanan dasar;

- 8) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 9) Pengentasan kemiskinan;
- 10) Peningkatan produktivitas dan daya saing;
- 11) Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
- 12) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan indonesia;
- 13) Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti;
- 14) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
- 15) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan;
- 16) Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;
- 17) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
- 18) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
- 19) Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
- 20) Keselamatan dan keamanan transportasi;
- 21) Ketahanan kebencanaan infrastruktur;
- 22) Pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
- 23) Peningkatan konektivitas jalan;
- 24) Peningkatan infrastruktur ekonomi;
- 25) Peningkatan infrastruktur perkotaan;
- 26) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- 27) Transformasi digital;
- 28) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 29) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
- 30) Pembangunan rendah karbon;
- 31) Konsolidasi demokrasi;
- 32) Optimalisasi kebijakan luar negeri;
- 33) Penegakan hukum nasional;
- 34) Reformasi birokrasi dan tata kelola;
- 35) Menjaga stabilitas keamanan nasional.

2. *Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, hal ini merupakan jawaban dari transisi kepemimpinan nasional yang menetapkan kebijakan baru. Perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap RTRWN. Perlu menjadi catatan bahwa pada RTRWN terdahulu, sebagian proyek-proyek strategis nasional yang belum terwadahi, sehingga menyulitkan implementasi di lapangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) ini, Pemerintah akan dapat mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN yang secara umum berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Perubahan PP ini juga mengatur serta mengakomodasi proyek-proyek yang sudah ada di pemerintahan sebelumnya maupun proyek yang ada pada pemerintahan sekarang serta yang direncanakan pada masa yang akan datang. Dengan terbitnya PP ini maka seluruh proyek infrastruktur strategis bisa segera dilaksanakan, mulai dari pembebasan lahan, pembangunan hingga pengelolaannya. Peraturan Pemerintah ini juga memayungi secara hukum pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang telah termuat

di dalamnya tetapi belum diakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota, karena PP ini bersifat overrule terhadap hirarki Rencana Tata Ruang di bawahnya.

Salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam PP ini adalah rencana pembangunan Tol Nganjuk-Kediri yang tentunya akan mengubah pola pergerakan, pola konsumsi dan jalur distribusi manusia, barang dan jasa dari dan keluar Kota Kediri, dampak besar lain yang ditimbulkan dari rencana ini adalah adanya perubahan pola investasi terutama pada industri dan perdagangan. Beberapa industri skala besar mulai melirik Kota Kediri sebagai lokasi investasi, mengingat dengan adanya jalan Tol Nganjuk-Kediri akan memudahkan akses distribusi sumber daya, bahan baku, dan faktor-faktor produksi maupun hasil-hasil produksi dari industri tersebut, selain itu kawasan-kawasan industri di area Gerbang Kertasusila telah menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang sangat tinggi dibanding dengan Kota Kediri, membuat Kota ini menjadi lebih menarik sebagai lokasi investasi. Hal ini bukan hanya berdampak terhadap infrastruktur maupun ekonomi, tetapi juga akan mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan dan kompetisi tenaga kerja dari dalam kota dan wilayah-wilayah sekitar.

d. Penelaahan Isu Strategis Provinsi

1. *Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024*

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pernyataan visi Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Timur sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”. Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan
Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Sedangkan, pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

- 2) **Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat**
Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kecenderungan menurun dari 12,28 persen pada Tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,292,15 ribu jiwa atau masih tercatat angka tertinggi secara nasional dan progress penurunannya cenderung lambat. Selain isu kemiskinan, Jawa Timur juga masih menghadapi isu disparitas, dimana dari 7.721 Desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 4,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016); 4,00 (2017); dan 3,99 (2018). Meskipun angka TPT Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional (5,34) tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
- 3) **Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi**
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk :
- a) Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
 - b) Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan
 - c) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan;
 - d) pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.
- 4) **Demokrasi Kewargaan**
Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi kewargaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.
Isu strategis lainnya antara lain: berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum

terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak; rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur, masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian).

5) Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara.

Di wilayah Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jaringan jalan yang memadai menuju pesisir utara Madura, serta belum terbangun pelabuhan samudra sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Madura. Di samping itu, Kawasan kepulauan di Sumenep dan Pulau Bawean masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Antara pesisir Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi dengan pesisir Tuban-Lamongan-Gresik masih terjadi kesenjangan yang disebabkan karena terbatasnya konektivitas antarmoda. Di sisi lain, kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya terkendala masalah kemacetan dan kualitas infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing wilayah.

Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI).

Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.

Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.

Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat

adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

4.2.2 ISU BERDASARKAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA TATA RUANG WILAYAH

a. Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penyusunan substansi dasar pembangunan jangka menengah daerah tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Sejauh mana hasil-hasil pembangunan jangka menengah 5 tahun sebelumnya mampu memberikan kontribusi yang positif dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memacu serta mendorong peningkatan, pengembangan dan percepatan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dengan tetap melihat isu permasalahan/strategis yang berkembang.

Tahapan terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan periodisasi RPJPD Kota Kediri, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap IV (Tahun 2020-2025)

Untuk melanjutkan pelaksanaan Tahap III, maka kebijakan pembangunan pada tahap IV diarahkan untuk sebagai tahapan pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, arah prioritas pembangunannya adalah (1) terwujudnya kemantapan posisi daya saing Kota Kediri di tingkat regional, nasional dan internasional, sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang pada tahun 2025. (2) Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah, (3) Terwujudnya Kota Kediri yang mempunyai jati diri sebagai kota yang mampu mewujudkan perannya dalam era global yang mampu memajukan semua aspek pembangunan kota yang didorong oleh kemandirian ekonomi berdaya saing global; (4) terciptanya Kota Kediri yang dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance* yang didukung SDM aparatur pemerintahan, dan partisipasi warga kota yang cerdas dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kota.

b. Isu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 telah memberikan arahan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kota Kediri. Dalam perkembangannya saat ini, RTRW Kota Kediri memasuki tahap revisi perubahan disesuaikan dengan kondisi eksisting perubahan 8 tahun terakhir. Adapun tujuan dan kebijakan penataan ruang yang termuat dalam Revisi RTRW Kota Kediri adalah mewujudkan Kota Kediri sebagai sentra pendidikan, industri, perdagangan-jasa dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi :

1. Kebijakan penataan struktur ruang wilayah kota;
2. Kebijakan penataan pola ruang wilayah kota; dan
3. Kebijakan penetapan kawasan strategis.

Isu Strategis kewilayahan pada Revisi RTRW Kota Kediri antara lain :

1. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan Nganjuk-Kediri dan *Tol Gate*;
2. Pembangunan Bandara di Kecamatan Banyakan dan Tarokan Kabupaten Kediri;
3. Rencana Kebutuhan Jalan lingkaran timur dan barat Kota Kediri untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi akibat pembangunan bandara dan tol;
4. Pengembangan RTH, Ruang Publik dan Olahraga di beberapa kawasan;
5. Pengembangan *Home Industry* dan Wisata Tenun Ikat Bandar, dan *Home Industry* Batik di beberapa kelurahan;
6. Pengembangan kawasan perdagangan jasa, industri dan *block office*;
7. Perubahan lokasi pelataran parkir mobil barang (PPMB) dan perubahan lokasi *dry port* di Ngronggo;
8. Pengembangan perumahan yang cukup pesat, namun fasilitas umum dan fasilitas sosial belum terbangun secara maksimal;
9. Berkembangnya pemukiman di makam Cina Kelurahan Pojok dan sekitar cagar budaya Maskumambang.

Beberapa skenario pengembangan regional dan kota antara lain :

1. Pemanfaatan Sempadan Sungai Brantas sebagai RTH dan Wisata;
2. Pendidikan : Skala Regional
 - Peningkatan Perguruan Tinggi Teknik dan Ekonomi untuk menunjang kegiatan utama kota yaitu industri dan perdagangan (perekonomian kota).
3. Perdagangan dan Jasa
 - Perdagangan sentra elektronik;
 - *Showroom* mobil dan motor;
 - Sentra Sektor Informal;
 - Perdagangan Modern;
 - Pasar wisata;
 - Sentra Souvenir.
4. Pariwisata : Skala Regional
 - Wisata alam, Wisata modern, wisata belanja dan kuliner, wisata industri, wisata olah raga.
5. Industri : Industri Pengolahan Makanan, Industri Pergudangan.
6. Revitalisasi kawasan pusat kota : penataan trotoar, sektor informal dan parkir.

Kebijakan struktur ruang wilayah kota meliputi: Pengembangan kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pengembangan kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kediri - Tulungagung - Blitar; Pengembangan sistem pusat pelayanan kota; Dan pengembangan sistem prasarana wilayah.

Kebijakan pola ruang wilayah Kota meliputi : pemantapan kawasan lindung; dan pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan penetapan kawasan strategis meliputi: pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi; dan pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup.

4.2.3 ISU-ISU STRATEGIS KOTA KEDIRI

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda internasional, nasional dan provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Kediri dan Kebijakan Penataan Ruang Kota Kediri, serta memperhatikan janji-janji politik yang perlu diwujudkan Walikota dan Wakil Walikota Kediri, maka isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2020-2024 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan reformasi dan pelayanan publik di Kota Kediri masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih perlunya peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, peningkatan profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan aset daerah, perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penataan sistem manajemen SDM aparatur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka dilaksanakan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah.

Upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan baik dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Peningkatan sarana-prasarana layanan publik dan layanan sosial yang ramah terhadap penyandang disabilitas;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui *penyempurnaan* mekanisme perencanaan dan penganggaran di daerah, perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa publik melalui pengembangan mekanisme pengadaan secara elektronik (*electronic procurement*) maupun unit pengadaan barang dan jasa, perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah dan perbaikan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor pajak, retribusi, bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah maupun sumber-sumber lain seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus maupun Pinjaman Daerah;
4. Perbaikan sistem administrasi pemerintahan, difokuskan pada :
 - a) Peningkatan kepatuhan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN sesuai peraturan yang berlaku;
 - b) Standarisasi penilaian dan evaluasi kinerja PNS Kota Kediri belum terstandar dan belum berbasis online sehingga tidak memungkinkan adanya pemberian *reward* dan *punishment* yang baik;
 - c) Penyusunan perencanaan/pemetaan jabatan PNS Kota Kediri, sehingga rekrutmen ASN dapat berdasarkan pada kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensi;
5. Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pengembangan *Pilot Project* Perangkat Daerah bebas korupsi;
6. Peningkatan inovasi daerah pada seluruh perangkat daerah;
7. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Kediri perlu membangun, mengembangkan dan mengoptimalkan *e-Government* dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

terintegrasi dari hulu hingga hilir diberbagai urusan dan layanan menuju Kota Kediri *SMART CITY*.

b. Kualitas daya saing sumber daya manusia

Pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Kota Kediri harus mampu menjamin akses layanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Adanya *brand image* sekolah-sekolah favorit yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di suatu sekolah, telah menciptakan perbedaan dalam kuantitas dan kualitas layanan dalam pendidikan, telah menutup akses bagi kelompok siswa yang membutuhkan peningkatan kualitas pendidikannya tetapi tidak mampu mengakses akibat adanya persaingan dalam sistem yang belum terevaluasi objektivitasnya.

Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar lembaga pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan pendidikan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.

Kedepan perlu adanya penambahan atau pengembangan sekolah agar jumlah sarana pendidikan selaras dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Disisi lain dalam upaya untuk menjamin semua warga Kota Kediri memperoleh pendidikan, maka siswa-siswa ataupun mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu dibiayai atau diberikan beasiswa oleh Pemerintah Daerah baik mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta, baik mereka yang bersekolah didalam kota maupun di luar Kota Kediri.

Untuk menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan yang berkualitas secara bertahap prasarana dan sarana bagi pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang memenuhi mutu standar pelayanan minimal menjadi tugas pemerintah Kota Kediri. Indikasi Kota Kediri tumbuh menjadi pusat pendidikan adalah terdapat beberapa perguruan tinggi di wilayah Kota Kediri yang berpotensi untuk menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Dengan adanya perguruan tinggi negeri secara tidak langsung akan memberikan *multiplier effect* bagi aktivitas perekonomian masyarakat yang mendorong peningkatan arus perputaran uang, barang dan jasa yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau

Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dimulai dari peningkatan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia (tenaga medis dan paramedis) dan tata kelola sistem

pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan beberapa kegiatan pelayanan kesehatan antara lain: promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Selain itu pelayanan kesehatan juga tetap memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus yang diharapkan pada gilirannya nanti, masyarakat memiliki kualitas hidup yang sehat dan produktifitas yang tinggi.

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Kota Kediri pada tahun 2020 tercapai sebesar 46,01 per 100.000 kelahiran hidup, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah Kota Kediri terus menekan AKI melalui berbagai upaya antara lain GEMAKIBA “Gerakan Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi” dan Program One Day Service ANC Terpadu. Untuk itu perlu berkelanjutan beberapa program pendamping bagi ibu hamil, agar AKI bisa ditekan.

Sementara itu, pada tahun 2020, angka kematian bayi dapat ditekan pada angka 1,38 per 1000 kelahiran hidup. Beberapa hal terkait adanya kematian bayi yang perlu diantisipasi antara lain disebabkan *asfiksia* (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR), infeksi *neonatus; pneumonia*, diare dan gizi buruk. Selain itu isu nasional terkait *stunting* perlu dicegah.

Upaya untuk menurunkan AKI, AKB dan *stunting* adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas PONEK dengan berbagai program dan upaya seperti GEMAKIBA, konseling, senam ibu hamil dll. Namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih perlu dioptimalkan kualitas prasarana dan sarana, pemerataan pendayagunaan tenaga kesehatan serta perlunya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Disisi lain, meningkatnya jumlah kasus penyakit menular seperti penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih tingginya kasus DBD, dikarenakan adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti* serta tidak maksimalnya kegiatan PSN; tingginya kasus HIV/AIDS dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit.

Selain itu, akses pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional di Kota Kediri belum optimal sehingga perlu menerapkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh warga Kota Kediri. Disamping itu, mempertimbangkan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang mengeluarkan kebijakan berjenjang, maka Pemerintah Kota Kediri perlu mengembangkan rumah sakit tipe C/D sehingga pasien BPJS dapat ditampung di rumah sakit milik pemerintah daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, maka diharapkan indeks pembangunan manusia di Kota Kediri dapat meningkat menjadi 3 besar di Jawa Timur.

c. Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat akibat Dampak Covid-19

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang.

Upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Disamping itu juga dilakukan pemulihan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi serta peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan pola hidup bersih dan sehat.

d. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Kesenjangan dan Lapangan Kerja

Tantangan pembangunan dibidang sosial adalah masih adanya kesenjangan sosial, dan kondisi sebagian masyarakat yang menghadapi tekanan kemiskinan, pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap untuk bersaing di era global yang makin kompetitif. Mengingat bahwa indeks gini Kota Kediri tahun 2017 sebesar 0,4, maka kesenjangan menjadi salah satu indikator tujuan agar kesenjangan di Kota Kediri dapat ditekan dan secara terus menerus diturunkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melakukan upaya serius untuk menangani masalah kemiskinan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui beberapa program kegiatan *pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment*. Selain itu, upaya mengatasi kemiskinan juga terkait dengan pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Angka kemiskinan di Kota Kediri selama tiga tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 8,49 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24.070 jiwa, turun menjadi 21.900 jiwa (2018) dan menjadi 20.540 jiwa (2019). Namun pada tahun 2020, terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 22.196 atau menjadi 7,69%. Angka kemiskinan di tahun 2018 merupakan nilai terendah dari beberapa tahun terakhir.

Mengingat jumlah penduduk miskin di Kota Kediri apabila dibandingkan dengan dengan wilayah kota di Jawa Timur masih cukup banyak dan progres penurunannya perlu ditingkatkan lagi, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk melakukan usaha sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

Jumlah penduduk usia kerja Kota Kediri tahun 2020 adalah 202.673 jiwa, terdiri atas 65,29 persen atau 144.688 jiwa angkatan kerja dan 34,71 persen atau 76.935 jiwa bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja secara ekonomi terbagi atas 93,79 persen bekerja dan 6,21 persen pengangguran terbuka. Persentase penduduk bekerja baik laki-laki maupun perempuan berkisar pada angka 94 sampai 96 persen. Ada perbedaan komposisi pada penduduk laki-laki dan perempuan. Dalam meningkatkan penduduk yang berkerja, pemerintah Kota Kediri telah melakukan strategi, diantaranya melalui bursa tenaga kerja serta menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pendidikan kejuruan dan lembaga pelatihan kerja bahkan melakukan pelatihan virtual melalui Balai Latihan Kerja.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Kota Kediri berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana pelatihan dan pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMK berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

e. Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kota

Pengembangan prasarana transportasi khususnya jalan dan jembatan merupakan tantangan penting karena dari prasarana transportasi inilah akan terjamin kelancaran pendistribusian barang dan jasa dan untuk pemerataan pembangunan terutama sektor perekonomian. Ketidakserasian pertumbuhan antar wilayah serta tersentralisasinya aktivitas di pusat kawasan perdagangan, jasa dan pelayanan publik, mengakibatkan terjadinya kemacetan di beberapa titik simpul jalan sehingga dalam lima tahun ke depan diperlukan revitalisasi dan penambahan jembatan dan prasarana jalan yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik kota serta mempercepat pertumbuhan wilayah.

Beberapa hal yang perlu diantisipasi dan segera diatasi untuk masalah infrastruktur terutama jalan dan jembatan antara lain pengalihan jalur bagi kendaraan-kendaraan angkutan berat yang saat ini masih melintas tengah Kota Kediri, segera direalisasikannya tol Nganjuk-Kediri yang exit tol tidak jauh dari batas kota, pembangunan bandara Kediri yang letaknya dekat dengan batas kota. Untuk itu perlu adanya alternatif pembangunan ruas jalan baru dan segera merealisasikan pembangunan jalan lingkar barat dan timur. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Ngronggo dengan Kelurahan Banjarmlati, Pembangunan Jembatan Mrican serta pengembangan jalan lingkar dapat menjadi alternatif untuk mengurai simpul kemacetan yang akan terjadi.

Di samping itu penyediaan infrastruktur fisik yang berkualitas dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan diantaranya: pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan umur pakai panjang, pengendalian pemakaian trotoar oleh PKL, perkerasan jalan dengan teknologi resapan, revitalisasi sumber air, pembangunan dan rehabilitasi saluran irigai, pembuatan dan peningkatan drainase, gorong-gorong dan saluran pembuangan air limbah serta peningkatan infrastruktur hijau dengan menyediakan jalur pejalan kaki (pedestrian), jalur sepeda dan jalur hijau. Disamping masih perlunya penambahan atau pemerataan ketersediaan lampu penerangan jalan umum di jalan-jalan utama dan lingkungan di seluruh wilayah Kota Kediri. Disamping itu, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya banjir di Kota Kediri perlu peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem drainase terpadu di Kota Kediri.

Selanjutnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dirasa penting untuk membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berbasis masyarakat khususnya di lingkungan tingkat RT dan RW melalui program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus dengan melakukan penataan dan perbaikan lingkungan kumuh; pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, selokan dan drainase sehingga dari segi fisik tercipta kondisi lingkungan yang terjaga kebersihan, keindahan dan kesehatannya, dan dari segi ekonomi dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Infrastruktur Non Fisik, terkait dengan penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial, antara lain: pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan baik

bangunan sekolah, ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung (perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer) yang masih belum optimal dan merata; serta prasarana dan sarana di Puskesmas.

Penyediaan infrastruktur dasar juga perlu difokuskan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah penyediaan akses terhadap air bersih, penyediaan sanitasi yang sehat dan penyediaan serta peningkatan kualitas tempat tinggal yang layak huni. Penyediaan akses terhadap air bersih perlu dilakukan tidak hanya melalui PDAM, mengingat saat ini Pemerintah Kota telah memiliki OPD dengan tupoksi penyediaan air minum untuk dapat segera mewujudkan akses universal terhadap air bersih.

Peningkatan pemantapan jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian juga masih perlu terus dilakukan mengingat bahwa Kota Kediri memiliki keterbatasan lahan untuk peningkatan produksi pertanian.

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi hal yang mengemuka seiring dengan terbentuknya perangkat daerah baru yang memiliki tupoksi khusus dalam menangani urusan ini. Dalam rangka menjaga tertibnya penyelenggaraan urusan ini serta menegaskan aturan main, kelembagaan, tugas, kewajiban, tata cara peran serta, dan sanksi yang mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung tercapainya Smart City antara lain : peningkatan kapasitas *bandwidth* intranet dan internet di lingkungan Pemerintah Kota Kediri; perluasan infrastruktur jaringan yang; optimalisasi *data center* yang dikelola secara terpusat dan profesional; peningkatan keamanan data dan informasi terhadap aset fisik dan non fisik; belum adanya *sistem recovery* yang mampu menyediakan data dan informasi mendekati kondisi terakhir sebelum bencana terjadi di kemudian hari. Disisi lain, diperlukan penyediaan infrastruktur TI, pengembangan aplikasi, penyediaan informasi yang terintegrasi, peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan menjadi satu OPD yang mandiri.

f. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Permasalahan sumber daya dan lingkungan meskipun menjadi masalah lokal Kota Kediri, namun demikian untuk efektivitas manajemennya tidak dapat mengabaikan potensi kerjasama dengan daerah-daerah lain terutama yang terkait secara langsung dengan keberadaan sumber daya lingkungan yang dibutuhkan masyarakat kota Kediri. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa permasalahan air, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dapat dipahami sekedar dari batas administratif. Permasalahan sumber daya air, misalnya perlu adanya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dan daerah-daerah lainnya.

Terkait dengan kondisi wilayah Kota Kediri, khususnya pada wilayah disekitar lereng Gunung Klotok dengan ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang dengan ketinggian 300 meter. Daerah-daerah tersebut memiliki kelerengan diatas 40%. Meskipun kedua Gunung tersebut tidak aktif, namun apabila tidak ada pencegahan terhadap perambahan dan perusakan hutan secara liar serta tidak diimbangi dengan adanya reboisasi yang tepat dan optimal, maka kemungkinan besar akan terjadinya tanah longsor atau erosi yang secara langsung akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, pembangunan kota harus senantiasa mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Disamping itu, disepanjang daerah aliran sungai brantas dan sungai-sungai yang ada di Kota Kediri diantaranya Sungai Kresak (panjang 9 km), Sungai Parang (panjang 7,5 km), dan Sungai Kedak (panjang 8 km) rawan terjadi bencana longsor dan banjir yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan masyarakat di sekitar bantaran sungai. Tingginya kebutuhan ruang hidup yang dihadapkan pada ketersediaan lahan menjadi semakin berkurang, mengakibatkan munculnya pemukiman liar di lahan yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal. Sehingga perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin terhadap munculnya rumah-rumah penduduk yang berada di bantaran sungai. Kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, penurunan daya dukung alam, isu pemanasan global, permasalahan bencana alam, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup yang ketat dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja dan berbagai isu strategis lainnya harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan.

Oleh karena itu kelestarian lingkungan hidup merupakan aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kota Kediri pada 5 (lima) tahun mendatang, pembangunan yang dilaksanakan akan mendudukkan isu kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Kediri.

Pembangunan berkelanjutan hanya mungkin dilakukan pada wilayah dengan kapasitas daya dukung lingkungan yang cukup hingga baik. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penataan ruang yang baik, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan hidup, serta mencegah tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Aspek pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait secara terintegrasi, terpadu, menyeluruh dan simultan mulai dari penyusunan peraturan, implementasinya secara teknis, hingga pengawasan dan evaluasi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kota Kediri sebagai kota yang layak huni bagi masyarakatnya maka akan dilakukan :

1. Pelaksanaan pembangunan termasuk berbagai aktivitas kegiatan perekonomian dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
2. Menjaga ekosistem dengan meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman-taman kota hingga 20% dari luasan kota;
3. Menyediakan infrastruktur sanitasi kota yang memadai;
4. Peningkatan kesadaran dan budaya masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat dan sadar lingkungan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Didalam RTRW Kota Kediri 2011-2030, diuraikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung, wilayah Kota Kediri tidak memiliki kawasan rawan bencana yang memerlukan perhatian khusus. Kawasan rawan bencana yang mungkin terjadi adalah di bagian barat Kecamatan Mojoroto pada kawasan yang memiliki ketinggian $\geq 40\%$ dan peka terhadap erosi.

Di Kota Kediri juga terdapat daerah rawan kebakaran, daerah tersebut adalah Kelurahan Dandangan, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kemas, Kelurahan Setono Pande, Kelurahan Ringin Anom, Kelurahan Bandar Lor. Di mana untuk penanggulangannya, Kota Kediri dapat bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan cara pelaksanaan tugas bantuan Pemadam Kebakaran melalui kordinasi sesuai dengan permintaan daerah yang membutuhkan.

Beberapa Isu Strategis yang terkait dengan kebencanaan di Kota Kediri antara lain :

1. Penanganan masalah bencana yang sering terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti banjir dan kebakaran;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
3. Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana;
4. Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;
5. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan.

Dalam pengurangan resiko bencana perlu mengintegrasikan peningkatan aspek ketangguhan terhadap bencana (*resilience*) untuk meningkatkan pengurangan resiko bencana yang komprehensif. Beberapa hal penting dalam aspek ketangguhan untuk membuat sebuah kota menjadi resilient adalah konsep untuk mengurangi dampak bencana terhadap kota, seperti perlindungan infrastruktur dan pengendalian tata guna lahan, serta perlindungan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dianggap sangat penting. Hal ini juga mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan karena ketangguhan bangsa akan meningkatkan daya dukung lingkungan, kemampuan ekonomi masyarakat dan meningkatkan peran aspek sosial, kelembagaan dan pendanaan.

g. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Inflasi

Selama periode 2016-2020 sektor dominan industri dan perdagangan belum mengalami pergeseran struktur ekonomi. Bahkan hingga tahun 2020, sektor industri dan perdagangan masih berada di angka 9,32% yang turun dari tahun 2019 yakni sebesar 9,55%. Struktur perekonomian Kota Kediri masih belum mengalami pergeseran yang signifikan dan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan. Hal tersebut merupakan bagian mendasar kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perekonomian, karena belum adanya efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi, serta masih sangat tergantung pada perkembangan aktivitas industri pengolahan. Pada kisaran 80% perekonomian Kota Kediri masih tergantung pada aktivitas industri pengolahan tembakau. Struktur perekonomian Kota Kediri sangat tergantung pada pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri memang dapat dicapai melalui peningkatan dan pengembangan peran, aktivitas, dan efisiensi sektor industri, perdagangan dan jasa.

Pada periode 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mengalami tren positif yaitu 5,14% (2017), 5,43% (2018), dan 5,47% (2019). Namun tren positif laju pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya Covid-19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri berkontraksi sebesar minus 6,25%.

Dalam rangka untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan berfluktuasi

memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi, selain menggerus daya beli, juga akan menyulitkan pelaku usaha di dalam mengkalkulasi biaya input produksi dan secara makro dapat mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri dengan beragam program dan kegiatannya telah berhasil menekan tingkat inflasi. Yang membanggakan, tingkat inflasi di Kota Kediri pada tahun 2018 disebut paling rendah se-Jawa Bali dan telah memperoleh penghargaan TPID terbaik tingkat kota se-Jawa Bali dari tahun 2017. Diharapkan pengendalian laju inflasi akan mampu menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri daerah pada masa mendatang. Lima tahun terakhir inflasi di Kota Kediri berada dibawah 2,00 persen.

Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif

Tantangan lain adalah permasalahan dalam pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu masih rendahnya kapasitas UMK Kota Kediri dalam era persaingan global. Saat ini usaha mikro, kecil (UMK) yang ada di Kota Kediri.

Upaya-upaya yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan berkembangnya sektor ekonomi di kota kediri antara lain melalui peningkatan kemampuan pelaku industri mikro, kecil dan menengah. mereka tidak lagi sekedar diberi pelatihan-pelatihan tetapi juga diajak mengikuti pameran-pameran besar seperti *inacraft*, pameran terbesar kerajinan di Indonesia. Bahkan untuk kerajinan batik dan tenun didatangkan desainer-desainer terkemuka lalu produknya diikutkan dalam *Jakarta fashion weeks*. Dalam forum seperti itu para pelaku UMK akan bisa belajar dari para kompetitornya sehingga tergerak untuk lebih maju lagi.

Untuk mewadahi kreatifitas dan inovasi para pelaku UMK, Kota Kediri harus terus bergerak, ramai, dan tidak diam. oleh karena itu di sepanjang tahun melalui perangkat daerah yang ada diselenggarakan festival, karnival, pameran dan aktivitas ekonomi lain agar para pelaku UMK bisa pameran dan berjualan pada *event-event* tersebut. Disamping itu pemkot juga memberikan fasilitasi berupa kredit murah atau bantuan permodalan untuk pengembangan usaha. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online* juga memberikan andil yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian di Kota Kediri.

Sebagai daerah yang tidak kaya akan sumber daya alam, kegiatan usaha produksi yang berbasis sumber daya alam di Kota Kediri kurang berkembang. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tiada lain yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan peran dan potensi UMK dan ekonomi kreatif.

Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya yang dimilikinya.

Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain :

1. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*provit motive*);
2. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas;
3. Alasan *budget*, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Pemerintah Kota Kediri telah berupaya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan bagian laba dari BUMD. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan dan dibina oleh Pemerintah Kota Kediri adalah :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR); dan
3. Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar).

Di masa depan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk semakin profesional dalam meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dengan mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Arah pengembangan BUMD Kota Kediri antara lain meliputi :

1. Penguatan tugas dan fungsi BUMD
 - a) Memberikan pelayanan jasa atau menghasilkan produk untuk kepentingan umum dan meraih laba guna memenuhi tujuan perusahaan;
 - b) Mengembangkan perekonomian daerah, yang berarti harus mampu menjadi motor penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah;
 - c) Menambah penghasilan daerah, yang berarti harus mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian guna menjalankan tugas pokoknya maka BUMD harus benar-benar mampu berfungsi optimal dalam :

- Mengelola dirinya secara berdaya guna dan berhasil guna, yakni dengan menerapkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat dan professional, sehingga mampu menempatkan dirinya sebagai penyumbang PAD yang handal;
 - Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antar BUMD, BUMN, swasta (khususnya UMKM) sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Memasuki era pasar bebas yang makin kompetitif dibutuhkan sebuah strategi khusus yang dilakukan oleh BUMD antara lain melalui aliansi strategis agar mampu menghadapi tantangan global dan mampu meningkatkan daya saing untuk menghadapi perubahan dan pesaing baru;
 3. Menghadapi perubahan yang sedang melanda dunia bisnis saat ini terdapat tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja BUMD yakni : Restrukturisasi dan Profitisasi.

Restrukturisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha dan penciptaan *core competencies*.

Profitisasi yakni upaya meningkatkan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMD membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMD, karyawan BUMD, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap BUMD serta adanya sinergitas program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan keberadaan BUMD.

h. Kerjasama Daerah Perbatasan, Antar Daerah, dan Pemerintah dengan Swasta

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah yang lebih optimal. Kerjasama daerah dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi perekonomian global kerjasama daerah dengan luar negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Dalam mendukung perekonomian Kota Kediri, diperlukan kerja sama dengan daerah perbatasan, terutama terkait dengan prasarana perhubungan yang berupa jembatan. Jembatan yang dimaksud adalah jembatan yang menghubungkan antara Kota Kediri bagian Selatan (Kelurahan Manisrenggo) dengan Kabupaten Kediri dan pembangunan kembali Jembatan Mrican, sehingga dapat mengurai arus lalu lintas dalam mengantisipasi pembangunan Tol Nganjuk Kediri dan Bandara Udara di Kecamatan Banyakan. Selain itu juga diperlukan pembahasan secara intensif tentang kerjasama persampahan. Hal ini beralasan, karena Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kecamatan Mojoroto sudah "*overload*", sehingga perlu kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri atau daerah sekitarnya dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasinya dengan TPA Terpadu.

Kerjasama dengan pihak swasta perlu dirintis atau dikembangkan, sebagai alternatif pembiayaan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengingat dana dari Pemerintah Pusat relatif terbatas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif juga belum dapat diharapkan untuk membiayai pembangunan di Kota Kediri secara keseluruhan.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Swasta ini seiring dengan perkembangan dari konsep "*Local Government*" menuju konsep "*Local Governance*", di mana yang bertanggungjawab dalam mengatasi kebutuhan publik (*public needs*) atau barang publik (*public goods*), bukan semata-mata dipundak Pemerintah, melainkan menjadi tanggungjawab bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu : pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*civil society*).

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi pembangunan jangka menengah mempunyai jangkauan 5 tahun dan merupakan kondisi ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Kediri mengacu pada visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Kediri tahun 2005-2025, yaitu terwujudnya **“Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing”**. Visi tersebut diwujudkan melalui empat tahapan perodesasi, sedangkan periode 2020-2024 merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat. Pembangunan tahap keempat dilaksanakan dengan berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama sampai ketiga. Pembangunan pada tahap keempat ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian kesejahteraan yang merata dan berdaya saing yang didukung oleh keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, sarana dan prasarana yang berkualitas dengan diimbangi kemampuan ilmu dan teknologi yang dikembangkan secara berkelanjutan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan visi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu **“Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royong”**, serta berpedoman pada arah pembangunan Kota Kediri sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025, dan capaian kinerja pembangunan periode 2014-2019, potensi, isu-isu strategis, serta tantangan Kota Kediri lima tahun ke depan, serta visi-misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih periode 2019-2024, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis dengan mewujudkan Kota Kediri yang unggul dan makmur dalam harmoni. Untuk itu visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2020-2024 adalah:

Visi Kota Kediri Tahun 2020-2024
“Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”

Penjelasan visi Kota Kediri tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Kota Kediri Unggul

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

Kota Kediri Makmur

Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai.

Kota Kediri Harmoni

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

5.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi perlu disusun misi yang efektif agar visi dapat terwujud pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan “Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1 - Keterkaitan Visi dan Misi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni	Kota Kediri Unggul	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi
		Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
	Kota Kediri Makmur	Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan
	Kota Kediri Harmoni	Mewujudkan Kota Kediri aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan berkelanjutan

Visi “**Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni**”, secara substansi dijabarkan didalam 4 misi, sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi

Mewujukan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemeritahan yang baik akan menghasikan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegras yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Misi 2

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya yang manusia memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3

Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi 4

Mewujudkan Kota Kediri aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat merwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Kediri tahun 2020-2024 Pemerintah Kota Kediri merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.3.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kota Kediri dalam 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 5.2 - Keterkaitan Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya
Misi 3 : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif 2. Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan
Misi 4 : Mewujudkan Kota Kediri aman,nyaman, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan	1. Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran 2. Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan

5.3.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Memperhatikan dampak Covid-19 serta adanya peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi capaian target kinerja, maka sasaran dan targetnya disesuaikan berdasarkan dampak Covid-19 dan ketentuan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tersebut.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang digunakan dalam upaya pencapaian misi dapat dilihat pada tabel 5.3. berikut ini :

Tabel 5.3 - Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2020-2024

VISI : Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	PROYEKSI / TARGET TAHUN								Kondisi Akhir RPJMD		OPD Pemangku	
					2018 (base line)	2020	2021		2022		2023		2024		2024				
							Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	1.1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD, Inspektorat, Bag. Pengadaan Barang dan Jasa, Bag. Hukum		
				2. Indeks Profesionalitas ASN	53,52	68	63,82	73	65	76	66	78	67	81	68	81	68	BKPSDM	
				3. Nilai SAKIP	BB (70,62)	BB	BB (71,70)	A	BB (75,50)	A	A (80,05)	A	A (80,55)	A	A (81,05)	A	A (81,05)	Bappeda, Bag. Pembangunan, Bag. Organisasi, Inspektorat, Sekretariat DPRD	
				4. Skor EKPPD	3,28	3,42	3,42	11	3,46	10	3,50	9	3,54	8	3,58	8	3,58	Bag. Pemerintahan	
				5. Level SPIP	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Inspektorat, Bappeda	
				6. Jumlah WBK/WBBM	0	10	0	15	1	20	2	25	5	30	10	30	10	Inspektorat, OPD layanan Publik	
		1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	7. Rasio kemandirian keuangan daerah	19,48%	20,70%	20,49%	20,50%	20,80%	21,00 %	21,00 %	21,50 %	21,50 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	BPPKAD, OPD Penghasil, Bag. Perekonomian, BUMD	
				3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	8. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPB) yang memperoleh nilai A	15,15%	22,22%	32%	38,89%	38,89%	50,00 %	50,00 %	61,11 %	61,11 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	OPD Layanan Publik, Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kecamatan, Dispendukcapil, Bappeda
				1.3. Level Smart City	4. Meningkatnya penerapan Smart City	9. Persentase implementasi Smart City	60%	70%	96%	80%	97%	84%	98%	88%	99%	95%	100%	95%	100%
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia (sdm) berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan budaya	2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	10. Indeks Pendidikan	0,85	0,86	0,75	0,87	0,76	0,88	0,77	0,89	0,78	0,90	0,79	0,90	0,79	Dinas Pendidikan, Sekolah	
				11. Indeks Minat Baca	83,96	85,10	73,7	86,20	74,20	87,40	76,40	88,60	78,60	90	81,05	90	81,05	Dinas Arsip & Perpus, Dinas Pendidikan, Sekolah	
			6. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	12. Angka harapan hidup	73,80	73,84	73,96	73,88	74,06	73,92	74,10	73,96	74,14	74,01	74,18	74,01	74,18	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	
				7. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,48	94,58	94,39	-	94,44	-	94,49	-	94,54	-	94,59	-	94,59	DP3AP2KB
			14. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			82,9	84,46	-	84,51	-	84,56	-	84,61	-	84,66	-	84,66	DP3AP2KB	
Misi 3 : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi	3.1. Pertumbuhan Ekonomi	8. Meningkatnya produk domestik	15. Nilai Peningkatan PDRB	12,2 T	7-12,3 T	-5,6 T	7-12,3 T	2,9 T – 3,5 T	7-12,3 T	3,5 T – 4,4 T	7-12,3 T	4,5 T – 5,5 T	7-12,3 T	4,7 T – 5,9 T	7-12,3 T	4,7 T – 5,9 T	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	PROYEKSI / TARGET TAHUN								Kondisi Akhir RPJMD		OPD Pemangku
					2018 (base line)	2020	2021		2022		2023		2024		2024			
							Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)
daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan	unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif		regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	16. Persentase Penciptaan 15.000 Wira Usaha Baru/ Pekerja Baru	-	20%	5%	40%	15%	60%	35%	80%	60%	100%	80%	100%	80%	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
			9. Meningkatnya ekonomi kreatif	17. Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,82%	5,8-7,20%	N/A	5,8-7,20%	3,50% - 4,50%	5,8-7,20%	4,00%-5,00%	5,8-7,20%	5,00%-6,00%	5,8-7,20%	5,00%-6,00%	5,8-7,20%	5,00%-6,00%	Disperdagin, Dinkop UMTK, Disbudparpora
			10. Meningkatnya jumlah investasi	18. Nilai realisasi investasi	717,48 M	718 M	1.313 M	735 M	720 M	772 M	722 M	810 M	724 M	850 M	726 M	850 M	726 M	DPMPTSP
			11. Meningkatnya kinerja BUMD	19. Persentase BUMD Kondisi Sehat	33.33	33.33	33.33	66.67	33.33	66.67	33.33	100.00	66.67	100.00	66.67	100.00	66.67	Bag. Perekonomian, BUMD
			12. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	20. Indeks infrastruktur	-	70	N/A	75	75	80	80	84	84	88	88	88	88	DPUPR, DPKP, Dishub
			13. Meningkatnya daya tarik wisata	21. Jumlah kunjungan wisata	1.850.000	1.875.000	721.141	1.900.000	900.000	1.925.000	1.000.000	1.950.000	1.500.000	2.000.000	1.750.000	2.000.000	1.750.000	Disbudparpora
	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	3.2. Indeks Gini	14. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	22. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21.900	19.386	22.196	18.082	21.957	16.745	21.408	16.211	20.857	15.911	20.304	15.911	20.304	Dinas Sosial, Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
		3.3. Tingkat Kemiskinan		23. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,63%	3,50%	6,21%	3,37%	5,80%	3,24%	5,65%	3,11%	5,50%	3,01%	5,40%	3,01%	5,40%	Dinkop UMTK, Disperdagin. DKPP
Misi 4 : Mewujudkan Kota Kediri aman, nyaman dan berwawasan lingkungan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	4.1. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Persentase penanganan potensi kasus SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP, Kesbangpol, Bag Kesra, DP3AP2KB
	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	4.2. Indeks Kota Layak Huni	16. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	25. Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	100%	100%	81,50%	80,74%	81,74%	81,24 %	82,24 %	81,74 %	82,74 %	82,24 %	82,94 %	82,24 %	82,94 %	DPUPR, Bappeda
			17. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	26. Persentase permukiman layak huni	79,64%	80,24%	94,35%	93,96%	94,44%	94,14 %	94,54 %	94,32 %	94,74 %	94,49 %	94,92 %	94,49 %	94,92 %	DPKP, DLHKP, DPUPR
				27. Persentase capaian layanan persampahan perkotaan	93,42%	93,77%	98,96%	98,81%	98,97%	98,82 %	98,98 %	98,83 %	98,99 %	98,84 %	99,00 %	98,84 %	99,00 %	DLHKP
				28. Tingkat Pelayanan Jalan	-	(0,90) C	N/A	(0,85) C	(0,85) C	(0,81) C	(0,81) C	(0,75) B	(0,75) B	(0,73) B	(0,73) B	(0,73) B	(0,73) B	Dishub, DPUPR
			18. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	29. Indeks Ketahanan Bencana	-	0,5	0,62	0,60	0,64	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	BPBD
			19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,29	63,20	63,25	65,08	65,08	66,02	66,02	66,16	66,16	66,35	66,35	66,35	66,35	DLHKP
				31. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	16,91	16,92	16,95	16,93	16,96	16,94	16,97	16,95	16,98	16,96	16,99	16,96	16,99	DLHKP, DPUPR

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang efektif dan efisien dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah- langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

6.1 STRATEGI

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan pada bab pembahasan terdapat strategi-strategi untuk mencapai sasaran RPJMD pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 - Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Kediri Tahun 2020-2024

Visi : Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi		
Tujuan 1: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi.	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		2. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
		3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	5. Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau
	4. Meningkatnya penerapan <i>smart city</i>	6. Peningkatan penerapan <i>smart city</i>
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya		
Tujuan 2: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya	5. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata
		8. Peningkatan budaya baca masyarakat
	6. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata serta peningkatan pola hidup sehat
	7. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	10. Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
Misi 3 Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan		
Tujuan 3: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif	8. Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	11. Peningkatan usaha perdagangan, industri, pertanian dan perikanan
		12. Pengembangan koperasi dan usaha mikro
		13. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
	9. Meningkatnya ekonomi kreatif	14. Pengembangan ekonomi kreatif
	10. Meningkatnya jumlah investasi	15. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu
	11. Meningkatnya kinerja BUMD	16. Peningkatan Kinerja BUMD
	12. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	17. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian
	13. Meningkatnya daya tarik wisata	18. Pengembangan potensi wisata daerah
Tujuan 4: Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	14. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	19. Peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan
		20. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja
Misi 4 Mewujudkan Kota Kediri aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan berkelanjutan		
Tujuan 5: Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	21. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Tujuan 6: Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	16. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	22. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah
	17. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	23. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
		24. Peningkatan kualitas layanan jalan
		25. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
	18. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	26. Peningkatan efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana
19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	27. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau	

Berdasarkan Tabel 6.1, terdapat rumusan strategi pada tahun 2020-2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. STRATEGI 1 - Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi birokrasi merupakan salah satu dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Kediri yaitu melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi keberhasilan perwujudan reformasi birokrasi dalam mewujudkan *good governance*. Selain itu Pemerintah Kota Kediri juga melakukan upaya yang mengarah pada peningkatan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui peningkatan peran dan kinerja lembaga keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah maka indikator tujuan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik akan dapat tercapai.

2. STRATEGI 2 - Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

Pelayanan publik yang berkualitas dalam mewujudkan *good governance* tidak dapat terlepas dari peran serta kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan profesionalisme kerja sebagai pelaku dalam pelayanan kebutuhan masyarakat Kota Kediri. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya antara lain adalah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang kompetitif, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kompetensi pegawai, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, menerapkan kedisiplinan tinggi, pendidikan yang berkelanjutan sehingga memiliki kualitas yang unggul.

3. STRATEGI 3 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat mencerminkan bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pembangunan dengan baik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja pemerintah daerah; optimalisasi pengawasan internal oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; memperluas zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM); melaksanakan evaluasi pembangunan daerah secara periodik.

4. STRATEGI 4 - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan Kota Kediri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Agar dapat membiayai pembangunan dalam berbagai bidang, Pemerintah Kota Kediri menerapkan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, antara lain: intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kinerja BUMD menuju *good corporate governance (GCG)* serta meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendapatan. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kota Kediri yaitu “Kota Kediri unggul dan makmur dalam harmoni”.

5. STRATEGI 5 - Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau

Untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi semua masyarakat Kota Kediri tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Kediri. Untuk mencapai strategi tersebut Pemerintah Kota Kediri melakukan upaya melalui peningkatan kualitas manajemen dan inovasi layanan publik serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi layanan publik dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik berbasis kartu. Kota Kediri menerapkan teknologi informasi pada layanan publik sehingga lebih mudah dapat diakses oleh masyarakat Kota Kediri, selain itu dalam hal pengurusan perizinan pemerintah Kota Kediri juga

sudah menerapkan perizinan yang berbasis online yang dapat diakses oleh semua masyarakat Kota Kediri dan juga lebih mempermudah proses perizinan karena tidak perlu datang langsung ke instansi terkait.

6. STRATEGI 6 - Peningkatan Penerapan *Smart City*

Upaya untuk peningkatan penerapan smart city melalui peningkatan penerapan *Smart City* melalui pembangunan dan implementasi 6 pilar *smart city* (*smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart social, dan smart environment*) secara berkelanjutan.

7. STRATEGI 7 - Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Merata

Upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata dilaksanakan melalui penetapan standar pelayanan pendidikan dasar yang mengacu pada standar pendidikan nasional; peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan gratis, bantuan pendidikan, pemberian beasiswa, dan dukungan sarana prasarana serta penyediaan fasilitas angkutan sekolah gratis; Peningkatan jumlah sekolah inklusi; Peningkatan kualitas PAUD; Peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan nonformal; Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

8. STRATEGI 8 - Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Membaca merupakan suatu cara mendapatkan informasi yang ditulis. Membiasakan budaya membaca sangat penting bagi masyarakat. Budaya membaca di masyarakat dapat mengembangkan kehidupan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu, budaya membaca diarahkan untuk meningkatkan pendidikan di Kota Kediri. Sasaran yang utama untuk menciptakan generasi muda yang produktif. Perbaikan tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel dapat dilakukan dengan meningkatkan peran masyarakat dan *stakeholders*. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan berbasis teknologi dan informasi di Kota Kediri sangat diperlukan untuk menunjang minat baca masyarakat. Arah kebijakan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat Kota Kediri seperti merevitalisasi perpustakaan daerah dan sekolah, mengembangkan perpustakaan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan daya tarik perpustakaan bagi masyarakat.

9. STRATEGI 9 - Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan yang Terjangkau dan Merata Serta Peningkatan Pola Hidup Sehat

Kesehatan sangat penting bagi masyarakat. Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakatnya. Arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata di Kota Kediri adalah melalui implementasi Asuransi Kesehatan Universal (UHC); meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah; meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, masyarakat menuju terwujudnya keluarga siaga dan terciptanya perilaku sehat hingga tersedianya *Home Care* untuk kondisi darurat pada lansia maupun balita. Kualitas layanan kesehatan juga dilaksanakan melalui upaya promotif dan preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat identik dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta olahraga teratur yang secara langsung dapat membentuk peningkatan energi

sehingga meningkatkan status kesehatan masyarakat. Status kesehatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, keturunan, perilaku, serta pelayanan kesehatan. Dengan peningkatan pola hidup sehat diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat.

10. STRATEGI 10 – Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam masyarakat, perempuan dan anak sering mengalami perlakuan tidak pantas. Agar seluruh masyarakat dapat menerima perlindungan yang sama, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kediri dengan meningkatkan pengarusutamaan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

11. STRATEGI 11 - Peningkatan Usaha Perdagangan, Industri, Pertanian, dan Perikanan

Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto perlu dukungan usaha perdagangan, industri, pertanian, dan perikanan. Untuk meningkatkan sektor tersebut diperlukan beberapa kebijakan seperti menciptakan iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif, meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri kecil, optimalisasi teknologi informasi, meningkatkan daya saing dan kemandirian IKM, penguatan wirausaha dan IKM serta meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan merupakan bagian dari strategi mewujudkan ketahanan pangan.

12. STRATEGI 12 - Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Upaya pengembangan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan melalui peningkatan kinerja koperasi dan usaha mikro dengan pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi pengelolaan; peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro; serta penciptaan wirausahawan baru dan mengembangkan Usaha Milik RW (Koperasi RW). Pengembangan koperasi dan usaha mikro perlu didukung dengan peningkatan akses permodalan usaha mikro dan koperasi dilaksanakan dengan memperluas akses permodalan melalui pinjaman lunak dan pendampingan akses ke lembaga keuangan. Selain itu, juga perlu peningkatan kelas Usaha Mikro yang didukung dengan penyediaan Mall UMKM.

13. STRATEGI 13 - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Lokal yang Memiliki Keunggulan Komperatif dan Kompetitif

Keunggulan produk lokal dapat menompang perekonomian di Kota Kediri. Daya saing produk lokal di Kota Kediri harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan kreativitas. Untuk menjadikan produk lokal dengan keunggulan komperatif dan kompetitif di Kota Kediri terdapat beberapa arah kebijakan seperti halnya pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk unggul daerah, peningkatan kualitas produk lokal melalui inovasi, perluasan pangsa pasar dan standarisasi produk unggulan daerah dengan menumbuhkan sentra-sentra industri.

14. STRATEGI 14 - Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif sangat penting dilakukan untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri akan

meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif agar dapat bersaing sehingga menghasilkan produk unggulan yang kompetitif. Kebijakan untuk membangun ekonomi kreatif di Kota Kediri adalah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan pangsa pasar ekonomi kreatif.

15. STRATEGI 15 - Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif dan Promosi Investasi Secara Terpadu

Strategi peningkatan iklim investasi yang kondusif dilaksanakan melalui peningkatan kualitas layanan perijinan untuk memudahkan para investor dalam perijinan. Pelayanan perijinan merupakan salah satu gerbang utama untuk melakukan investasi sehingga peningkatan kualitas layanan perijinan akan terus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Kota Kediri. Disamping itu, untuk meningkatkan investasi di Kota Kediri dilakukan promosi investasi secara terpadu untuk memperkenalkan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan memerlukan nilai investasi yang tinggi. Upaya dalam peningkatan promosi investasi secara terpadu dilakukan melalui pengembangan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah dan peningkatan promosi jenis-jenis usaha potensial untuk meningkatkan daya tarik investasi.

16. STRATEGI 16 - Peningkatan Kinerja BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk semakin profesional dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kontribusi pendapatan daerah dengan mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Arah pengembangan BUMD Kota Kediri antara lain meliputi:

- a. Penguatan tugas dan fungsi BUMD
 - 1) Memberikan pelayanan jasa atau menghasilkan produk untuk kepentingan umum dan meraih laba guna memenuhi tujuan perusahaan;
 - 2) Mengembangkan perekonomian daerah, yang berarti harus mampu menjadi motor penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah;
 - 3) Menambah penghasilan daerah, yang berarti harus mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- b. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga mampu meningkatkan daya kinerja perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. STRATEGI 17 - Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pendukung Perekonomian

Ketersediaan infrastruktur yang baik tentu akan memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian yang akan bermuara pada kesejahteraan hidup masyarakat. Upaya dalam peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan jaringan drainase perkotaan. Sedangkan dalam mendukung kegiatan perniagaan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

18. STRATEGI 18 - Pengembangan Potensi Wisata Daerah

Pengembangan potensi wisata merupakan strategi yang dilakukan untuk mendukung

penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pengembangan potensi wisata dilaksanakan melalui peningkatan dan pengembangan potensi wisata, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan promosi kepariwisataan, pengembangan budaya daerah, serta peningkatan sarana dan prasarana *meeting, incentive, convention, exhibition* (MICE). Pengembangan potensi wisata dapat dicapai melalui program Kampung Keren (kreatif dan independen).

19. STRATEGI 19 - Peningkatan Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dimiliki oleh setiap daerah yang harus diatasi agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, peningkatan layanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberian bantuan sosial bagi warga yang memiliki resiko sosial melalui program kartu Sahabat, peningkatan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan, serta peningkatan program pemberdayaan masyarakat plus.

20. STRATEGI 20 - Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja

Kesempatan kerja yang luas secara langsung akan mempengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Kediri. Kesempatan kerja yang luas tentu akan menyerap tenaga kerja secara merata. Upaya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas ketenagakerjaan daerah dan peningkatan informasi lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tidak hanya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja tetapi perlindungan tenaga kerja juga harus diperhatikan. Dalam hal ini Kota Kediri memberikan fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan industri.

21. STRATEGI 21 - Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban dapat tercipta dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Kota Kediri. Masyarakat ikut mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta pengembangan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Selain itu, keberagaman masyarakat mulai dari suku, ras dan agama menjadikan suatu daerah memiliki berbagai macam perbedaan. Agar keberagaman tersebut menjadi aset bagi Kota Kediri maka perlu adanya harmonisasi yang menjadikan suasana kota yang damai dan tentram. Hal ini tercermin dari masyarakat yang rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan harmonisasi sosial yaitu melalui peningkatan efektivitas bantuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan, serta melakukan peningkatan komunikasi dan keharmonisan antar elemen masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka perlu pemenuhan hak dan perlindungan untuk semua masyarakat.

22. STRATEGI 22 - Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah

Pemanfaatan tata ruang wilayah yang berkualitas dan sesuai arahan akan menjadikan wilayah daerah kota menjadi lebih teratur, sehingga dapat membuat nyaman masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui meningkatkan sinergitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

23. STRATEGI 23 - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai dapat mendukung penciptaan kota layak huni di Kota Kediri. Oleh karena itu, ditetapkan arah kebijakan berupa penataan kawasan kumuh perkotaan dengan hunian dan ruang publik yang layak, terjangkau, ramah disabilitas dan meningkatkan kota layak anak.

24. STRATEGI 24 - Peningkatan Kualitas Layanan Jalan

Tingkat pelayanan jalan adalah ukuran kinerja ruas jalan atau simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, kepadatan dan hambatan yang terjadi. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, meningkatnya kegiatan ekonomi, terbatasnya sumberdaya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan serta sarana-prasarana lalu lintas angkutan jalan. Disamping itu, untuk mengatasi kepadatan jalan dilaksanakan melalui penyediaan transportasi bagi pelajar.

25. STRATEGI 25 - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan yang berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Kediri. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan adalah dengan meningkatkan kinerja layanan kebersihan dan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, meningkatkan pengelolaan limbah cair serta IPAL, meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan persampahan, pembangunan TPA dan mengembangkan TPA Regional.

26. STRATEGI 26 - Peningkatan Efektivitas Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana

Kejadian bencana tidak dapat diperkirakan, namun perlu penanganan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Perlunya kesiapsiagaan bencana dimulai dari pencegahan sampai pasca bencana untuk meminimalisir dampak dan resiko bencana yang terjadi. Upaya yang dilakukan dengan mengembangkan kelurahan tanggap bencana.

27. STRATEGI 27 - Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Peningkatan Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

Kota Kediri memiliki wilayah daratan yang termasuk rendah dan dilalui oleh sungai brantas, untuk itu perlu adanya pengendalian tingkat pencemaran air sungai. Selain sungai, Kota Kediri memiliki kawasan industri dan pemukiman padat penduduk yang

rawan untuk mencemari air, udara, dan tanah. Guna melindungi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka pemerintah melakukan upaya peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran tanah, air dan udara. Upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan juga dilakukan melalui rehabilitasi dan pengelolaan kawasan lindung. Hal tersebut didukung dengan peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau melalui pembangunan taman pada skala kota maupun kelurahan, serta RTH lainnya melalui program 1 kelurahan 1 RTH. Program ini didukung oleh program prodamas yang diberikan untuk tiap Rukun Tetangga.

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 6.2 - Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	v	v	v	v	v
		2	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	v	v	v	v	v
2	Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	3	Meningkatan kualitas sumber daya aparatur	v	v	v	v	v
		4	Meningkatkan kompetensi pegawai	v	v	v	v	v
		5	Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	v	v	v	v	v
		6	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur	v	v	v	v	v
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7	Meningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah	v	v	v	v	v
		8	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP, meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern	v	v	v	v	v
		9	Mengoptimalkan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	v	v	v	v	v
		10	Memperluas zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	v	v	v	v	v
		11	Melaksanakan evaluasi pembangunan daerah secara periodik dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran pembangunan daerah	v	v	v	v	v
4	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD)	v	v	v	v	v
		13	Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendapatan	v	v	v	v	v
5	Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau	14	Meningkatkan kualitas manajemen dan inovasi layanan publik, serta menerapkan kartu melayani pada layanan publik	v	v	v	v	v
		15	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi layanan publik	v	v	v	v	v

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		2020	2021	2022	2023	2024
		16	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik berbasis kartu	v	v	v	v	v
6	Peningkatan penerapan <i>smart city</i>	17	Membangun dan mengimplementasi 6 pilar <i>smart city</i> (<i>smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart social, dan smart environment</i>) secara berkelanjutan	v	v	v	v	v
7	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	18	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui standarisasi pelayanan pendidikan dasar yang mengacu pada standar pendidikan nasional	v	v	v	v	v
		19	Meningkatkan akses pendidikan melalui pendidikan gratis dan berkualitas, bantuan pendidikan, pemberian beasiswa, dukungan sarana- prasarana dan angkutan sekolah gratis	v	v	v	v	v
		20	Meningkatkan jumlah sekolah inklusi	v	v	v	v	v
		21	Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	v	v	v	v	v
		22	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan non formal dengan : a) Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional; b) Menynergikan program-program pendidikan non formal kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan) untuk memperluas kesempatan kerja; a) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan.	v	v	v	v	v
		23	Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga	v	v	v	v	v
		24	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	v	v	v	v	v
8	Peningkatan budaya baca masyarakat	25	Merevitalisasi perpustakaan daerah dan sekolah	v	v	v	v	v
		26	Mengembangkan taman baca masyarakat	v	v	v	v	v
9	Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata serta peningkatan pola hidup sehat	27	Meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Universal Health Coverage (UHC)	v	v	v	v	v
		28	Meningkatkan kualitas layanan puskesmas	v	v	v	v	v
		29	Meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah dan meningkatkan kuantitas Rumah Sakit Tipe C/D untuk melayani pasien BPJS.	v	v	v	v	v
		30	Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui <i>home care</i>	v	v	v	v	v

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		2020	2021	2022	2023	2024
		31	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kesehatan	v	v	v	v	v
		32	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian	v	v	v	v	v
		33	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan melalui Poskeskel	v	v	v	v	v
		34	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat	v	v	v	v	v
		35	Meningkatkan jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	V	v	v	v	v
10	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	36	Meningkatkan Pengarusutamaan gender	V	v	v	v	v
		37	Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	V	v	v	v	v
11	Peningkatan usaha perdagangan, industri, pertanian dan perikanan	38	Menciptakan iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif	v	v	v	v	v
		39	Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri kecil dan menengah	v	v	v	v	v
		40	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menyongsong revolusi industri 4.0	v	v	v	v	v
		41	Meningkatkan daya saing dan kemandirian IKM	v	v	v	v	v
		42	Penumbuhan dan penguatan wirausaha baru dan IKM berbasis teknologi	v	v	v	v	v
		43	Meningkatkan produktivitas pertanian dan produksi perikanan dan peternakan	v	v	v	v	v
		44	Pemulihan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, pertanian akibat dampak Covid-19, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan perluasan pemasaran melalui daring (<i>go digital</i>) maupun luring	v	v	v	v	v
12	Pengembangan koperasi dan usaha mikro	45	Meningkatkan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro	v	v	v	v	v
		46	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk koperasi dan usaha mikro	v	v	v	v	v
		47	Mengembangkan kelembagaan koperasi dan usaha mikro	v	v	v	v	v
		48	Mengembangkan usaha milik RW (koperasi RW)	v	v	v	v	v
		49	Menciptakan wirausaha baru	v	v	v	v	v
		50	Memperluas akses permodalan melalui pinjaman lunak dan pendampingan akses ke lembaga keuangan	v	v	v	v	v
		51	Peningkatan kelas Usaha Mikro yang didukung dengan penyediaan Mall UMKM			v	v	v
13	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif	52	Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk-produk unggulan daerah	v	v	v	v	v
		53	Peningkatan kualitas produk lokal melalui inovasi produk dan	v	v	v	v	v

NO.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2020	2021	2022	2023	2024
			teknologi					
		54	Perluasan pangsa pasar bagi produk unggulan daerah	v	v	v	v	v
		55	Standarisasi produk unggulan daerah	v	v	v	v	v
		56	Menumbuhkan sentra sentra industri	v	v	v	v	v
14	Pengembangan ekonomi kreatif	57	Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha ekonomi kreatif	v	v	v	v	v
		58	Meningkatkan pangsa pasar ekonomi kreatif	v	v	v	v	v
15	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu	59	Meningkatkan kualitas layanan perijinan	v	v	v	v	v
		60	Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah	v	v	v	v	v
		61	Meningkatkan promosi jenis-jenis usaha potensial untuk meningkatkan daya tarik investasi	v	v	v	v	v
16	Peningkatan Kinerja BUMD	62	Penguatan tugas dan fungsi BUMD	v	v	v	v	v
		63	Meningkatkan kinerja BUMD menuju tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>)	v	v	v	v	v
17	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian	64	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	v	v	v	v	v
		65	Mewujudkan jalan lingkar Kota Kediri		v	v	v	v
		66	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase dan trotoar perkotaan	v	v	v	v	v
		67	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pengairan dan irigasi	v	v	v	v	v
		68	Meningkatkan sarana- prasarana perdagangan	v	v	v	v	v
18	Pengembangan potensi wisata daerah	69	Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata	v	v	v	v	v
		70	Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata	v	v	v	v	v
		71	Meningkatkan promosi kepariwisataan	v	v	v	v	v
		72	Mengembangkan Budaya Daerah	v	v	v	v	v
		73	Meningkatkan sarana- prasarana <i>meeting, incentive, convention, exhibition</i> (MICE)	v	v	v	v	v
		74	Mengembangkan kampung keren (kreatif dan independen)	v	v	v	v	v
		75	Mengembangkan identitas Kota Kediri untuk peningkatan kunjungan wisata		v	v	v	v
19	Peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan	76	Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor	v	v	v	v	v
		77	Melaksanakan pembangunan secara menyeluruh	v	v	v	v	v
		78	Meningkatkan layanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	v	v	v	v	v
		79	Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	v	v	v	v	v

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		2020	2021	2022	2023	2024
		80	Memberikan bantuan sosial bagi penduduk yang memiliki resiko sosial melalui kartu Sahabat		v	v	v	v
		81	Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat plus dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Kediri	v	v	v	v	v
20	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	82	Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan daerah	v	v	v	v	v
		83	Meningkatkan informasi lapangan kerja	v	v	v	v	v
		84	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	v	v	v	v	v
		85	Meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha dan industri	v	v	v	v	v
21	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	86	Meningkatkan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban	v	v	v	v	v
		87	Mengembangkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	v	v	v	v	v
		88	Meningkatkan efektivitas bantuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan	v	v	v	v	v
		89	Meningkatkan komunikasi dan keharmonisan antar elemen masyarakat	v	v	v	v	v
22	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	90	Meningkatkan sinergitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	v	v	v	v	v
23	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	91	Penataan kawasan perkotaan dengan penyediaan hunian dan ruang publik yang layak, terjangkau dan ramah disabilitas	v	v	v	v	v
		92	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sanitasi dan air bersih	v	v	v	v	v
		93	Meningkatkan Kota Layak Anak	v	v	v	v	v
		94	Meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan pemakaman yang berkualitas	v	v	v	v	v
24	Peningkatan Kualitas Layanan Jalan	95	Meningkatkan sarana- prasarana lalu-lintas angkutan jalan	v	v	v	v	v
		96	Menyediakan transportasi bagi pelajar.	v	v	v	v	v
25	Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	97	Meningkatkan layanan kebersihan melalui pengelolaan sampah terpadu, pemenuhan sarana prasarana serta implementasi teknologi ramah lingkungan	v	v	v	v	v
		98	Melakukan pembangunan TPA Kota Kediri dan Mengembangkan TPA Regional	v	v	v	v	v
		99	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	v	v	v	v	v
26	Peningkatan efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	100	Mengembangkan kelurahan tanggap bencana	v	v	v	v	v
27	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	101	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran tanah, air dan udara	v	v	v	v	v
		102	Merehabilitasi dan mengelola kawasan lindung	v	v	v	v	v

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		2020	2021	2022	2023	2024
		103	Meningkatkan pelestarian, revitalisasi dan pengelolaan sumber mata air	v	v	v	v	v
		104	Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH melalui pembangunan/ pengembangan taman pada skala kota maupun kelurahan (1 kelurahan 1 RTH), serta RTH lainnya.	v	v	v	v	v

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tema atau fokus pembangunan untuk memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Kediri dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari fokus pembangunan tahap keempat dari RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 yakni, terwujudnya kemantapan posisi daya saing Kota Kediri dengan kemajuan semua aspek pembangunan kota yang didorong oleh kemandirian ekonomi dilandasi *good governance* yang didukung SDM aparatur pemerintahan serta partisipasi warga kota yang cerdas dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kota. Hal tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan tema/fokus pembangunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan lima tahunan untuk tahun 2020-2024. Tema pembangunan tahun 2021 dan 2022 disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3 - Tema atau Fokus Pembangunan Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Yang Berkualitas	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat	Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Infrastruktur Daerah	Memantapkan Pembangunan Kota Kediri Yang Unggul Berbasis Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Mewujudkan Kota Kediri Yang Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Berdasarkan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka dirumuskan program pembangunan daerah sebagai berikut :



Tabel 6.4 – Program Pembangunan Daerah

NO	MISI/ SASARAN/ STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (<i>OUTCOME</i>)	ANGGARAN/TARGET TAHUNAN										OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024		
				ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	
	Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi													
	Tujuan 1: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi.													
	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih													
1	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	125.923.000.000,00	WTP	132.198.477.520,00	WTP	134.181.464.792,80	WTP	136.194.186.618,04	WTP	138.237.099.270,59	WTP	BPPKAD, Inspektorat, Bappeda, Bag. Pengadaan, Bag. Hukum, Bag. Pembangunan
2	Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Program Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	19.019.000.000,00	63,82	20.019.139.750,00	65	20.319.426.846,25	66	20.624.218.248,94	67	20.933.581.522,68	68	BKPSDM
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	Level SPIP	955.000.000,00	3	1.004.353.260,00	3	1.019.418.558,90	4	1.034.709.837,28	4	1.050.230.484,84	4	Inspektorat
		Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	51.545.000.000,00	BB (71,70)	54.256.868.655,00	BB (75,50)	55.070.721.684,83	A (80,05)	55.896.782.510,10	A (80,55)	56.735.234.247,75	A (81,05)	Bappeda, Bag. Organisasi, Inspektorat
			Skor EKPPD		3,42		3,46		3,50		3,54		3,58	Bag. Pemerintahan
			Program Perluasaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah WBK/ WBBM	9.944.000.000,00	0	10.467.076.590,00	1	10.624.082.738,85	2	10.783.443.979,93	5	10.945.195.639,63	10
	Sasaran: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah													
4	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio kemandirian keuangan daerah	4.276.000.000,00	20,49%	4.500.210.660,00	20,80%	4.567.713.819,90	21,00%	4.636.229.527,20	21,50%	4.705.772.970,11	22,00%	BPPKAD, OPD Penghasil, Bag. Perekonomian, BUMD



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

NO	MISI/ SASARAN/ STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (<i>OUTCOME</i>)	ANGGARAN/TARGET TAHUNAN										OPD PENANGG UNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024		
				ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	
	Sasaran: Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat													
5	Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau	Program Peningkatan kualitas Manajemen dan Inovasi Layanan Publik	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPB) yang memperoleh nilai A	97.198.000.000,00	32%	102.306.398.551,00	38,89%	103.840.994.529,27	50,00%	105.398.609.447,20	61,11%	106.979.588.588,91	66,67%	OPD Layanan Publik, Bag Organisasi
	Sasaran: Meningkatnya penerapan <i>smart city</i>													
6	Peningkatan penerapan <i>smart city</i>	Program Peningkatan Penerapan <i>smart city</i>	Persentase Implementasi Smart City	10.479.000.000,00	96%	11.028.388.000,00	97%	11.193.813.820,00	98%	11.361.721.027,30	99%	11.532.146.842,71	100%	Diskominfo, Bappeda, Bag. Protokol
	Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya													
	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya													
	Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat													
7	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Pendidikan	291.618.000.000,00	0,75	305.249.041.672,00	0,76	309.827.777.297,08	0,77	314.475.193.956,54	0,78	319.192.321.865,88	0,79	Dinas Pendidikan, Sekolah
8	Peningkatan budaya baca masyarakat	Program Peningkatan minat baca masyarakat	Indeks Minat Baca	5.911.000.000,00	73,7	6.219.103.280,00	74,20	6.312.389.829,20	76,40	6.407.075.676,64	78,60	6.503.181.811,79	81,05	Dinas Arsip & Perpus, Dinas Pendidikan
	Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat													
9	Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata serta peningkatan pola hidup sehat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	373.137.010.100,00	73,96	353.856.981.125,00	74,06	330.226.739.115,00	74,10	335.180.140.201,73	74,14	340.207.842.304,75	74,18	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
	Sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak													
10	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender			1.916.316.350,00	84,51	1.945.061.095,25	84,56	1.974.237.011,68	84,61	2.003.850.566,85	84,66	DP3AP2KB
			Indeks Pembangunan Gender				94,44		94,49		94,54		94,59	DP3AP2KB



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

NO	MISI/ SASARAN/ STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (<i>OUTCOME</i>)	ANGGARAN/TARGET TAHUNAN										OPD PENANGG UNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024		
				ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	
	Misi 3 Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan													
	Tujuan 3: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif													
	Sasaran: Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah													
11	Peningkatan usaha perdagangan, industri, pertanian dan perikanan	Program Peningkatan usaha perdagangan, industri, pertanian dan perikanan berbasis produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	51.961.000.000,00	-5,6 T	54.684.762.703,00	2,9 T – 3, T	55.505.034.143,55	3,5 T – 4,4 T	56.337.609.655,69	4,5 T – 5,5 T	57.182.673.800,54	4,7 T – 5,9 T	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPI
			Persentase Penciptaan 15.000 Wira Usaha Baru/ Pekerja Baru		5%		15%		35%		60%		80%	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPI
	Sasaran: Meningkatnya ekonomi kreatif													
12	Pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	3.517.000.000,00	N/A	3.701.599.560,00	3,50% - 4,50%	3.757.123.553,40	4,00% - 5,00%	3.813.480.406,70	5,00% - 6,00%	3.870.682.612,80	5,00% - 6,00%	Disperdagin, Dinkop UMTK, Disbudparpora
	Sasaran: Meningkatnya jumlah investasi													
13	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu	Program Peningkatan Iklim Investasi	Nilai Realisasi Investasi	6.591.000.000,00	1.313 M	6.935.091.778,00	720 M	7.039.118.154,67	722 M	7.144.704.926,99	724 M	7.251.875.500,89	726 M	DPMPSTP
	Sasaran: Meningkatnya kinerja BUMD													
14	Peningkatan Kinerja BUMD	Program Peningkatan Kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	3.140.000.000,00	33,33%	3.304.929.286,00	33,33%	3.354.503.225,29	33,33%	3.404.820.773,67	66,67%	3.455.893.085,27	66,67%	Bag. Perekonomian, Bappeda, BUMD
	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai													
15	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian	Program peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian	Indeks Infrastruktur	109.201.923.431,52	N/A	87.047.033.484,00	75	92.624.818.079,15	80	72.963.324.179,79	84	57.312.146.315,84	88	DPUPR, DPKP Dishub



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

NO	MISI/ SASARAN/ STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (<i>OUTCOME</i>)	ANGGARAN/TARGET TAHUNAN										OPD PENANGG UNG- JAWAB	
				2020		2021		2022		2023		2024			
				ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET		
	Sasaran: Meningkatnya daya tarik wisata														
16	Pengembangan potensi wisata daerah	Program Pengembangan potensi wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	11.392.000.000,00	721.141	11.989.422.874,00	900.000	12.169.264.217,11	1.000.000	12.351.803.180,37	1.500.000	12.537.080.228,07	1.750.000	Disbudparpora	
	Tujuan 4: Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan														
	Sasaran: Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka														
17	Peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan	Program peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	151.982.000.000,00	22.196	159.571.552.806,00	21.957	161.965.126.098,09	21.408	164.394.602.989,56	20.857	166.860.522.034,41	20.304	Dinas Sosial Bappeda, Dinkop UMTK, Disperdagin	
18	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	Program Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.640.000.000,00	6,21%	1.724.999.130,00	5,80%	1.750.874.116,95	5,65%	1.777.137.228,70	5,50%	1.803.794.287,13	5,40%	Dinkop UMTK, Disperdagin	
	Misi 4 Mewujudkan Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan														
	Tujuan 5: Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran														
	Sasaran: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat														
19	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	63.373.000.000,00	100%	64.779.027.990,00	100%	65.750.713.409,85	100%	66.736.974.111,00	100%	67.738.028.722,67	100%	Satpol PP, Kesbangpol, Bag Kesra, DP3AP2KB	
	Tujuan 6: Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan														
	Sasaran: Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang														
20	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	Program Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	Persentase Luas Lahan Yang Peruntukannya Sesuai RTRW	3.228.000.000,00	81,50%	3.396.994.950,00	81,74%	3.447.949.874,25	82,24%	3.499.669.122,36	82,74%	3.552.164.159,20	82,94%	DPUPR, Bappeda	
	Sasaran: Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan														



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

NO	MISI/ SASARAN/ STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	ANGGARAN/TARGET TAHUNAN										OPD PENANGG UNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024		
				ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	
21	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Program peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	26.235.000.000,00	93,95%	27.611.837.437,00	93,96%	28.026.014.998,56	94,14%	28.446.405.223,53	94,32%	28.873.101.301,89	94,49%	DPKP, DLHKP, DPUPR
22	Peningkatan Kualitas Layanan Jalan	Program peningkatan Kualitas Layanan Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	7.333.000.000,00	N/A	7.718.917.500,00	0,85 (C)	7.834.701.262,50	0,81 (C)	7.952.221.781,44	0,75 (B)	8.071.505.108,16	0,73 (B)	Dishub, DPUPR
23	Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Program peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	14.953.000.000,00	98,96%	15.739.749.600,00	98,97%	15.975.845.844,00	98,98%	16.215.483.531,66	98,99%	16.458.715.784,63	99,00	DLHKP
	Sasaran: Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana													
24	Peningkatan efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Program peningkatan efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Bencana	4.117.000.000,00	0,62	4.330.903.860,00	0,64	4.395.867.417,90	0,65	4.461.805.429,17	0,70	4.528.732.510,61	0,75	BPBD
	Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH													
25	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	26.236.000.000,00	63,55	27.612.784.110,00	65,08	28.026.975.871,65	66,02	28.447.380.509,72	66,16	28.874.091.217,37	66,35	DLHKP
			Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah		16,95		16,96		16,97		16,98		16,99	DLHKP, DPUPR



Program pembangunan daerah tersebut menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Dalam rangka mendukung pencapaian target program pembangunan daerah, maka ditetapkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Kediri, yaitu: Prodamas Plus, *Service City Card* (Kartu Melayani), *Open And Clean Government*, Asuransi Kesehatan Universal (UHC), *Home Care* Kondisi Darurat, Lansia Dan Balita, Pendidikan Gratis Dan Berkualitas, Pengembangan Usaha Milik RW (Koperasi RW), Penciptaan 15.000 Wirausaha Baru/ Pekerja Baru, 1 Kelurahan 1 RTH, Kampung Keren (Kreatif Dan Independen).

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disampaikan kerangka pendanaan pembangunan dan seluruh program dalam Perubahan RPJMD 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD). Disamping itu juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Kerangka pendanaan pembangunan merupakan kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagaimana yang disajikan pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1 - Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 Kota Kediri

No	URAIAN	Anggaran	Realisasi	PROYEKSI			
		2020		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	PENDAPATAN	1,207,565,404,905.51	1,283,093,769,233.74	1,225,576,071,899.00	1.216.099.455.608,13	1.270.384.253.260,29	1.280.804.560.908,20
4.1	Pendapatan Asli Daerah	239,764,641,013.51	262,886,289,227.78	272,346,756,588.00	280.286.691.608,13	285.892.425.440,29	291.610.273.949,10
4.1.01	Pajak Daerah	101,550,323,000.00	112,204,944,288.62	112,888,250,000.00	113.085.000.000,00	115.346.700.000,00	117.653.634.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9,427,273,000.00	10,293,135,651.00	18,917,716,600.00	26.132.452.200,00	26.655.101.244,00	27.188.203.268,88
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	1,209,685,603.43	1,209,685,603.43	1,439,972,315.00	1.440.735.219,83	1.469.549.924,23	1.498.940.922,71
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	127,577,359,410.08	139,178,523,684.73	139,100,817,673.00	139.628.504.188,30	142.421.074.272,07	145.269.495.757,51
4.2	Pendapatan Transfer	939,585,563,892.00	992,118,443,735.00	925,014,115,311.00	907.597.564.000,00	956.135.551.820,00	960.696.229.579,10
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusa	868,316,936,842.00	895,353,725,667.00	832,431,728,311.00	813.397.564.000,00	861.464.551.820,00	865.551.874.579,10
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71,268,627,050.00	96,764,718,068.00	92,582,387,000.00	94.200.000.000,00	94.671.000.000,00	95.144.355.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28,215,200,000.00	28,089,036,270.96	28,215,200,000.00	28.215.200.000,00	28.356.276.000,00	28.498.057.380,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	28,215,200,000.00	28,089,036,270.96	28,215,200,000.00	28.215.200.000,00	28.356.276.000,00	28.498.057.380,00
5	BELANJA	1,474,904,933,531.52	1,207,691,610,980.16	1,428,487,199,778.00	1.478.808.473.299,00	1.481.913.971.092,93	1.487.397.052.785,97
5.1	Belanja Operasi	1,200,446,928,340.69	1,005,007,203,988.26	1,330,896,725,617.00	1.323.676.436.607,00	1.326.456.157.123,87	1.331.364.044.905,23
5.2	Belanja Modal	117,017,140,029.54	98,314,709,094.90	81,520,113,361.00	135.061.666.692,00	135.345.296.192,05	135.846.073.787,96
5.3	Belanja Tidak Terduga	157,440,865,161.29	104,369,697,897.00	15,500,000,000.00	19.500.000.000,00	19.540.950.000,00	19.613.251.515,00
5.4	Belanja Transfer	1,474,904,933,531.52	1,207,691,610,980.16	570,360,800.00	570.370.000,00	571.567.777,00	573.682.577,77
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(267,339,528,626.01)	75,402,158,253.58	(202,911,127,879.00)	(262.709.017.690,87)	(211.529.717.832,64)	(206.592.491.877,77)
6	PEMBIAYAAN	267,339,528,626.01	267,341,428,526.01	202,911,127,879.00	262.709.017.690,87	211.529.717.832,64	206.592.491.877,77
6.1	Penerimaan Pembiayaan	267,339,528,626.01	267,341,428,526.01	202,911,127,879.00	267.709.017.690,87	250.529.717.832,64	206.592.491.877,77
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	267,339,528,626.01	267,341,428,526.01	202,911,127,879.00	267.709.017.690,87	250.529.717.832,64	162.592.491.877,77
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00
	Silpa Tahun Berjalan	0,00	342,743,586,779.59	0,00	0	0	0

Belanja pada kerangka pendanaan tersebut dijabarkan dalam program perangkat daerah. Pelaksanaan program tahun anggaran 2020 disajikan dalam tabel 7.2, sedangkan uraian program yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.2 - Anggaran dan Realisasi Program Tahun Anggaran 2020

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	4.400.000.000	90,00%	4.919.598.618
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	670.000.000	90,00%	941.910.357
1.01.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	75%	30.000.000		
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- APK PAUD (%)	96,60%	4.197.000.000	92,84%	5.129.357.565
		- APK TK (%)	103,68%		102,28%	
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	106,53%	27.500.000.000	106,26%	28.976.188.724
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	107,80%		109,99%	
		Angka Kelulusan SD/MI	100,00%		100,00%	
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00%		100,00%	
		Peringkat Olimpiade Sains Nasional (OSN)	15			
		Peringkat Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	10			
		Peringkat Festival Lomba Seni Siswa Nasional	15			
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf diatas 15 th	100,00%	8.000.000.000	100,00%	9.781.288.920
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,00%	3.600.000.000	89,49%	4.223.026.000
1.01.21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100,00%	5.300.000.000	100,00%	4.264.474.350
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	340.000.000	94,00%	258.752.804
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	12.000.000	98,00%	7.325.000
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.500.000.000	109,99%	900.263.850
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	181.000.000	90,00%	141.644.500
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	193.000.000	90,00%	162.720.000
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.900.000.000	109,99%	1.107.468.070
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	356.000.000	90,00%	321.367.058
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	41.600.000	90,00%	40.850.000
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.550.000.000	109,99%	818.581.151
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	320.000.000	95,00%	266.035.460
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	-	-	0
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.640.000.000	109,99%	925.110.000
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	230.000.000	100,00%	187.589.600
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	25.000.000	90,00%	19.040.000
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.750.000.000	109,99%	712.170.900
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	265.000.000	94,00%	196.468.795
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	90.000.000	94,00%	84.415.000
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.600.000.000	109,99%	965.434.500
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	255.000.000	77,00%	180.206.080
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	8.000.000	95,00%	6.200.000
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.650.000.000	109,99%	710.611.000
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.01	PENDIDIKAN					
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	310.000.000	95,00%	296.608.928
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,0%	20.000.000	95,00%	17.688.500
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP(%)	107,80%	1.670.000.000	109,99%	962.066.000
		Angka Kelulusan SMP	100,00%			
1.02	KESEHATAN					
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	6.300.000.000	90,00%	5.279.686.907
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	821.000.000	90,00%	1.148.478.546
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	100.000.000	82,00%	148.600.000
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	70.000.000	tepat waktu	288.402.300

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
1.02.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	75%	30.000.000		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	91,00%	280.000.000	90,00%	3.396.326.648
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	2.685.000.000	90,00%	18.113.880.463
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang berfungsi baik	82,00%	800.000.000	82,00%	3.455.150.851
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100,00%	8.400.000.000	75,00%	6.277.692.540
1.02.34	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100,00%	7.500.000.000	95,00%	2.040.132.000
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional	80%			
1.02.35	Program Pembinaan lingkungan Sosial	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional	80%	16.179.538.888	90,00%	37.879.022.269
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional			-	0
1.02.36	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penvakit	85%	2.500.000.000	82,00%	1.885.803.551
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	99.875.036.350	95,00%	88.315.275.682
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru	Persentase Prasarana dan sarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik	85%	500.000.000	97,50%	17.051.335.254
1.02.35	Program Pembinaan lingkungan Sosial	Persentase Sarana prasarana kesehatan rumah sakit yang berfungsi baik	85,00%	2.000.000.000	96,00%	13.989.413.209
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Persentase Sarana prasarana kesehatan rumah sakit yang berfungsi baik				
	RSUD BARU					
1.02	KESEHATAN					
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru	Persentase Prasarana dan sarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik				
1.02.35	Program Pembinaan lingkungan Sosial	Persentase Sarana prasarana kesehatan rumah sakit yang berfungsi baik				
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Persentase Sarana prasarana kesehatan rumah sakit yang berfungsi baik				
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	1.263.000.000	75,00%	1.319.051.379
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	1.268.000.000	75,00%	2.091.962.715
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	1.404.000.000	75,00%	2.152.645.189
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	822.000.000	75,61%	1.615.645.159
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	989.000.000	75,00%	1.117.399.216
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	75,00%	492.375.000	75,00%	202.197.600
1.02.39	Program Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	1.408.000.000	91,00%	1.499.989.540
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	1.068.000.000	80,00%	1.375.035.997
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	1.343.000.000	88,50%	1.687.032.437
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.02	KESEHATAN					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	91,00%	1.057.000.000	75,00%	1.761.681.901
1.02.xx	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional				
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	4.250.000.000	80,00%	1.697.812.736
1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	19.565.000.000	85,00%	6.992.468.908
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	450.000.000	-	0
1.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	90,00%	290.000.000	25,00%	62.864.000
1.03.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio ketersediaan jalan terhadap kebutuhan	70%	1.010.000.000	70,00%	1.337.291.550
		Rasio ketersediaan jembatan terhadap kebutuhan	82%			
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	% Panjang jalan yang memiliki drainase	52,49%	9.185.000.000	50,00%	963.757.975
1.03.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	%panjang sungai/ irigasi kewenangan kota yang memiliki tanggul	56,00%	5.460.000.000	55,00%	1.626.218.200
1.03.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi baik	77,00%	2.775.000.000	32,00%	2.389.606.625
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	81,00%			
1.03.22	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Kebnamargaan	Persentase Data kebinamargaan yang terkelola dalam SI	35,00%	550.000.000	90,00%	730.711.800
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	67,00%	5.560.000.000	73,00%	5.693.871.625
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	40,00%	1.400.000.000	55,00%	2.427.344.700
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase penurunan titik genangan	38%	1.050.000.000	75,00%	872.858.614
1.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pengembangan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh	50%	100.000.000	20%	90.225.000
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan	62,00%	200.000.000	55,00%	286.343.500
1.03.xx	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Persentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan	64,00%	100.000.000	72,47%	72.468.600
1.03.31	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	45,00%	1.750.000.000	33,00%	1.634.467.907
1.03.xx	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen dan regulasi tata ruang kota				
1.03.39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	71%	1.475.000.000	45,00%	1.081.650.950
1.03.41	Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	77,00%	5.200.000.000	45,00%	2.111.065.885
		Persentase Panjang Drainase dalam kondisi baik	45,00%			
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	1.800.000.000	90,00%	2.153.245.920
1.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	440.000.000	75,00%	185.944.238
1.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	30.000.000		
1.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	40.000.000	tepat waktu	50.731.900
1.04.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan area perumahan	60,00%	640.000.000	90,00%	430.049.400
1.04.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase area pemakaman dalam kondisi baik	95,00%	350.000.000	42,54%	300.134.000
1.04.21	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Persentase titik lampu dalam kondisi baik	80,00%	7.700.000.000	80,00%	8.441.029.701
1.04.22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup perumahan dan pemukiman	Persentase Panjang jalan perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik	77,00%	200.000.000		
		Persentase Panjang Drainase perumahan pemukiman dalam kondisi baik	45,00%			
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio ketersediaan jalan perumahan dan pemukiman terhadap kebutuhan	77,00%			
		Rasio ketersediaan jembatan terhadap kebutuhan	82,00%			
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase panjang jalan perumahan dan pemukiman yang memiliki drainase	52,49%	400.000.000		
1.03.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik	77,00%	200.000.000		
		Persentase jumlah jembatan perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik	81,00%			
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan	50,00%	200.000.000		
1.03.xx	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Persentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan				

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
1.03.31	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	Persentase Drainase / Gorong-Gorong perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik	45,00%	150.000.000		
2.04	PERTANAHAN					
2.04.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pengendalian Pemanfaatan Pertanahan	60%	70.000.000	0,00%	0
2.04.xx	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pertanahan	Persentase ASN yang memahami bidang pertanahan				
		Persentase ketersediaan dokumen data/informasi pertanahan				
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	600.100.000	90,00%	481.657.084
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	155.000.000	90,00%	267.460.100
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	17.000.000	tepat waktu	5.336.000
1.05.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
1.05.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Potensi konflik yang tertangani	100%	173.000.000	90,00%	134.150.000
1.05.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat kewaspadaan dini masyarakat	95,00%	752.000.000	90,00%	558.250.000
1.05.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	90,00%	425.000.000	90,00%	107.877.855
1.05.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase mitra yang berperan dalam peningkatan wawasan kebangsaan	90,00%	350.000.000	90,00%	205.805.000
1.05.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan	90,00%	700.000.000	90,00%	231.615.200
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	700.000.000	90,00%	523.340.489
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	340.000.000	90,00%	333.108.555
1.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90,00%	30.000.000		
1.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	200.000.000	82,00%	119.700.000
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	22.000.000		
1.05.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
1.05.24	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penegakan perda	78%	3.900.000.000	80,00%	3.346.676.200
1.05.25	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Persentase petugas perlindungan masyarakat yang aktif	90,00%	1.150.000.000	30,00%	949.650.000
1.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan pelayanan penanganan kebakaran	40,00%	400.000.000	40,00%	350.443.000
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	490.000.000	90,00%	300.236.216
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	160.000.000	90,00%	152.312.000
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	13.000.000		
1.05.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
1.05.23	Program Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Indeks pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	90%	950.000.000	85,00%	3.196.611.960
1.05.26	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase pemenuhan logistik kedaruratan dan bencana	94%	469.000.000	90,00%	65.980.000
1.05.27	Program Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Tingkat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	90%	80.000.000	94,00%	50.560.000
1.06	SOSIAL					
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90%	1.000.000.000	90%	896.820.453
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	220.000.000	90%	174.196.906
1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	-		
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	40.000.000	tepat waktu	26.448.000
1.06.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera	Persentase PMKS yang tertangani	77,00%	1.500.000.000	75,00%	1.389.498.088
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	50,00%	1.000.000.000	80,00%	980.961.000
1.06.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase Panti asuhan / jompo yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	75%	250.000.000		

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
1.06.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persentase Eks penyandang penyakit sosial yang mampu berintegrasi sosial	60,00%	200.000.000		
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	80%	280.000.000	80,00%	192.641.000
1.06.24	Program Pembinaan Orang Terlantar	Persentase orang terlantar yang tertangani	80%	230.000.000	46,00%	207.401.000
1.06.25	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas dan eks trauma yang tertangani	80%	200.000.000	80,00%	107.439.000
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	995.000.000	90,00%	936.335.989
2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	245.000.000	90,00%	226.616.270
2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	60.000.000	80,00%	10.270.000
2.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	50.000.000	tepat waktu	50.000.000
2.02.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen nenganggaran	100%	30.000.000		
2.02.22	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan ternadu	82,50%	770.000.000	85,00%	782.283.500
2.02.23	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Cakupan pemenuhan fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender	85%	2.184.000.000	85,00%	1.882.318.366
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	73,10%	250.000.000	73,00%	1.426.333.700
2.08.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK (Pelayanan Informasi dan Konseling) yang terbentuk	60	50.000.000	100,00%	39.843.000
2.08.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Akseptor KB	70,01	50.000.000	100,00%	73.889.500
2.08.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	70%	120.000.000	70,00%	17.750.000
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,0091	895.000.000	0,0091	814.050.000
2.03	PANGAN					
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	900.000.000	90,00%	631.124.096
2.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	210.000.000	90,00%	119.849.620
2.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	-		
2.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	15.000.000	tepat waktu	9.250.000
2.03.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen nenganggaran	100%	30.000.000		
2.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein per kapita	92,00%	270.000.000	90,00%	109.440.500
2.03.16	Program Pengenekaragaman Pangan dan Gizi	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	88,10%	330.000.000	87,57%	11.937.000
2.03.17	Program Kewaspadaan Pangan dan Keamanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	62,70%	29.000.000	62,70%	8.462.000
2.03.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan ketahanan pangan	90%	180.000.000	90%	61.660.000
2.03.xx	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketahanan Pangan	Persentase masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan ketahanan pangan				
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan (Ton)	182,15	190.000.000	146,65	89.969.000
3.01.25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Perikanan	Persentase masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan perikanan	80%	70.000.000	80,00%	36.462.000
3.03	PERTANIAN					
3.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kelompok Tani yang dibina	75%	140.000.000	75,00%	24.063.650
3.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase kelompok Tani yang dibantu pemasarannya	11%	25.000.000	11,00%	7.250.000
3.03.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan tehnologi pertanian	34%	175.000.000	30,00%	112.002.500
3.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas tanaman pertanian (padi, Ton/Ha)	7,27	352.000.000	7,27	129.948.700
		Produktivitas tanaman pertanian (jagung, Ton/Ha)	8,25			
		Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	98,50			
3.03.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang	Persentase penyuluh yang berkompeten	100%	120.000.000	55,00%	48.654.500
3.03.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak	20,10%	160.000.000	20,10%	69.613.000
3.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	produksi hasil peternakan (Ton)	4.829	150.000.000	3.596,48	81.575.000
3.03.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	pemasaran produksi hasil peternakan (kg)	1.479.194	140.000.000	1.479.194	126.572.000

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
3.03.24	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pertanian	Persentase masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan pertanian	81%	240.000.000	80,00%	183.521.000
2.05	LINGKUNGAN HIDUP					
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	1.859.000.000	90,00%	1.705.337.628
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	452.000.000	82,38%	426.127.953
2.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90,00%	130.000.000	90,00%	114.564.900
2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	25.000.000		0
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	35.000.000	tepat waktu	20.490.000
2.05.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen nenganggaran	100%	30.000.000		
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	82,00%	20.399.000.000	90,00%	11.608.548.530
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	63,30%	865.000.000	63,55%	550.148.280
		Indeks kualitas udara	90,28%			
2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Sumber daya alam yang terpelihara	81,00%	190.000.000	81,00%	23.010.500
2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	88,00%	189.000.000	90,00%	77.366.250
2.05.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	16,92%	6.239.000.000	8,00%	4.269.409.738
2.05.25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Indeks kualitas air	63,30%	250.000.000	60,23%	242.368.470
		Indeks kualitas udara	90,28%		90,76	
2.05.xx	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air				
		Indeks kualitas udara				
2.05.26	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	Persentase peningkatan PAD dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pertamanan	2,00%	85.000.000	10,00%	45.081.900
2.05.xx	Program Pengembangan Penerimaan Daerah dari Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan pertamanan	Persentase peningkatan PAD dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pertamanan				
2.05.27	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Persampahan	Timbulan sampah yang dikelola	98,80%	250.000.000	30,00%	243.074.500
2.05.28	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang RTH	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	16,92%	16.000.000.000	16,95%	2.766.485.450
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	1.050.000.000	90,00%	953.297.648
2.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	120.000.000	90,00%	114.336.376
2.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90,00%			
2.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	20.000.000	tepat waktu	14.300.000
2.06.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen nenganggaran	100%	30.000.000		
2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kenendudukan	95,79%	1.400.000.000	85,00%	2.276.135.990
2.09	PERHUBUNGAN					
2.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	2.700.000.000	90,00%	2.454.672.558
2.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	370.000.000	90,00%	357.302.122
2.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	14.000.000	tepat waktu	8.120.000
2.09.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen nenganggaran	100%	30.000.000		
2.09.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan frekuensi pelayanan angkot dalam satu rute kawasan pendidikan per jam	14%	2.000.000.000	50,00%	693.456.646
2.09.23	Pogram Pengembangan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Persentase perlengkapan LLAJ sesuai standar	90,00%	1.000.000.000	100,00%	974.361.959
2.09.24	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan	1,50%	1.000.000.000	#REF!	1.123.119.800
2.09.25	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Persentase prasarana angkutan umum sesuai standar	80,00%	3.900.000.000	75%	3.699.940.800
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	450.000.000	90,00%	350.439.958
2.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	80.000.000	90,00%	68.581.881
2.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	8.000.000	tepat waktu	5.477.000
2.10.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen nenganggaran	100%	30.000.000		

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang <u>dipublikasikan</u>	75,00%	430.000.000	90,00%	401.093.104
2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Persentase kebijakan daerah yang <u>dipublikasikan</u>	75,00%	220.000.000	90,00%	97.447.500
2.10.21	Program Pengembangan Komunikasi	Persentase Kelompok Informasi <u>Masyarakat yang terlatih</u>	90%	150.000.000	90,00%	118.002.038
2.10.22	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase SDM Komunikasi dan <u>Informatika yang berkompeten</u>	90%	260.000.000	112,00%	172.902.857
2.10.43	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi E-Gov yang <u>terintegrasi</u>	20%	3.900.000.000	30,21%	3.919.336.802
2.10.44	Program Penguatan Tata Kelola Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi informasi yang <u>memiliki Tata Kelola yang baik</u>	40%	360.000.000	40,00%	332.227.900
2.10.45	Program Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi	Persentase jaringan komunikasi yang <u>aktif</u>	75%	5.000.000	90,80%	46.905.000
2.10.46	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Informasi yang <u>disampaikan melalui jaringan komunikasi yang aman</u>	80%	250.000.000	80,00%	264.152.500
2.10.47	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah aduan yang <u>ditindaklanjuti</u>	100%	160.000.000	90,00%	105.220.000
2.14	STATISTIK					
2.14.42	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase tersedianya data statistik <u>sektoral</u>	90%	358.000.000	90,00%	73.400.000
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
2.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan <u>administrasi perkantoran</u>	90,00%	680.000.000	90,00%	380.396.941
2.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana <u>dalam kondisi baik</u>	90,00%	190.000.000	90,00%	38.395.848
2.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin <u>ASN</u>	90,00%	22.000.000	90,00%	15.985.000
2.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja <u>perangkat daerah disusun tepat waktu</u>	tepat waktu	20.000.000	tepat waktu	8.250.000
2.11.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen <u>perencanaan dengan dokumen penganggaran</u>	100%	30.000.000		
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75,00%	1.000.000.000	64,00%	632.217.000
2.11.xx	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase masyarakat di lingkungan <u>IHT yang mendapat pelatihan</u>	86,00%	300.000.000		
2.11.20	Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang terlatih	6,90%	800.000.000	6,56%	176.614.000
2.11.21	Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang terlatih	6,90%	80.000.000	6,56%	71.225.000
		<u>Jumlah Wirausaha Baru</u>	1650 WUB		1.169,00	
2.11.22	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro	Usaha Mikro yang Meningkatkan <u>Omsetnya</u>	275 UM	1.440.000.000	100 um	553.721.600
2.01	TENAGA KERJA					
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang <u>mendapat pelatihan</u>	75%	300.000.000	52,63%	287.444.125
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja yang <u>terfasilitasi informasi kerja</u>	96,57%	300.000.000	46,32%	120.914.000
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan <u>(%)</u>	79%	375.000.000	79,00%	149.624.000
		Persentase kasus yang diselesaikan <u>dengan perjanjian bersama</u>	100%		100%	
2.01.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja dan <u>masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan</u>	75%	2.000.000.000	52,63%	1.430.015.000
		Persentase angkatan kerja yang <u>terfasilitasi informasi kerja</u>	96,57%		95,36%	
2.12	PENANAMAN MODAL					
2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan <u>administrasi perkantoran</u>	90,00%	1.600.000.000	90,00%	1.232.585.418
2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana <u>dalam kondisi baik</u>	90,00%	170.000.000	90,00%	188.521.197
2.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin <u>ASN</u>	90,00%	30.000.000	90,00%	45.600.000
2.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja <u>perangkat daerah disusun tepat waktu</u>	tepat waktu	22.000.000	tepat waktu	21.500.000
2.12.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen <u>perencanaan dengan dokumen penganggaran</u>	100%	30.000.000		
2.12.18	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase penerbitan izin usaha dan <u>izin teknis yang sesuai dengan SOP</u>	90%	800.000.000	93,00%	540.071.825
2.12.19	Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) <u>baru</u>	625	400.000.000	1.169,00	101.245.000
2.12.20	Program Pengendalian Penanaman Modal	Tingkat ketaatan investor terhadap <u>ketentuan penanaman modal</u>	90%	250.000.000	88,00%	193.250.000
2.12.21	Program Optimalisasi Pemanfaatan Data Dan Teknologi Informasi	Cakupan pelayanan izin yang <u>terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal</u>	90%	240.000.000	95,00%	141.329.000
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
2.13.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<u>prestasi kepemudaan</u>	12	600.000.000	0,00	530.448.350
2.13.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang mendapat <u>pelatihan kewirausahaan</u>	4,00%	500.000.000		
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	<u>Jumlah atlet berprestasi</u>	40	1.300.000.000	0,00	354.580.000
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olah <u>raga yang berfungsi dengan baik</u>	86,00%	125.000.000	96,00%	147.533.200
2.16	KEBUDAYAAN					
2.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan <u>administrasi perkantoran</u>	90,00%	1.975.000.000	90,00%	1.657.465.026
2.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana <u>dalam kondisi baik</u>	90,00%	70.000.000	90,00%	359.483.750

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
2.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	25.000.000		
2.16.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai budaya yang dilestarikan	85,50%	375.000.000	90,00%	251.040.000
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	86,00%	1.400.000.000	86,00%	1.172.961.500
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Budaya yang dilestarikan	85,00%	800.000.000	85,00%	683.192.500
2.16.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase budaya yang dipromosikan	75,00%	350.000.000	75,00%	196.412.500
3.02	PARIWISATA					
3.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	90%	1.000.000.000	38,46%	390.591.500
3.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase potensi obyek wisata yang berfungsi dengan baik	80,00%	185.000.000	38,46%	184.976.000
3.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata	75,00%	250.000.000	38,46%	300.300.000
2.17	PERPUSTAKAAN					
2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pelayanan perpustakaan	65%	820.000.000	65%	569.999.726
		Persentase Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan	40%			
2.18	KEARSIPAN					
2.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	636.000.000	90,00%	408.078.668
2.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	148.000.000	90,00%	102.564.954
2.18.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90,00%	25.000.000		
2.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	25.000.000		
2.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	20.000.000	tepat waktu	9.066.000
2.18.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
2.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentasi Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	30%	34.000.000	30%	26.735.000
2.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip yang diselamatkan	42%	250.000.000	42%	142.939.500
2.18.17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang berfungsi baik	70%	62.000.000	70%	42.020.000
2.18.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki SDM pengelola Arsip yang berkompeten	65%	26.000.000	65%	8.890.000
3.06	PERDAGANGAN					
3.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	755.000.000	90,00%	518.228.473
3.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	210.000.000	97,00%	87.437.400
3.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	60.000.000		
3.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	25.000.000	tepat waktu	21.422.600
3.06.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	100%	30.000.000		
3.06.15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase penurunan kejadian kelangkaan barang	50%	410.000.000	60%	71.103.000
3.06.16	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik	600 orang	50.000.000	450	173.334.000
3.06.17	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Perdagangan non tembakau (Milyar Rupiah)	18500	435.000.000	29350	189.034.000
3.06.18	Program Pembinaan dan Pengembangan Kemetrolgian Daerah	Persentase pelayanan tera/tera ulang	85%	445.000.000	18,70%	324.944.580
3.06.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha yang terbina	0,00%	-		
3.07	PERINDUSTRIAN					
3.07.15	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	Persentase tenaga kerja IKM yang memanfaatkan teknologi	39%	230.000.000	40%	44.991.000
3.07.16	Program Pemberdayaan Industri	Persentase IKM yang naik status	2%	100.000.000	0,00%	0
3.07.17	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	26%	160.000.000	22,72%	104.100.000
3.07.18	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif	1297 unit	1.035.000.000	1562,00	419.840.000
3.07.19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase IKM yang terbina	29,71%	280.000.000		
3.07.21	Program Pembinaan Industri	Persentase IHT yang terbina	100%	20.000.000	0,00%	0
4	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.08	Program Pembinaan Administrasi Kecamatan/ Kelurahan	Persentase aparatur pemerintahan kecamatan/kelurahan yang terbina	80%	180.000.000	80,00%	78.457.500
4.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peringkat LPPD tingkat nasional (kategori kota)	12	350.000.000	12	214.825.250

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	80%	350.000.000	80,00%	209.876.000
4.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase batas wilayah yang akurat	90%	270.000.000	90,00%	178.371.875
4.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur pemerintahan kecamatan yang terbina	80%	25.000.000	0,00%	0
4.03.43	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat kelurahan yang berkinerja baik	90%	260.000.000	90,00%	218.970.800
4.03.xx	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Kelurahan	Persentase perangkat kelurahan yang berkinerja baik				
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase kelurahan berdaya	85%	1.000.000.000	85,00%	384.786.500
2.07.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	80%	160.000.000	80,00%	34.790.000
2.07.66	Program Fasilitas Produmas	Persentase program pemberdayaan masyarakat dengan kategori berhasil	87%	800.000.000	87,00%	235.010.000
2.07.xx	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelurahan berdaya	80%			
2.07.xx	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	80%			
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	35.000.000	90,00%	87.120.000
4.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	tingkat pelayanan kedinasan dan protokol kesekretariatan , KDH dan Wakil KDH yang berkualitas	85%	300.000.000	85,00%	212.262.982
4.03.39	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Tingkat cakupan penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai	90%	500.000.000	90,00%	255.331.452
4.03.40	Program Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersampaikan	85%	5.200.000.000	85,00%	132.537.881
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	10.000.000	90,00%	108.136.000
4.03.45	Program Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan dan Spiritual	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	93%	2.500.000.000	93%	1.673.615.000
4.03.46	Program Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan dan Bina Sosial	Persentase kegiatan kemasyarakatan bidang kesehatan dan bina sosial yang terfasilitasi	93%	750.000.000	93,00%	568.135.000
		Persentase lembaga keagamaan/sosial yang mendapat bantuan	83%		83%	
4.03.47	Program Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase kegiatan kemasyarakatan bidang pendidikan dan kebudayaan yang terfasilitasi	90%	1.700.000.000	90,00%	1.338.676.344
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	50.000.000	90,00%	45.280.000
4.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	90.000.000	tepat waktu	115.581.000
4.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian RKA dengan HSPBJ	90%	250.000.000	90,00%	414.714.131
4.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai ketentuan	74,00%	550.000.000	74,00%	754.522.750
4.03.36	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Rasio Jumlah Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Jalan dengan Hasil Kerja yang baik	80%	150.000.000	0,00%	0
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	70.000.000		
4.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase program / kegiatan yang didanai DBHCHT sesuai dengan ketentuan	100%	50.000.000	100,00%	75.056.000
4.03.32	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Tingkat pencegahan peredaran barang kena cukai ilegal	100%	500.000.000	100,00%	287.073.619
4.03.35	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitas dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD	70%	280.000.000	70,00%	209.182.847
4.03.44	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Persentase peningkatan laba BUMD	5,00%	230.000.000	5,00%	254.326.250
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	25.000.000		
4.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	85.000.000	82,00%	75.150.000
4.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase fasilitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90,00%	950.000.000	90,00%	885.443.355
4.03.xx	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan				
4.03.xx	Program Peningkatan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ				
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	150.000.000		0
4.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80,00%	340.000.000	80,00%	242.307.250
4.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus hukum dan persentase terfasilitasinya masyarakat miskin mendapatkan akses keadilan	100%	1.800.000.000	100%	644.583.350
4.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	90%	1.300.000.000	90%	737.395.637

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.03.xx	Program Penyebarluasan Informasi Hukum	Persentase cakupan kelompok sasaran yang menerima diseminasi produk hukum dan informasi kebijakan daerah sesuai substansi hukumnya				
4.03.xx	Program Peningkatan Kualitas Layanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase aparatur layanan hukum yang berkompeten				
		Persentase layanan hukum yang tepat sasaran				
		Persentase pemberian fasilitasi pengaju bantuan hukum				
4.03.xx	Program Penguatan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase penanganan kasus				
		Persentase penanganan Perkara ASN				
		Persentase hasil pertemuan koordinasi permasalahan hukum dengan APH				
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	350.000.000	tepat waktu	395.201.000
4.03.07	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang optimal	75,00%	700.000.000	75,00%	598.351.500
4.03.xx	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah				
4.03.xx	Program Peningkatan Layanan Publik	Rata-rata nilai IKM Perangkat Daerah				
4.03	KESEKRETARIATAN DAERAH					
4.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	7.200.000.000	90,00%	6.070.327.953
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	1.200.000.000	90,00%	1.497.492.902
4.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90,00%	345.000.000	90,00%	103.711.961
4.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	40.000.000	tepat waktu	26.750.000
4.03.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
4.03.10	Program Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90%	4.550.000.000	90%	3.456.397.425
4.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah, sesuai ketentuan regulasi yang berlaku	90,00%	5.500.000.000	90,00%	5.318.714.846
4.03.48	Program Peningkatan Layanan Kesekretariatan Daerah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi pada layanan kesekretariatan daerah	-	-		
4.04	KESEKRETARIATAN DPRD					
4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	3.600.000.000	90,00%	4.728.599.069
4.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	370.000.000	90,00%	2.348.456.913
4.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90,00%	550.000.000	90,00%	267.357.700
4.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	125.000.000	82,00%	412.202.000
4.04.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
4.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat Kapasitas DPRD	90,00%	25.110.042.000	90,00%	25.204.600.413
4.04.16	Program Pembuatan Peraturan Daerah	Persentase perda yang ditetapkan	80,00%	13.000.000.000	80,00%	13.094.868.468
4.04.xx	Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase perda yang ditetapkan				
4.05	PENGAWASAN					
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	490.000.000	90,00%	364.065.337
4.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	260.000.000	90,00%	249.291.073
4.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	14.000.000	tepat waktu	13.094.000
4.05.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
4.05.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal B	90,00%	2.100.000.000		1.425.734.043
4.05.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase peningkatan nilai AK (Angka Kredit) melalui pengembangan profesi	77,00%	390.000.000	77,00%	175.105.739
4.05.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Level APIP	Level 3	91.000.000	Level 3	70.964.000
4.05.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	92,00%	155.000.000	92,00%	77.169.000
4.06	PERENCANAAN					
4.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90%	680.000.000	90%	658.674.591
4.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	280.000.000	90,00%	237.260.040

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82,00%	40.000.000	82,00%	30.000.000
4.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	25.000.000	tepat waktu	17.392.000
4.06.07	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	30.000.000		
4.06.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan dokumen data/informasi untuk perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah	80%	350.000.000	80%	176.268.200
4.06.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	92%	900.000.000	92%	828.980.785
		Persentase perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang selaras dengan peraturan yang berlaku	93,55%			
4.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA tepat waktu	100%	1.400.000.000	100%	1.760.523.682
		RKPD yang berkualitas	100%		100%	
4.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang ekonomi dengan RPJMD	100%	400.000.000	100%	289.904.000
		Persentase capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Bidang Ekonomi berkategori berhasil	93,55%		93,55%	
4.06.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang sosial budaya dengan RPJMD	100%	700.000.000	100%	502.214.000
		Persentase capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Bidang Sosial dan Budaya berkategori berhasil	93,55%		93,55%	
4.06.xx	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkualitas	90,00%	200.000.000		
		Persentase Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berkualitas	85,71%			
4.06.xx	Program pengendalian pembangunan daerah	Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu	100%	200.000.000		
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.38	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen dan regulasi tata ruang kota	100%	100.000.000		0
4.09	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
4.09.30	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan	78,57%	1.800.000.000	78,57%	1.105.686.778
4.07	KEUANGAN					
4.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	3.015.496.000	90,00%	2.747.674.635
4.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	1.013.083.000	90,00%	841.976.270
4.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90,00%			
4.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	94.830.000	tepat waktu	97.023.000
4.07.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	30.000.000		
4.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	3.201.098.000	WTP	2.276.820.077
4.07.42	Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi pada penerimaan daerah	100%	-		
4.07.43	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD	5%	4.429.524.000	-1,45%	3.915.441.500
4.07.44	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	91%	1.998.185.000	13,48%	1.250.311.512
4.07.xx	Program Peningkatan Pengelolaan BMD	Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	14%	-		
4.07.xx	Program Peningkatan Kualitas Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat, cepat dan akurat	98%	-		
4.07.xx	Program Peningkatan Kualitas Data Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah	5%	-		
4.07.xx	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Dan Optimalisasi Pendapatan	Persentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih	13%	-		
4.07.xx	Program Pengendalian Operasional Pendapatan	Persentase Kenaikan PAD	3%	-		
4.08	KEPEGAWAIAN					
4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	856.000.000	90,00%	724.099.881
4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	250.000.000	90,00%	877.485.417
4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin ASN	90%	360.000.000	35%	310.166.100
4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	29.000.000	tepat waktu	19.526.000
4.08.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	30.000.000		
4.08.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan	80,00%	1.000.000.000	92,00%	664.766.600
4.08.31	Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Informasi ASN	Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi	90%	4.800.000.000	90%	1.778.941.820

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.08.32	Program Pelayanan ASN	Persentase hasil pelayanan tepat waktu	96%	1.100.000.000	93,00%	239.308.833
4.08.34	Program Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan aparatur	80%	880.000.000	93,00%	893.395.900
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	355.920.000	90,00%	280.033.664
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	190.871.000	90,00%	47.897.755
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	13.000.000	tepat waktu	9.967.500
4.11.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
4.11.31	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Persentase layanan publik yang sesuai SOP	83,00	65.000.000	83,00	43.615.000
4.11.34	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	91,00%	1.100.000.000	91,00%	436.141.500
		Persentase kampung kreatif yang terbangun				
4.11.39	Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku	90%	-		
4.11.xx	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kelurahan yang memperoleh skor IKM A	83,00			
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.xx	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	87,00%			
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	205.000.000	90,00%	118.131.356
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	200.000.000	90,00%	19.060.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.670.000	tepat waktu	4.267.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	55.000.000	88,00%	7.890.500
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.52	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Lor	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.200.000.000	1,44%	60.625.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	468.000.000	87,00%	713.955.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	270.000.000	90,00%	156.918.176
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	180.000.000	90,00%	39.678.400
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	170.000.000	88,00%	24.455.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.53	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.100.000.000	#REF!	66.743.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	430.000.000	87,00%	729.745.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	263.000.000	90,00%	204.922.405
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	200.000.000	90,00%	195.660.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000		0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	65.600.000	#REF!	42.237.500
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.54	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarmati	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.400.000.000	1,80%	61.050.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	357.000.000	87,00%	636.885.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	224.190.000	90,00%	200.390.346
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	130.000.000	90,00%	200.895.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000		
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	253.340.000	25,49%	64.587.500
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.55	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Poiok	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.900.000.000	1,14%	55.575.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	416.000.000	85%	779.348.240
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	202.200.000	90,00%	144.151.881
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	90.000.000	90,00%	156.064.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	441.000.000	17,31%	76.325.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.56	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukorame	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.700.000.000	0,00%	0
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	362.000.000	87,00%	658.075.700

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	228.665.000	90,00%	151.845.068
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	138.000.000	90,00%	184.369.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	231.000.000	19,03%	43.950.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.57	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bujel	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.500.000.000	1,49%	52.270.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	348.000.000	87,00%	657.930.200
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	176.504.000	90,00%	104.112.500
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	159.000.000	90,00%	113.196.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	136.000.000	26,51%	36.050.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.58	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gavam	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.100.000.000	1,16%	35.862.500
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	297.000.000	87,00%	634.172.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	198.000.000	90,00%	177.308.496
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	300.000.000	90,00%	234.094.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	7.160.000	tepat waktu	3.085.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	216.000.000	88,00%	133.885.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.59	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mrican	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.600.000.000	2,17%	78.100.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	410.000.000	172,96%	709.127.700
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	190.000.000	90,00%	143.306.851
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	134.000.000	90,00%	57.803.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000		0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	224.000.000		63.480.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.60	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermu	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.500.000.000	1,83%	45.667.200
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	260.000.000	219,20%	569.932.050
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	170.000.000	90,00%	154.584.225
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	79.000.000	90,00%	174.450.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000	tepat waktu	7.500.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	99.000.000	9,19%	9.100.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.61	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampel	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.900.000.000	1,66%	48.275.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	80,00%	320.000.000	187,26%	599.222.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	250.000.000	90,00%	170.169.134
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	110.000.000	90,00%	107.523.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000	tepat waktu	5.100.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	250.000.000	42,51%	106.275.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.62	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojoroto	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	5.400.000.000	1,75%	94.656.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	560.000.000	162,28%	908.761.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	260.000.000	90,00%	248.662.013
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	78.000.000	90,00%	175.339.325
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	3.500.000	tepat waktu	9.800.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	250.000.000	19,32%	48.300.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.63	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campurejo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.900.000.000	1,57%	45.670.000

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	260.000.000	240,47%	625.223.065
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	240.000.000	90,00%	189.197.629
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	73.000.000	90,00%	128.773.400
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	300.000.000	14,99%	44.971.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.64	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lirboyo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.800.000.000	0,00%	0
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	340.000.000	188,07%	639.447.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	190.000.000	90,00%	125.464.804
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	50.000.000	90,00%	31.385.400
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	160.000.000	11,72%	18.748.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.65	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.300.000.000	1,22%	28.018.500
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	240.000.000	272,91%	654.980.900
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	417.219.000	68,95%	287.668.944
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	82.155.000	#REF!	75.228.013
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	18.715.000	tepat waktu	18.605.000
4.11.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
4.11.31	Program Peningkatan Pelayanan Prima	IKM Kecamatan	75,00	53.500.000	75,00%	63.541.000
4.11.34	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	95,00%	1.168.411.000	24,51%	286.388.000
4.11.39	Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	90%	80.000.000	90%	61.300.000
4.11.xx	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	IKM Kecamatan	75,00			
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.xx	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	87,00%			
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	290.000.000	90,00%	234.218.573
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	35.000.000	90,00%	84.482.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90,00%	300.000.000	11,83%	35.498.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.35	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semampir	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.000.000.000	1,48%	44.500.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	310.000.000	90,00%	634.447.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	200.000.000	90,00%	153.961.066
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	110.000.000	85,00%	28.807.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	101.000.000	21,28%	21.495.400
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.36	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balowerti	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.000.000.000	1,20%	35.975.800
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	340.000.000	184,42%	627.038.600
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	240.000.000	90,00%	208.750.702
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	100.000.000	90,00%	79.541.300
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	160.000.000	88,00%	8.325.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.37	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dandangan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	5.300.000.000	1,27%	67.125.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	640.000.000	87,00%	867.646.350
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	380.000.000	90,00%	238.715.528
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	35.000.000	90,00%	25.170.625
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000	tepat waktu	3.450.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90,00%	200.000.000	13,73%	27.465.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.38	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngadirejo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	5.700.000.000	2,43%	138.249.000

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	600.000.000	87,00%	909.632.850
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	250.000.000	90,00%	169.298.152
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	280.000.000	90,00%	28.600.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	190.000.000	42,29%	80.344.500
1	URUSAN WAJIB					
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	20.000.000	87,00%	15.735.000
2.07.39	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjaran	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.900.000.000	1,62%	79.560.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	510.000.000	87,00%	777.635.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	190.000.000	90,00%	209.750.523
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	250.000.000	90,00%	107.370.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	10.000.000	tepat waktu	0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	240.000.000	25,98%	62.354.000
1	URUSAN WAJIB					
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.40	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliombo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.700.000.000	2,51%	118.142.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	390.000.000	87,00%	724.828.685
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	380.000.000	90,00%	248.503.410
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	120.000.000	90,00%	393.200.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	270.000.000	0,56%	1.500.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.41	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngronggo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	7.100.000.000	1,56%	110.477.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	650.000.000	87,00%	942.525.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	190.000.000	90,00%	192.722.308
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	55.000.000	90,00%	95.567.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	10.000.000		0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	56.000.000	88,00%	22.000.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.42	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrenggo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.200.000.000	1,91%	61.100.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	610.000.000	87,00%	893.104.350
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	220.000.000	90,00%	170.546.478
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	24.000.000	90,00%	65.373.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	39.000.000	20,51%	8.000.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.43	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.400.000.000	0,79%	18.850.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	280.000.000	87,00%	625.148.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	120.000.000	90,00%	98.663.659
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	51.000.000	90,00%	37.563.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	4.000.000		0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	46.000.000	10,98%	5.050.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA					
2.07.44	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemasan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	800.000.000	2,61%	20.890.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	200.000.000	87,00%	514.960.800

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	120.000.000	90,00%	102.473.764
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	60.000.000	90,00%	8.991.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	90.000.000	10,76%	9.680.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.45	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pocanan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	900.000.000	2,96%	26.650.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	240.000.000	87,00%	478.245.550
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	149.000.000	90,00%	114.565.728
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	100.000.000	90,00%	35.000.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	8.000.000		0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	130.000.000	12,59%	16.364.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.46	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ringinanom	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	700.000.000	4,88%	34.146.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	240.000.000	87,00%	539.522.475
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	220.000.000	90,00%	160.030.350
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	25.000.000	90,00%	22.413.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	200.000.000	40,44%	80.875.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.47	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	1.800.000.000	3,28%	59.037.500
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	320.000.000	87,00%	580.473.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	150.000.000	90,00%	135.203.275
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	60.000.000	90,00%	57.251.300
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	-		
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	180.000.000	7,53%	13.550.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.48	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Pande	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.800.000.000	1,76%	49.375.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	300.000.000	87,00%	654.052.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	130.000.000	90,00%	101.569.942
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	18.000.000	90,00%	17.509.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	8.000.000	tepat waktu	4.500.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	43.000.000	21,72%	9.340.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.49	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	600.000.000	3,36%	20.150.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	290.000.000	87,00%	492.323.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	230.000.000	90,00%	172.484.916
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	53.000.000	90,00%	70.213.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	130.000.000	29,65%	38.550.000
1	URUSAN WAJIB					
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.50	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakelan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	1.500.000.000	2,88%	43.225.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	300.000.000	87,00%	530.851.000

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	130.000.000	90,00%	117.736.568
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	30.000.000	90,00%	26.356.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000		
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	88,00%	29.000.000	88,00%	20.887.500
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.51	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Gedong	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	500.000.000	5,02%	25.075.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	290.000.000	87,00%	463.297.003
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	430.000.000	90,00%	362.546.530
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	340.000.000	90,00%	347.290.771
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	14.000.000	tepat waktu	8.885.000
4.11.07	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000		
4.11.31	Program Peningkatan Pelayanan Prima	IKM Kecamatan	88,30	186.000.000	7,17%	13.330.000
4.11.34	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	91,00%	890.000.000	24,60%	218.982.500
4.11.39	Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	90%	90.000.000	77,47%	69.725.000
4.11.xx	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	IKM Kecamatan	88,30			
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.xx	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	87,00%			
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	190.000.000	90,00%	163.892.475
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	90.000.000	90,00%	41.894.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90,00%	50.000.000	37,89%	18.944.000
2.07	PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.20	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangsal	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.600.000.000	0,72%	26.000.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	550.000.000	87,00%	674.606.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	260.000.000	90,00%	193.830.358
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	90.000.000	90,00%	64.718.750
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000		
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	100.000.000	14,54%	14.535.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.21	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakunden	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.200.000.000	0,64%	26.717.500
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	480.000.000	87,00%	730.098.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	200.000.000	90,00%	158.234.076
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	50.000.000	90,00%	48.871.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	260.000.000	13,14%	34.175.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA					
2.07.22	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tosaren	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.600.000.000	1,14%	52.263.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	480.000.000	87,00%	746.598.700
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	300.000.000	90,00%	237.761.650
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	80.000.000	90,00%	91.132.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	130.000.000	4,00%	5.206.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA					
2.07.23	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jamsaren	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.100.000.000	0,61%	24.987.500
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	460.000.000	87,00%	754.029.300

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	280.000.000	90,00%	268.112.550
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	60.000.000	90,00%	153.877.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	10.000.000	tepat waktu	9.150.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	135.000.000	14,44%	19.500.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.24	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Singonegaran	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	4.800.000.000	0,61%	29.459.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	570.000.000	87,00%	852.866.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	160.000.000	90,00%	160.931.379
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	90.000.000	90,00%	128.407.500
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	10.000.000		0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	190.000.000	90%	122.947.500
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.25	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Blabak	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.100.000.000	0,72%	22.450.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	340.000.000	87,00%	628.350.800
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	160.000.000	90,00%	125.254.574
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	90.000.000	90,00%	192.975.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	6.000.000	tepat waktu	2.465.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	80.000.000	32,46%	25.965.500
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.26	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Betet	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.300.000.000	1,08%	24.923.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	390.000.000	87,00%	623.173.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	220.000.000	90,00%	157.148.533
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	150.000.000	90,00%	63.290.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	170.000.000	7,75%	13.175.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.27	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinalan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.400.000.000	0,67%	22.755.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	290.000.000	87,00%	632.480.400
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	200.000.000	90,00%	122.364.254
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	90.000.000	90,00%	51.821.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	300.000.000	11,53%	34.575.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.28	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bawang	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	3.200.000.000	0,00%	0
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	380.000.000	87,00%	622.557.000
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	130.000.000	90,00%	99.738.708
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	70.000.000	90,00%	74.322.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	90.000.000	22,11%	19.900.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA					
2.07.29	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngletih	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	1.400.000.000	1,25%	17.543.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	150.000.000	87,00%	511.761.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	170.000.000	90,00%	144.038.151
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	13.000.000	90,00%	41.602.400
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	2.000.000	tepat waktu	825.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	90.000.000	25,46%	22.915.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.30	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tempurejo	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	95,00%	2.100.000.000	0,98%	20.500.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	320.000.000	87,00%	615.312.450
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	200.000.000	90,00%	145.398.433
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	44.000.000	90,00%	30.141.000
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	180.000.000	7,03%	12.653.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.31	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketami	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masvarakat	95,00%	3.000.000.000	0,68%	20.451.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	420.000.000	87,00%	549.285.000
2.07	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	280.000.000	90,00%	216.878.495
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	130.000.000	90,00%	50.757.000
4.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	tepat waktu	5.000.000		0
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	160.000.000	9,25%	14.800.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.32	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pesantren	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masvarakat	95,00%	3.900.000.000	0,45%	24.156.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	380.000.000	87,00%	662.489.500
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	170.000.000	90,00%	130.240.826
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	130.000.000	90,00%	65.977.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	39.000.000	49,06%	19.135.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.33	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banaran	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masvarakat	95,00%	2.500.000.000	1,13%	28.322.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	280.000.000	87,00%	572.757.900
4.11	PEMERINTAHAN UMUM					
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	300.000.000	90,00%	184.903.726
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00%	23.000.000	90,00%	16.479.500
4.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	100,00%	170.000.000	3,71%	6.310.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.07.34	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Burengan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masvarakat	95,00%	3.700.000.000	0,08%	3.000.000
2.07.67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	87,00%	410.000.000	87,00%	719.270.000
TOTAL				732.424.528.238,00		550.723.458.827,90

Tabel 7.3 - Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	1		Dinas Pendidikan												
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	217.473.807.782,00	100 %	209.859.884.399,00	100 %	210.300.590.156,24	100 %	211.078.702.339,82	100 %	1.056.941.984.677,05	Dinas Pendidikan
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A (%)	106.64 %	63.993.635.600,00	106.75 %	74.753.291.321,00	106.86 %	74.910.273.232,77	106.87 %	75.187.441.243,74	106.87 %	349.638.641.397,51	Dinas Pendidikan
				APM SMP/MTs/Paket B (%)	107.91 %		108.02 %		108.13 %		108.24 %		108.24 %		
				APK TK (%)	103.98 %		104.28 %		104.58 %		104.88 %		104.88 %		
				Angka Melek Huruf diatas 15 tahun	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Melek Huruf diatas 15 tahun	100 %	149.997.830,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.052.500,00	100 %	25.145.194,25	100 %	368.195.524,25	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	91 %	10.577.351.000,00	92 %	9.835.000.000,00	93 %	9.855.653.500,00	94 %	9.892.119.417,95	94 %	50.209.123.917,95	Dinas Pendidikan
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	2		Dinas Kesehatan												
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	249.000.000.000,00	100 %	280.486.006.749,00	100 %	281.075.027.363,17	100 %	282.115.004.964,42	100 %	1.335.449.039.076,59	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik	85 %	72.151.971.000,00	85 %	79.521.451.635,00	85 %	79.688.446.683,43	85 %	79.983.293.936,16	85 %	379.890.163.254,60	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
				Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	92 %		93 %		94 %		95 %		95 %		
				Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	83 %		84 %		85 %		86 %		86 %		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100 %	3.629.600.000,00	100 %	8.216.800.000,00	100 %	8.234.055.280,00	100 %	8.264.521.284,54	100 %	31.793.976.564,54	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	92 %	200.000.000,00	95 %	207.200.000,00	95 %	207.635.120,00	100 %	208.403.369,94	100 %	1.013.238.489,94	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	92 %	364.970.000,00	93 %	500.000.000,00	94 %	501.050.000,00	95 %	502.903.885,00	95 %	2.215.923.885,00	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	25.182.204.427,00	100 %	24.239.605.797,00	100 %	24.290.508.969,17	100 %	24.380.383.852,36	100 %	122.016.703.045,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	69 %	9.912.816.116,00	71 %	15.890.381.022,00	73 %	15.923.750.822,15	75 %	15.982.668.700,19	75 %	67.127.616.660,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase panjang sungai/ irigasi kewenangan kota yang memiliki tanggul	57 %			-		-		-		-	
				Persentase Jaringan Sungai Dalam Kondisi Baik			56%		57%		58%		58%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	50 %	749.370.000,00		-		-		-		1.461.370.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Sarana Air Minum Berfungsi Dengan Baik			90,75%	399.752.000,00	90,85%	400.591.479,20	90,95	402.073.667,67	90,95%	1.202.417.146,87	
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan			10,87%	500.000.000,00	17,39%	501.050.000,00	23,91%	502.903.885,00	23,91%	1.503.953.885,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	90,02%	249.997.990,00	90,26%	2.113.650.000,00	90,51%	2.118.088.665,00	90,75%	2.125.925.593,06	90,75%	6.845.662.248,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	47,83%	6.424.991.213,00	48,23%	15.025.400.000,00	48,63%	15.056.953.340,00	49,04%	15.112.664.067,36	49,04%	57.724.008.620,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik	66,15%	2.160.182.480,00	70,82%	10.480.000.000,00	93 %	10.502.008.000,00	94 %	10.540.865.429,60	94 %	35.736.055.909,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Terpenuhinya Infrastruktur Lingkungan	100%	1.171.994.950,00	100%	506.920.000,00	100%	507.984.532,00	100%	509.864.074,77	100%	3.810.763.556,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	81,96	5.913.998.900,00	82,48	10.423.281.242,00	82,99%	10.445.170.132,61	83,51%	10.483.817.262,10	83,51%	42.885.267.536,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi			100%	700.000.000,00	100%	701.470.000,00	100%	704.065.439,00	100%	2.105.535.439,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW / RDTK	80,74%	2.125.000.000,00	81,24%	1.225.682.300,00	81,74%	1.228.256.232,83	82,94%	1.232.800.780,89	82,94%	7.830.739.313,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman												
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %	696.200.000,00	0	-	0	-	0	-	0	1.358.200.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	46 %	308.560.000,00	0	-	0	-	0	-	0	602.560.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik	91 %	70.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	137.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi baik	79 %	169.230.000,00	0	-	0	-	0	-	0	330.230.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman												
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	7.459.295.215,00	100 %	9.159.290.338,00	100 %	9.178.524.847,71	100 %	9.212.485.389,65	100 %	42.096.595.790,36	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan area perumahan	61 %	80.000.000,00	62 %	260.946.834,00	63 %	261.494.822,35	64 %	262.462.353,19	64 %	940.904.009,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase ketersediaan area perumahan	61 %	7.032.413.000,00	62 %	7.066.911.250,00	63 %	7.081.751.763,63	64 %	7.107.954.245,15	64 %	34.970.030.258,78	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan area perumahan	61 %	9.114.378.752,00	62 %	9.285.453.750,00	63 %	9.304.953.202,88	64 %	9.339.381.529,73	64 %	45.703.167.234,60	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	5		Satuan Polisi Pamong Praja												
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	10.527.523.500,00	100 %	11.277.242.286,00	100 %	11.300.924.494,80	100 %	11.342.737.915,43	100 %	54.450.428.196,23	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda	80 %	4.278.328.000,00	82 %	3.472.205.000,00	85 %	3.479.496.630,50	88 %	3.492.370.768,03	88 %	18.787.400.398,53	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran	50 %	389.570.000,00	60 %	518.598.350,00	71 %	519.687.406,54	76 %	521.610.249,94	76 %	2.320.466.006,47	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
					2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	5		Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	2.627.589.000,00	100 %	2.815.142.100,00	100 %	2.821.053.898,41	100 %	2.831.491.797,83	100 %	13.592.276.796,24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	91 %	1.200.695.390,00	92 %	1.280.414.256,00	93 %	1.283.103.125,94	94 %	1.287.850.607,50	94 %	6.193.063.379,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase pemenuhan logistik kedaruratan dan bencana	95 %		96 %		97 %		98 %		98 %		
				Tingkat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1	6		Dinas Sosial												
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	6.450.167.010,00	100 %	7.472.246.690,00	100 %	7.487.938.408,05	100 %	7.515.643.780,16	100 %	35.053.995.888,21	Dinas Sosial
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	81 %	971.359.000,00	82 %	703.262.900,00	83 %	704.739.752,09	84 %	707.347.289,17	84 %	4.009.708.941,26	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	80 %	5.158.752.150,00	81 %	4.850.761.960,00	82 %	4.860.948.560,12	83 %	4.878.934.069,79	83 %	24.650.396.739,90	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	80 %	8.082.230.280,00	81 %	8.040.702.002,00	82 %	8.057.587.476,20	83 %	8.087.400.549,87	83 %	39.946.920.308,07	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Peningkatan Kapasitas Tagana	100 %	113.049.470,00	100 %	540.000.000,00	100 %	541.134.000,00	100 %	543.136.195,80	100 %	1.845.319.665,80	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100 %	86.165.440,00	100 %	127.302.400,00	100 %	127.569.735,04	100 %	128.041.743,06	100 %	551.079.318,10	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
2	7		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja												
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun			100%	-	100%	50.000.000,00	100%	50.185.000,00	100%	100.185.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dan masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	87 %	1.000.000.000,00		-		-		-		1.950.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Angkatan Kerja yang terlatih			88%	30.000.000,00	89%	30.063.000,00	90%	30.174.233,10	90%	90.237.233,10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	80 %	350.000.000,00	85 %	6.203.165.000,00	90 %	6.166.191.646,50	95 %	6.189.006.555,59	95 %	19.241.363.202,09	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	80 %	374.999.130,00		-		-		-		731.999.130,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPIS Ketenagakerjaan)			25%	288.250.000,00	26%	288.855.325,00	27%	289.924.089,70	27%	867.029.414,70	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2	8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	6.868.173.165,00	100 %	7.814.461.280,00	100 %	7.830.871.648,69	100 %	7.859.845.873,79	100 %	36.898.351.967,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
					2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	86 %	1.916.316.350,00	87 %	1.825.504.320,00	88 %	1.779.337.879,07	89 %	1.785.921.429,22	89 %	9.128.079.978,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu	85%		87%		90%	50.000.000,00	92,50%	50.185.000,00	92,50%	100.185.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu	85 %	20.889.300,00	87.5 %	234.082.520,00	90 %	234.574.093,29	92.5 %	235.442.017,44	92.5 %	744.987.930,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	86 %	101.025.000,00	87 %	15.000.000,00	88 %	15.031.500,00	89 %	15.087.116,55	89 %	242.143.616,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu	85 %	57.600.000,00	87.5 %	50.000.000,00	90 %	50.105.000,00	92.5 %	50.290.388,50	92.5 %	262.995.388,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu	85 %	472.799.900,00	87.5 %	180.300.000,00	90 %	180.678.630,00	92.5 %	181.347.140,93	92.5 %	1.465.125.670,93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2	9		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian												
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	14.018.958.600,00	100 %	13.049.043.511,00	100 %	13.076.446.502,37	100 %	13.124.829.354,43	100 %	66.588.277.967,81	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	63 %	39.392.000,00	63.2 %	66.528.000,00	63.75 %	66.667.708,80	64 %	66.914.379,32	64 %	277.502.088,12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein per kapita	92 %	1.306.156.000,00	93 %	967.148.260,00	94 %	969.179.271,35	94 %	972.765.234,65	94 %	5.456.248.766,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88.25 %		88.5 %		89 %		89.75 %	-	89.75 %		
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	63 %	32.202.000,00	63.2 %	3.890.200,00	63.75 %	3.898.369,42	64 %	3.912.793,39	64 %	74.903.362,81	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	63 %	35.000.000,00	63.2 %	15.585.000,00	63.75 %	15.617.728,50	64 %	15.675.514,10	64 %	115.878.242,60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
1	4		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman												
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			100.000.000,00		205.000.000,00		205.430.500,00		206.190.592,85		811.621.092,85	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan	61 %		62 %		63 %		64 %		64 %		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2	11		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan												
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	21.792.196.760,00	100 %	22.410.305.672,00	100 %	22.457.367.313,91	100 %	22.540.459.572,97	100 %	109.903.329.318,88	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersusun	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.157.500,00	100 %	75.435.582,75	100 %	372.593.082,75	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara dan air	66.8 %	179.055.600,00	68.95 %	152.900.000,00	69.20 %	153.221.090,00	69.30 %	153.788.008,03	69.30 %	809.964.698,03	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	16.93 %	4.873.995.450,00	16.94 %	6.836.817.314,00					16.96 %	16.341.812.764,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
				Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara					100%	6.751.174.630,36	100%	6.776.153.976,49	100%	13.527.328.606,85	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
				Persentase RTH Kelurahan terbangun					90%		100%				

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase sampah B3 yang ditangani	84 %	68.999.800,00	86 %	63.552.200,00	88 %	63.685.659,62	90 %	63.921.296,56	90 %	326.158.956,18	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanganan izin lingkungan	66.8 %	553.536.500,00	68.95 %	721.500.000,00	69.20 %	723.015.150,00	69.30 %	725.690.306,06	69.30 %	3.249.741.956,06	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	89 %	70.000.000,00	90 %	124.200.000,00	91 %	124.460.820,00	92 %	124.921.325,03	92 %	510.582.145,03	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Aduan Lingkungan Hidup	0	-	68.95 %	-	100%	100.000.000,00	100%	100.370.000,00	69.30 %	200.370.000,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang ditangani	84 %	15.739.749.600,00	98,98%	13.299.731.100,00	98,99%	13.327.660.535,31	99%	13.376.972.879,29	99%	70.697.114.114,60	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	6.698.386.050,00	100 %	7.054.997.400,00	100 %	7.069.812.894,54	100 %	7.095.971.202,25	100 %	34.283.167.546,79	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	97 %	359.996.635,00	98 %	943.686.886,00	99 %	945.668.628,46	100 %	949.167.602,39	100 %	3.540.519.751,85	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	97 %	236.996.110,00	98 %	278.550.870,00	99 %	279.135.826,83	100 %	280.168.629,39	100 %	1.300.851.436,21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	97 %	634.999.470,00	98 %	373.371.100,00	99 %	374.155.179,31	100 %	375.539.553,47	100 %	2.362.065.302,78	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	97 %	79.999.000,00	98 %	-	99 %	-	100 %	-	100 %	155.999.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
4	1		Sekretariat Daerah												
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan Berdaya	82 %	322.549.040,00	83 %	256.744.700,00	84 %	257.283.863,87	85 %	258.235.814,17	85 %	1.401.813.418,04	Sekretariat Daerah
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelurahan Berdaya	82 %	208.459.500,00	83 %	132.256.300,00	84 %	132.534.038,23	85 %	133.024.414,17	85 %	805.274.252,40	Sekretariat Daerah
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2	8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,16%	783.050.000,00	0,15%	542.463.030,00	0,14%	543.602.202,36	0,13%	545.613.530,51	0,13%	3.158.728.762,87	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	70.2 %	90.299.520,00	70.4 %	120.000.000,00	70.6 %	120.252.000,00	70.8 %	120.696.932,40	70.8 %	537.248.452,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah PIK (Pusat Informasi & Konseling) yang terbentuk	62 %	117.283.120,00	70 %	183.120.479,00	75 %	183.505.032,01	80 %	184.184.000,62	80 %	780.092.631,63	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2	15		Dinas Perhubungan												
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	12.960.910.250,00	100 %	12.187.302.890,00	100 %	12.212.896.226,07	100 %	12.258.083.942,11	100 %	61.932.193.308,17	Dinas Perhubungan
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %				
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan LLAJ sesuai standar	91 %	7.718.917.500,00	92 %	11.284.713.815,00	93 %	11.308.411.714,01	94 %	11.350.252.837,35	94 %	48.995.295.866,36	Dinas Perhubungan	
				Persentase prasarana angkutan umum sesuai standar	83 %		86 %		91 %		94 %		94 %			
				Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan	1.5 %		1.5 %		1.5 %		1.5 %		1.5 %			
				Persentase peningkatan frekuensi pelayanan angkot dalam satu rute kawasan pendidikan per jam	17 %		20 %		23 %		25 %		25 %			
				Persentase LPJU dalam kondisi baik			87%		89%		91%		91%			
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2	16		Dinas Komunikasi dan Informatika													
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	5.312.848.000,00	100 %	8.187.435.090,00	100 %	8.204.628.703,69	100 %	8.234.985.829,89	100 %	34.987.897.623,58	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan	77 %	1.333.468.140,00	80 %	2.087.165.368,00	83 %	2.091.548.415,27	85 %	2.099.287.144,41	85 %	8.878.469.067,68	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik	50 %	3.930.346.780,00	60 %	3.812.250.410,00	67 %	3.820.256.135,86	70 %	3.834.391.083,56	70 %	19.131.244.409,42	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase Aplikasi E-Gov Yang Terintegrasi	30 %		40 %		50 %		70 %	-	70 %			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2	17		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja													
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	6.253.983.950,00	100 %	10.169.753.720,00	100 %	10.191.110.202,81	100 %	10.228.817.310,56	100 %	42.785.665.183,37	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	64,51%	100.000.000,00	65,63%	100.000.000,00	66,66%	100.000.000,00	67,64%	100.000.000,00	67,64%	400.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	64,51%	298.399.950,00	65,63%	85.000.000,00	66,66%	85.178.500,00	67,64%	85.493.660,45	67,64%	838.072.110,45	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi cukup sehat	60%	49.999.800,00	60,78%	48.250.000,00	60,95%	48.351.325,00	61,81%	48.530.224,90	61,81%	243.131.349,90	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	81%	19.999.920,00	81,25%	15.000.000,00	81,81%	15.031.500,00	82,35%	15.087.116,55	82,35%	84.118.536,55	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dengan klasifikasi usaha koperasi (KUK) 2	5%	3.071.099.900,00	5,77%	962.000.000,00	6,48%	964.020.200,00	7,14%	967.587.074,74	7,14%	8.882.707.174,74	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terlatih	7.4 %	18.296.947.120,00	8.08 %	10.988.609.752,00	9.21 %	11.011.685.832,48	10.6 %	11.052.429.070,06	10.6 %	68.827.671.774,54	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	320 UM	99.999.590,00	373 UM	99.999.600,00	440 UM	100.209.599,16	515 UM	100.580.374,68	515 UM	495.789.163,84	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2	18		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	6.098.187.458,00	100 %	6.131.473.885,00	100 %	6.144.349.980,16	100 %	6.167.084.075,09	100 %	30.335.095.398,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	656 NIB	111.233.500,00	689 NIB	110.488.000,00	705 NIB	110.720.024,80	720 NIB	111.129.688,89	720 NIB	549.571.213,69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	656 NIB	88.687.200,00	689 NIB	124.432.500,00	705 NIB	124.693.808,25	720 NIB	125.155.175,34	720 NIB	547.968.683,59	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
					2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	90 %	466.983.720,00	93 %	394.983.410,00	95 %	395.812.875,16	96 %	397.277.382,80	96 %	2.099.057.387,96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal	93 %	169.999.900,00	94 %	98.899.900,00	95 %	99.107.589,79	96 %	99.474.287,87	96 %	629.481.677,66	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	93 %	201.000.000,00	94 %	181.000.000,00	95 %	181.380.100,00	96 %	182.051.206,37	96 %	936.431.306,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2	22		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga												
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prestasi Pemuda	13 Pemuda	1.414.999.660,00	14 Pemuda	2.254.666.700,00	15 Pemuda	2.259.401.500,07	16 Pemuda	2.267.761.285,62	16 Pemuda	9.541.829.145,69	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4 %		4 %		5 %		5 %		5 %		
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	42 atlet	11.639.249.800,00	44 atlet	11.814.438.400,00	46 atlet	11.839.248.720,64	48 atlet	11.883.053.940,91	48 atlet	58.233.990.861,55	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase sarana dan prasarana olah raga yang berfungsi dengan baik	87 %		88 %		89 %		90 %	-	90 %		
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2	16		Dinas Komunikasi dan Informatika												
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	91 %	119.990.230,00	92 %	37.858.700,00	93 %	37.938.203,27	93 %	38.078.574,62	93 %	347.865.707,89	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2	16		Dinas Komunikasi dan Informatika												
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman	81 %	130.734.850,00	82 %	24.528.000,00	83 %	24.579.508,80	84 %	24.670.452,98	84 %	329.512.811,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2	22		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga												
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	7.703.423.314,00	100 %	13.265.275.743,00	100 %	13.293.132.822,06	100 %	13.342.317.413,50	100 %	54.923.149.292,56	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya yang dilestarikan	85 %	3.575.999.670,00	86 %	898.400.080,00	87 %	900.286.720,17	88 %	903.617.781,03	88 %	9.676.304.251,20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase budaya yang dipromosikan	80 %		82 %		86 %		90 %		90 %		
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	88 %	60.000.000,00	90 %	15.000.000,00	94 %	15.031.500,00	96 %	15.087.116,55	96 %	162.118.616,55	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
2	24		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan												
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pelayanan perpustakaan	66 %	1.467.517.460,00	67 %	451.477.500,00	68 %	452.425.602,75	69 %	454.099.577,48	69 %	4.220.520.140,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
2	24		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan												
2	24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	4.501.417.860,00	100 %	6.168.917.745,00	100 %	6.181.872.472,26	100 %	6.204.745.400,41	100 %	27.333.953.477,68	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang memiliki SDM pengelola Arsip yang berkompeten	66 %	134.991.100,00	67 %	216.542.320,00	68 %	216.997.058,87	69 %	217.799.947,99	69 %	915.330.426,86	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang berfungsi baik	35 %		40 %		45 %		50 %		50 %		
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang diselamatkan	50 %	115.176.860,00	60 %	76.611.400,00	70 %	76.772.283,94	80 %	77.056.341,39	80 %	455.616.885,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
2	9			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian												
3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan (kw)	183.95 %	396.037.000,00	185.76 %	213.854.500,00	187.56 %	214.303.594,45	189.56 %	215.096.517,75	189.56 %	1.416.291.612,20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pembinaan dan ketrampilan kerja lingkup perikanan	81 %	99.616.000,00	82 %	54.275.900,00	83 %	54.389.879,39	84 %	54.591.121,94	84 %	357.872.901,33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
2	22			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga												
3	26	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase potensi obyek wisata yang berfungsi dengan baik	83 %	220.000.000,00	86 %	30.000.000,00	88 %	30.063.000,00	90 %	30.174.233,10	90 %	519.237.233,10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	91 %	349.999.950,00	92 %	276.000.000,00	93 %	276.579.600,00	94 %	277.602.944,52	94 %	1.513.182.494,52	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	91 %	79.999.940,00	92 %	80.000.000,00	93 %	80.168.000,00	94 %	80.464.621,60	94 %	396.632.561,60	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
2	9			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian												
3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman pangan padi (ton)	7.29 ton	916.294.500,00	7.3 ton	616.980.000,00	7.31 ton	618.275.658,00	7.32 ton	620.563.277,93	7.32 ton	3.643.113.435,93	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produksi hasil peternakan (kg)	4979 kg		5129 kg		5279 kg		5429 kg		5429 kg		
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.	100 %	704.160.000,00	100 %	197.674.000,00	100 %	198.089.115,40	100 %	198.822.045,13	100 %	1.967.745.160,53	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak	20.20 %	73.120.000,00	20.30 %	77.027.000,00	20.40 %	77.188.756,70	20.50 %	77.474.355,10	20.50 %	374.810.111,80	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan tehnologi	34 %	50.000.000,00	48 %	53.478.000,00	50 %	53.590.303,80	56 %	53.788.587,92	56 %	258.856.891,72	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang dibina	76 %	238.751.400,00	80 %	221.797.950,00	82 %	222.263.725,70	83 %	223.086.101,48	83 %	1.132.899.177,18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3	30			Dinas Perdagangan dan Perindustrian												
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	20%	-	22%	-	24%	50.000.000,00	26%	50.185.000,00	26%	100.185.000,00	
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	28%	349.999.820,00	29%	25.000.000,00	30%	25.052.500,00	31%	25.145.194,25	31%	805.197.514,25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	10,20%	199.999.820,00	9,80%	219.999.800,00	9,40%	220.461.799,58	9,00%	221.277.508,24	9,00%	1.051.738.927,82	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	12%	229.999.760,00	16%	284.490.000,00	20%	285.087.429,00	24%	286.142.252,49	24%	1.304.719.441,49	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	86%	449.999.479,00	87%	906.798.940,00	88%	858.703.217,77	89%	861.880.419,68	89%	3.552.382.056,45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik	500 orang	319.999.790,00	700 orang	80.510.000,00	700 orang	80.679.071,00	900 orang	80.977.583,56	1100 orang	866.166.444,56	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3	30			Dinas Perdagangan dan Perindustrian												
3	31	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	6.584.646.474,00	100 %	7.914.196.492,00	100 %	7.930.816.304,63	100 %	7.960.160.324,96	100 %	36.645.819.595,59	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
					Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
					Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memenuhi standar	27%	3.601.599.560,00	28%	5.424.999.900,00	29%	5.436.392.399,79	30%	5.456.507.051,67	30%	23.436.498.911,46	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pemantauan dan pengawasan Ijin Sektor Industri	75%	100.000.000,00	80%	25.000.000,00	85%	25.052.500,00	90%	25.145.194,25	90%	175.197.694,25	
3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	3,30%	349.999.830,00	6%	1.074.999.800,00	8%	1.077.257.299,58	11%	1.081.243.151,59	11%	3.916.500.081,17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1		SEKRETARIAT DAERAH													
4	1		Sekretariat Daerah													
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	44.900.000.000,00	100 %	45.762.665.457,00	100 %	45.858.767.054,46	100 %	46.028.444.492,56	100 %	225.536.877.004,02	Sekretariat Daerah	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.10 point		82.15 point		84.55 point		86.5 point		86.5 point			
				Tingkat pelayanan kedinasan dan protokoler kesekretariatan, KDH dan Wakil KDH yang berkualitas	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat LPPD tingkat nasional (kategori kota)	91 %	23.231.830.950,00	92 %	19.222.446.400,00	93 %	19.262.813.537,44	94 %	19.334.085.947,53	94 %	103.122.176.834,97	Sekretariat Daerah	
				Persentase kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan yang terfasilitasi	93 %		94 %		94 %		95 %		95 %			
				Persentase harmonisasi Produk Hukum Daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	83 %		83 %		85 %		85 %		85 %			
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD	75 %	3.304.929.286,00	80 %	2.937.997.700,00	85 %	2.944.167.495,17	90 %	2.955.060.914,90	90 %	15.282.155.396,07	Sekretariat Daerah	
				Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai ketentuan	75 %		76 %		77 %		78 %		78 %			
				Level Kematangan UKPBJ	2		2		3		3		3			
				Persentase peningkatan laba BUMD	8 %		10 %		13 %		15 %		15 %			
4	2		SEKRETARIAT DPRD													
4	2		Sekretariat DPRD													
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	30.158.974.500,00	100 %	33.119.570.000,00	100 %	33.189.121.097,00	100 %	33.311.920.845,06	100 %	158.431.586.442,06	Sekretariat DPRD	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	81 %	43.981.904.000,00	82 %	29.435.863.000,00	83 %	29.497.678.312,30	84 %	29.606.819.722,06	84 %	174.305.265.034,36	Sekretariat DPRD	
				Tingkat Kapasitas DPRD	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1		PERENCANAAN													
5	1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	6.130.375.275,00	100 %	6.645.546.860,00	100 %	6.659.502.508,41	100 %	6.684.142.667,69	100 %	31.848.567.311,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA tepat waktu	100 %	2.179.993.970,00	100 %	1.625.399.300,00	100 %	1.628.812.638,53	100 %	1.634.839.245,29	100 %	9.140.045.153,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
						2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan sosial budaya dengan RPJMD	100 %	1.451.394.000,00	100 %	1.429.005.900,00	100 %	1.432.006.812,39	100 %	1.437.305.237,60	100 %	7.128.711.949,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang ekonomi dan SDA dengan RPJMD	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	93 %		95 %		97 %		98 %		98 %			
5	2		KEUANGAN													
5	2		Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah													
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	22.703.472.330,00	100 %	24.611.186.591,00	100 %	24.662.870.082,84	100 %	24.754.122.702,15	100 %	118.300.651.705,99	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengan target WTP	WTP .	33.499.808.000,00	WTP .	24.887.373.200,00	WTP .	24.939.636.683,72	WTP .	25.031.913.339,45	WTP .	140.183.731.223,17	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	29 %	936.222.690,00	43 %	1.148.022.300,00	57 %	1.150.433.146,83	71 %	1.154.689.749,47	71 %	5.279.367.886,30	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase kenaikan PAD	3 %	4.500.210.660,00	3 %	5.435.048.313,00	3 %	5.446.461.914,46	3 %	5.466.613.823,54	3 %	25.124.334.711,00	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
5	3		KEPEGAWAIAN													
5	3		Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia													
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	8.771.026.250,00	100 %	7.774.649.500,00	100 %	7.790.976.263,95	100 %	7.819.802.876,13	100 %	40.489.454.890,08	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi	91 %	8.118.676.300,00	92 %	3.677.086.543,00	93 %	3.684.808.424,74	94 %	3.698.442.215,91	94 %	26.892.013.483,65	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Persentase hasil pelayanan tepat waktu	96.5 %		96.7 %		97 %		97.5 %		97.5 %			
				Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan aparatur	81 %		82 %		83 %		84 %		84 %			
				Tingkat disiplin ASN	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5	3		Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia													
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan	80.97 %	3.129.437.200,00	68%	2.818.359.900,00	76%	2.824.278.455,79	77%	2.834.728.286,08	77%	14.579.803.841,87	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan aparatur	81 %		82 %		83 %		84 %		84 %			
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5	1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	81%	1.279.499.380,00	82%	1.138.906.718,00	83%	1.141.298.422,11	84%	1.145.521.226,27	84%	5.921.225.746,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	1		INSPEKTORAT DAERAH													
6	1		Inspektorat													
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	8.287.082.620,00	100 %	8.283.312.810,00	100 %	8.300.707.766,90	100 %	8.331.420.385,64	100 %	41.075.523.582,54	Inspektorat	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
					2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal B	92 %	1.513.596.000,00	94 %	1.919.635.400,00	95 %	1.923.666.634,34	96 %	1.930.784.200,89	96 %	8.725.682.235,23	Inspektorat
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level APIP	Level 3	1.004.353.260,00	Level 3	889.161.930,00	Level 3	891.029.170,05	Level 3	894.325.977,98	Level 3	4.633.870.338,04	Inspektorat
				Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	95 %		96 %		100 %		100 %		100 %		
7			UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1		KECAMATAN												
4	1		Sekretariat Daerah												
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	96 %	3.655.887.740,00	97 %	3.743.596.100,00	98 %	3.751.457.651,81	99 %	3.765.338.045,12	99 %	18.390.279.536,93	Sekretariat Daerah
7	1		Kecamatan Mojooroto												
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	29.635.474.520,00	100 %	29.864.324.440,00	100 %	29.927.039.521,32	100 %	30.037.769.567,55	100 %	147.618.608.048,88	Kecamatan Mojooroto
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	92 %	269.551.890,00	93 %	219.389.700,00	94 %	219.850.418,37	95 %	220.663.864,92	95 %	1.186.455.873,29	Kecamatan Mojooroto
				Persentase layanan publik yang sesuai SOP	84 %		85 %		86 %		87 %		87 %		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	96 %	41.913.927.183,00	97 %	36.803.148.451,00	98 %	36.880.435.062,75	99 %	37.016.892.672,48	99 %	192.433.403.369,23	Kecamatan Mojooroto
				Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	92 %		93 %		94 %		95 %		95 %		
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	88 %	80.124.500,00	89 %	983.165.775,00	90 %	985.230.423,13	91 %	988.875.775,69	91 %	3.114.396.473,82	Kecamatan Mojooroto
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90 %	586.321.330,00	92 %	558.396.300,00	93 %	559.568.932,23	94 %	561.639.337,28	94 %	2.823.925.899,51	Kecamatan Mojooroto
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	88 %	5.587.499.700,00	89 %	6.099.227.330,00	90 %	6.112.035.707,39	91 %	6.134.650.239,51	91 %	29.242.412.976,90	Kecamatan Mojooroto
7	1		Kecamatan Kota												
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	33.129.167.990,00	100 %	33.047.830.939,00	100 %	33.117.231.383,97	100 %	33.239.765.140,09	100 %	164.006.995.453,06	Kecamatan Kota
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	92 %	196.793.000,00	93 %	148.000.000,00	94 %	148.310.800,00	95 %	148.859.549,96	95 %	828.963.349,96	Kecamatan Kota
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90 %	43.800.000.000,00	92 %	37.608.396.384,00	93 %	37.687.374.016,41	94 %	37.826.817.300,27	94 %	198.916.587.700,67	Kecamatan Kota
				Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	96 %		97 %		98 %		99 %		99 %		
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	88 %	92.276.750,00	89 %	1.507.265.425,00	90 %	1.510.430.682,39	91 %	1.516.019.275,92	91 %	4.713.992.133,31	Kecamatan Kota
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90 %	637.061.250,00	92 %	592.847.200,00	93 %	594.092.179,12	94 %	596.290.320,18	94 %	3.026.290.949,30	Kecamatan Kota
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	88 %	6.526.649.690,00	89 %	6.785.938.521,00	90 %	6.800.188.991,89	91 %	6.825.349.691,16	91 %	33.139.126.894,06	Kecamatan Kota
7	1		Kecamatan Pesantren												
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	30.409.508.696,00	100 %	29.335.273.997,00	100 %	29.396.878.072,39	100 %	29.505.646.521,26	100 %	147.537.307.286,66	Kecamatan Pesantren
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %		

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah			
						2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	92 %	124.516.650,00	93 %	132.035.700,00	94 %	132.312.974,97	95 %	132.802.532,98	95 %	640.667.857,95	Kecamatan Pesantren		
				Persentase layanan publik yang sesuai SOP	84 %		85 %		86 %		87 %		87 %				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	96 %	41.594.258.198,00	97 %	37.422.380.899,00	98 %	37.500.967.898,89	99 %	37.639.721.480,11	99 %	193.672.328.476,00	Kecamatan Pesantren		
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	88 %	32.999.940,00	89 %	1.024.975.054,00	90 %	1.027.127.501,61	91 %	1.030.927.873,37	91 %	3.148.030.368,98	Kecamatan Pesantren		
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90 %	644.521.030,00	92 %	427.943.600,00	93 %	428.842.281,56	94 %	430.428.998,00	94 %	2.544.735.909,56	Kecamatan Pesantren		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	88 %	5.899.623.050,00	89 %	6.331.444.099,00	90 %	6.344.740.131,61	91 %	6.368.215.670,09	91 %	30.549.022.950,70	Kecamatan Pesantren		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik														
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	3.609.487.850,00	100 %	2.903.537.280,00	100 %	2.909.634.708,29	100 %	2.920.400.356,71	100 %	15.773.060.195,00	Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %				
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %				
				Persentase layanan pelaydiaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %				
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %		92 %		93 %		94 %		94 %				
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan	91 %	202.054.940,00	92 %	150.054.900,00	93 %	150.370.015,29	94 %	150.926.384,35	94 %	845.406.239,64	Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan	91 %	915.312.790,00	92 %	2.541.644.850,00	93 %	2.546.982.304,19	94 %	2.556.406.138,71	94 %	9.430.346.082,90	Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan	91 %	650.000.000,00	92 %	900.000.000,00	93 %	901.890.000,00	94 %	905.226.993,00	94 %	3.975.116.993,00	Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat kewaspadaan dini masyarakat	96 %	625.198.520,00	97 %	549.919.600,00	98 %	551.284.431,16	99 %	553.694.183,56	99 %	2.874.096.734,72	Kesatuan Bangsa dan Politik		
Total							1.428.487.199.778,00		1.478.808.473.299,00		1.481.913.971.092,93		1.487.397.052.785,97		7.242.309.696.955,90		

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan pencapaian target masing-masing indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD, adapun Indikator Kinerja Utama Kota Kediri yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1 - Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Kediri

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun							
		2018	2020		2021		2022		2023		2024	
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	51,52	65,25	58,11	72,50	65,00	78,75	69,00	80,50	73,00	81,15	77,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (3,25)	B (3,50)	B (3,48)	A (3,55)	A (3,55)	A (3,65)	A (3,65)	A (3,75)	A (3,75)	A (3,80)	A (3,80)
3	Skor <i>Smart City</i>	N/A	3	2,87	-	3,20	-	3,25	-	3,45	-	3,55
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,58	78,86	78,23	79,50	78,73	80,14	78,95	80,78	79,30	81,42	79,65
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,42%	5,40 - 6,60	-6,25%	5,40 - 6,60	3,50 - 4,50	5,40 - 6,60	4,00 - 5,00	5,40 - 6,60	5,00 - 6,00	5,40 - 6,60	5,00 - 6,00
6	Indeks Gini	0,4	0,350 - 0,390	0,346	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390
7	Tingkat Kemiskinan	7,68	6,48	7,69	5,98	7,50	5,48	7,30	5,25	7,10	5,10	6,90
8	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	3,76 (Tinggi)	3,95 (Tinggi)	N/A	4,05 (Tinggi)	4,05 (Tinggi)	4,1 (Tinggi)	4,1 (Tinggi)	4,2 (Sangat Tinggi)	4,2 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)
9	Indeks Kota Layak Huni	63,975 (Cukup)	73,50 (Cukup)	72,60 (Cukup)	76,90 (Cukup)	74,60 (Cukup)	80,30 (Baik)	78,90 (Baik)	82,40 (Baik)	79,80 (Baik)	85,15 (Baik)	80,50 (Baik)

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Kediri secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8.2 - Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kediri**

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,42%	5,40 - 6,60	-6,25%	5,40 - 6,60	3,50 - 4,50	5,40 - 6,60	4,00 - 5,00	5,40 - 6,60	5,00 - 6,00	5,40 - 6,60	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
2.	Penduduk Miskin (%)	%	7,68	7,68	7,69	5,98	7,50	5,48	7,30	5,25	7,10	5,10	6,90	6,90	Dinas Sosial, Bappeda, Dinkop UMTK, Disperdagin
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	77,58	78,86	78,23	79,50	78,73	80,14	78,95	80,78	79,30	81,42	79,65	79,65	Dinas Arsip & Perpus, Dinas Pendidikan, Sekolah, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
4.	Indeks Gini	indeks	0,4	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	Barennlitbang, Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
5	Tingkat Inflasi	%	1,97%	2,5 ± 1%	2,93%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
B	ASPEK PELAYANAN UMUM														
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB														
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1.1	BIDANG PENDIDIKAN														
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,91	9,92	9,93	9,93	9,94	9,94	9,95	9,95	9,96	9,96	9,97	9,97	DINDIK
	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,96	14,97	15,26	14,98	15,27	14,99	15,28	15,00	15,29	15,01	15,30	15,30	DINDIK

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
	Angka melek huruf	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINDIK
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :														
	APK PAUD	%	96,00	96,60	92,84	97,20	97,20	97,80	97,80	98,60	98,60	99,40	99,40	99,40	DINDIK
	APK TK	%	103,38	103,68	102,28	103,98	103,98	104,28	104,28	104,58	104,58	104,88	104,88	104,88	DINDIK
	Pendidikan Dasar														
	APK SD/MI/Paket A	%	116,06	116,26	109,81	116,47	116,47	116,67	116,67	116,86	116,86	116,99	116,99	116,99	DINDIK
	APK SMP/MTs/Paket B	%	133,45	133,56	132,79	133,67	133,67	133,78	133,78	133,89	133,89	133,99	133,99	133,99	DINDIK
	APM SD/MI/Paket A	%	106,42	106,53	106,26	106,64	106,64	106,75	106,75	106,6	106,86	106,87	106,87	106,87	DINDIK
	APM SMP/MTs/Paket B	%	107,69	107,80	109,99	107,91	110,21	108,02	110,34	108,13	110,52	108,24	110,62	110,62	DINDIK
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,008	0,01	0,007	0,01	0,006	0,01	0,005	0,005	DINDIK
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,12	0,11	0,01	0,10	0,0095	0,09	0,0085	0,08	0,0076	0,08	0,0063	0,0063	DINDIK
	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	9,91	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINDIK
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINDIK
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89	90	89,49	91	91,50	92	92,00	93	92,50	94	93	93	DINDIK
	1.2	BIDANG KESEHATAN													
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran		Permil	2,80	2,70	1,38	2,60	1,36	2,50	1,34	2,40	1,32	2,30	1,30	1,30	DINKES
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		Per 100.000	46,7	46,2	46,01	45,7	45,7	45,20	45,20	44,70	44,70	44,20	44,20	44,20	DINKES
Persentase balita gizi buruk		%	0,067	0,067	0,11	0,066	0,10	0,065	0,09	0,064	0,08	0,063	0,07	0,07	DINKES
Rasio Posyandu Terhadap Jumlah Balita			1 : 63	1 : 62	1 : 61	1 : 62	1 : 61	1 : 61	1 : 61	1 : 61	1 : 61	1 : 60	1 : 60	1 : 60	DINKES
Rasio tenaga medis per satuan penduduk			1:879	1:875	1:645	1:870	1:640	1:865	1:635	1:860	1:630	1:860	1:625	1:625	DINKES
Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		%	100	100	98,22		100		100		100		100	100	DINKES
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar		%	100	100	93,35		100		100		100		100	100	DINKES
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		%	100	100	100		100		100		100		100	100	DINKES
Cakupan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar		%	100	100	17,67		100		100		100		100	100	DINKES

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber	
				2020		2021		2022		2023		2024				
						Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	
	Cakupan Pelayanan Diabetes Militus (DM) Sesuai Standar	%	100	100	66,43		100		100		100		100	100	DINKES	
	Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Sesuai Standar	%	100	100	92,71		100		100		100		100	100	DINKES	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100	100	93,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	78,26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	45,73	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Cakupan Puskesmas		1 : 32.549	1 : 32.549	1 : 32.474	1 : 32.549	1 : 31.500	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	DINKES	
	Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional	%	71,76	85	89,05	95	95	98	95,25	99	95,50	100	95,75	95,75	DINKES	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	90,73	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	-	100	26,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	-	100	34,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	100	91,98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
	Angka kematian di RSUD :															
	- NDR	% Permil	40,28	25	45,32	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	RSUD
	- GDR	% Permil	77,05	49	91,70	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	RSUD
1.3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantab	%	98,85	99	82,58	99,30	83	99,50	83,50	100	84	100	84,50	84,50	DPUPR	
	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	%	80	81	100	82	100	83	100	84	100	85	100	100	DPUPR	
	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	90,65	90,76	90,02	90,87	90,87	90,98	90,98	91,09	91,09	91,20	91,20	91,20	DPUPR	

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020		2021		2022		2023		2024			
						Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	99,80	99,81	89,50	99,82	90,00	99,84	91,00	99,86	91,50	99,90	92,00	92,00	DPUPR
	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	66,24	66,50	68,00	70	70	72,50	72	75	74	77,50	76	76	DPUPR
	Rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan	%	-	25	30	30	35	40	40	50	50	60	60	60	DPUPR
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	87,89	88	90,65	88,25	90,70	88,50	90,80	88,60	91,60	88,70	91,70	91,70	DPUPR
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	43,36	48	45	53	53	58	58	63	63	70	70	70	DPUPR
	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,25	80,24	81,50	80,74	81,74	81,24	82,24	81,74	82,74	82,24	82,94	82,94	DPUPR
	Proporsi panjang jaringan jalan dengan trotoar	%	14,68	21,25	17,77	21,30	18,00	21,50	18,20	22,00	18,40	22,50	18,60	18,60	DPUPR
1.4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN														
	Rasio rumah layak huni		93,42	93,77	94,35	93,96	94,44	94,14	94,54	94,32	94,74	94,49	94,92	94,92	DPKP
	Persentase pemukiman yang tertata	%	N/A	76,34	N/A	79,45	70%	82,56	72%	85,67	74%	88,87	76%	76%	DPKP
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,094	0,084	0,053	0,074	0,044	0,064	0,034	0,054	0,024	0,050	0,020	0,020	DPKP
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	-	20	80	40	81	60	81,50	80	82	90	82,50	82,50	DPKP
	Rasio lampu penerangan jalan umum dalam kondisi baik di Kota Kediri	%	70	80	75	85	85	89	87	92	89	94	91	91	DPKP
	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	%	-	77	89,77	82	90	87	91	92	92	97	93	93	DPKP
	Persentase Rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DPKP
1.5	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keamanan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020		2021		2022		2023		2024			
						Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	72,40	75	96,30	77	96,40	80	96,50	82	96,60	85	96,70	96,70	Satpol PP
	Potensi konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
	<i>Response time</i> penanganan bencana	Menit	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	BPBD
	Indeks ketahanan daerah terhadap bencana	indeks	-	0,5	0,62	0,60	0,64	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	BPBD
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
2.1	BIDANG SOSIAL														
	Persentase PMKS yang tertangani	%	77,00	80,00	90,30	81,00	100	82,98	100	84,00	100	85,00	100	100	DINSOS
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100	100	97,49	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
2.2	BIDANG TENAGA KERJA														
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkop UMTK
2.3	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	DP3AP2KB
	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu	%	-	82,50	100	85	100	87,50	100	90	100	92,50	100	100	DP3AP2KB
	Rasio KDRT yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
2.4	BIDANG PANGAN														
	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	91	92	92,04	92	93	93	94	93	95	94	96	96	DKPP
	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	61,00	62,70	62,715	63	100	63,20	100	63,75	100	64	100	100	DKPP
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	%	88,36	88,10	89,57	88,25	90,00	88,50	91,00	88,75	92,00	89	93,00	93,00	DKPP

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
	(PPH)														
2.5	BIDANG PERTANAHAN														
	Persentase Tertib Adminstrasi Pengelolaan Pertanahan	%	-	-	-	-	-	60	60	65	65	70	70	70	DPKP
2.5	BIDANG PERTANAHAN														
2.6	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	16,91	16,92	16,95	16,93	16,96	16,94	16,97	16,95	16,98	16,96	16,99	16,99	DLHKP
	Hasil pengukuran indeks kualitas air	%	48,57	63,30	60,23	66,80	66,80	68,95	68,95	69,20	69,20	69,30	69,30	69,30	DLHKP
	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	%	90,28	91,50	90,76	93,90	93,90	94,70	94,70	94,80	94,80	95,20	95,20	95,20	DLHKP
	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	%	41,68	41,90	45,64	42,18	45,74	42,30	45,85	42,40	45,90	43,50	45,95	45,95	DLHKP
	Timbulan sampah yang terkelola	%	98,79	98,80	98,96	98,81	98,97	98,82	98,98	98,83	98,99	98,84	99,00	99,00	DLHKP
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	58,29	63,20	63,25	65,08	65,08	66,02	66,02	66,16	66,16	66,35	66,35	66,35	DLHKP
2.7	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	98,47	98,50	98,35	98,75	98,75	99	99	99,50	99,50	99,95	99,95	99,95	Disdukcapil
	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99,15	99,20	99,11	99,25	99,25	99,30	99,30	99,35	99,35	99,40	99,40	99,40	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan KK	%	96,01	96,52	97,19	97,03	97,35	97,54	97,54	98,05	98,05	98,56	98,56	98,56	Disdukcapil
	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 kelahiran	%	54,48	75	98,52	80	98,53	90	98,54	93	98,55	95	98,56	98,56	Disdukcapil
	Cakupan kepemilikan KIA	%	75,18	85	77,47	90	90	95	95	99	99	99,50	99,50	99,50	Disdukcapil
2.8	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	Persentase program pemberdayaan masyarakat dengan kategori berhasil	%	80	80	16,67%	85	90	85	92	90	93	90	95	95	Bag. Pemerintahan
2.9	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,01	0,91	0,17	0,0089	0,16	0,0088	0,15	0,0087	0,14	0,0086	0,13	0,13	DP3AP2KB
	Rasio Akseptor KB	%	69,85	70,01	71,66	70,20	71,70	70,40	71,80	70,60	71,85	70,80	71,95	71,95	DP3AP2KB
	Persentase jumlah wanita kawin usia	%	0,29	0,28	0,37	0,27	0,36	0,26	0,35	0,25	0,34	0,24	0,33	0,33	DP3AP2KB

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
	dibawah 20 tahun														
2,10	BIDANG PERHUBUNGAN														
	Rasio ijin trayek	%	66,67	68	66,67	69	69	70	70	71	71	72	72	72	DISHUB
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	92,35	93	91,87	94	94	95	95	96	96	97	97	97	DISHUB
	Persentase layanan angkutan perkotaan	%	15,59	20	17,85	25	25	30	30	40	40	50	50	50	DISHUB
	Indeks fasilitas perlengkapan LLAJ	indeks	91,30	92	91,55	93	93	94	94	95	95	96	96	96	DISHUB
2.11	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI														
	Persentase aplikasi E-Gov yang terintegrasi	%	2,52	20	30,21	30	30	40	35	50	50	70	70	70	Diskominfo
	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
	Persentase kebijakan daerah yang dipublikasikan	%	-	75	100	77	100	80	100	83	100	85	100	100	Diskominfo
2.12	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO														
	Persentase koperasi sehat	%	74,48	80,47	77,11	81,12	66,55	81,93	68,19	82,71	70,24	83,45	72,65	72,65	Dinkop UMTK
	Pertumbuhan jumlah usaha mikro	%	6,58	8,66	7,05	9,29	9,29	10,12	10,12	11,04	11,04	12,10	12,10	12,10	Dinkop UMTK
	Pertumbuhan jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat	%	4,94	5,34	1,97	5,69	2,80	6,02	3,01	6,40	3,32	6,68	3,34	3,34	Dinkop UMTK
2.13	BIDANG PENANAMAN MODAL														
	Peningkatan nilai investasi daerah	Rp (Milya r)	717,48 M	718 M	1.313 M	735 M	720 M	772 M	722 M	810 M	724 M	850 M	726 M	726 M	DPMPTSP
2.14	BIDANG KEPEMUDA DAN OLAHRAGA														
	Prestasi kepemudaan	Prestasi	11	12	0	13	5	14	8	15	11	16	14	14	Disbudparpora
	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	40	40	0	42	5	44	10	46	15	48	20	20	Disbudparpora
2.15	BIDANG STATISTIK														
	Persentase Data Sektoral yang Akurat	%	-	-	-	-	75	-	77	-	79	-	82	82	Diskominfo

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
2.16	BIDANG PERSANDIAN														
	Persentase Informasi Persandian yang Diamankan	%	-	-	-	-	60	-	65	-	70	-	75	75	Diskominfo
2.17	BIDANG KEBUDAYAAN														
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dibudparpora
2.18	BIDANG PERPUSTAKAAN														
	Indeks Minat Baca	indeks	83,96	85,10	73,7	85,98	74,20	86,99	76,40	87,98	78,60	88,98	81,05	81,05	Disarpus
2.19	BIDANG KEARSIPAN														
	Persentasi Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	25	30	22,2	35	35	40	40	45	45	50	50	50	Disarpus
	Persentase arsip yang diselamatkan	%	33	42	38	50	50	60	60	70	70	80	80	80	Disarpus
3	URUSAN PILIHAN														
3.1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
	Produksi perikanan	Ton	180,35	182,15	146,65	183,95	183,95	185,76	185,76	187,56	187,56	189,56	189,56	189,56	DKPP
3.2	BIDANG PARIWISATA														
	Jumlah wisatawan	Orang	1.850.000	1.875.000	721.141	1.900.000	900.000	1.925.000	1.000.000	1.950.000	1.500.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	Disbuparpora
3.3	BIDANG PERTANIAN														
	Produktivitas tanaman pangan (Padi)	Ton/ Ha	7,03	7,27	7,29	7,29	7,30	7,30	7,31	7,31	7,32	7,32	7,33	7,33	DKPP
	(jagung)	Ton/ Ha	8,02	8,25	8,40	8,30	8,45	8,35	8,50	8,40	8,55	8,45	8,60	8,60	
	Produktivitas tanaman perkebunan (tebu)	Ton/ Ha	98,50	98,50	98,52	98,55	98,55	98,60	98,60	98,65	98,65	98,70	98,70	98,70	DKPP
	Produksi peternakan	Ton	4.679	4.829	3.597	4.979	3,598	5.129	3,600	5.279	3,605	5.429	3,610	3,610	DKPP
3.4	BIDANG KEHUTANAN														
3.5	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL														

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
3.6	BIDANG PERDAGANGAN														
	Neraca Perdagangan	%	71.585,63	88.573,38	84.554,85		84.600,00		86.000,00		89.000,00		92.000,00	92.000,00	Disperdagin
	Indeks tertib ukur	Indeks	N/A	N/A	37		58		62		67		71	71	Disperdagin
3.7	BIDANG PERINDUSTRIAN														
	Pertumbuhan Industri	%	2,54	5,83	12,12	6,25%	12.2%	6,63%	12.3%	6,87%	12.4%	7,23%	12.6%	12.6%	Disperdagin
4	URUSAN PENUNJANG														
4.1	BIDANG SEKRETARIAT DAERAH														
	Persentase produk hukum yang ditetapkan	%	100	100	92,76	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bag. Hukum
	Persentase penanganan kasus hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bag. Hukum
	Persentase lembaga keagamaan/sosial yang mendapat bantuan	%	83	83	87	84	88	85	89	86	90	87	91	91	Bag. Kesra
	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	93	93	113	93	100	94	100	94	100	95	100	100	Bag. Kesra
	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	%	84	93	89	93	93	94	94	94	94	95	95	95	Bag. Kesra
	Hasil evaluasi SAKIP	Kategori (nilai)	BB	BB	BB (71,70)	BB	BB (75,50)	A	A (80,05)	A	A (80,55)	A	A (81,05)	A (81,05)	Bag. Organisasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	B (3,25)	B (3,50)	B (3,48)	B	A (3,55)	A	A (3,65)	A	A (3,75)	A	A (3,80)	A (3,80)	Bag. Organisasi, Bag. Umum, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase kesesuaian RKA dengan HSPBJ	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bag. Pembangunan
	Skor EKPPD	Skor	3,28	3,42	3,42		3,46		3,50		3,54		3,58	3,58	Bag. Pemerintahan
	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	%	80	80	100	83	100	83	100	85	100	85	100	100	Bag. Pemerintahan

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	%	-	87	80,96	88	88	89	89	91	91	92	92	92	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level			2	-	2	-	2	-	3	-	3	3	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah BUMD yang melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik	Unit	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	2	2	Bag. Perekonomian
	Persentase peningkatan laba BUMD	%	-	5	-27,51	7,5	5,25	10	6	12,5	7	15	8	8	Bag. Perekonomian
4.2	BIDANG SEKRETARIAT DEWAN														
	Persentase Perda yang ditetapkan	%	73,33	75	81,82	77	82	79	83	81	84	83	85	85	Sekretariat DPRD
4.3	BIDANG PENGAWASAN														
	Persentase tindak lanjut temuan	%	80	84	77,78	85	85	87	87	89	89	90	90	90	Inspektorat
4.4	BIDANG PERENCANAAN														
	Persentase Renstra Perangkat Daerah yang Berkualitas Baik	%	-	85,71	100	92,86	100	96,43	100	100	100	100	100	100	Bappeda
	RKPD yang Berkualitas	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
	Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	-	90,00	100	92,50	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori berhasil	%	-	93,55	81,48	96,77	83%	96,77	85	100	88	100	90	90	Bappeda
4.5	BIDANG KEUANGAN														
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
	Peningkatan Penerimaan PAD	%	-15	3	-1,45	6	1,00	9	1,25	12	1,50	15	1,75	1,75	BPPKAD
4.6	BIDANG KEPEGAWAIAN														
	Indeks Profesionalitas ASN	%	53,52	68	63,82	73	65	76	66	78	67	81	68	68	BKPSDM
4.7	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	71,42	78,57	87,50	85,71	81	85,71	82	92,86	83	100	84	84	Bappeda
4.8	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM														
	IKM Kecamatan Kota	kategori (nilai)	-	B (3,50)	A (3,64)	A (3,55)	A (3,65)	A (3,65)	A (3,65)	A (3,75)	A (3,75)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	Kec. Kota

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2020	2021		2022		2023		2024				
					Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan			
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)
	IKM Kecamatan Mojoroto	kategori (nilai)	-	B (3,50)	A (3,57)	A (3,55)	A (3,60)	A (3,65)	A (3,65)	A (3,75)	A (3,75)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	Kec. Mojoroto
	IKM Kecamatan Pesantren	kategori (nilai)	-	B (3,50)	B (3,52)	A (3,55)	A (3,55)	A (3,65)	A (3,65)	A (3,75)	A (3,75)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	Kec. Pesantren
C	ASPEK DAYA SAING														
1.	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI														
	Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan	Rupiah	642.035	718.922	688.323,00	744.551	690.000,00	770.180	692.000,00	795.809	695.000,00	821.438	698.000,00	698.000,00	BPS
	Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan	Rupiah	515.417	605.909	561.467,00	636.073	562.000,00	666.237	564.000,00	696.401	566.000,00	726.565	568.000,00	568.000,00	BPS
2.	FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR														
	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik terhadap Jumlah Kendaraan	Km/kendaraan	-	1,321	N/A	1,322	1,322	1,323	1,323	1,324	1,324	1,325	1,325	1,325	DPUPR
	Tingkat Pelayanan Jalan	Indeks	-	(0,90) C	N/A	(0,85) C	(0,85) C	(0,81) C	(0,81) C	(0,75) B	(0,75) B	(0,73) B	(0,73) B	(0,73) B	DPUPR, DPKP Dishub
	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,64	80,24	81,50	80,74	81,74	81,24	82,24	81,74	82,74	82,24	82,94	82,94	Bappeda, DPUPR
	Indeks Infrastruktur	indeks	-	70	N/A	75	75	80	80	84	84	88	88	88	DPUPR, DPKP
3.	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA														
	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	0,089	0,091	0,095	0,093	0,096	0,095	0,097	0,097	0,098	0,099	0,099	0,099	Dindik, BKPSDM, Dispendukcapil
	Rasio Ketergantungan	%	0,451	0,452	0,433	0,453	0,453	0,454	0,454	0,455	0,455	0,456	0,456	0,456	Dindik, BKPSDM, Dispendukcapil

BAB 9

P E N U T U P

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Walikota Kediri serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Kediri periode 2020-2024. Substansi yang terkandung di dalamnya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Kediri serta memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

- a. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang secara operasional dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri mulai tahun 2021 hingga tahun 2024;
- b. Setelah berakhirnya Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, perlu disusun RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 dengan mengacu ketentuan yang berlaku sementara RPJMD belum ditetapkan.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Kediri serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Kediri berkewajiban menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 kepada masyarakat;
- b. Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 menjadi pedoman Penyusunan RKPD Kota Kediri Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Kediri, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Kediri, dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Kediri agar segera menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Kediri 2020-2024 pasca ditetapkannya Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 ini dengan Peraturan Daerah;

- f. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Disamping itu, perlu adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah serta adanya komitmen untuk bersama-sama mewujudkan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga cita-cita dan harapan untuk **“Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”** dapat segera terwujud.